



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

- perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan atau terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD.
 11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
 12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
 13. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
 14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
 15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dampak).
 16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.
 17. Pagu Indikatif adalah perkiraan awal jumlah anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja.
 18. Program adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran (output) yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah periode tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 3

- (1) Periodisasi pembangunan jangka menengah Daerah dibagi dalam tahapan pembangunan tahunan dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai tahapan pelaksanaan RPJMD yang tidak hanya menjabarkan visi, misi dan program Bupati tetapi juga merupakan bagian dari dukungan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai turunan dari RPJMD yang bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan dokumen berbagai rencana yang lebih rinci dan spesifik.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten.
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan, dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, serta permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini menjelaskan dan menguraikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan Sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah pada periode tahun 2025-2029. Bab ini menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan prioritas pembangunan Daerah beserta indikator kinerja yang ditetapkan.
- d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati (Indikator Kinerja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

e. BAB V : PENUTUP

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Uraian substansi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial

- budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan atau pemutakhiran atas klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
 - (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
 - (6) Tata cara perubahan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila:
 - a. terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan atau pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan selama target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

Pasal 9

- (1) Target Kinerja dan Pagu Indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi;
 - b. kondisi strategis daerah; atau
 - c. fiskal daerah.
- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada
tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,
PROVINSI JAWA BARAT (1/128/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIP.19751231 200501 1 031



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Menindaklanjuti ayat (1) huruf c Pasal 65, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota untuk segera membahas RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wali Kota dilantik.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara berjenjang telah dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. RPJPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030. Berdasarkan hasil Pilkada, KPU telah menetapkan Pasangan Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Dena Muhamad Ramdhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2030 berdasarkan Surat Keputusan KPU Majalengka Nomor 15 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 9 Januari 2025, yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025

oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kabupaten Majalengka melaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dan sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, adalah pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 mempedomani:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 terutama terkait pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten.
- b. Substansi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja/indikator pembangunan.
- c. Substansi RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan serta kinerja/indikator pembangunan.
- d. Substansi RTRW Kabupaten Majalengka yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah dan indikasi kinerja RTRW.
- e. Substansi KLHS RPJMD yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis.
- f. Substansi Dokumen Perencanaan Sektor Lainnya, terutama terkait pelaksanaan urusan pemerintahan.
- g. Substansi Hasil Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode Tahun 2020-2024 (pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2025-2029



R P J M D

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025-2029





Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dan RPJM Nasional tahun 2025-2029	I-10
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dan RPJPD	I-10
1.3.3 Keterkaitan RPJMD Majalengka dengan Dokumen KLHS RPJMD	I-11
1.3.4 Keterkaitan RPJMD Majalengka dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat	1-12
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	I-12
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Sektoral Lainnya	I-12
1.3.7 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	I-13
1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Majalengka	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Posisi Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Pemanfaatan Ruang	II-10
2.1.1.3 Perkembangan Penggunaan Lahan ..	II-12
2.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup	II-13
2.1.1.5 Resiko Bencana	II-15
2.1.1.6 Kondisi Klimatologis	II-21



	Halaman
2.1.1.7	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-22
2.1.1.8	Peran Strategis Daerah II-33
2.1.1.9	Potensi Pengembangan Wilayah..... II-34
2.1.1.10	Potensi Sumber Daya Alam II-37
2.1.2	Aspek Demografi II-47
2.1.2.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk II-47
2.1.2.2	Karakteristik Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-49
2.1.2.3	Struktur Penduduk dan Piramida Penduduk II-50
2.1.2.4	Proyeksi Jumlah Penduduk II-51
2.1.2.5	Keberadaan Masyarakat Adat II-53
2.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-55
2.1.3.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-55
2.1.3.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat II-76
2.1.3.3	Fokus Seni Budaya II-86
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah II-88
2.1.4.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-93
2.1.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi II-97
2.1.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia II-100
2.1.5	Aspek Pelayanan Umum II-103
2.1.5.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar. II-103
2.1.5.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar II-126
2.1.5.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan II-149
2.1.5.4	Fokus Layanan Penunjang Urusan .. II-163
2.2	Gambaran Keuangan Daerah II-175
2.2.1	Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir II-175
2.2.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD..... II-176
2.2.1.2	Neraca Daerah..... II-185



	Halaman
2.2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	II-185
2.2.1.4 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan.....	II-190
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-205
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-205
2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah	II-228
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.1.1 Dasar Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.....	III-1
3.1.2 Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029....	III-2
3.1.3 Misi.....	III-3
3.1.4 Tujuan dan Sasaran.....	III-9
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-15
3.2.1 Strategi.....	III-15
3.2.2 Arah Kebijakan.....	III-27
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-29
3.2.3.1 Program Prioritas Sesuai Agenda Pembangunan Daerah.....	III-29
3.2.3.2 Program Prioritas Tematik serta Kewilayahan.....	III-41
3.2.3.3 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	III-45
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-110
BAB V PENUTUP.....	V-1



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka..... II-5
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... II-9
Tabel 2.3	Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-10
Tabel 2.4	Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-12
Tabel 2.5	Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka II-14
Tabel 2.6	Struktur Batuan Di Kabupaten Majalengka..... II-15
Tabel 2.7	Data Lokasi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... II-18
Tabel 2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-20
Tabel 2.9	Hubungan Antara Potensi Daerah, Permasalahan Aktual, Isu Strategis KLHS, Isu Lingkungan Dinamis, dan Isu Strategis Daerah di Kabupaten Majalengka..... II-25
Tabel 2.10	Luasan DDLH Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka..... II-27
Tabel 2.11	Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-28
Tabel 2.12	Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-29
Tabel 2.13	Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka..... II-30
Tabel 2.14	Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka..... II-31
Tabel 2.15	Potensi Recharge Area Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka..... II-31
Tabel 2.16	Indeks Zona Konservasi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka..... II-32
Tabel 2.17	Luasan DDLH Air Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka..... II-32
Tabel 2.18	Daftar Sungai Utama di Kabupaten Majalengka..... II-38



	Halaman
Tabel 2.19	Daftar Mata Air di Kabupaten Majalengka..... II-39
Tabel 2.20	Daftar Situ/Rawa di Kabupaten Majalengka..... II-39
Tabel 2.21	Daftar Situ/Rawa di Kabupaten Majalengka Luas Lebih Dari 1 ha..... II-40
Tabel 2.22	Daftar Embung di Kabupaten Majalengka..... II-40
Tabel 2.23	Daftar Embung di Kabupaten Majalengka Luas Lebih Dari 1 ha..... II-41
Tabel 2.24	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan Di Kabupaten Majalengka..... II-42
Tabel 2.25	Daftar Wisata Alam di Kabupaten Majalengka..... II-43
Tabel 2.26	Daftar Potensi Bahan Galian Tambang di Kabupaten Majalengka..... II-46
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-47
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... II-48
Tabel 2.29	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2020-2024..... II-49
Tabel 2.30	Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... II-50
Tabel 2.31	Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka Menurut Kelompok Umur, 2025-2030 (Ribu Jiwa)..... II-52
Tabel 2.32	Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024..... II-57
Tabel 2.33	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Harga Berlaku (Hb) Kabupaten Majalengka (Persen) Tahun 2020-2024..... II-60
Tabel 2.34	Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-63
Tabel 2.35	Data Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2025 II-64
Tabel 2.36	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-65



	Halaman	
Tabel 2.37	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-67
Tabel 2.38	Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka dan Dimensi.. Penyusunnya Selama Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2.39	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-70
Tabel 2.40	Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.41	Data Kemiskinan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.42	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel 2.43	Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-75
Tabel 2.44	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-78
Tabel 2.45	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel 2.46	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Digital Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.....	II-81
Tabel 2.47	Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.48	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.49	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.50	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-86



	Halaman
Tabel 2.51	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024..... II-91
Tabel 2.52	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Ranking Tahun 2024..... II-92
Tabel 2.53	Perbandingan Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning Jawa Barat Tahun 2020-2024..... II-93
Tabel 2.54	Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Bank di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-95
Tabel 2.56	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-97
Tabel 2.57	Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2020-2024... II-97
Tabel 2.58	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-98
Tabel 2.59	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 II-98
Tabel 2.60	Tabel Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Majalengka II-100
Tabel 2.61	Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-104
Tabel 2.62	Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-104
Tabel 2.63	Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-105
Tabel 2.64	Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-106
Tabel 2.65	Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-108
Tabel 2.66	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-108
Tabel 2.67	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024..... II-109



	Halaman
Tabel 2.68 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Pendidikan Tahun 2024....	II-109
Tabel 2.69 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.70 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-111
Tabel 2.71 Perkembangan Rasio Posyandu di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.72 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	II-113
Tabel 2.73 Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-114
Tabel 2.74 Rasio Dokter terhadap 1.000 Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-114
Tabel 2.75 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-115
Tabel 2.76 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-116
Tabel 2.77 Data Prevalensi Stunting Kabupaten Majalengka 2020-2024	II-117
Tabel 2.78 Cakupan Penemuan Penyakit TBC dan AIDs Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.79 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Kesehatan Tahun 2024	II-118
Tabel 2.80 Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel 2.81 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-120
Tabel 2.82 Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka.....	II-120
Tabel 2.83 Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-121
Tabel 2.84 Kondisi Perumahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-121



	Halaman	
Tabel 2.85	Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel 2.86	Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II-122
Tabel 2.87	Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-123
Tabel 2.88	Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024.....	II-124
Tabel 2.89	Data Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel 2.90	Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Majalengka Urusan Sosial Tahun 2024	II-125
Tabel 2.91	Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel 2.92	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024.....	II-128
Tabel 2.93	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-130
Tabel 2.94	Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2.95	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-134
Tabel 2.96	Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024....	II-135
Tabel 2.97	Perkembangan Posyandu dan Kelompok PKK Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-136
Tabel 2.98	Perkembangan Desa Mandiri Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel 2.99	Indikator Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-137



	Halaman	
Tabel 2.100	Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.101	Jumlah Kendaraan Yang diuji di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel 2.102	Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel 2.103	Indikator Capaian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel 2.104	Jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-140
Tabel 2.105	Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-141
Tabel 2.106	Jumlah UMKM di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-142
Tabel 2.107	Rasio Wirausaha Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.108	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-143
Tabel 2.109	Data Kategori Perusahaan di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-144
Tabel 2.110	Jumlah Prasarana Olahraga di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2.111	Perkembangan Indikator Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel 2.112	Ketersediaan Dokumen Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.113	Kegiatan Bidang Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel 2.114	Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-148
Tabel 2.115	Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel 2.116	Indikator Capaian Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel 2.117	Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-152



	Halaman
Tabel 2.118 Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2024.....	II-152
Tabel 2.119 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel 2.120 Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2.121 Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel 2.122 Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel 2.123 Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2.124 Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2.125 Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel 2.126 Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.127 Jumlah dan Jenis Pasar di Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-156
Tabel 2.128 Jenis Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.129 Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-159
Tabel 2.130 Indikator Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-160
Tabel 2.131 Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.132 Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel 2.133 Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-162
Tabel 2.134 Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel 2.135 Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-164



Tabel 2.136	Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-165
Tabel 2.137	Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.139	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2.140	Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka RPJMD Tahun 2018-2023	II-170
Tabel 2.141	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Majalengka RPJMD Tahun 2018-2023	II-171
Tabel 2.142	Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka RPD Tahun 2024-2026	II-172
Tabel 2.143	Target dan Capaian IKU Kabupaten Majalengka RPD Tahun 2024-2026	II-169
Tabel 2.144	Rata-Rata Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026	II-173
Tabel 2.145	Rata-Rata Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026	II-174
Tabel 2.146	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-179
Tabel 2.147	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2.148	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.149	Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023..	II-196
Tabel 2.150	Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	II-200
Tabel 2.151	Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	II-201
Tabel 2.152	Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	II-203
Tabel 2.153	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030.....	II-204



	Halaman
Tabel 2.154 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	II-206
Tabel 3.1 Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.....	III-2
Tabel 3.2 Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Kabupaten Majalengka	III-3
Tabel 3.3 Misi Pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 3.4 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	III-13
Tabel 3.5 Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030	III-18
Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	III-27
Tabel 3.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	III-34
Tabel 3.8 Program Strategis Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang Berlokasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030.....	III-46
Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030	IV-2
Tabel 4.2 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	IV-111
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	IV-112
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	IV-113
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	IV-117



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029	I-4
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnnya	I-10
Gambar 1.3 Tahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045	I-11
Gambar 1.4 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan APBD	I-13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Majalengka	II-3
Gambar 2.2 Peta Letak Geografis Kabupaten Majalengka.....	II-4
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Kabupaten Majalengka.....	II-6
Gambar 2.4 Peta Ketinggian Kabupaten Majalengka.....	II-8
Gambar 2.5 Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042	II-9
Gambar 2.6 Peta Kondisi Geologi Kabupaten Majalengka.....	II-17
Gambar 2.7 Data Perkembangan Curah Hujan Bulanan Kabupaten Majalengka	II-21
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah	II-34
Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2024	II-51
Gambar 2.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030.....	II-52
Gambar 2.11 Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka	II-57
Gambar 2.12 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional	II-62
Gambar 2.13 Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.14 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka	II-66
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka	II-68
Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka	II-73
Gambar 2.17 Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Elstrem Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	II-75



Gambar 2.18	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin Ekstrem Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	II-76
Gambar 2.19	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka	II-77
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Majalengka	II-78
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Literasi Digital Masyarakat (IPLM) Kabupaten Majalengka, Provinsi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2023-2024.....	II-80
Gambar 2.22	Unsur Pembangun Capaian IPLM Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	II-81
Gambar 2.23	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Majalengka	II-83
Gambar 2.24	Kerangka IDSD Tahun 2024.....	II-89
Gambar 2.25	Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Majalengka	II-101
Gambar 2.26	Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan Kabupaten Majalengka	II-102
Gambar 2.27	Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka	II-105
Gambar 2.28	Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka	II-106
Gambar 2.29	Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Majalengka.....	II-107
Gambar 2.30	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka, Tahun 2020-2024	II-129
Gambar 2.31	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.....	II-144
Gambar 2.32	Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA Kabupaten Majalengka	II-145
Gambar 2.33	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 (Persen)	II-230
Gambar 2.34	Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 (Persen)	II-231
Gambar 2.35	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun), Tahun 2024	II-232



Halaman

Gambar 2.36	Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Juta Rupiah), Tahun 2024	II-233
Gambar 2.37	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen) Tahun 2020-2024	II-234
Gambar 2.28	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-235
Gambar 3.1	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.....	III-7
Gambar 3.2	6 Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae Tahun 2026-2030.....	III-17
Gambar 3.3	Tahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030.....	III-17
Gambar 3.4	Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara.....	III-43
Gambar 3.5	Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Tengah.....	III-44
Gambar 3.6	Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Selatan.....	III-45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi landasan pijak dan kompas penunjuk arah dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pada pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024. Pada tanggal 27 Nopember 2024 Kabupaten Majalengka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029. Berdasarkan hasil pilkada, KPU telah menetapkan Pasangan Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Dena Muhamad Ramdhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan KPU Majalengka Nomor 15 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 9 Januari 2025, yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.



Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang *berorientasi pada proses* dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, menggunakan pendekatan:

1. **Teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3. **Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD termasuk Pokok-pokok Pikiran DPRD yang mendukung terhadap prioritas pembangunan daerah;
4. **Atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas hasil dari aspirasi masyarakat, yang dibahas dalam Musrebang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan daerah yang *berorientasi pada substansi*, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, menggunakan pendekatan:

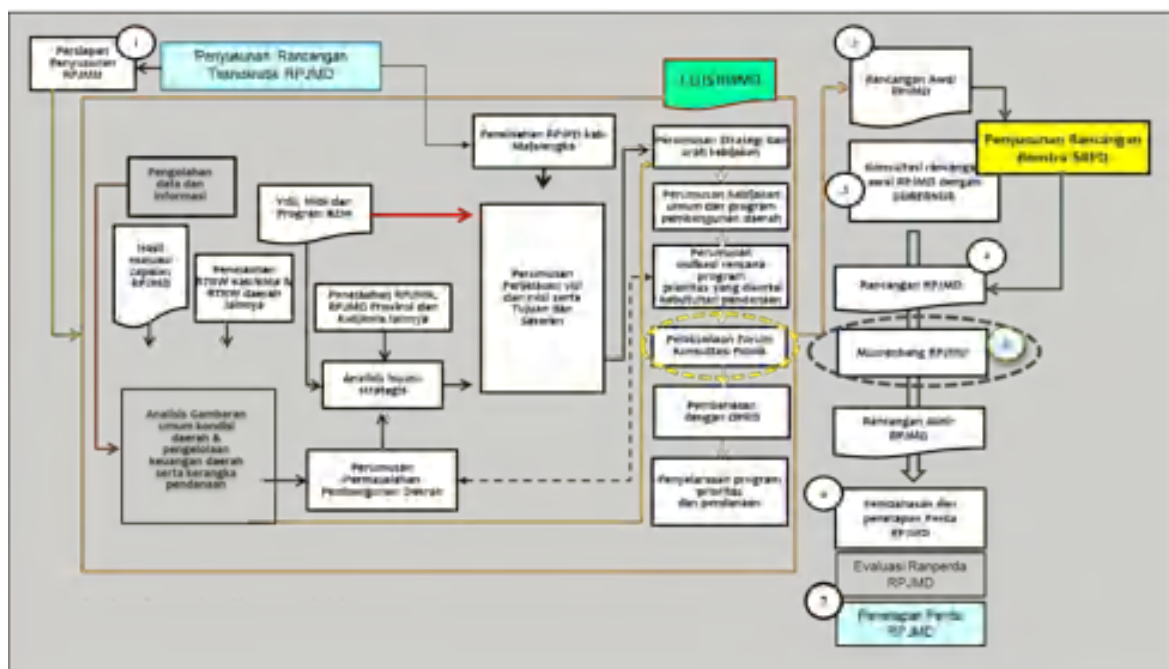
1. **Holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;



2. **Integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
3. **Spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Alur penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Mengingat pentingnya dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, maka diharapkan seluruh entitas Kabupaten Majalengka mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah serta menjamin kualitas lingkungan hidup.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 6547);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



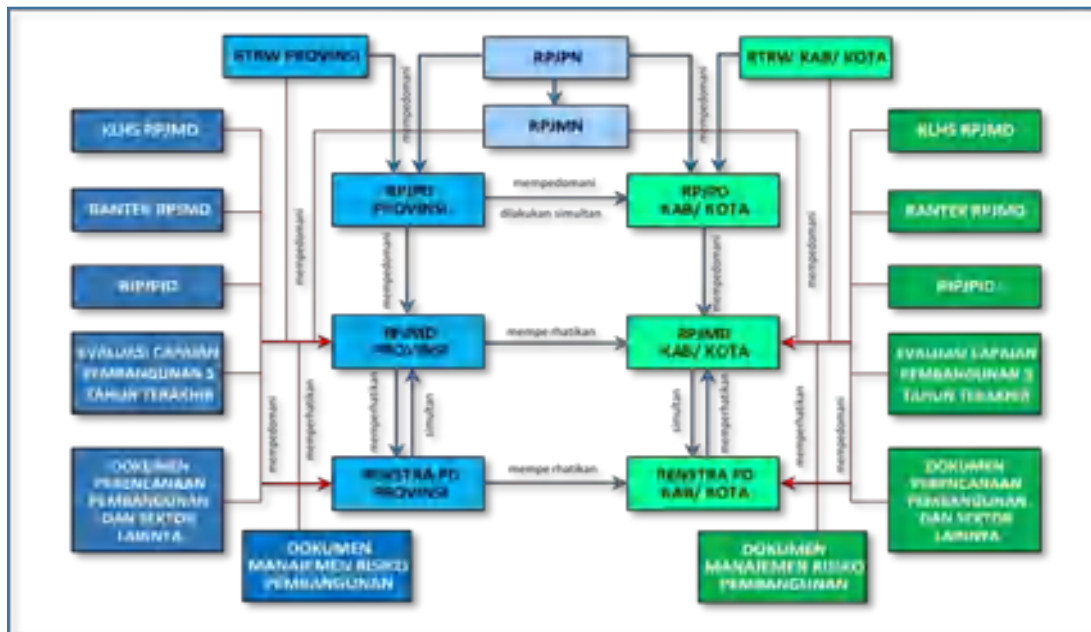
- (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Nomor);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3).
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan kebijakan pembangunan nasional.

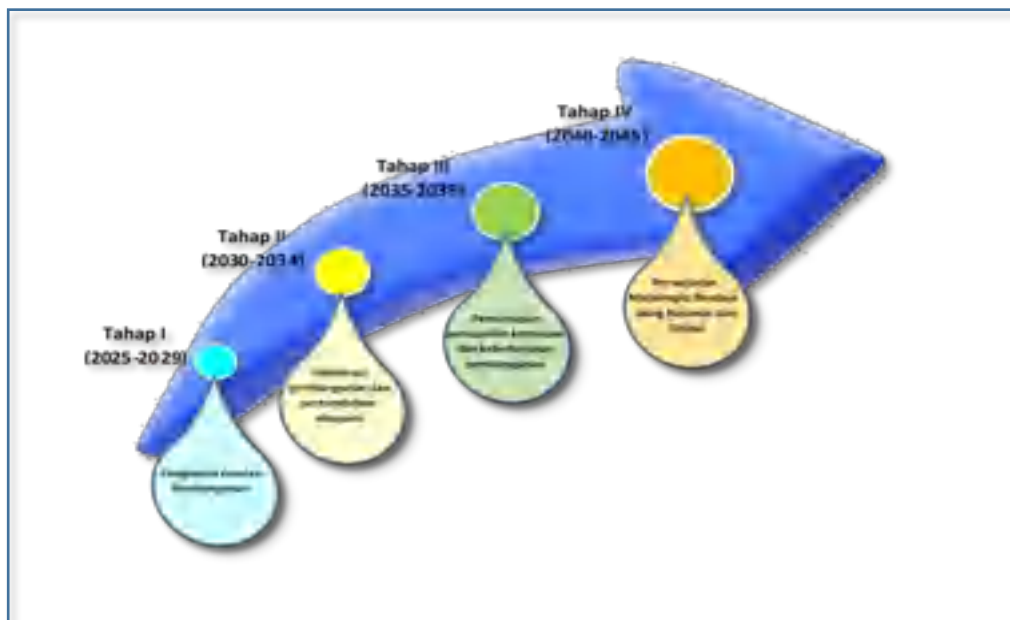
1.3.2. Keterkaitan RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Majalengka masa bakti tahun 2025-2029, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. Berikut ini adalah



Gambar Pentahapan agenda pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Majalengka selama periode 2025-2045.

Gambar 1.3
Tahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045



Sumber: Perda Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 ttg RPJPD Kab. Majalengka Tahun 2025-2045.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD Majalengka dengan Dokumen KLHS RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Majalengka 2025-2029 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diminta melaksanakan KLHS antara lain pada penyusunan RPJMD.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS



memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD Majalengka dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan visi, misi pembangunan serta program prioritas pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, sehingga Kabupaten Majalengka juga mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Jawa Barat.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Jawa Barat, Perda No. 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 dan rencana revisi RTRW Kabupaten Majalengka sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Majalengka. RPJMD Kabupaten Majalengka juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 juga mempedomani dokumen perencanaan sektoral lainnya yang disusun di Kabupaten Majalengka yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten seperti sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan dan lainnya.



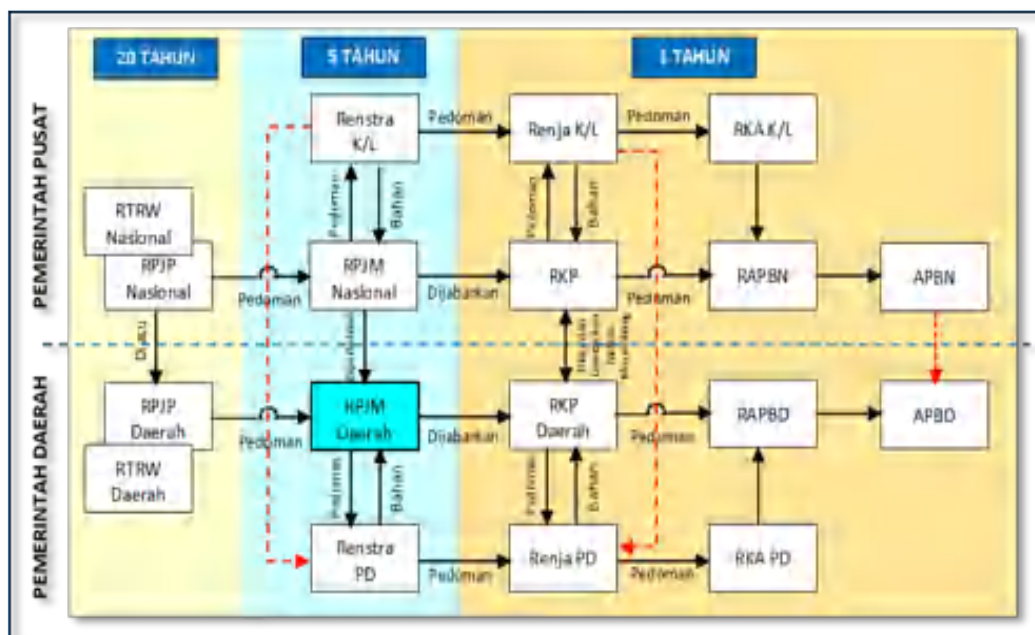
1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi lembaga yang menangani Perencanaan Pembangunan. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD).

1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung (desa) dan kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar 1.4
Keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan APBD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi dan misi kepada daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Majalengka secara berkesinambungan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Menelaah kinerja pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2024.
- b. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Majalengka.
- d. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun kedepan.
- e. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.
- f. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Majalengka.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum; gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan, dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah; permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi pemerintah sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah pada periode tahun 2025-2029. Bab ini juga menjelaskan dan menguraikan arah kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang berdasarkan kesesuaian antara strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta menyajikan penjelasan mengenai hubungan antara sasaran pokok daerah dengan prioritas pembangunan daerah beserta indikator kinerja yang ditetapkan.



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Bab ini juga menguraikan hasil analisis terhadap kinerja daerah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Indikator Kinerja Utama) dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan secara singkat harapan yang hendak dicapai dari dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan ditetapkan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Majalengka

Dinamika pembangunan Kabupaten Majalengka menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan.

Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Posisi Strategis Daerah

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 km²). Merujuk kepada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 yang masih dalam proses penyusunan, bahwa luas Kabupaten Majalengka menjadi 1.330,17 Km². Hal tersebut berdasarkan data Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang telah disetujui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai Surat Keterangan Persetujuan



Penggunaan Informasi Geospasial Dasar untuk Penyusunan RTRW Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor : 20.2/KA-BIG/IGT.02.04/8/2024. Secara geografis, Kabupaten Majalengka berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Majalengka

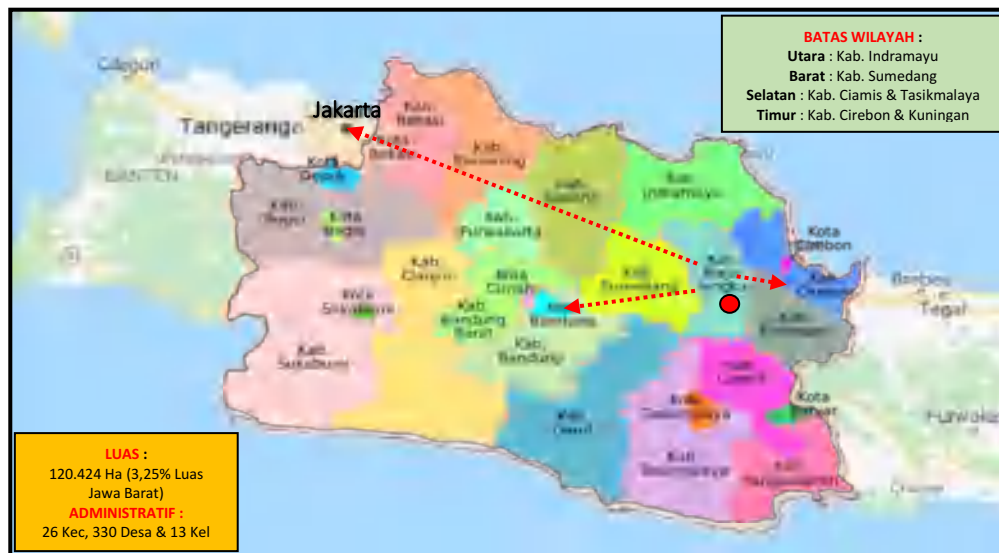


Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis: Bagian Barat antara $108^{\circ} 03'$ - $108^{\circ} 19'$ Bujur Timur, bagian Timur antara $108^{\circ} 12'$ - $108^{\circ} 25'$ Bujur Timur, Bagian Utara antara $6^{\circ} 36'$ - $6^{\circ} 58'$ Lintang Selatan dan Bagian Selatan antara $6^{\circ} 43'$ - $7^{\circ} 03'$ Lintang Selatan.

Dalam konteks zona waktu, Indonesia merupakan negara tropis dengan 3 wilayah waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur), seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat).

Gambar 2.2
Peta Letak Geografis Kabupaten Majalengka



Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, diolah.

Secara geostrategis, Kabupaten Majalengka memiliki posisi yang strategis karena merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan utama regional metropolitan Rebana di wilayah timur laut Provinsi Jawa Barat bersama tiga daerah lain, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Subang serta tiga daerah penyangga, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Bukan hanya itu, Kabupaten Majalengka juga menjadi wilayah kawasan industri baru seiring dengan tersedianya infrastruktur skala internasional, nasional dan regional, seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Jalan Tol Cikopo Palimanan, Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Cisumdawu.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Majalengka	4	10	14.	Sindangwangi	10	-
2.	Panyingkiran	9	-	15.	Sukahaji	13	-
3.	Kadipaten	7	-	16.	Sindang	7	-
4.	Dawuan	11	-	17.	Cigasong	7	3
5.	Kasokandel	10	-	18.	Maja	18	-
6.	Kertajati	14	-	19.	Argapura	14	-
7.	Jatitujuh	15	-	20.	Banjaran	13	-
8.	Jatiwangi	16	-	21.	Talaga	17	-
9.	Palasah	13	-	22.	Cikijing	15	-
10.	Ligung	19	-	23.	Cingambul	13	-
11.	Sumberjaya	15	-	24.	Bantarujeg	13	-
12.	Leuwimunding	14	-	25.	Lemahsugih	19	-
13.	Rajagaluh	13	-	26.	Malausma	11	-
Jumlah	Kecamatan					26	
	Desa					330	
	Kelurahan					13	

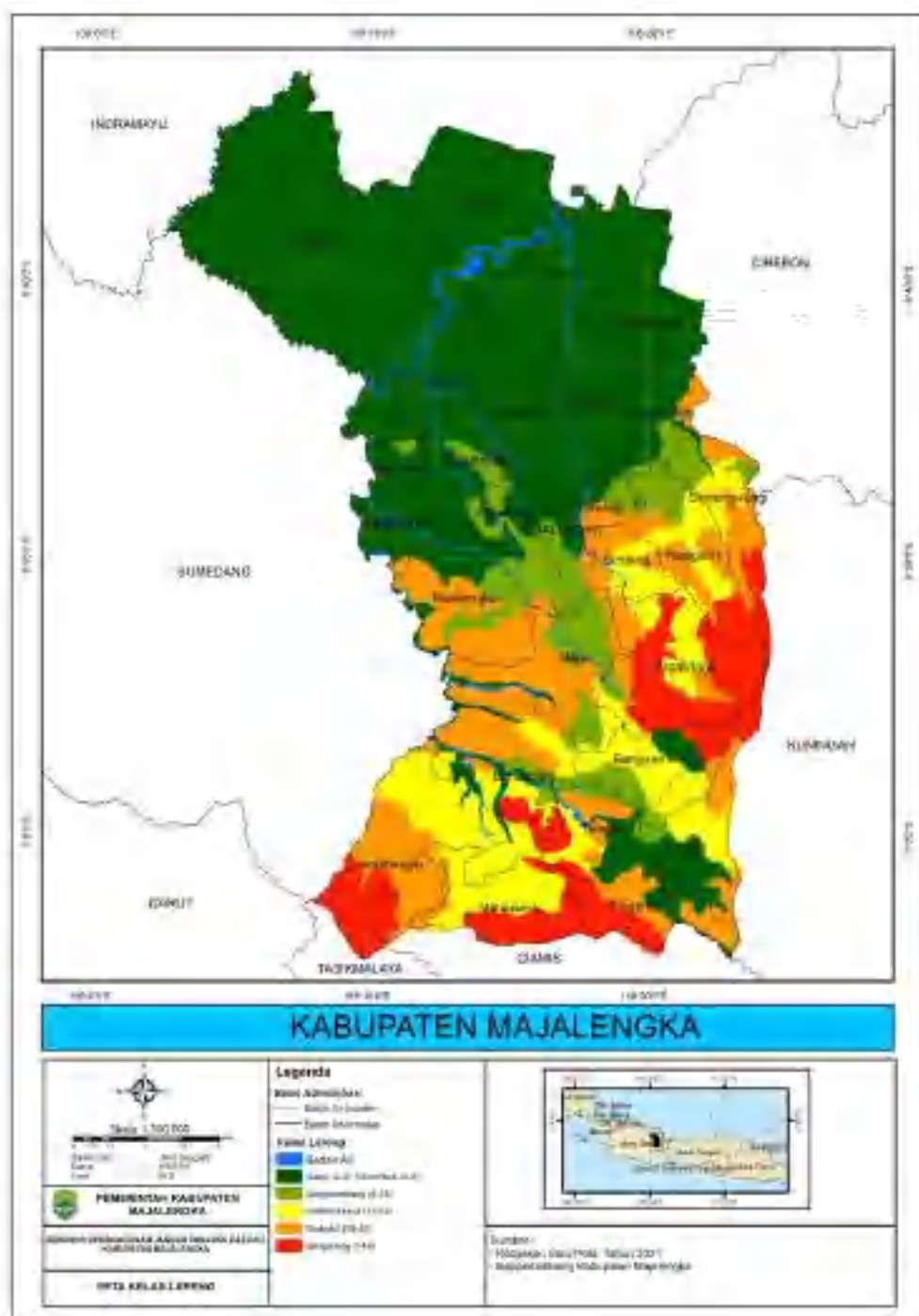
Sumber: Kabupaten Majalengka dalam Angka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi topografi Kabupaten Majalengka dapat diklasifikasikan menjadi 3 zona topografi yang berbeda yaitu:

1. Daerah Pegunungan seluas 482,02 km² atau 40,03%.
2. Daerah Bergelombang/Berbukit seluas 376,56 km² atau 31,27%.
3. Dataran Rendah seluas 345,61 km² atau 28,70%.

Kondisi bentang alam Kabupaten Majalengka yang melandai ke daerah Barat Laut, menyebabkan sebagian besar aliran sungai mengalir ke arah Utara sedangkan perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di lereng Gunung Ciremai dan daerah lereng Gunung Cakrabuana. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah. Selain itu, kondisi tersebut juga memiliki potensi daerah rawan bencana gerakan tanah terutama daerah yang mempunyai kelereng curam.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Kabupaten Majalengka



Sumber: Kebijakan Satu Peta Tahun 2021.

Adapun distribusi zona topografi yang ada di Kabupaten Majalengka sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

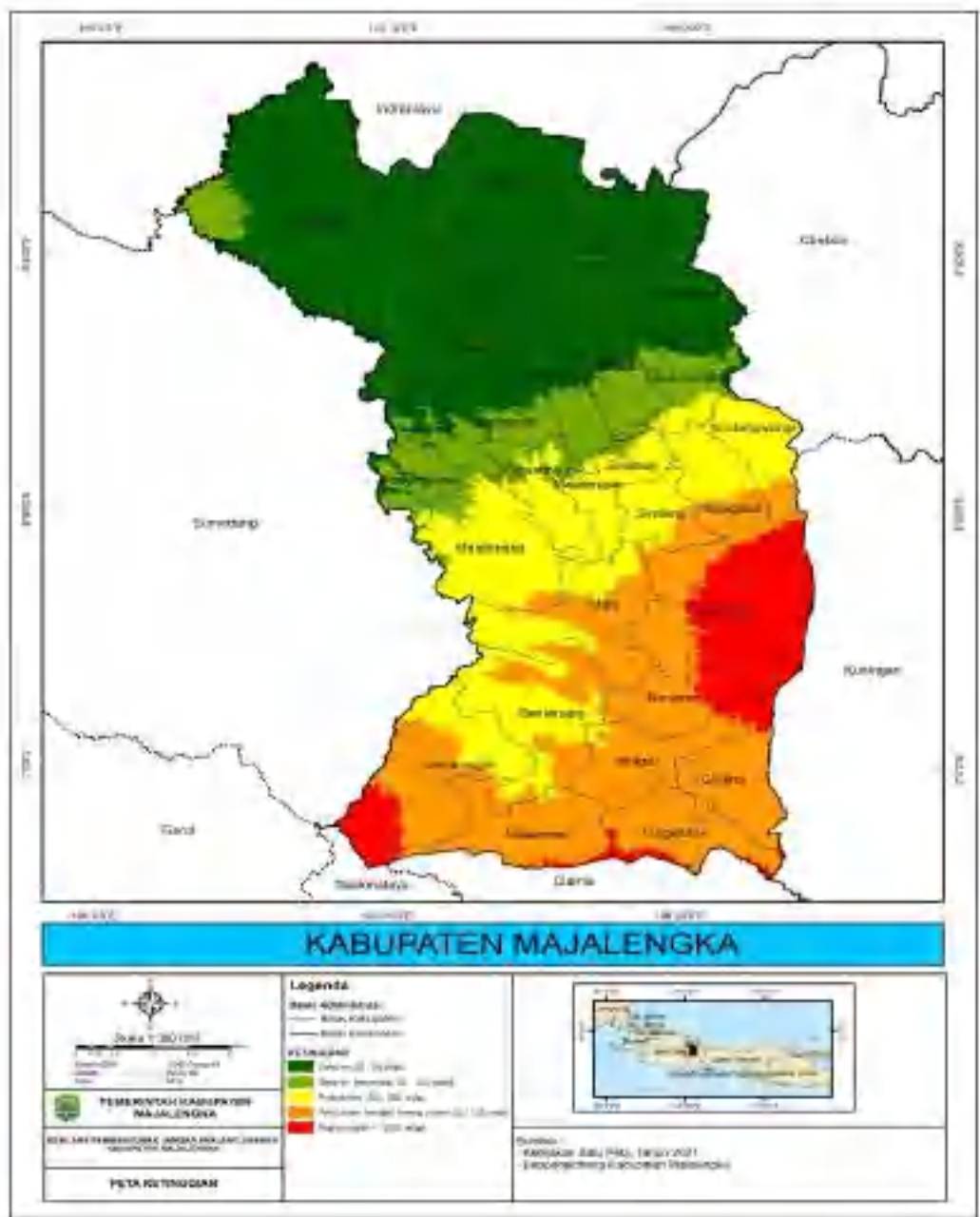
1. Daerah Pegunungan meliputi Kecamatan Argapura, Banjaran, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Lemahsugih, dan Talaga;



2. Daerah Bergelombang/Berbukit meliputi Kecamatan Maja, Majalengka, Cigasong, Sukahaji, Sindang, sebagian Rajagaluh dan Sindangwangi;
3. Dataran Rendah meliputi Kecamatan Panyingkiran, Kadipaten, Kasokandel, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Dawuan, Jatiwangi, Palasah, Leuwimunding dan Sumberjaya;

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 5 klasifikasi yaitu dataran dengan ketinggian berkisar (0-50 mdpl), dataran berombak dengan ketinggian berkisar (50-100 mdpl), Perbukitan dengan ketinggian berkisar (100-500 mdpl), Perbukitan dengan lereng curam dengan ketinggian berkisar (500-1000 mdpl) dan Pegunungan dengan ketinggian berkisar (>1000 mdpl).

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kabupaten Majalengka



Sumber: Kebijakan Satu Peta Tahun 2021.

Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan yang mempunyai luas berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2. Kecamatan Kertajati merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas, yaitu 138,36 km² atau 11,49% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kadipaten, yaitu 21,86 km² atau hanya 1,82% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka.



Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase	No.	Nama Kecamatan	Luas (m ²)	Persentase
1.	Majalengka	57,00	4,73	14.	Sindangwangi	31,76	2,64
2.	Panyingkiran	22,98	1,91	15.	Sukahaji	32,52	2,7
3.	Kadipaten	21,86	1,82	16.	Sindang	23,97	1,99
4.	Dawuan	23,80	1,98	17.	Cigasong	24,17	2,01
5.	Kasokandel	31,61	2,62	18.	Maja	65,21	5,42
6.	Kertajati	138,36	11,49	19.	Argapura	60,56	5,03
7.	Jatitujuh	73,66	6,12	20.	Banjaran	41,98	3,49
8.	Jatiwangi	40,03	3,32	21.	Talaga	43,50	3,61
9.	Palasah	38,69	3,21	22.	Cikijing	43,54	3,62
10.	Ligung	62,25	5,17	23.	Cingambul	37,03	3,07
11.	Sumberjaya	32,73	2,72	24.	Bantarujeg	66,52	5,52
12.	Leuwimunding	32,46	2,7	25.	Lemahsugih	78,64	6,53
13.	Rajagaluh	34,37	2,85	26.	Malausma	45,04	3,74
Kabupaten Majalengka		Luas Kabupaten Majalengka (Km²)				1.204,24	
		Persentase				100,00	

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.5
Peta Posisi Kabupaten Majalengka dalam RTRW
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.



2.1.1.2 Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi pemanfaatan ruang sebagai tanda ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	90	54,02	91	74,23
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	6,70	6,81	6,81	6,89	6,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Revisi, Peninjauan Kembali, dan Peraturan Substansi RTRW dan RDTR, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

- A. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:
- Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman
 - Penataan/pengembangan wilayah kabupaten;



- c. Sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
 - d. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- B. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:
- a. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
 - c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
 - d. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan penahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.
- C. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
- a. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
 - c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
 - e. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Arah Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K3PR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan arah ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan rangkaian program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.



Tujuan dari penetapan prioritas pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka adalah agar terjaganya kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya, sehingga terjaganya konsistensi pengembangan wilayah kabupaten.

2.1.1.3 Perkembangan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan data di bawah, penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2023 didominasi lahan bukan sawah, yaitu seluas 70.959 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.958 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan TNGC seluas 14.641 Ha. Luas lahan sawah pada tahun 2023 seluas 49.465 Ha menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka masih pada sektor pertanian.

Khusus untuk lahan sawah, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka tanggal 27 Oktober 2022 antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka bahwa luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Majalengka adalah seluas 48.509,22 Ha dengan rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 27.884,63 Ha dan sebagai kawasan tanaman pangan seluas 20.624,59 Ha.

Tabel 2.4
Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 - 2024

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Sawah						
1.	Irigasi Teknis	36.802	36.462	36.101	36.101	36.101



No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Tadah Hujan	13.479	13.555	13.364	13.364	13.364
Luas Lahan Sawah		50.281	50.017	49.465	49.465	49.465
Lahan Bukan Sawah						
1.	Pekarangan/bangunan	13.690	13.693	14.245	14.247	14.250
2.	Tegal/Kebun	23.694	23.958	23.958	23.958	23.958
3.	Ladang/Huma	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4.	Pengembalaan/Padang Rumput	495	495	495	495	495
5.	Ditanami pohon / Hutan Rakyat	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
6.	Hutan Negara	14.641	14.641	14.641	14.641	14.641
7.	Perkebunan	739	739	739	739	739
8.	Lahan lainnya	7.813	7.711	7.712	7.712	7.712
9.	Rawa-rawa	99	99	99	99	99
10.	Kolam/empang	1.422	1.521	1.520	1.518	1.515
Luas Lahan Bukan Sawah		70.143	70.407	70.959	70.959	70.959
LUAS LAHAN KESELURUHAN		120.424	120.424	120.424	120.424	120.424

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.1.4 Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi



perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Terkait pengolahan sampah mengantisipasi berkembangnya Kawasan Rebana direncanakan akan dilakukan rehabilitasi TPA Heuleut di Kecamatan Kadipaten. Sehubungan kebutuhan anggaran yang cukup besar sehingga pembiayaan rehabilitasi TPA Heuleut salah satunya diusulkan ke Pemerintah Pusat. Kabupaten Majalengka telah mempersiapkan lahan yang sudah bersertifikat, Rencana Induk dan Kajian UKL/UPL. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

No.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penanganan sampah (%)	35,15	34,30	33,05	33,07	41,74
2.	Persentase cakupan area pelayanan Persampahan (%)	1,90	1,90	1,90	1,91	1,91
3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	50	50	47,14	50	50
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	87,65	87,31	88,71	88,71	94



	(poin)					
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,97	50,97	50,97	50,97	35,04
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,87	62,76	64,81	65,89	64,54
7.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Titik)	352	352	352	352	352
8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL-UKL/SPPL	27,50	89,47	95,50	100	100
9.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	82,21	83,31	95,74	95,75	95,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.1.5 Resiko Bencana

Kondisi geologis Kabupaten Majalengka termasuk daerah rawan bencana gempa bumi karena dilalui oleh Sesar Baribis. kondisi geologisnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang berpotensi terjadinya bencana longsor dan pergeseran tanah, sesuai hasil pemetaan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang masuk ke dalam kawasan Sesar Baribis. Sesar Baribis adalah Sesar aktif yang membentang dari timur hingga barat Pulau Jawa. Sesar Baribis merupakan sesar terpanjang di Pulau Jawa. Sesar ini juga melintasi sisi barat Subang dan Purwakarta, Karawang, Cibatu (Bekasi), Jakarta hingga Tangerang dan Rangkasbitung.

Berdasarkan sebaran dan struktur batuanannya, Kabupaten Majalengka didominasi oleh batuan *Alluvium* dengan luasan 27617,15 Ha sebesar 20,7%, *Old Sundoro Volanics* dengan Luasan 16.830,25 Ha sebesar 12,6%, *Old Volcanic Product* dengan luasan 9,89 Ha sebesar 9,9%, *Young Eruption Product of Ciremai* dengan luasan 11.790,89 Ha sebesar 8,8% dan *Young Volcanic Product* dengan luasan 23.552,97 Ha dengan luasan 17,7%, untuk lebih jelas dicantumkan kedalam **Tabel 2.6** dan **Gambar 2.6**

Tabel 2.6
Struktur Batuan Di Kabupaten Majalengka

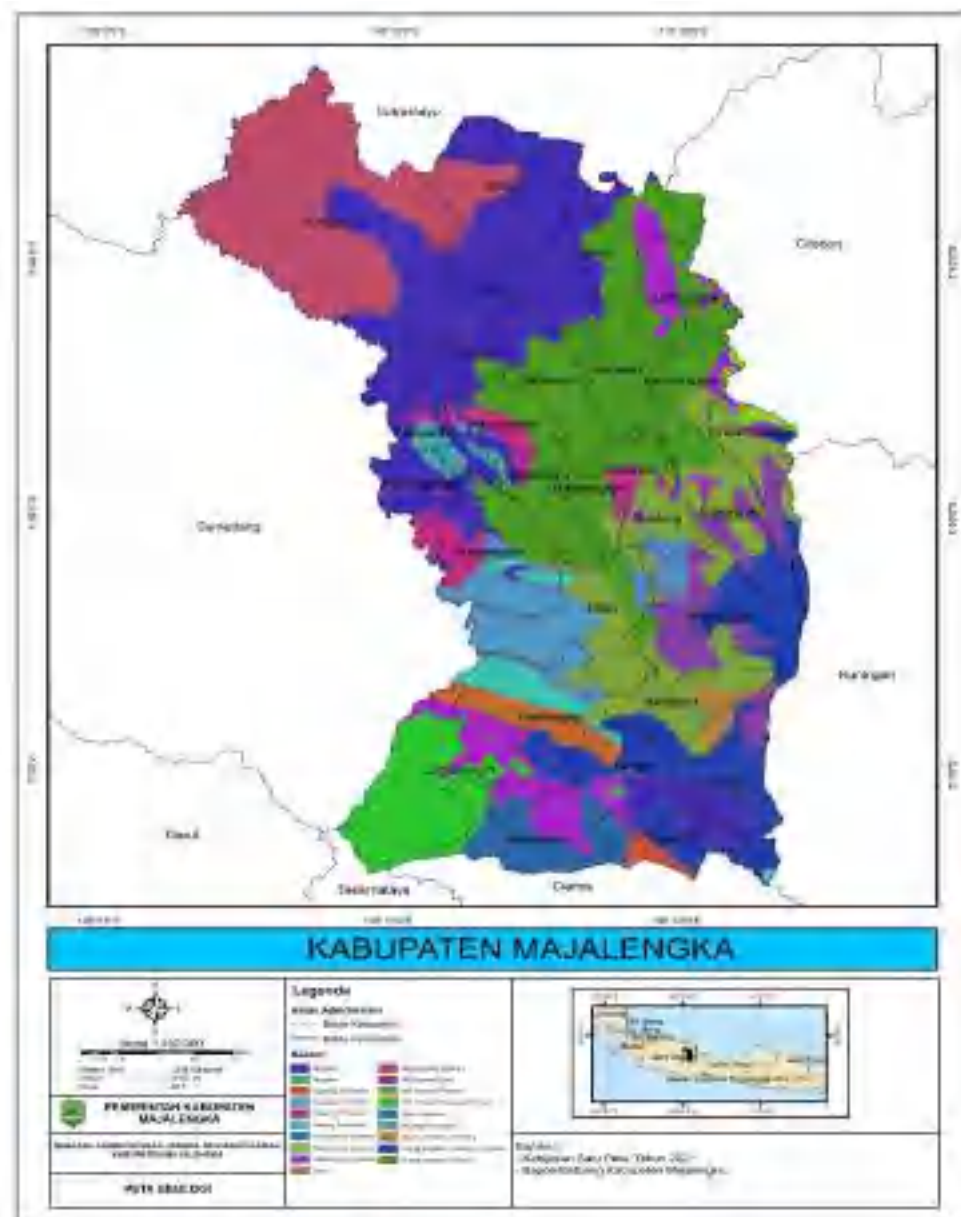
No.	Nama Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Alluvium	27.617,15	20,7
2.	Andesite	75,74	0,1



No.	Nama Formasi Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
3.	Cijulang Formation	565,10	0,4
4.	Cinambo Formation	6.862,08	5,1
5.	Citalang Formation	2.975,83	2,2
6.	Halang Formation	1,79	1,8
7.	Hornblende Andesite	157,10	0,1
8.	Hyperstene Andesite	536,76	0,4
9.	Kaliwangu Formation	7.167,51	5,4
10.	Lava	885,05	0,7
11.	Old Sundoro Volanics	16.830,25	12,6
12.	Old Volcanic Lava	4.800,82	3,6
13.	Old Volcanic Product	9,89	9,9
14.	Old Volcanic Products Breccia	7.102,93	5,3
15.	Older Volcanics	3.553,86	2,7
16.	Subang Formation	1.229,71	0,9
17.	Upper Member of Halang	2.066,14	1,5
18.	Young Eruption Product of Ciremai	11.790,89	8,8
19.	Young Volcanic Product	23.552,97	17,7

Sumber: Kebijakan Satu Peta Tahun 2021, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.6
Peta Kondisi Geologi Kabupaten Majalengka



Sumber: Kebijakan Satu Peta Tahun 2021.

Wilayah utara yang merupakan dataran rendah sangat berpotensi terjadinya bencana banjir, dan abrasi sungai, hal ini sebagai konsekuensi adanya beberapa aliran sungai yang cukup besar serta banyaknya sungai-sungai kecil yang bermuara di sungai-sungai besar. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi penyebab utama timbulnya bencana abrasi dan banjir. Selain hal tersebut di atas Kabupaten Majalengka mendapat julukan Kota Angin karena sepanjang tahun hembusan angin yang cukup kencang sering terjadi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung yang melanda Kabupaten Majalengka dan sering menimbulkan kerugian harta benda masyarakat.



Peristiwa bencana tersebut tidak mungkin dihindari tetapi yang dapat kita lakukan adalah memperkecil terjadinya korban jiwa, harta benda maupun lingkungan.

Banyaknya korban jiwa maupun harta benda peristiwa bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Mengamati fenomena-fenomena di atas, Kabupaten Majalengka yang relatif tidak aman dari bencana, harus tetap waspada agar dampak negatifnya berupa korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Data Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Data Lokasi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Potensi Bencana				
		Longsor	Tektonik	Vulkanik	Banjir	Cuaca Ekstrem
1.	Argapura	14 desa	14 desa	13 desa	2 desa	14 desa
2.	Banjaran	13 desa	13 desa	2 desa	-	13 desa
3.	Bantarujeg	13 desa	13 desa	-	-	13 desa
4.	Cigasong	8 desa	10 desa	4 desa	10 desa	10 desa
5.	Cikijing	12 desa	15 desa	1 desa	11 desa	15 desa
6.	Cingambul	11 desa	13 desa	-	12 desa	13 desa
7.	Dawuan	-	11 desa	-	11 desa	11 desa
8.	Jatitujuh	-	15 desa	-	15 desa	15 desa
9.	Jatiwangi	-	16 desa	6 desa	16 desa	16 desa
10.	Kadipaten	-	7 desa	-	7 desa	7 desa
11.	Kasokandel	1 desa	10 desa	-	10 desa	10 desa
12.	Kertajati	-	14 desa	-	14 desa	14 desa
13.	Lemahsugih	19 desa	19 desa	-	-	19 desa
14.	Leuwimunding	4 desa	14 desa	-	14 desa	14 desa
15.	Ligung	-	19 desa	7 desa	19 desa	19 desa
16.	Maja	13 desa	18 desa	14 desa	14 desa	18 desa



No.	Kecamatan	Potensi Bencana				
		Longsor	Tektonik	Vulkanik	Banjir	Cuaca Ekstrim
17.	Majalengka	8 desa	14 desa	1 desa	14 desa	14 desa
18.	Malausma	10 desa	11 desa	-	-	11 desa
19.	Palasah	-	13 desa	7 desa	13 desa	13 desa
20.	Panyingkiran	1 desa	9 desa	-	9 desa	9 desa
21.	Rajagaluh	8 desa	13 desa	10 desa	7 desa	13 desa
22.	Sindang	7 desa	7 desa	5 desa	2 desa	7 desa
23.	Sindangwangi	9 desa	10 desa	7 desa	8 desa	10 desa
24.	Sukahaji	7 desa	13 desa	9 desa	13 desa	13 desa
25.	Sumberjaya	-	16 desa	4 desa	15 desa	16 desa
26.	Talaga	16 desa	16 desa	2 desa	9 desa	16 desa
Desa		174 desa	343 desa	92 desa	245 desa	343 desa
Kecamatan		18 kec	26 kec	15 kec	22 kec	26 kec

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

a. Indeks Ketahanan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB nomor 3 tahun 2012 penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Resiko Bencana (IRB). Adapun IKD Kabupaten Majalengka tahun 2023 sebesar 0,70 poin turun menjadi 0,66 poin pada tahun 2024, sedangkan IRB Kabupaten Majalengka 2023 nilainya 120,84 poin menjadi 108,99 poin pada tahun 2024. Meskipun poin IKD sedikit menurun, namun nilai capaian IRB juga menurun, artinya meskipun ketahanan daerah sedikit menurun, namun potensi resiko bencana juga menurun, mengindikasikan bahwa Kabupaten Majalengka masih baik dalam melakukan mitigasi bencana.

b. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Kabupaten Majalengka yang memiliki potensi bencana atau rawan bencana sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana dan dapat



membantu daerah menetapkan prioritas dan strategi pengurangan risiko sesuai karakteristik wilayah

Dalam rangka mengukur dan menganalisis potensi ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan angin topan di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008.

BNPB bertugas melakukan analisis, kajian, dan penentuan tingkat risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia dan menerbitkan status bencana berupa Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011 dan sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011 dan sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. IRB digunakan untuk memahami besarnya risiko yang dihadapi suatu wilayah terhadap bencana dan untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

IRB diperoleh dengan melakukan perhitungan pada komponen indeks bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*). Perhitungan IRB dilakukan dengan metode analisis geospasial terhadap peta indeks bahaya (*hazard*), peta kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) dengan rumus ($Risk = Hazard \times Vulnerability / Capacity$), adapun nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	143,43	124,74	136,35	120,84	108,99

Sumber: Buku IRBI Tahun 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2025.



Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majalengka dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren yang terus menurun, sempat naik di tahun 2022 akan tetapi turun signifikan di tahun 2023 artinya terjadinya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga risiko bencana yang ditimbulkan mengalami penurunan. Dengan skor IRB 108,99 maka Kabupaten Majalengka masuk dalam kategori kelas risiko “**Sedang**”.

2.1.1.6 Kondisi Klimatologis

Kondisi klimatologis di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 439 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 1,0 mm. Kecepatan angin rata-rata berkisar 5 knot dan kecepatan tertinggi 26 knot dan kecepatan angin terendah 3 knot. Kabupaten Majalengka terkenal dengan sebutan Kota Angin karena memang pada bulan-bulan tertentu di musim kemarau angin berhembus dengan kecepatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Suhu terendah di Kabupaten Majalengka selama tahun 2024 mencapai 20,04°C dan suhu tertinggi mencapai 37,0°C. Sementara kelembapan udara terendah mencapai 31% dan kelembapan udara tertinggi mencapai 100%.

Gambar 2.7
Data Perkembangan Curah Hujan Bulanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024



Sumber: BMKG Stasiun Meteorologi Kertajati, Tahun 2025 (diolah).



2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pendekatan sistematis dan partisipatif dalam menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan. Secara yuridis, KLHS diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Kewajiban ini diperkuat dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta dioperasionalisasi lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan RPJMD terintegrasi KLHS.

Hasil kajian terhadap status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka untuk pangan dan air bersih menggunakan pendekatan sistem grid melalui teknik pengolahan data spasial, sehingga untuk membandingkan data ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data potensi baik pangan dan air serta kebutuhan pangan dan air berbasis spasial. Untuk kebutuhan pangan dan air dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap grid yang digunakan dalam menghitung status daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan hubungan antara potensi daerah, permasalahan aktual, isu strategis KLHS, isu lingkungan dinamis, dan isu strategis daerah. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan berjenjang dan sinkron, mencakup keterkaitan isu global (TPB/SDGs), nasional (RPJMN 2025–2029), dan regional (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029), sebagaimana ditegaskan dalam



Lampiran Inmendagri bahwa RPJMD harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengintegrasikan substansi KLHS ke dalam seluruh struktur perencanaan RPJMD Tahun 2025– 2029. Tabel integrasi yang disusun mencerminkan keterkaitan antara potensi dan permasalahan daerah dengan isu-isu utama pembangunan berkelanjutan yang teridentifikasi dalam KLHS. Selain itu, pendekatan akademik yang digunakan mengaitkan isu tersebut secara hirarkis dan tematik dengan arah kebijakan global (*Sustainable Development Goals*), nasional (RPJMN 2025–2029), dan regional (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029), sehingga menjamin koherensi vertikal dan horizontal antar dokumen perencanaan.

Secara konseptual, integrasi dilakukan dengan mendudukan isu strategis daerah sebagai simpul dari lima aspek penting, yakni potensi daerah, permasalahan faktual, isu lingkungan hidup strategis (termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan), tekanan pembangunan yang bersifat dinamis (lingkungan dinamis), serta kerangka kebijakan multi-level governance. Misalnya, isu tentang "pengendalian pembangunan dan lingkungan dalam mengantisipasi perkembangan industri dan perkotaan" berakar dari tekanan spasial dan ekologis akibat perkembangan wilayah Rebana. Isu ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-11 dan ke-13, serta menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk mendorong tata kelola ruang yang adil, resilien, dan inklusif.

Sementara itu, pendekatan regional melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 memberikan konteks spasial dan sektoral yang lebih dekat, seperti penegasan peran Kabupaten Majalengka dalam kawasan strategis Rebana, serta pentingnya ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Di sinilah urgensi integrasi KLHS menemukan pijakan akademiknya: yakni sebagai instrumen ilmiah dalam menginternalisasi prinsip ekologis ke dalam keputusan pembangunan yang bersifat ekonomis dan sosial.

Lebih lanjut, integrasi substansi KLHS dalam RPJMD tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi dibuktikan secara teknis melalui keterpaduan



dalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, serta program dan kegiatan prioritas yang sensitif terhadap risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lokasi muatan KLHS dalam struktur dokumen RPJMD juga telah diidentifikasi secara eksplisit, sehingga proses *tracking* dan verifikasi kebijakan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Isu pengendalian pembangunan dan lingkungan, KLHS mengidentifikasi tekanan terhadap daya dukung lingkungan di kawasan strategis akibat pesatnya pembangunan industri dan perkotaan. Isu ini kemudian dikaitkan dengan strategi nasional dalam RPJMN 2025– 2029 mengenai pengelolaan ruang dan wilayah secara berkelanjutan, serta diperkuat oleh prioritas regional Jawa Barat dalam pengembangan kawasan Rebana yang adaptif terhadap lingkungan.

Hubungan Antara Potensi Daerah, Permasalahan Aktual, Isu Strategis KLHS, Isu Lingkungan Dinamis, Dan Isu Strategis Daerah, serta memuat pemetaan isu seperti pengembangan ekonomi inklusif, penyiapan sumber daya manusia, serta peningkatan layanan dasar air bersih dan sanitasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.9
Hubungan Antara Potensi Daerah, Permasalahan Aktual, Isu Strategis KLHS, Isu Lingkungan Dinamis, Dan Isu Strategis Daerah di Kabupaten Majalengka

No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1.	Letak strategis Majalengka sebagai penyangga kawasan industri dan pariwisata Rebana	Tekanan lahan dan lingkungan akibat pesatnya urbanisasi dan industri	Pengendalian pembangunan dan lingkungan dalam mengantisipasi perkembangan industri dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan• Penanggulangan Perubahan Iklim	Transformasi tata kelola dan pembangunan wilayah berkelanjutan	Penguatan peran kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pengendalian pembangunan dan lingkungan dalam mengantisipasi perkembangan industri dan perkotaan
2.	Potensi sektor industri, pariwisata, dan pertanian unggulan lokal	Kesenjangan ekonomi, terbatasnya keterlibatan UMKM lokal	Pengembangan ekonomi inklusif yang melibatkan potensi ekonomi lokal dan keterkaitannya dengan industri skala besar yang didukung infrastruktur penunjang produktifitas dan dukungan akses perhubungan dan distribusi produk	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi• Industri, Inovasi dan Infrastruktur• Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan UMKM	Pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal



No.	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
3.	Demografi usia produktif tinggi	Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal	Penyiapan SDM yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dalam sektor industri dan sektor ekonomi lainnya yang berkembang baik di dalam daerah maupun di luar daerah	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan Berkualitas• Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja	Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis industri	Penyiapan SDM berdaya saing tinggi
4.	Kebutuhan air bersih dan sanitasi meningkat	Cakupan layanan air dan sanitasi masih rendah	Peningkatan layanan dasar air bersih dan sanitasi untuk mendukung peningkatan kesehatan SDM secara merata dan optimal	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak	Penguatan infrastruktur air bersih dan sanitasi di kawasan perdesaan	Peningkatan layanan dasar air bersih dan sanitasi

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



A. Daya Dukung Penyedia Pangan

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) penyedia pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. DDLH penyedia pangan tersebut merupakan informasi yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sehingga ketersediaan sumberdaya pangan dapat terjamin.

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa masih ada beberapa wilayah Kecamatan dengan status sudah melampaui yaitu sebesar 9,24% dan untuk belum melampaui yaitu sebesar 90,76%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Luasan DDLH Pangan berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total (Ha)
		(Sudah Melampaui)	(Belum Melampaui)	
1.	Argapura	-	7.283,53	7.283,53
2.	Banjaran	-	3.426,55	3.426,55
3.	Bantarujeg	-	6.725,33	6.725,33
4.	Cigasong	5,16	3.057,02	3.062,18
5.	Cikijing	391,49	3.386,54	3.778,03
6.	Cingambul	422,58	3.441,86	3.864,44
7.	Dawuan	1.633,40	1.581,90	3.215,29
8.	Jatitujuh	2.281,76	6.189,78	8.471,53
9.	Jatiwangi	923,09	3.316,62	4.239,71
10.	Kadipaten	572,41	1.676,64	2.249,05
11.	Kasokandel	112,38	3.425,93	3.538,32
12.	Kertajati	2.457,59	17.503,45	19.961,04
13.	Lemahsugih	-	8.114,58	8.114,58
14.	Leuwimunding	24,75	2.763,23	2.787,99
15.	Ligung	2.546,58	4.838,85	7.385,43



No.	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total
16.	Maja	-	6.292,13	6.292,13
17.	Majalengka	-	6.448,10	6.448,10
18.	Malausma	-	4.671,93	4.671,93
19.	Palasah	252,62	3.456,82	3.709,44
20.	Panyingkiran	49,52	2.102,90	2.152,41
21.	Rajagaluh	-	4.801,96	4.801,96
22.	Sindang	2,78	2.271,94	2.274,72
23.	Sindangwangi	-	3.615,99	3.615,99
24.	Sukahaji	157,03	2.768,93	2.925,96
25.	Sumberjaya	248,28	3.358,31	3.606,59
26.	Talaga	222,22	4.389,16	4.611,39
Grand Total		12.303,65	120.909,98	133.213,63
%		9,24%	90,76%	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan hasil analisis Kecamatan yang mempunyai yang statusnya sudah melampaui terbesar berada di Kecamatan Ligung dengan sebesar 2.546,58 Ha (1,91%) dari total keseluruhan wilayah dan wilayah kecamatan yang belum melampaui terbesar berada di Kecamatan Kertajati dengan luas sebesar 17.503,45 Ha (13,14%) dari total keseluruhan wilayah.

Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang menggambarkan capaian ketahanan pangan dan gizi di wilayah tersebut. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya, walaupun angkanya berada di bawah Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Indek Ketahan Pangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Majalengka	81,02	80,79	79,44	81,39	82,58
2.	Jawa Barat	76,78	77,79	77,55	82,19	82,97



No.	Uraian	Indek Ketahanan Pangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Nasional	61,40	59,20	60,20	58,80	76,20

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2020-2024, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Majalengka selama 5 tahun terakhir selalu dalam kondisi baik dan trendnya terus meningkat, kecuali tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya gagal panen padi akibat banjir, kekeringan dan anomali cuaca.

Sementara itu angka Prevalensi Ketidacukupan Pangan (*Prevalence of Undernourishment* [PoU]) atau ketidacukupan konsumsi pangan adalah persentase dari perkiraan proporsi kelompok penduduk tertentu yang tidak mendapatkan cukup energi harian dari makanan untuk menjalani kehidupan normal secara reguler, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.

Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa prevalensi ketidacukupan pangan di Kabupaten Majalengka masih dalam kondisi aman dan terkendali, meski sempat naik tahun 2022 akibat gagal panen yang disebabkan kekeringan dan cuaca ekstrim, dengan skor tahun 2024 sebesar 5,95% masih di bawah skor Jawa Barat (6,00%) dan nasional (8,20%).

Tabel 2.12
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Majalengka	4,17	4,94	9,88	7,90	5,95
2.	Jawa Barat	5,87	5,84	6,75	5,83	6,00
3.	Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,20

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025, Yang dikelola dalam SIPD.



B. Daya Dukung Penyedia Air

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Hasil analisis untuk status DDLH Air terlihat bahwa masih ada beberapa wilayah Kecamatan dengan Status daya dukung air sudah melampaui yaitu sebesar 28,30% dan untuk status belum melampaui sebesar 71,70%. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan, dilewati 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung yang menjadi sumber air baku terutama untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa potensi air permukaan lainnya berupa situ/danau yaitu di wilayah Desa Cipadung, Payung, Sangiang, dan Talagaherang.

Tabel 2.13
Potensi Air Permukaan di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Sungai	Bendungan	Areal Layanan (Ha)	Debit (Liter/detik)	
				Maksimal	Minimal
1.	Cilutung	Kamun	8.462	60.383	25.105
2.	Cideres	Tirtanegara, Cigasong	2.500	2.376	0.031
3.	Cikeruh	Cikeruh, Cebutul	3.048	12.187	0.286
4.	Ciherang	Ciherang	940	1.287	0.403
5.	Cikadongdong	Cikemangi, Cikondang	1.841	3.181	0,4
6.	Ciwaringin	Ciwaringin	3.387	11.24	0,401
7.	Cilongkrang	Ciminggiri	Suplai ke Bd Ciawi	0,907	0,66
8.	Ciawi	Ciawi	116	0,175	0,132
9.	Cimanuk	Rentang	571	N/A	N/A
10.	Cihikeu	Citeureup	207	0.706	0,54
11.	Cihieum	Cihieum	265	4.791	0,07
12.	Cisampora	Cimingking	201	1.043	0,017
JUMLAH			21.538	98.28	27.85

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka Tahun 2024, yang dikelola dalam SIPD.

Kabupaten Majalengka mempunyai potensi Air Bawah Tanah yang cukup baik, hanya 5 Kecamatan yang potensinya rendah/kurang yaitu, Kecamatan Kertajati, Ligung, Dawuan, Kasokandel dan Jatiwangi.



Potensi Air Bawah Tanah ini sangat dipengaruhi oleh potensi *Recharge Area* dan indeks zona konservasinya. Untuk lebih jelasnya gambaran kondisi hidrologi Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka

No.	Kisaran Indeks Rata-Rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1.	1,64 - 2,01	Kertajati – Ligung – Dawuan dan Kasokandel – Jatiwangi	D	Kurang Berpotensi
2.	2,01 - 2,31	Palasah – Leuwimunding – Panyingkiran – Majalengka – Cigasong – Sukahaji dan Sindang – Bantarujeg dan Malausma – Talaga – Cingambul	C	Potensi Sedang
3.	2,31 - 2,61	Sumberjaya – Rajagaluh – Maja – Lemahsugih – Banjaran	B	Berpotensi
4.	2,61 - 3,14	Kadipaten – Sindangwangi – Argapura – Jatitujuh – Cikijing	A	Sangat Berpotensi

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011–2031.

Tabel 2.15
Potensi *Recharge Area* Air Bawah Tanah di Kabupaten Majalengka

No.	Kisaran Indeks Rata-Rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1.	2,47 – 2,69	Sumberjaya – Majalengka – Argapura	D	Kurang Baik
2.	2,70 – 2,92	Rajagaluh – Sindangwangi – Maja – Cikijing - Cingambul	C	Sedang
3.	2,93 – 3,15	Kertajati – Ligung – Jatiwangi – Palasah – Leuwimunding – Cigasong – Sukahaji – Bantarujeg – Lemahsugih - Talaga	B	Baik
4.	3,16 - 3,37	Jatitujuh - Kadipaten – Dawuan – Panyingkiran - Banjaran	A	Sangat Baik

Sumber: RTRW Kabupaten Majalengka, Tahun 2011–2031.



Tabel 2.16
Indeks Zona Konservasi Air Bawah Tanah
di Kabupaten Majalengka

No.	Kisaran Indeks Rata-Rata	Kecamatan	Kelas	Keterangan
1.	8,81 – 9,82	Kertajati – Ligung – Dawuan	D	Kurang Baik
2.	9,83 – 10,84	Jatiwangi – Leuwimunding – Cigasong – Bantarujeg – Palasah – Talaga – Sukahaji	C	Sedang
3.	10,85 – 11,86	Lemahsugih – Banjaran – Majalengka – Maja – Cingambul – Panyingkiran	B	Baik
4.	11,87 – 12,89	Jatitujuh – Kadipaten – Sumberjaya – Rajagaluh – Sindangwangi – Argapura – Cikijing	A	Sangat Baik

Sumber: Inventarisasi dan Pemetaan Zona Konservasi Air Bawah Tanah Kabupaten Majalengka (2003).

Status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Hasil analisis untuk status DDLH Air terlihat bahwa masih ada beberapa wilayah kecamatan dengan status daya dukung air sudah melampaui yaitu sebesar 28,30% dan untuk status belum melampaui sebesar 71,70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Luasan DDLH Air Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total (Ha)
		(Sudah Melampaui)	(Belum Melampaui)	
1.	Argapura	1.908,23	5.375,30	7.283,53
2.	Banjaran	71,48	3.355,07	3.426,55
3.	Bantarujeg	2.045,06	4.680,26	6.725,33
4.	Cigasong	567,50	2.494,68	3.062,18
5.	Cikijing	2.031,84	1.746,19	3.778,03
6.	Cingambul	1.624,74	2.239,70	3.864,44
7.	Dawuan	277,70	2.937,59	3.215,29
8.	Jatitujuh	74,29	8.397,25	8.471,53
9.	Jatiwangi	1.997,45	2.242,26	4.239,71
10.	Kadipaten	1.187,04	1.062,01	2.249,05
11.	Kasokandel	2.603,56	934,75	3.538,32
12.	Kertajati	50,34	19.910,70	19.961,04
13.	Lemahsugih	3.080,98	5.033,60	8.114,58
14.	Leuwimunding	1.258,67	1.529,31	2.787,99
15.	Ligung	314,12	7.071,31	7.385,43
16.	Maja	2.051,98	4.240,15	6.292,13
17.	Majalengka	2.268,33	4.179,77	6.448,10



No.	Kecamatan	Status (Ha)		Grand Total (Ha)
		(Sudah Melampaui)	(Belum Melampaui)	
18.	Malausma	3.160,08	1.511,84	4.671,93
19.	Palasah	1.258,27	2.451,18	3.709,44
20.	Panyingkiran	1.009,50	1.142,92	2.152,41
21.	Rajagaluh	1.505,44	3.296,52	4.801,96
22.	Sindang	561,22	1.713,49	2.274,72
23.	Sindangwangi	1.167,34	2.448,65	3.615,99
24.	Sukahaji	1.585,24	1.340,72	2.925,96
25.	Sumberjaya	1.920,57	1.686,02	3.606,59
26.	Talaga	2.123,87	2.487,52	4.611,39
Grand Total		37.704,84	95.508,78	133.213,63
%		28,30%	71,70%	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan hasil analisis, kecamatan yang persentase statusnya sudah melampaui terbesar berada di Kecamatan Malausma dengan luas sebesar 3.160,08 Ha (2,37%) dari total keseluruhan wilayah dan wilayah kecamatan yang persentase statusnya belum melampaui terbesar berada di Kecamatan Kertajati dengan luas sebesar 19.910,70 Ha (14,95%) dari total keseluruhan wilayah.

2.1.1.8 Peran Strategis Daerah

Berdasarkan rencana kawasan strategis Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang di dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Perda Provinsi no 9 tahun 2022), bagian wilayah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis (KSP) Provinsi Jawa Barat, meliputi:

A. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, berupa:

1. Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity Merupakan kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat, dengan arahan pengembangan sebagai berikut:

- Mengembangkan bandara dan aerocity;
- Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah di sekitarnya;
- Kerja sama dengan pihak swasta.

2. Kawasan Koridor Bandung-Cirebon

Merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat. Adapun arahan pengembangan sebagai berikut:

- Mengembangkan kawasan agroindustri;
- Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan.

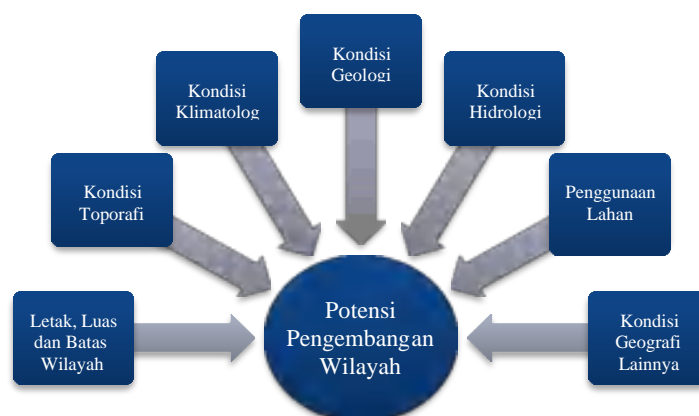
B. Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, berupa:

- Kawasan Panas Bumi Sangkan Hurip. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan panas bumi yang bersifat lintas kabupaten/kota yang memerlukan pengelolaan kawasan secara terpadu dan serasi, dengan arahan pengembangan sebagai berikut:
- Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar.

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah





Sejalan dengan perkembangan tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka sudah banyak terjadi perubahan serta kebijakan kewilayah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terkait Kabupaten Majalengka terdapat perubahan, sehingga pada saat ini sedang dilakukan revisi RTRW Kabupaten Majalengka, sehingga berikutnya perlu disampaikan data informasi terbaru yang tertuang dalam revisi RTRW di bawah ini.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan Pengembangan sistem pusat permukiman ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya struktur ruang yang tangguh untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi basis. Pengembangan sistem pusat permukiman juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan potensinya dan daya tampung lingkungannya, baik itu struktur ruang internal pada Kabupaten Majalengka maupun struktur ruang eksternal dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hierarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumberdaya buatan.

Mengingat sektor ekonomi basis Kabupaten Majalengka adalah sektor pertanian, pariwisata, dan industri maka konsep ruang yang akan diterapkan adalah pengembangan kabupaten dengan kota-kota atau kawasan perkotaan yang mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri. Pengembangan hirarki kota di Kabupaten Majalengka berdasarkan pada arahan kebijakan nasional dan provinsi, disamping itu juga berdasarkan hasil kajian tentang tingkat perkembangan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Majalengka. Hirarki sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- 1) PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Kabupaten Majalengka, merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang



melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di wilayah Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, serta Kecamatan Kertajati yang menjadi aerocity, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : Bandar udara, dan atau Terminal tipe B
- Ekonomi : Pasar Induk (regional)
- Kesehatan : Rumah Sakit Umum tipe B
- Pendidikan : Perguruan Tinggi

Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung - Cirebon dan koridor Utara-Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk ke dalam PKW Kadipaten dan Kertajati, sebagian wilayah Kecamatan Kadipaten dan sebagian wilayah Kecamatan Kertajati.

- 2) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Revisi Nomor 9 Tahun 2022) ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan yang melayani wilayah kabupaten dan beberapa kecamatan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Rajagaluh dan Kecamatan Talaga.

- 3) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Maja, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, dan Kecamatan Sumberjaya.
- 4) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yaitu Kecamatan Leumahsugih, Kecamatan Malausma, Kecamatan Cingambul, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Argapura, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Sindang, Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Leuwimunding, Kecamatan Palasah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
 - Melayani satu atau lebih desa;
 - Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan.

2.1.1.10 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup beragam. Wilayah dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan pegunungan,



menjadikan Majalengka sebagai daerah yang kaya akan kekayaan alam. Potensi tersebut meliputi mata air, embung/waduk/situ, curug, sungai, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan), perikanan, wisata alam, hutan, serta sektor pertambangan.

Keberadaan sumber daya alam ini tidak hanya menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal, tetapi juga menawarkan peluang besar dalam pengembangan pariwisata, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Namun demikian, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam ini harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

A. Potensi Sumber Daya Air

Sumber daya air di Kabupaten Majalengka terdiri dari : mata air, sungai, dan situ/rawa/embung yang keberadaannya tersebar di setiap kecamatan. Sebagian besar dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pertanian (irigasi) dan sebagian lagi mempunyai potensi sebagai destinasi wisata.

1. Sungai

Terdapat 10 (sepuluh) sungai utama di Kabupaten Majalengka, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Sungai Utama di Kabupaten Majalengka

No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Cimanuk	46,16
2.	Ciwaringin	13,48
3.	Cisambeng	19,20
4.	Cikoronjo	22,84
5.	Cilutung	56,41
6.	Cikeruh	33,49
7.	Cijurey	22,50
8.	Cideres	28,44
9.	Sukiheun / Cisuluheun	14,50
10.	Cihieum	11,02
Jumlah		268,04

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.



2. Mata Air

Terdapat 353 (tiga ratus lima puluh tiga) mata air di Kabupaten Majalengka yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.19

Daftar Mata Air di Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Jumlah	No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Argapura	33	8.	Maja	3
2.	Banjaran	20	9.	Majalengka	6
3.	Bantarujeg	36	10.	Malausma	23
4.	Cigasong	1	11.	Rajagaluh	30
5.	Cikijing	53	12.	Sindangwangi	14
6.	Cingambul	31	13.	Sukahaji	10
7.	Lemahsugih	62	14.	Talaga	31
Total					353

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

3. Situ/Rawa dan Embung

Terdapat 50 (lima puluh) situ/rawa di Kabupaten Majalengka, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20

Daftar Situ/Rawa di Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Jumlah	No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Banjaran	1	6.	Ligung	1
2.	Cingambul	1	7.	Malausma	1
3.	Jatitujuh	14	8.	Rajagaluh	2
4.	Kertajati	23	9.	Sindang	2
5.	Lemahsugih	1	10.	Sindangwangi	5
Total					50

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

Sebanyak 12 (dua belas) situ/rawa yang mempunyai luasan lebih dari 10.000 m² atau lebih dari 1 hektar, yaitu:

**Tabel 2.21****Daftar Situ/Rawa di Kabupaten Majalengka Luas Lebih Dari 1 ha**

No.	Nama Situ/Rawa	Lokasi		Luas (ha)	Volume (000 m ³)
		Kecamatan	Desa		
1	Anggrarahan	Jatitujuh	Jatitengah	108,0	1.365,0
2	Rancabeureum	Jatitujuh	Pilangsari	57,0	687,5
3	Suryan	Kertajati	Mekarmulya	47,5	1.187,5
4	Jawura	Kertajati	Kertajati	46,0	640,5
5	Tarisi	Jatitujuh	Babajurang	34,0	320,0
6	Cimaneuh	Kertajati	Bantarjati	30,0	418,5
7	Kedung Bima	Kertajati	Mekarmulya	27,0	405
8	Sanghiang	Banjaran	Sanghiang	26,4	2.900,0
9	Baregbeg I	Jatitujuh	Jatitengah	20,0	500,0
10	Citamiang	Kertajati	Kertajati	19,0	123,4
11	Cigambir	Kertajati	Mekarmulya	12,5	187,5
12	Cicabe	Kertajati	Pasiripis	12,0	150,0

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

Terdapat 84 (delapan puluh empat) embung di Kabupaten Majalengka.

Tabel 2.22**Daftar Embung di Kabupaten Majalengka**

No.	Kecamatan	Jumlah	No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Argapura	2	14.	Ligung	5
2.	Banjaran	2	15.	Maja	2
3.	Bantarujeg	1	16.	Majalengka	2
4.	Cigasong	1	17.	Malausma	3
5.	Cikijing	3	18.	Palasah	7
6.	Cingambul	4	19.	Panyingkiran	3
7.	Dawuan	0	20.	Rajagaluh	1
8.	Jatitujuh	7	21.	Leuwimunding	6
9.	Jatiwangi	4	22.	Sindang	1
10.	Kadipaten	1	23.	Sindangwangi	7
11.	Kasokandel	2	24.	Sukahaji	5
12.	Kertajati	7	25.	Sumberjaya	4
13.	Lemahsugih	2	26.	Talaga	3
Total					84

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.



Sebanyak 5 (lima) embung yang mempunyai luasan lebih dari 10.000 m² atau lebih dari 1 ha, yaitu:

Tabel 2.23

Daftar Embung di Kabupaten Majalengka Luas Lebih Dari 1 ha

No.	Nama Embung	Lokasi		Luas (Ha)
		Kecamatan	Desa	
1.	Cijingga	Kertajati	Mekarmulya	2,0
2.	Cubluk	Kertajati	Kertajati	1,7
3.	Palabuan/Cigayam	Sukahaji	Palabuan	1,6
4.	Cipelang Mati	Kertajati	Kertawinangun	1,5
5.	Wanayasa	Palasah	Tarikolot	1,3

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

B. Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan

Sektor pertanian dan perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Majalengka, terlihat dari masih luasnya hamparan lahan pertanian dan perikanan, masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani/nelayan, serta dalam struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masih menduduki posisi di tiga besar dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha.

1. Tanaman Pangan

- Padi : Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, dan Kadipaten
- Jagung : Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, Malausma
- Kedelai : Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati, Sukahaji

2. Hortikultura

- Bawang Merah : Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh, Majalengka
- Cabe Merah : Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih, Cikijing
- Mangga Gedong Gincu : Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung, Jatitujuh, Kertajati



- d. Durian : Kecamatan Sindangwangi, Rajagaluh, Sindang, Sukahaji

3. Perkebunan

- a. Teh : Kecamatan Lemahsugih, Rajagaluh
b. Tembakau : Kecamatan Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih
c. Kopi : Kecamatan Lemahsugih, Argapura
d. Cengkeh : Lemahsugih, Argapura, Bantarujeg, Maja
e. Tebu Rakyat : Kertajati, Ligung, Leuwimunding, Jatitujuh

4. Peternakan

- a. Sapi potong : Kecamatan Lemahsugih, Kertajati, Majalengka, Cingambul
b. Domba : Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Lemahsugih, Ligung
c. Ayam ras pedaging : Kecamatan Cikijing, Cingambul, Talaga, Sindangwangi, Banjaran
d. Sapi perah : Kecamatan Banjaran

5. Perikanan

- a. Ikan mas : Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura, Rajagaluh
b. Ikan nila : Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding
c. Ikan gurami : Kecamatan Sdwangi, Lwmunding, Palasah
d. Ikan lele : Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh, Ligung

6. Potensi Sektor Kehutanan

Berdasarkan fungsinya luas hutan di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan
Di Kabupaten Majalengka

No.	Fungsi Hutan	Luas (ha)
1.	Hutan produksi	11.058,00
2.	Hutan produksi tetap	1.224,77
3.	Hutan produksi terbatas	2.627,00
4.	Hutan negara	14.910,45
5.	Hutan lindung	5.486,33
Total		35.306,55

Sumber : <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/luas-kawasan-hutan-berdasarkan-fungsi-hutan-di-jawa-barat>, Tahun 2017.



Selain itu juga di Kabupaten Majalengka terdapat Taman Nasional Gunung Ciremai seluas 6.029 ha.

7. Potensi Wisata Alam

Kabupaten Majalengka memiliki beberapa tempat tujuan (destinasi) wisata alam yang menarik, yaitu:

Tabel 2.25
Daftar Wisata Alam di Kabupaten Majalengka

NO.	KECAMATAN	NO.	DAYA TARIK WISATA	DESA	JENIS
1.	Lemahsugih	1	Situ Cikencong	Desa Cipasung	Alam
		2	Curug Tapak Kuda Simpurn	Desa Sadawani	Alam
		3	Bantar Merak High Land	Desa Bantar Merak	Alam
		4	Gunung Cakra Buana	-	Alam
		5	Batu Uncal	Sukamaju	Alam
		6	Kebun Teh Cipasung	Desa Cipasung	Pertanian
2.	Bantarujeg	7	Pesona Gunung Bitung	-	Alam
3.	Malausma	8	Situ Batu	Malausma	Alam
		9	Kebun Teh	Desa Cimuncang	Pertanian
4.	Cikijing	10	Bukit Pohon Jomblo, Perkebunan Buah Kesemek	Cipulus	Alam
		11	Puncak Ciinjuk	Cipulus	Alam
		12	Kanaga Hill	Ciinjuk	Alam
5.	Cingambul	13	Air Terjun Cibali	Desa Cikondang	Alam
		14	Situ Nyi Mas Cincin/Jahim	Desa Cinta Asih	Alam
		15	Mbung Jahim		Alam
6.	Talaga	16	Air Terjun Cilutung	Desa Campaga	Alam
		17	Curug Emas	Talaga Kulon	Alam
7.	Banjaran	18	Situ Sahiang	Desa Sangiang	Alam
		19	Curug Remis		Alam
		20	Curug Cingeunclang		Alam
		21	Curug Miami	Sunia Baru	Alam
		22	Pohon Cinta	Sunia	Alam
		23	Panorama Alam Sawiah	-	Alam
8.	Argapura	24	Curug Muara Jaya	Desa Argamukti	Alam
		25	Gua Lalai	Desa Sukadana	Alam
		26	Grand Canyon		Alam
		27	Curug Ibum		Alam
		28	Bukper Cipanten	Desa Argapura	Alam
		29	Situ Ciberut	Desa Mekarwangi	Alam



NO.	KECAMATAN	NO.	DAYA TARIK WISATA	DESA	JENIS
		30	Curug Cicangkrung	Desa Apuy	Alam
		31	Gunung Sela	-	Alam
		32	Curug Sawer	Desa Argalingga	Alam
		33	Lembah Cibunut	Cibunut	Alam
		34	Panorama Alam Terasering Panyaweuyan	Desa Argamukti	Pertanian
		35	Panorama Sawah	Desa Heubeulisuk	Pertanian
		36	Panorama Gunung dan Terasering	Panyaweuyan, Cibuluh	Pertanian
		37	Pendakian Gunung Ciremai	Desa Argamukti	Cagar Alam
9.	Maja	38	Curug Goong	Desa Nunuk	Alam
		39	Curug Mahpar	Desa Cipicung	Alam
		40	Curug Puntang, Hutan Pinus	Cengal	Alam
		41	Bukit Untuk Kemah, Pinus	Anggrawati	Alam
		42	Panorama Cikebo	Desa Tegal Sari	Alam
10.	Majalengka	43	Paralayang Gunung panteun	Desa Sindamukti	Alam
		44	Curug Semping		Alam
		45	Curug Cilutung		Alam
		46	Curug Situ Hilang	Desa Kulur	Alam
		47	Gunung Karang (Stone Garden)	Desa Babakan Jawa	Alam
		48	Curug Monyet	Cibodas	Alam
11.	Sukahaji	49	Embung	Desa Pelabuan	Alam
		50	Curug Ciborete		Alam
		51	Buyut Buntu	Ciomas	Religi
12.	Sindang	52	Bukit Alam Hejo	Desa Pasir Ayu	Alam
		53	Situ Cipanten	Desa Gunung kuning	Alam
13.	Rajagaluh	54	Hutan Prabu Siliwangi/Talaga Emas	Desa pajajar	Alam
		55	Situ Janawi	Desa Payung	Alam
		56	Curug Cinini		Alam
		57	Batu Nyongclok		Alam
		58	Pendakian Sadarehe		Alam
		59	Cikadongdong River Tubing		Alam
		60	Curug Tonjong	Desa Teja	Alam
		61	Terasering Sawah Nangkarak	Desa Payung	Alam agro
		62	Edelweiss Cidewata		Agro



NO.	KECAMATAN	NO.	DAYA TARIK WISATA	DESA	JENIS
		63	Sentra Bibit Buah Dan Sayuran	Desa Payung	Agro
14.	Sindangwangi	64	Talaga Herang	Lengkong Kulon	Alam
		65	Wisata Argo Batu Luhur	Desa Jerukleueut	Alam
		66	Talaga Leutik		Alam
		67	Talaga Cileuweung		Alam
		68	Talang Loa		Alam
		69	Situ Resmi		Alam
		70	Situ Cikuda	Desa Padaherang	Alam
		71	Talaga Biru		Alam
		72	Talaga Beunteur		Alam
		73	Air Terjun Leles		Alam
		74	Air Terjun Baligo		Alam
		75	Gua Kejayaan		Alam
		76	Sumber Air Hangat	Balagedog	Alam
		77	Kebun Durian	Ujungberung	Alam
		78	Track Hiking		Alam
		79	Batu Luhur	Sindangwangi	Alam
		80	Situ cibulakan	Desa Bantaragung	Alam
		81	Situs Batu Asahan		Alam
		82	Buper Awi Lega		Alam
		83	Curug Leles		Alam
		84	Tangga Seribu		Alam
		85	Pasir Cariu		Alam
		86	Curug Linggi		Alam
		87	Balong Kamulyaan		Alam
		88	Puncak Palasan		Alam
		89	Argo Sinapeul		Alam
		90	Curug Cipeuteuy		Alam
		91	Terasering	Sindangwangi	Pertanian
		92	Terasering Ciboer	Bantaragung	Pertanian
		93	Sawah Cukang Baok		Pertanian
		94	Pembibitan Buah-Buahan	Buah Kapas	Pertanian
		95	Potensi Wisata Perikanan	Lengkong Kulon	Pertanian
		96	Potensi Wisata Perikanan	Lengkong Wetan	Pertanian
15.	Leuwimunding	97	Cadas Gantung	Desa Mirat	Alam
		98	Bukit Petapaan	Parung Jaya	Alam
		99	Buper Cibaringkeng	Desa Leuwi Kujang	Alam
16.	Kasokandel	100	Gunung Batu Tilu	Desa Girimukti	Alam
17.	Kertajati	101	Situ Cijaura	KertaJati	Alam
18.	Jatitujuh	102	Bendung Rentang	Panongan	Alam
		103	Situ Anggrahan	Pilangsari	Alam
		104	Situ Ranca Beureum	-	Alam



NO.	KECAMATAN	NO.	DAYA TARIK WISATA	DESA	JENIS
19.	Panyingkiran	106	Mangga Gedong Gincu	Pasir Muncang	Pertanian
		107	Perkebunan Panyingkiran		Pertanian
20.	Ligung	109	Mangga Gedong Gincu		Pertanian

Sumber : Naskah Akademik Raperda Ripparkab Majalengka, Tahun 2021.

8. Potensi Sektor Pertambangan

Kabupaten Majalengka mempunyai potensi bahan galian mineral tambang yang cukup besar, antara lain :

Tabel 2.26
Daftar Potensi Bahan Galian Tambang di Kabupaten Majalengka

No.	Bahan Tambang	Lokasi		Cadangan Hipotetik (juta m ³)	Pemanfaatan
		Kecamatan	Desa		
1.	Andesit	Talaga	Mekarharja, Campaga	6,646	Andesit Blok
		Bantarujeg	Salawangi, Cimanggu Hilir	4,914	Split
		Dawuan	Gn. Tempuh	0,270	Batu Belah
		Majalengka	Gn. Balukbuk, Gn. Haur	3,915	Batu Belah, Split
2.	Lempung	Jatiwangi	Loji, Jatisura, Sukaraja, Cibentar	22	Genteng, Bata
		Sukahaji	Palabuan, Padahanten	7	Genteng, Bata
		Panyingkiran	Karyamukti, Cijurey, Panyingkiran	9	Genteng, Bata
		Jatitujuh	Sumber	2,25	Genteng, Bata
		Palasah	Palasah	5,625	Genteng, Bata
		Ligung	Majasari	4,5	Genteng, Bata
		Sumberjaya	Lojikobong, Sambeng	10	Genteng, Bata
3.	Pasir / Sirtu (endapan alluvial)	Jatitujuh	S. Cimanuk		Konstruksi
		Kertajati	Pakubeureum		Konstruksi
		Kadipaten	Bbk. Anyar		Konstruksi
		Panyingkiran	Pataking, Bonang, Cijurey		Konstruksi
		Jatiwangi	S. Cikeruh, Cibentar		Konstruksi
		Sukahaji	S. Cijurey, S. Cideres		Konstruksi
		Majalengka	S. Cilutung		Konstruksi
4.	Pasir (endapan vulkanik)	Sumberjaya	Panjalin Kidul		Konstruksi
5.	Tras	Talaga	Cimeong		Batako
		Maja	Cihaurbeuti, Cinangka		Batako
6.	Gamping	Cigasong	Baribis		Kapur Tohor



7.	Kalsedon	Maja	Cimeong, Sukaesmi		
8.	Gypsum	Majalengka	Cibodas	20	
		Maja	Nunuk		

Sumber : Kegiatan Pemetaan Reklamasi Lahan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Majalengka, Tahun 2008.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumberdaya manusia atau aspek kependudukan di Kabupaten Majalengka mencakup data jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk dan sebarannya, kecenderungan konsentrasi penduduk, struktur penduduk menurut mata pencaharian serta tingkat angkatan kerja dan orientasi pergerakan penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mencapai 1.369.569 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,09%. Sempat terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2019 dikarenakan migrasi dari daerah-daerah sekitar Kabupaten Majalengka sebagai dampak dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pembangunan industri di Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk, LPP, dan Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.315.272	1.323.854	1.328.894	1.345.378	1.369.569
	Laki-laki (Jiwa)	662.772	665.612	668.505	677.169	689.351
	Perempuan (Jiwa)	652.500	658.242	660.389	668.209	680.218
2.	<i>Sex Ratio</i>	101,57	101,12	101,23	101,34	101,34
3.	LPP (%)	0,56	0,65	0,38	1,24	1,09
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.092	1.099	1.104	1.117	1.138

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.28
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Lemahsugih	34.403	33.313	67.716	103,27
2.	Bantarujeg	24.875	24.651	49.526	100,91
3.	Cikijing	36.235	35.332	71.567	102,56
4.	Talaga	25.762	25.113	50.875	102,58
5.	Argapura	19.234	18.815	38.049	102,23
6.	Maja	27.350	27.083	54.433	100,99
7.	Majalengka	38.027	38.175	76.202	99,61
8.	Sukahaji	25.214	25.160	50.374	100,21
9.	Rajagaluh	24.554	24.346	48.900	100,85
10.	Leuwimunding	33.858	32.882	66.740	102,97
11.	Jatiwangi	47.522	46.636	94.158	101,90
12.	Dawuan	24.632	24.405	49.037	100,93
13.	Kadipaten	23.967	23.450	47.417	102,20
14.	Kertajati	24.971	24.819	49.790	100,61
15.	Jatitujuh	28.662	28.917	57.579	99,12
16.	Ligung	34.108	34.294	68.402	99,46
17.	Sumberjaya	33.854	33.472	67.326	101,14
18.	Panyingkiran	16.879	16.780	33.659	100,59
19.	Palasah	27.919	27.688	55.607	100,83
20.	Cigasong	19.622	19.344	38.966	101,44
21.	Sindangwangi	18.256	17.789	36.045	102,63
22.	Banjaran	13.126	13.248	26.374	99,08
23.	Cingambul	23.188	22.646	45.834	102,39
24.	Kasokandel	27.830	27.510	55.340	101,16
25.	Sindang	8.737	8.787	17.524	99,43
26.	Malasma	26.566	25.563	52.129	103,92
Kabupaten Majalengka		689.351	680.218	1.369.569	101,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebanyak 1.369.569 jiwa, masih didominasi penduduk laki-laki (689.351 jiwa) dibandingkan perempuan (680.218 jiwa, dengan sex ratio 101,34, artinya dari 100 orang perempuan terdapat 101 orang laki-laki. Konsentrasi jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Jatiwangi (94.158 jiwa) dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Sindang (17.542 jiwa).



2.1.2.2 Karakteristik Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik Penduduk berdasarkan Pendidikan, salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf, artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus didukung oleh sarana pendidikan yang memadai, berikut jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Kabupaten Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
Tahun 2020 - 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tidak/Belum Punya Ijazah SD	26,92	26,80	26,83	5,67	6,16
2.	SD	41,14	39,12	38,64	48,35	47,08
3.	SLTP	16,36	16,69	16,84	21,88	22,12
4.	SLTA	12,18	13,62	13,86	18,94	19,37
5.	D I/ D3	0,93	0,95	0,95	1,21	1,19
6.	S1	2,35	2,68	2,74	3,76	3,88
7.	S2	0,12	0,13	0,13	0,18	0,19
8.	S3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari tingkat Pendidikan dan ijazah yang dimiliki, penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 masih didominasi lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 88,57 % (Lulusan SD :47,08%, SLTP : 22,12% dan SLTA : 19,37%), sementara lulusan Diploma dan Sarjana sebanyak 5,27% (Lulusan DI/D3: 3,88%, S1 : 0,19%, S2 : 0,19% dan S3 : 0,01%).



2.1.2.3 Struktur Penduduk dan Piramida Penduduk

Struktur penduduk adalah gambaran komposisi penduduk suatu wilayah berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tahun 2025, penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	0-4	48.329	45.508	93.747
2.	5-9	55.398	52.088	107.486
3.	10-14	57.602	53.673	111.275
4.	15-20	49.221	47.366	96.587
5.	21-24	55.156	53.568	108.724
6.	25-29	53.310	50.220	103.530
7.	30-34	49.536	47.309	96.845
8.	35-39	46.199	46.309	92.508
9.	40-44	54.663	56.284	110.947
10.	45-49	50.019	51.967	101.986
11.	50-54	44.975	47.449	92.424
12.	55-59	37.452	38.607	76.059
13.	60-64	30.828	31.311	62.139
14.	65-69	22.974	23.011	45.985
15.	70-74	17.052	16.602	33.654
16.	75 +	16.727	18.946	35.673
	Jumlah	689.351	680.218	1.369.569

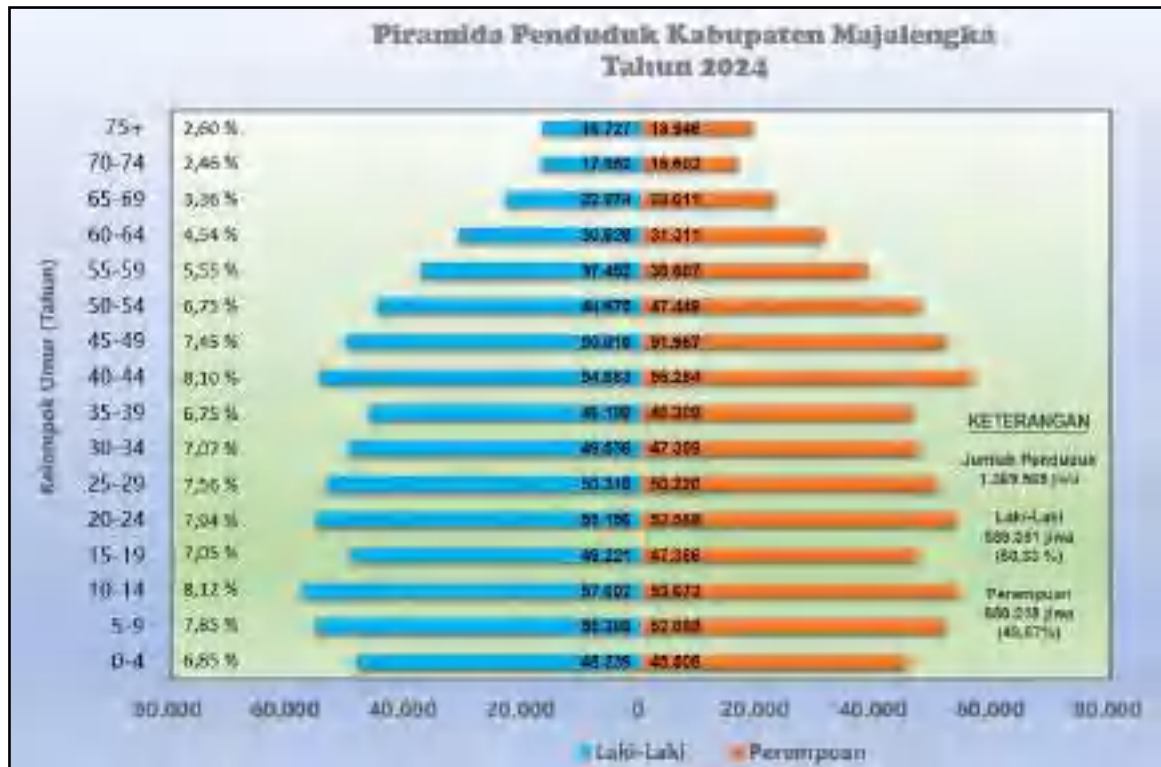
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data di atas, penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 masih didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 941.749 jiwa atau 68,76%, sementara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan usia >65 tahun) sebanyak 427.820 jiwa atau 31,24% dari jumlah penduduk.

Adapun Piramida Penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu

populasi atau kelompok, maka piramida penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Proyeksi Penduduk dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia

Berikut ini proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2025-2030 berdasarkan hasil sensus penduduk yang diselenggarakan oleh BPS tahun 2020.



Tabel 2.31
Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka
Menurut Kelompok Umur, 2025–2030 (Ribu Jiwa)

NO.	UMUR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	0–4	104,67	103,61	102,64	101,73	100,87	100,07
2	5–9	93,48	96,2	98,76	101,1	103,13	104,68
3	10–14	95,64	94,75	94,02	93,52	93,32	93,52
4	15–19	101,14	99,89	98,66	97,47	96,37	95,38
5	20–24	105,51	104,92	104,06	102,99	101,82	100,60
6	25–29	103,72	104,24	104,7	105,02	105,10	104,88
7	30–34	100,31	100,89	101,49	102,1	102,71	103,28
8	35–39	98,38	98,11	98,24	98,7	99,29	99,91
9	40–44	102,73	102,03	100,9	99,59	98,45	97,72
10	45–49	98,88	99,86	100,75	101,42	101,74	101,59
11	50–54	90,27	92,00	93,48	94,76	95,89	96,92
12	55–59	76,91	78,84	81,00	83,25	85,42	87,38
13	60–64	66,03	67,41	68,69	69,96	71,38	73,00
14	65–69	52,57	54,21	55,86	57,48	59,02	60,49
15	70–74	37,91	39,39	40,86	42,34	43,82	45,31
16	75+	35,62	38,27	41,03	43,86	46,79	49,80
	Total	1.363,77	1.374,62	1.385,14	1.395,29	1.405,12	1.414,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020–2035 | Hasil Sensus Penduduk 2020).

Gambar 2.10
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka
Tahun 2025 - 2030



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020–2035 | Hasil Sensus Penduduk 2020)



Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2025-2030 sebagaimana tabel dan gambar di atas, maka pada tahun 2030 jumlah penduduk Kabupaten Majalengka diproyeksikan berjumlah 1.414.530 jiwa, komposisi penduduk masih didominasi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 960.660 jiwa atau 67,91%, sementara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan usia >65 tahun) sebanyak 453.870 jiwa atau 32,09 % dari jumlah penduduk, sehingga dengan prosentase usia penduduk produktif yang lebih besar dari pada usia tidak produktif, maka sangat mendukung pembangunan di Kabupaten Majalengka, terutama dari segi ketersediaan sumber daya manusia.

2.1.2.5 Keberadaan Masyarakat Adat

Kasepuhan Nunuk adalah warga lokal dan bagian dari Kerajaan Talaga yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Kampung Nunuk merupakan kampung berpenghuni pertama kali, dan kemudian berkembang ke Kampung Sanding, Kadut, serta kampung lainnya. Kata Nunuk diambil dari nama pohon/Buah Nunuk yang banyak tumbuh di wilayah adat Kasepuhan Nunuk. Kata Nunuk berasal dari kata camu'uk, cinunuk yang berarti diam. Wilayah Adat Kasepuhan Nunuk memiliki areal yang sangat luas dimana setiap wilayah di Nunuk, diberi nama untuk memudahkan dalam penyebutan tempat. Nama-nama tempat tersebut adalah nama blok yang merupakan bagian dari Wilayah kasepuhan Nunuk. Nama-nama tempat tersebut juga disepakati sebagai bagian dari tata batas Wilayah Kasepuhan Nunuk. Wilayah adat kasepuhan Nunuk meliputi sembilan kampung/blok yaitu:

1. Nunuk
2. Babakan
3. Cirelek
4. Sanding
5. Kadut
6. Citayeum
7. Cikawoan
8. Cinangka
9. Lengkong



Hubungan Kasepuhan Nunuk dengan Kerajaan Talaga mempunyai hubungan yang saling mengikat satu sama yang lainnya terutama dalam acara penyiraman benda-benda pusaka. Kerajaan Talaga menganut Tri Tangtu, yaitu sistem pembagian kekuasaan yang didasarkan pada sejarah berdirinya kerajaan Talaga. Tri Tangtu dimaksud adalah pangwastu, Juru Tangtu dan pangestu. Kasepuhan Nunuk merupakan bagian dari Juru Tangtu dimana perannya yang menentukan waktu terkait kapan dilaksanakannya upacara nyiramkeun pusaka atau memulai penanaman untuk makaya. Keputusan waktu yang ditentukan oleh Kasepuhan Nunuk bersifat mutlak dan harus diikuti oleh seluruh pengikut Kerajaan. Kehidupan warga Kasepuhan Nunuk yang taat dan menghormati alam dan lingkungan selama bertahun-tahun telah menjadikan wilayah Kasepuhan Nunuk menjadi daerah yang subur makmur gemah ripah loh jinawi. Mereka sangat menghormati tatali paranti karuhun sebagai tatanan pedoman atau papagon yang dianut dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang diatur dalam ketentuan adat Kasepuhan Nunuk. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, Kasepuhan Nunuk memiliki papagon yaitu: Gunung kayuan, Lamping Awian, Datar Imahan, Legok Balongan (Hutan ditanami kayu, Lereng ditanami bambu, Dataran untuk pemukiman dan lahan basah untuk sawah dan kolam). Wilayah Nunuk merupakan penghasil aneka rupa hasil bumi berupa pangan, sandang dan papan. Budaya berladang atau huma merupakan aktivitas mayoritas masyarakat Kasepuhan Nunuk. Ketentuan waktu berladang atau ngahuma ditentukan oleh Sesepeuh Adat melalui ritual Guar Bumi. Kehidupan masyarakat warga kasepuhan Nunuk adalah masyarakat agraris dengan sistem berladang atau ngahuma yang bersifat menetap.

Struktur adat Kasepuhan Nunuk meliputi: Ketua Adat Desa (para Tetua Kampung/Adat), Sesepeuh Lembur/Kuncen dan Jangjang Karawat. Jangjang karawat merupakan petugas adat Kasepuhan Nunuk dalam kegiatan adat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut: Ngajaga Pusaka (laki-laki), Ngala Cai (laki-laki), Ngayah Pusaka (laki-laki), Tenun Gadod (perempuan), Nyawen (laki-laki), Nutu/Tutunggulan (perempuan). Mekanisme pemilihan Ketua Adat



Desa dilaksanakan melalui riuangan adat yang dihadiri oleh Seseput/Tokoh Nunuk, Kepala Desa Nunuk, Seseput Lembur/Kuncen, tokoh pemuda, tokoh agama. Sementara untuk pemilihan Seseput Lembur/Kuncen diatur oleh Ketua Adat Desa melalui mekanisme riuangan adat. Masa bakti Ketua Adat Desa maupun Seseput Lembur/Kuncen adalah hingga yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Syarat untuk menjadi Ketua Adat Desa sangat dipertimbangkan memiliki garis keturunan dari Kuncen atau Tokoh Adat, namun hal tersebut tidak berlaku untuk pemilihan Seseput lembur/Kuncen. Seseput lembur/Kuncen dipilih berdasarkan pertimbangan kemauan, memiliki kepribadian yang baik, dan sanggup menjalankan tugas sebagai seseput lembur atau kuncen.

Pembagian tugas dan fungsi pemangku adat Kasepuhan Nunuk adalah bersifat teritorial. Dimana peran Ketua adat, seseput lembur atau kuncen mempunyai kewenangan dalam mengatur, menjaga atau melakukan tugas dan fungsinya di wilayahnya masing-masing. Keberadaan ketua Adat Desa mempunyai tugas untuk mengharmonisasi para seseput lembur atau kuncen serta memimpin upacara untuk tingkat desa.

Aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan Wilayah dan Sumber daya alam yaitu: Pamali, Tabur, Hajat Uar, Pamunah, Ngabungbang, Nyungsum, Guar Bumi, Pareresan, Buku Taun. Aturan Adat terkait Pranata Sosial yaitu: Pamali, Ngageuing, Hukuman Ghoib. Belum ada penerapan sanksi lahir, namun Kasepuhan Nunuk mempercayai jika hukuman atas pelanggaran adat/budaya atau tindakan yang melanggar akan diberi sanksi ghoib.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah



faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

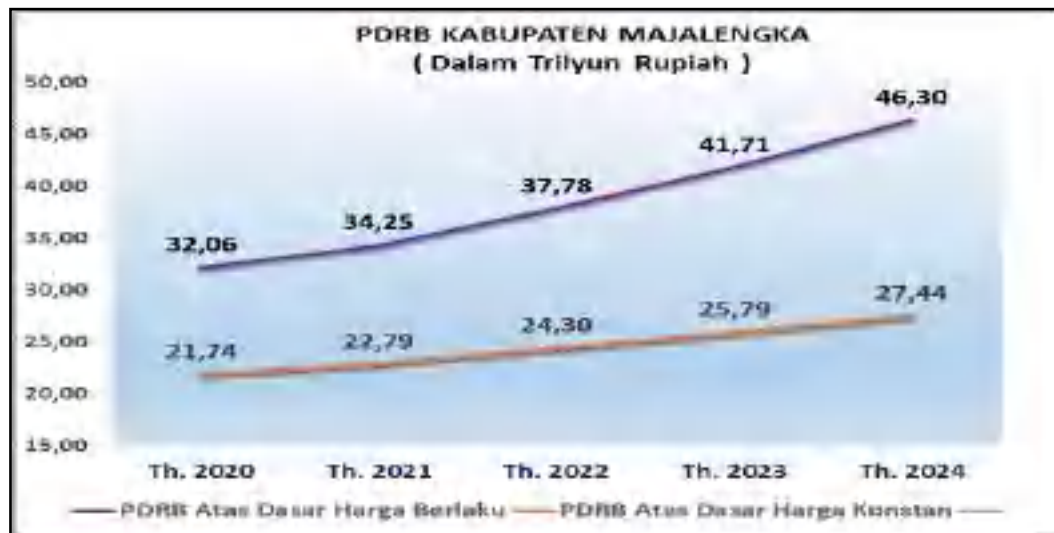
PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional/regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Majalengka selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 32,06 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 46,30 triliun pada tahun 2024. Sementara Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 (PDRB ADHK) juga selalu meningkat dalam lima tahun terakhir, dari Rp 21,74 triliun pada tahun 2020 menjadi 27,44 triliun pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK (Laju Pertumbuhan Ekonomi) pada tahun 2024 sebesar 6,38%.

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Peningkatan PDRB tersebut menunjukkan peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Majalengka disebabkan mulai melandainya kondisi pandemi. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sebelumnya menjadi sektor yang paling banyak menyumbang jumlah total seluruh PDRB di Kabupaten Majalengka, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 ini posisinya tergeser oleh sektor Industri Pengolahan.

Terdapat 4 sektor yang dominan dalam menyumbang nilai PDRB yaitu sektor Industri Pengolahan (25,94%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,36%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%), dan Konstruksi (11,53%).

Tabel 2.32
Nilai Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka (Juta Rupiah) Tahun 2020 - 2024

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4.116.819,10	7.205.171,90	4.152.808,92	7.239.252,07	4.388.830,50	8.020.416,60	4.467.110,00	8.740.720,00	4.135.790,00	8.500.120,00



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	380.757,07	434094,2	380.937,13	477.363,60	380.664,20	513.037,21	373.560,00	494.120,00	383.470,00	485.230,00
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.851.513,30	7.052.656,30	5.447.301,53	8.167.474,92	6.173.712,69	9.501.191,67	6.695.610,00	10.665.880,00	7.299.690,00	12.010.680,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	19.757,50	28.222,70	22.581,65	32.274,59	25.168,13	36.215,09	27.890,00	40.540,00	30.980,00	44.960,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	13.917,80	21.030,70	16.953,77	27.742,87	19.498,46	32.238,47	21.270,00	35.460,00	23.270,00	41.040,00
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.699.491,40	3.764.137,60	2.842.509,74	4.170.900,57	2.858.901,81	4.428.337,87	3.007.940,00	4.809.000,00	3.217.960,00	5.195.150,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.403.003,30	4.601.445,90	3.504.158,05	4.821.564,99	3.642.339,37	5.183.571,93	3.816.200,00	5.648.034,00	3.988.720,00	6.047.400,00
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	771.718,60	1.161.084,90	767.098,58	1.187.180,90	842.092,70	1.364.746,67	1.044.190,00	1.839.350,00	1.548.810,00	3.592.110,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	653.263,30	925.088,10	644.936,810	943.267,22	707.643,05	1.080.190,50	784.360,00	1.211.630,00	860.540,00	1.371.400,00
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.183.794,3	1.164.249,8	1.267.351,34	1.226.678,17	1.336.248,51	1.277.962,12	1.400.170,00	1.340.200,00	1.512.420,00	1.452.410,00



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	611.875,30	862.382,90	631.871,12	917.180,24	636.315,93	997.561,15	661.190,00	1.075.240,00	682.480,00	1.162.910,00
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	294.050,60	354.982,40	318.805,26	385.824,82	338.550,15	422.482,11	357.000,00	451.200,00	379.540,00	480.720,00
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	68.549,40	98.104,00	70.674,97	104.460,91	77.468,16	119.159,34	84.020,00	134.870,00	89.000,00	149.980,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	622.869,90	1.041.440,40	612.568,81	1.048.206,49	605.996,90	1.034.076,73	621.900,00	1.072.590,00	669.920,00	1.153.050,00
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.220.914,20	2.172.685,60	1.238.966,83	2.247.016,22	1.303.364,05	2.340.003,60	1.383.900,00	2.548.860,00	1.474.630,00	2.764.090,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	235.109,30	327.764,70	250.703,88	356.176,06	263.313,21	375.555,31	275.500,00	405.640,00	291.770,00	438.080,00
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	589.200,40	840.665,50	618.525,86	893.053,18	700.666,20	1.052.089,62	771.060,00	1.199.380,00	849.940,00	1.413.560,00
	PDRB	21.736.604,90	32.055.207,90	22.788.754,26	34.245.617,82	24.300.774,06	37.778.836,04	25.793.240,00	41.713.450,00	27.438.930,00	46.302.880,00

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Sebelum tahun 2021, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi sektor yang berkontribusi pada PDRB Kabupaten Majalengka selain 3 sektor besar lainnya, yaitu sektor



Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Industri Pengolahan; dan sektor Konstruksi. Keempat sektor tersebut menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Majalengka, namun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terjadi perubahan, dominasi kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tergeser dengan meningkatnya kontribusi sektor Industri Pengolahan, ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan kegiatan perekonomian daerah dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Majalengka (Persen)
Tahun 2020 - 2024

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	18,94	22,48	18,22	21,14	18,06	21,23	17,32	20,95	15,07	18,36
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,75	1,35	1,67	1,39	1,57	1,36	1,45	1,18	1,40	1,05
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	22,32	22,00	23,90	23,85	25,41	25,15	25,96	25,57	26,60	25,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,11	0,10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	12,42	11,74	12,47	12,18	11,76	11,72	11,66	11,53	11,73	11,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	15,66	14,35	15,38	14,08	14,99	13,72	14,80	13,54	14,54	13,06



No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	3,55	3,62	3,37	3,47	3,47	3,61	4,05	4,41	5,64	7,76
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,01	2,89	2,83	2,75	2,91	2,86	3,04	2,90	3,14	2,96
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,45	3,63	5,56	3,58	5,50	3,38	5,43	3,21	5,51	3,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,81	2,69	2,77	2,68	2,62	2,64	2,56	2,58	2,49	2,51
12.	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,35	1,11	1,40	1,13	1,39	1,12	1,38	1,08	1,38	1,04
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,87	3,25	2,69	3,06	2,49	2,74	2,41	2,57	2,44	2,49
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,62	6,78	5,44	6,56	5,36	6,19	5,37	6,11	5,37	5,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,08	1,02	1,10	1,04	1,08	0,99	1,07	0,97	1,06	0,95
17.	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,71	2,62	2,71	2,61	2,88	2,78	2,99	2,88	3,10	3,05
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada pada angka 4,95 persen serta nasional yang berada pada angka 5,03 persen, meningkat dibandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2023 sebesar 6,15%, namun sedikit lebih rendah daripada LPE tahun 2022 sebesar 6,63%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2024 merupakan LPE tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE kedua adalah Kabupaten Cirebon (5,83%) dan urutan ketiga adalah Kabupaten Kuningan (5,61%), LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 4,95%.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu tumbuh sebesar 24%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 10,84%), lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas Jasa (tumbuh 10,83%), serta lapangan usaha Jasa Lainnya (tumbuh 10,05%), sementara lapangan usaha Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10 persen, 8,50 persen dan 8,46 persen. Perkembangan Laju pertumbuhan Ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.12
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

c. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.34
Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
2.	Jawa Barat	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64
3.	Majalengka	1,16	1,81	4,48	3,22	1,60

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021-2025, dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.13
Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.



Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka memiliki nilai inflasi sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah pusat sebesar 3 ± 1 persen. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan kenaikan melebihi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk segera mengendalikan inflasi. Kenaikan nilai inflasi tahun 2022 disebabkan berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global, faktor lain dari pendorong kenaikan inflasi barang, karena terjadinya gangguan pasokan dalam negeri di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabe dan bawang merah akibat permasalahan struktural di sektor pertanian serta cuaca demikian juga ketersediaan antar waktu dan antar daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Majalengka berhasil mengendalikan nilai inflasi sesuai dengan rentang sasaran nasional sebesar $2,5\pm 1\%$.

Tabel 2.35
Data Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Kelompok Pengeluaran IHK	Tingkat Inflasi Year on Year (y-o-y) Kabupaten Majalengka (%)				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Umum (Headline)	1,21	-0.16	0,36	1,70	2,14
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,04	1.34	0,77	1,25	2,17
Pakaian dan Alas Kaki	3.4	3.7	4,54	3,70	4,31
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-8.49	-16.67	-11,00	-0,03	-0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.66	0.38	0,3	1,06	0,97
Kesehatan	3.14	2.98	2,75	2,73	2,82
Transportasi	0.12	0.6	0,94	-0,23	0,10
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.32	0.21	-0,04	-0,93	-0,82
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1.4	2.23	2,51	1,74	2,35
Pendidikan	1.34	1.34	1,34	1,34	1,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1.31	1.41	1,38	1,45	1,51
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8.95	10.24	10,87	13,02	13,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.



d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Dengan asumsi bahwa, pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB. Angka pendapatan per kapita (PDRB Per Kapita) diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data selengkapnya mengenai PDRB per kapita dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Dan Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020- 2024

No.	Tahun	PDRB Per Kapita ADH Konstan 2010 (Rp)	PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp)
1.	2020	16.704.000	24.708.000
2.	2021	17.329.000	25.975.000
3.	2022	18.297.000	28.446.662
4.	2023	19.240.000	31.137.604
5.	2024	20.287.000	34.233.994

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Catatan : Tahun 2023 angka sementara, tahun 2024 angka sangat sementara

Dari tabel di atas, rata-rata pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku (PDRB Per Kapita ADHB) selama kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, PDRB Perkapita ADHB meningkat sebesar Rp 3,096 juta (9,94%) dari Rp 31,138 juta pada tahun 2023 menjadi Rp 34,234 juta pada tahun 2024. Sementara PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (PDRB Per Kapita ADHK) tahun 2024

sebesar Rp 20,287 juta meningkat sebesar Rp 1,053 juta (5,44%) dari tahun 2023 sebesar Rp 19,240 juta.

e. Gini Ratio

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Gini Ratio, atau yang juga disebut dengan Indeks Gini atau Koefisien Gini, adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Nilai penghitungan Gini Rasio berada pada besaran 0 dan 1, makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Data Gini ratio di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.14
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas, angka Gini Ratio di Kabupaten Majalengka selama 5 tahun terakhir masih bersifat fluktuatif, antara tahun 2020-2022 angkanya cenderung naik dari 0,336 poin pada tahun 2020 menjadi 0,367 poin pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 0,342 poin, namun pada tahun 2024 angkanya meningkat



lagi menjadi 0,354 poin, artinya kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka meningkat.

Adapun data perbandingan antara angka Gini Ratio Kabupaten Majalengka dengan Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.37
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Gini Ratio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354
Jawa Barat	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421
Nasional	0,381	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio $< 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq$ Gini Ratio $\leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio $> 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2024 menunjukkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka masih tergolong sedang (0,354 poin). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat (0,421) dan Nasional (0,381) walaupun masih dalam kategori sedang.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu **umur** panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),

pengetahuan (*knowledge*), dan **standar hidup layak** (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$.
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$.
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$.
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$.

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.



Perkembangan dimensi-dimensi pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka selama periode 2020-2024 menunjukkan berbagai perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat. Analisis terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup mengungkapkan bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan telah diterapkan secara efektif. melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem pendidikan, dan peningkatan standar ekonomi.

Kabupaten Majalengka telah berhasil mencatat berbagai kemajuan yang berkelanjutan dalam setiap dimensi pembentukan IPM. Ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan IPM dan Dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.38
Perkembangan IPM Kabupaten Majalengka dan Dimensi Penyusunnya Selama Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,22	12,23	12,28	12,26	12,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	9.521	9.591	9.950	10.340	10.842
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,20	69,42	70,18	70,76	71,37

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Majalengka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka tahun 2024 mencapai 71,37 meningkat 0,61 poin atau 0,86 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,76). Selama periode 2021-2024, IPM Kabupaten Majalengka rata-rata meningkat sebesar 0,78 persen per



tahun. Peningkatan IPM Kabupaten Majalengka tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan tertinggi pada dimensi standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,98 tahun, lebih lama 0,25 tahun (0,33 persen) dibandingkan tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023 dari 12,26 tahun menjadi 12,27 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,01 tahun (0,13 persen) dibandingkan tahun 2023 dari 7,52 tahun menjadi 7,53 tahun.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 sebesar Rp 10,84 juta rupiah, meningkat 502 ribu rupiah (4,85 persen) dibandingkan tahun 2023.

Perbandingan angka Indeks Pembangunan Manusia antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	IPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	69,2	69,42	70,18	70,76	71,37
Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majalengka terus meningkat setiap tahunnya, Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,37 poin, meningkat sebesar



0,61 poin atau 1,41 % dibandingkan tahun 2023. Sejak tahun 2020 capaian IPM Kabupaten Majalengka sudah melewati angka 70 poin, sehingga termasuk kategori tinggi, namun masih di bawah capaian IPM Jawa Barat dan Nasional. IPM Kabupaten Majalengka tahun 2024 (71,73) masih di bawah capaian IPM Jawa Barat (74,92) dan Nasional (75,02), sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM Kabupaten Majalengka untuk mengejar ketertinggalan dari capaian IPM rata-rata Jawa Barat dan Nasional.

g. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan

Konsep definisi dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Sebagai contoh interpretasi, Pengeluaran per kapita Majalengka pada tahun 2024 sebesar Rp 10.842.000, artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Majalengka selama setahun adalah Rp 10.842.000. Nilai ini masih di bawah Pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12.157.000 maupun Nasional sebesar Rp 12.341.000. Adapun perbandingan nilai Pengeluaran per Kapita yang



disesuaikan antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40
Perbandingan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	Pengeluaran Per Kapita (000 Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	9.521	9,591	9.950	10.340	10.842
Jawa Barat	10.850	10.934	11.277	11.695	12.157
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

h. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.41
Data Kemiskinan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	138.200	151.100	147.120	138.780	134.580
2.	Persentase Penduduk	%	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82



No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Miskin						
3.	Garis Kemiskinan	(Rupiah/ Kapita/ Bulan)	453.201	466.813	483.319	520.713	547.912

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Selama kurun waktu 2022-2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Majalengka terus menurun, ini mengindikasikan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Majalengka cukup berhasil menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mencapai 134,58 ribu orang (10,82 persen), menurun sebesar 4,16 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2023 yang sebesar 138,78 ribu orang (11,21 persen).

Penurunan prosentase penduduk miskin Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 (10,82%) ini cukup menggembirakan karena merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), namun angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (7,08%) dan Nasional (8,57%).

Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.



Berikut ini perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Angka Kemiskinan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
Jawa Barat	7,88	8,40	8,06	7,62	7,08
Nasional	9,78	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kabupaten Majalengka merupakan wilayah prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem periode Tahun 2022-2024. Persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan dari 3,58 persen di Tahun 2021 menjadi 0.86 persen di Tahun 2023. Namun pada Tahun 2024 meningkat menjadi 1.18 persen, diperkirakan peningkatan ini disebabkan karena pengaruh inflasi. Hal ini bisa terlihat dari angka garis kemiskinan yang meningkat dari Rp. 520.713,00 pada Tahun 2023 menjadi Rp. 547.912,00. Di Tahun 2024. Persentase kemiskinan Ektrem Kabupaten Majalengka dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 masih di atas persentase kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tabel 2.43
Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Angka Kemiskinan Ektrem (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	n/a	3,58	1,96	0,86	1,18
Jawa Barat	n/a	1,79	1,86	0,79	0,78
Nasional	n/a	2,14	2,04	1,12	0,83

Sumber: BPS dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, P3KE, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebesar 1,18 persen. Berdasarkan analisis posisi relatif kabupaten/kota di Jawa Barat, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka masih tinggi yaitu berada di posisi ke-6 tertinggi di Jawa Barat. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Indramayu, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem terendah adalah Kota Bandung dan Kota Sukabumi.

Gambar 2.17
Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten
Majalengka Tahun 2024



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, P3KE, Tahun 2025, Diolah..

Adapun berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2 /KEP.1153-BAPPEDALITBANG /2024 tentang Hasil Pemutakhiran Data Pensasaran Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diketahui bahwa jumlah KK miskin ekstrem sebanyak 2.673 KK, dimana kecamatan dengan KK miskin ekstrem tertinggi adalah Kecamatan Malausma sebanyak 546 KK miskin ekstrem dan Kecamatan Lemahsugih sebanyak 425 KK miskin ekstrem. Sedangkan kecamatan dengan KK miskin ekstrem terendah adalah Kecamatan Jatitujuh sebanyak 14 KK miskin ekstrem dan Kecamatan Kasokandel sebanyak 15 KK miskin ekstrem.

Gambar 2.18
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin Ekstrem Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin Ekstrem
1	ARGAPURA	48
2	BANJARAN	78
3	BANTARUJEG	174
4	CIGASONG	27
5	CIKIJING	115
6	CINGAMBUL	337
7	DAWUAN	23
8	JATITUJUH	14
9	JATIWANGI	17
10	KADIPATEN	29
11	KASOKANDEL	15
12	KERTAJATI	47
13	LEMAHSUGIH	425
14	LEUWIMUNDING	86
15	LIGUNG	28
16	MAJA	103
17	MAJALENGKA	76
18	MALAUSSMA	546
19	PALASAH	66
20	PANYINGKIRAN	27
21	RAJAGALUH	85
22	SINDANG	27
23	SINDANGWANGI	56
24	SUKAHAJI	82
25	SUMBERJAYA	45
26	TALAGA	97
Total		2.673

Sumber: Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.1153-BAPPEDALITBANG/2024 tentang Hasil Pemutakhiran Data Pensasaran Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Majalengka Tahun 2024

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan EYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.19
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Selama periode tahun 2020-2024, angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majalengka selalu meningkat dari 12,22 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,27 tahun pada tahun 2024. Angka ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,27 tahun, atau setara dengan SMA kelas 3. Angka ini meningkat sebesar 0,01 tahun dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan angka Angka Harapan Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
Jawa Barat	12,50	12,61	12,62	12,68	12,80
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Meskipun Angka HLS Kabupaten Majalengka dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat, namun kondisi tahun 2024 masih dibawah angka HLS Jawa Barat (12,80 Tahun) dan angka HLS Nasional (13,21 Tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan MYS Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.20
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Perkembangan MYS atau Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020-2024 menunjukkan grafik yang menanjak yaitu dari 7,27 tahun pada



tahun 2020 menjadi 7,53 tahun pada 2024. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Majalengka secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 1.

Perbandingan angka Angka Rata-Rata Lama Sekolah antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
Provinsi Jawa Barat	8,55	8,61	8,78	8,83	8,87
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka masih berada di bawah angka RLS Jawa Barat (8,87 tahun) dan Nasional (8,85 Tahun).

Upaya peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat selain melalui peningkatan capaian indikator terkait yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), maka diperlukan juga upaya pembangunan literasi di masyarakat, termasuk literasi digital. Pembangunan literasi masyarakat diukur dengan **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**. IPLM terdiri dari 7 (tujuh) indikator pembangunannya yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (IPLM 1);
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2);
3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3);
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat Per Hari (UPLM 4);
5. Perpustakaan Yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (UPLM 5);
6. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6);



7. Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM 7).

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.21
Indeks Pembangunan Literasi Digital Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2023-2024



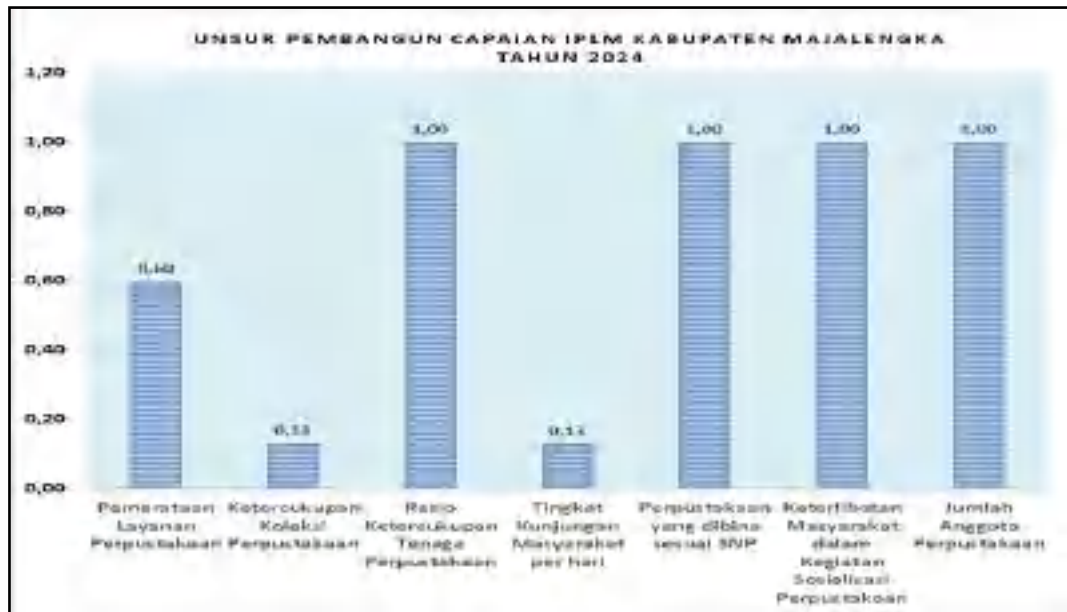
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.

Perkembangan IPLM Kabupaten Majalengka terlihat dinamis, dari 82,99 poin pada tahun 2022 turun menjadi 58,47 poin pada tahun 2023, dan naik lagi menjadi 69,38 poin pada tahun 2024.

Adapun unsur pembangun IPLM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.22
Unsur Pembangun Capaian IPLM Kabupaten Majalengka
Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025.

Tabel 2.46
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Digital Masyarakat (IPLM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerintahan Layanan Perpustakaan	Keterbacaan Koleksi Perpustakaan	Rasio Keterbacaan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SMP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
1	Kota Cirebon	95,37	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Kota Sukabumi	87,81	0,99	0,56	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
3	Kota Bandung	86,82	1,00	0,73	0,73	0,70	1,00	0,93	1,00
4	Indramayu	84,60	1,00	0,53	1,00	0,82	1,00	0,57	1,00
5	Cilegon	82,62	1,00	0,74	1,00	0,04	1,00	1,00	1,00
6	Kota Depok	81,37	0,50	1,00	0,70	0,51	1,00	1,00	1,00
7	Kota Banjar	79,88	1,00	0,32	1,00	0,26	1,00	1,00	1,00
8	Kota Bogor	78,36	0,49	0,16	1,00	0,84	1,00	1,00	1,00
9	Pangandaran	77,16	0,05	0,99	1,00	1,00	0,17	1,00	1,00
10	Kota Cimahi	75,33	0,73	0,52	1,00	0,04	1,00	1,00	1,00
11	Kota Tasikmalaya	72,84	0,60	0,40	1,00	1,00	1,00	0,04	1,00
12	Purwakarta	70,96	0,49	0,19	1,00	0,29	1,00	1,00	1,00
13	Sumedang	70,85	0,80	0,13	1,00	0,04	1,00	1,00	1,00
14	Tasikmalaya	69,95	0,34	0,06	0,49	1,00	1,00	1,00	1,00
15	Majalengka	69,38	0,60	0,13	1,00	0,13	1,00	1,00	1,00
16	Sukabumi	65,14	0,26	0,19	0,35	0,70	1,00	1,00	1,00
17	Sumedang	64,97	0,87	0,29	0,83	0,54	1,00	0,02	1,00
18	Kerinci	63,06	0,51	0,24	0,39	0,27	1,00	1,00	1,00
19	Bekasi	61,40	0,33	0,11	0,37	0,49	1,00	1,00	1,00
20	Bandung	60,65	0,59	0,37	0,31	0,01	1,00	0,98	1,00
21	Bandung Barat	60,30	0,44	0,12	0,50	0,07	1,00	1,00	1,00
22	Kota Bekasi	59,36	0,44	0,07	0,61	0,03	1,00	1,00	1,00
23	Subang	58,29	0,39	0,03	0,89	0,09	1,00	0,90	1,00
24	Bogor	58,10	0,29	0,16	0,43	0,17	1,00	1,00	1,00
25	Cirebon	57,56	0,43	0,08	0,46	0,01	1,00	1,00	1,00
26	Cerai	56,77	0,30	0,07	0,48	0,22	1,00	0,89	1,00
27	Cilegon	44,39	0,44	0,13	0,39	0,02	1,00	0,16	1,00
	Jawa Barat	72,76	0,52	0,27	0,90	0,39	1,00	1,00	1,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pada tahun 2024, berdasarkan capaian IPLM, Kabupaten Majalengka berada pada posisi ke-15 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa



Barat. Jika dibandingkan dengan 18 Kabupaten di Jawa Barat, maka posisi Kabupaten Majalengka berada pada urutan ke -10. Peningkatan capaian IPLM ini tidak terlepas dari program/kegiatan yang diselenggarakan dinas terkait untuk mendongkrak nilai IPLM Kabupaten Majalengka, diantaranya program peningkatan minat baca di Majalengka terus diupayakan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya melalui Lomba Bertutur tingkat SD se-Kabupaten Majalengka.

Juga program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan indeks literasi nasional melalui **Gerakan Literasi Nasional**.

Gerakan Literasi Nasional (GLN) lahir dari sinkronisasi semua program literasi yang sudah berjalan pada setiap unit utama yang ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLN merupakan upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam pengembangan budaya literasi. Gerakan Literasi Nasional harus dilaksanakan secara masif, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk implementasi GLN, Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menetapkan **GELORA MAJALENGKA (Gerakan Literasi Orang Majalengka)** sebagai salah satu inovasi guna menyiapkan SDM di Majalengka.

b. Kesehatan

Tujuan utama pembangunan manusia dalam aspek kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, sehingga dapat hidup sehat dan berumur panjang. Pengukuran taraf kesehatan tersebut adalah dengan menghitung angka harapan hidup saat lahir (e_0). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang akan ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu banyaknya anak lahir hidup dan banyaknya anak masih hidup. Perkembangan AHH Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Pada rentang tahun 2020-2024, berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Majalengka terus meningkat dari 73,95 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,98 tahun pada tahun 2024. Angka ini bisa diartikan bahwa bayi yang baru lahir di Majalengka memiliki peluang untuk hidup hingga 74,98 tahun. Sedangkan menurut WHO, kondisi ideal AHH adalah sebesar 85 tahun, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak implementasinya masih perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan bidang kesehatan.

Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Wilayah	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98



Wilayah	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Barat	74,19	74,37	74,6	74,91	75,16
Nasional	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

1. rendah = di bawah 10%
2. sedang = 10-19%
3. tinggi = 20-29%
4. sangat tinggi = 30%

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Majalengka dari tahun ke tahun mengalami penurunan, data terakhir tahun 2023 sebesar 0,13%, artinya menurut standar WHO jika lebih kecil dari 10% dapat dikatakan rendah. Perkembangan persentase gizi buruk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.48
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
1.	2020	0,15
2.	2021	0,13



No.	Tahun	Persentase Balita Gizi Buruk (%)
3.	2022	0,19
4.	2023	0,13
5.	2024	0,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

c. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Majalengka pada kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)
1.	2020	94,16
2.	2021	94,29
3.	2022	95,84
4.	2023	95,88
5.	2024	95,99

Sumber: BPS Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Dari data diatas terlihat bahwa rasio penduduk yang bekerja selama periode 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang bekerja mencapai 709.500 orang (95,99%) dari jumlah seluruh angkatan kerja sebanyak 739.144 orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, dari tiga lapangan usaha pertanian, manufaktur dan jasa. Sektor jasa adalah yang menyerap terbesar yaitu sebanyak 48,61 persen, kemudian sektor manufaktur sebesar 29,76 persen, dan yang terakhir adalah sektor pertanian sebesar 21,63 persen. Pada tahun 2024 penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 2,85 persen atau sebanyak 19.679 orang dibanding tahun 2023. Sektor Jasa mengalami peningkatan sebesar 0,82 persen poin kemudian sektor manufaktur mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen poin. Untuk sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dibanding tahun 2023.



Berdasarkan Data BPS Kabupaten Majalengka tahun 2024, penduduk bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan di Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 45,36 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 8,96 persen.

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari aktivitas kesenian dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Indikator perkembangan seni budaya selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah grup kesenian	405	683	683	692	510
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kebudayaan sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pembangunan yang tidak meninggalkan kearifan lokal, yang diperoleh dan dikumpulkan selama bertahun-tahun melalui pengalaman langsung, dan tercermin dalam ekspresi kebudayaan, dapat memberikan masukan yang signifikan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan tanpa memicu perlawanan lokal. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Salah satu tujuan dari Pemajuan kebudayaan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Perwujudan Pemajuan kebudayaan di kabupaten Majalengka salah



satunya adalah adanya kawasan pemajuan Kebudayaan, yaitu kawasan terakota yang digagas oleh masyarakat.

Kawasan terakota merupakan ruang perwujudan masyarakat untuk mengolah dan mengoptimalkan sumber daya dengan mengangkat tema tanah sebagai lahan, bahan dan gagasan serta merespon adanya perubahan lanskap industri dari produsen genteng tradisional menjadi industri manufaktur modern melalui pendekatan aktifitas seni dan budaya yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat merestorasi kerusakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi hijau yang efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mendorong potensi unggulan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Selain Kawasan Terakota, di Kabupaten Majalengka juga terdapat satu **Desa Wisata berbasis Budaya** yang lokasinya berada di sebelah Selatan Kota Majalengka, yaitu **Desa Nunuk Baru**, Kecamatan Maja. Desa Wisata Nunuk Baru masyarakatnya masih tetap menjaga dan mempertahankan adat, tradisi dan kearifan lokal sebagai warisan leluhur, juga keindahan alamnya yang berbukit, lembah dan ngarai hal ini dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata agar lingkungan serta kearifan lokal tetap terjaga.

Adapun kearifan lokal yang masih terpelihara sampai saat ini Desa Nunuk Baru diantaranya : ADAT DAN TRADISI (Hajat Guar Bumi, Hajat Pareresan dan Hajat Buku Taun, Nyiramkeun Pusaka Peninggalan Para Leluhur, SENI (Silat Buhun, Bongbang, Debus, Rampak Lesung, Tari Tenun Gadod, BUDAYA (kain tenun tradisional Gadod, KULINER (Gula Kawung/Aren, Lahang/Wedang). Destinasi sejarah Nunuk sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Talaga Manggung bahkan kemungkinan dengan zaman Kerajaan Pajajaran hal ini dibuktikan dengan adanya Petilasan Hariang Banga, Ciung Wanara dan Badugal Jaya. Makam keramat yang mengelilingi Desa Nunuk Baru ada ± 60 makam tokoh yang di keramatkan di 20 lokasi Kabuyutan/Cagar Budaya dan masih terpelihara serta tetap dijaga sampai saat ini (Lembaga Adat Desa), dan telah dijadikan tujuan wisata religi bagi para pengunjung yang datang ke Nunuk Baru.



Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, termasuk benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan yang memiliki nilai penting dan perlu dilestarikan. Kabupaten Majalengka hingga saat ini belum terdapat cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sebanyak 3 karya budaya di Kabupaten majalengka telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya tak benda (WBTB) oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2023. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah karya hidup yang diciptakan dan dijaga oleh komunitas, kelompok atau perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya. Adapun 3 karya WBTB dimaksud adalah Gaok, tari Kedempling dan sampyong.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berorientasi pada pengembangan potensi, kekhasan, dan keunggulan masing-masing wilayah. Daya saing (competitiveness) merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang bertujuan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Pengukuran daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan potensi dan kapabilitas daerah. Daerah dengan daya saing tinggi umumnya memiliki masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen untuk mengukur tingkat daya saing pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah adalah menggunakan **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)** yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mengukur IDSD sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah dan stakeholder pembangunan. Pengukuran IDSD Tahun 2024 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF).

Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

IDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Kerangka IDSD 2024 secara umum sama dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing dan hubungan antara komponen, pilar, dimensi dan indikator dalam IDSD 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.24
Kerangka IDSD Tahun 2024



Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025.

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa komponen dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian



daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Pasar

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

4. Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamika bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha (entry) dan juga kemudahan menutup usaha bagi entitas bisnis yang tidak efisien (exit), serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Berikut ini skor IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang diterbitkan oleh BRIN, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

PROVINSI JAWA BARAT													
		3,88								8			
		SKOR IDSD 2024								kab/kota			
		PROVINSI								≥ skor provinsi			
		JAWA BARAT											
NAMA KAB/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. JAWA BARAT	4,07	4,07	4,09	4,36	4,09	3,48	1,74	3,82	3,34	5,00	4,08	4,63	3,88
RATA-RATA KAB/KOTA	4,56	3,92	4,61	3,73	4,00	3,55	4,00	3,27	2,56	4,64	3,74	2,98	3,80
BOGOR	4,53	4,41	4,65	3,85	3,91	3,36	2,65	3,08	2,41	5,00	3,47	4,36	3,81
SUKABUMI	4,62	3,95	4,36	3,89	3,91	3,07	3,99	2,66	1,77	4,85	2,87	2,57	3,54
CIANJUR	4,44	4,49	4,47	3,84	3,82	2,89	4,62	2,44	1,90	4,68	3,88	2,83	3,69
BANDUNG	4,62	3,93	4,73	3,83	4,11	3,64	2,90	3,24	2,99	5,00	3,51	3,81	3,86
GARUT	4,74	3,95	4,31	3,64	3,92	3,17	4,24	3,10	2,47	4,77	4,85	2,50	3,80
TASIKMALAYA	4,63	3,27	4,25	3,51	3,77	3,19	4,16	2,51	1,81	4,56	3,48	2,11	3,44
CIAMIS	4,86	3,22	4,51	3,49	3,97	3,58	5,00	2,67	2,18	4,51	3,95	2,66	3,72
KUNINGAN	4,82	3,09	4,44	3,39	4,11	3,43	5,00	3,31	2,25	4,40	4,72	2,92	3,82
CIREBON	4,72	3,42	4,53	3,52	3,98	3,37	4,74	3,86	2,38	4,69	3,49	2,93	3,80
MAJALENGKA	4,66	4,00	4,50	3,89	3,84	3,66	3,65	2,93	1,82	4,53	4,24	2,49	3,68
SUMEDANG	4,62	3,58	4,63	3,62	4,02	3,67	4,41	2,86	2,20	4,55	5,00	3,92	3,92
INDRAMAYU	4,47	4,16	4,57	2,55	3,96	3,10	2,24	3,48	1,04	4,95	3,12	2,43	3,34
SUBANG	4,59	4,35	4,26	3,55	4,02	3,23	3,79	2,99	2,20	4,62	3,80	2,74	3,68
PURWAKARTA	4,69	3,97	4,53	3,64	3,90	3,47	2,43	2,87	1,71	4,84	4,51	2,32	3,57
KARAWANG	4,69	4,54	4,37	3,87	4,00	3,32	1,73	2,93	1,57	5,00	3,61	3,13	3,56
BEKASI	4,52	4,48	4,76	3,80	4,12	3,70	1,26	3,37	2,75	5,00	3,89	3,69	3,78
BANDUNG BARAT	4,49	4,13	4,53	3,52	4,01	3,22	3,32	2,91	2,37	4,66	3,93	2,60	3,64
PANGANDARAN	4,48	3,15	4,52	3,96	3,84	4,05	5,00	2,83	1,42	4,05	4,37	2,21	3,65
KOTA BOGOR	4,71	4,71	4,91	4,11	4,13	3,62	5,00	3,52	3,94	4,69	2,89	3,83	4,17
KOTA SUKABUMI	4,43	3,12	4,80	3,41	4,01	3,70	5,00	4,17	3,40	4,10	3,14	2,64	3,83
KOTA BANDUNG	4,40	4,53	4,92	3,88	4,18	3,86	5,00	3,72	3,92	5,00	3,44	4,25	4,26
KOTA CIREBON	4,44	3,12	4,77	3,72	4,01	3,96	5,00	4,03	4,02	4,39	2,64	3,30	3,95
KOTA BEKASI	3,88	4,81	4,98	4,13	4,23	3,89	4,81	3,82	3,33	5,00	3,54	2,61	4,09
KOTA DEPOK	4,47	5,00	5,00	4,84	4,19	3,96	4,37	4,17	3,17	4,87	2,85	3,04	4,16
KOTA CIMAH	4,50	3,42	4,95	3,98	4,16	3,79	3,67	4,18	2,55	4,53	3,25	3,36	3,86
KOTA TASIKMALAYA	4,52	3,50	4,67	3,39	4,00	3,97	5,00	3,23	3,41	4,36	4,27	3,20	3,96
KOTA BANJAR	4,71	3,41	4,63	3,82	3,90	3,93	5,00	3,59	4,17	3,66	4,25	2,07	3,93

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025.

Skor IDSD diperoleh dari hasil penilaian pada 12 pilar utama. Pilar tersebut meliputi institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan



komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi. Setiap daerah dinilai berdasarkan kekuatan dan tantangan pada masing-masing aspek tersebut.

Skor IDSD Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menempati urutan 19 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan skor 3,68 dari skala 5. Namun jika dibandingkan 18 Kabupaten yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Majalengka menempati urutan 10.

Tabel 2.52
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Ranking Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Total Indeks Kab/Kota IDSD 2024
1.	Kota Bandung	4,26
2.	Kota Bogor	4,17
3.	Kota Depok	4,16
4.	Kota Bekasi	4,09
5.	Kota Tasikmalaya	3,96
6.	Kota Cirebon	3,95
7.	Kota Banjar	3,93
8.	Kab. Sumedang	3,92
9.	Kota Cimahi	3,86
10.	Kab. Bandung	3,86
11.	Kota Sukabumi	3,83
12.	Kab. Kuningan	3,82
13.	Kab. Bogor	3,81
14.	Kab. Garut	3,80
15.	Kab. Cirebon	3,80
16.	Kab. Bekasi	3,78
17.	Kab. Ciamis	3,72
18.	Kab. Cianjur	3,69
19.	Kab. Majalengka	3,68
20.	Kab. Subang	3,68
21.	Kab. Pangandaran	3,65
22.	Kab. Bandung Barat	3,64
23.	Kab. Purwakarta	3,57
24.	Kab. Karawang	3,56
25.	Kab. Sukabumi	3,54
26.	Kab. Tasikmalaya	3,44
27.	Kab. Indramayu	3,34
	Rata-Rata Kab/Kota	3,80
	Provinsi Jawa Barat	3,88
	Nasional	3,43

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Berikut ini posisi skor IDSD Kabupaten Majalengka selama 5 tahun terakhir di wilayah Ciayumajakuning:



Tabel 2.53
Perbandingan Skor Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten/Kota di Wilayah Ciayumajakuning Jawa Barat
Tahun 2020-2024

No.	INDEKS DAYA SAING DAERAH	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
1.	Provinsi Jawa Barat	N/A	N/A	3,64	3,76	3,88
2.	Kota Cirebon	N/A	N/A	-	3,64	3,95
3.	Kabupaten Majalengka	N/A	N/A	3,03	3,25	3,68
4.	Kabupaten Kuningan	N/A	N/A	3,02	3,41	3,82
5.	Kabupaten Cirebon	N/A	N/A	2,93	3,30	3,80
6.	Kabupaten Indramayu	N/A	N/A	-	3,19	3,43

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Di wilayah Ciayumajakuning skor IDSD Kabupaten Majalengka tahun 2024 menempati urutan ke-4 dari 5 Kabupaten/Kota, posisi tertinggi Kota Cirebon (3,95), posisi berikutnya Kabupaten Kuningan (3,82), Kabupaten Cirebon (3,80) Kabupaten Majalengka (3,68) dan Kabupaten Indramayu (3,43).

Adapun jika merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik jika didukung dengan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Infrastruktur di Kabupaten Majalengka, masih menjadi kendala bagi kegiatan perekonomian daerah, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Perekonomian perdesaan terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa.

a. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 digolongkan dalam 3 kelompok yakni; Jalan Nasional (39,5 km), Jalan



Provinsi (125,83 km), dan Jalan Kabupaten (918,726 km) dengan kondisi jalan kabupaten dibagi menjadi empat kategori yaitu jalan kondisi baik (445,86 km), kondisi sedang (346,97 km), kondisi rusak ringan (89,56 km) dan jalan dengan kondisi rusak berat (32,64 km).

b. Perhubungan

Saat ini di Kabupaten Majalengka telah dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang akan menjadi sarana transportasi udara untuk mengakses wilayah Majalengka, Jawa Barat dan sekitarnya menuju wilayah seluruh nasional dan internasional. Dalam menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2022 sudah terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

c. Irigasi

Irigasi merupakan infrastruktur lain yang mendukung perekonomian, terutama sektor pertanian, karena akan menunjang ketersediaan pengairan di Kabupaten Majalengka. Persentase irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 mencapai 71,36%.

d. Penataan Ruang Daerah

Indikator penataan ruang di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	90,00	90,00	54,02	74,23	74,23
2.	Luas wilayah produktif	%	60	23,30	67,72	67,72	60,81
3.	Luas wilayah industri	%	1,37	0,72	1,09	2,433	2,433
4.	Penyediaan kawasan industri	Ha	-	-	394,68	2.843,63	2.843,63
5.	Luas wilayah kebanjiran	Ha	600	-	72,809	72,809	72,809



No.	Indikator Penataan Ruang	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
6.	Luas wilayah kekeringan	Ha	-	-	120,424	120,424	120,424
7.	Luas wilayah perkotaan	%	41	6,33	31,64	32,41	32,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

e. Fasilitas Keuangan

Kabupaten Majalengka memiliki lembaga penunjang perekonomian berupa fasilitas perbankan yang terdiri atas bank umum yaitu Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Danamon, Bank BCA, Bank OCBC NISP, Bank BTPN, Bank SAUDARA, Bank BPR, Bank BTN, Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Perkembangan jumlah lembaga perbankan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Bank Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Nama Bank	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	BJB	Unit	11	11	11	11	11
2.	BRI	Unit	39	40	40	40	40
3.	BNI	Unit	3	3	3	3	3
4.	MANDIRI	Unit	6	6	6	6	6
5.	PANIN	Unit	4	4	4	4	4
6.	DANAMON	Unit	5	5	5	5	5
7.	BCA	Unit	1	1	1	2	2
8.	OCBC NISP	Unit	2	2	2	2	2
9.	BTPN	Unit	5	5	5	5	5
10.	SAUDARA	Unit	1	1	1	1	1
11.	BPR	Unit	18	18	18	18	18
12.	BTN	Unit	8	8	8	8	8
13.	BRI Syariah	Unit	1	-	-	-	-
14.	BTPN Syariah	Unit	1	-	-	-	-
15.	Bank Syariah Indonesia	Unit	-	1	1	1	1
Jumlah		Unit	105	105	105	106	106

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

f. Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan



peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka pada Tahun 2024 tercatat 175 restoran yang tersebar di berbagai kecamatan dengan lokasi terbanyak berada di Kecamatan Majalengka sebanyak 61 restoran dan Kadipaten sebanyak 19 restoran.

g. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka terdapat 30 buah hotel/penginapan dengan total kamar sebanyak 932 kamar.

h. Air bersih

Penggunaan air bersih di Kabupaten Majalengka saat ini berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2024 sebesar 398.278 rumah tangga. Data selengkapnya mengenai jumlah Rumah Tangga Pengguna air bersih di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.56
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
1.	2020	368.626
2.	2021	374.699
3.	2022	376.106
4.	2023	396.721
5.	2024	398.278

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif di suatu daerah merupakan salah satu daya saing bagi daerah tersebut untuk dapat meningkatkan investasi yang masuk ke daerah tersebut. Iklim investasi diukur antara lain dengan tindak kriminalitas, kemudahan perijinan, perkembangan pembangunan.

a. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demo

Indikator Jumlah Kriminalitas ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.57
Jumlah Kriminalitas Yang Tertangani Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kasus					
	- Kasus Narkoba	38	2	2	2	4
	- Kasus Pembunuhan	0	0	1	0	1
	- Kasus Seksual	16	25	5	0	4
	- Kasus Penganiayaan	10	21	4	4	7
	- Kasus Pencurian	81	39	66	36	83
	- Kasus Penipuan	34	13	7	2	8
	- Kasus Pemalsuan Uang	1	0	0	0	0
2.	Jumlah Kasus Tertangani					
	- Kasus Narkoba	38	2	2	2	4
	- Kasus Pembunuhan	0	0	1	0	1



No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	- Kasus Seksual	16	25	5	0	4
	- Kasus Penganiayaan	10	21	4	4	7
	- Kasus Pencurian	81	39	66	36	83
	- Kasus Penipuan	34	13	7	2	8
	- Kasus Pemalsuan Uang	1	0	0	0	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.58
Jumlah Demonstrasi Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Demonstrasi
1.	2020	11
2.	2021	9
3.	2022	9
4.	2023	25
5.	2024	14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

b. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan menyederhanakan pelayanan perizinan terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, murah dan terjangkau. Rata-rata proses perijinan di Kabupaten Majalengka hanya membutuhkan waktu 1- 3 hari.

c. Jumlah, Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2024, yaitu pajak sebanyak 11 jenis dan retribusi sebanyak 15 jenis, dengan perincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Jenis Pajak Daerah	Jenis Retribusi Daerah
1. Pajak Reklame	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Pajak Air Tanah	2. Retribusi Pelayanan
3. Pajak Sarang Burung Walet	Persampahan/Kebersihan
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan	3. Retribusi Pelayanan Parkir di



Jenis Pajak Daerah	Jenis Retribusi Daerah
Batuan	Tepi Jalan Umum
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	4. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman	6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8. PBJT-Tenaga Listrik	7. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
9. PBJT-Jasa Perhotelan	8. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
10. PBJT-Jasa Parkir	9. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
11. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	10. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
	11. Retribusi Rumah Potong Hewan
	12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
	13. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
	14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
	15. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 202, yang dikelola dalam SIPD.

d. Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Berbagai regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung kemudahan usaha di daerah sehingga kegiatan investasi di daerah tersebut bisa menjadi lancar.



Tabel 2.60
Tabel Regulasi yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Majalengka

NO.	TAHUN	PERDA/PERBUP/KEPBUP
1	2018	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung
2	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
3	2018	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Majalengka
4	2020	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
5	2020	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 503/Kep.70-DPMPTSP/2020 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
6	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 649/Kep.137-DPMPTSP/2021 Tentang Standar Harga Dasar Bangunan Sebagai Dasar Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Majalengka
7	2021	Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.195-BKAD/2021 Tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Majalengka Sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka
8	2022	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
9	2022	Keputusan Bupati Majalengka Nomor PU.03.00.00.00/Kep.170-DPUTR/2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
10	2024	Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Berusaha Perizinan di Daerah
11	2024	Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kertajati-Kadipaten dan Sekitarnya
12	2025	Peraturan Bupati (PERBUP) Majalengka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia

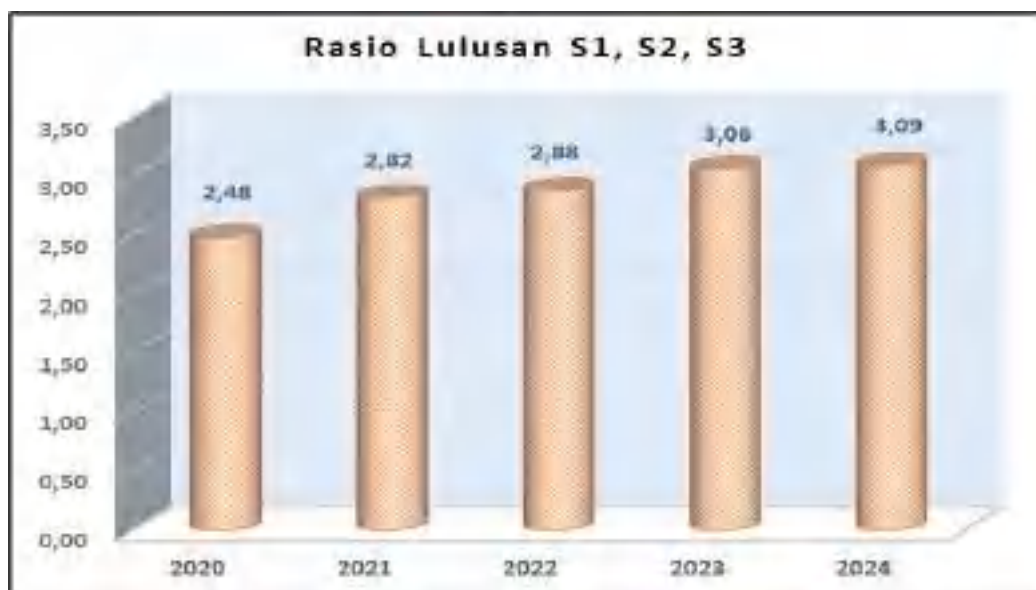
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi

dalam persaingan global. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kualitas SDM adalah dengan mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Selama periode 2020-2024, hanya sebagian kecil yang berpendidikan Diploma dan Sarjana, walaupun demikian tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Majalengka terus meningkat. Tercatat pada tahun 2024 persentase lulusan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Majalengka sebesar 3,09% dari total jumlah penduduk dan terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Gambar 2.25
Perkembangan Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja

yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.26
Rasio Ketergantungan/Angka Beban Tanggungan
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Pada tahun 2024, angka ketergantungan di Kabupaten Majalengka sebesar 44,39%, ini berarti bahwa di Majalengka dari 100 orang penduduk yang produktif menanggung beban 44 orang penduduk non-produktif.



2.1.5 Aspek Pelayanan Umum

2.1.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara dan didalamnya mengandung satu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan pendidikan harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

1. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
2. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.



Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Data perkembangan PAUD di Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.61
Penyelenggaraan PAUD Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Siswa (Jiwa)	40.843	25.681	40.064	41.823	41.414
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun (Jiwa)	62.153	42.470	42.332	42.116	42.707
3.	APK	65,71	95,05	94,64	98,02	96,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

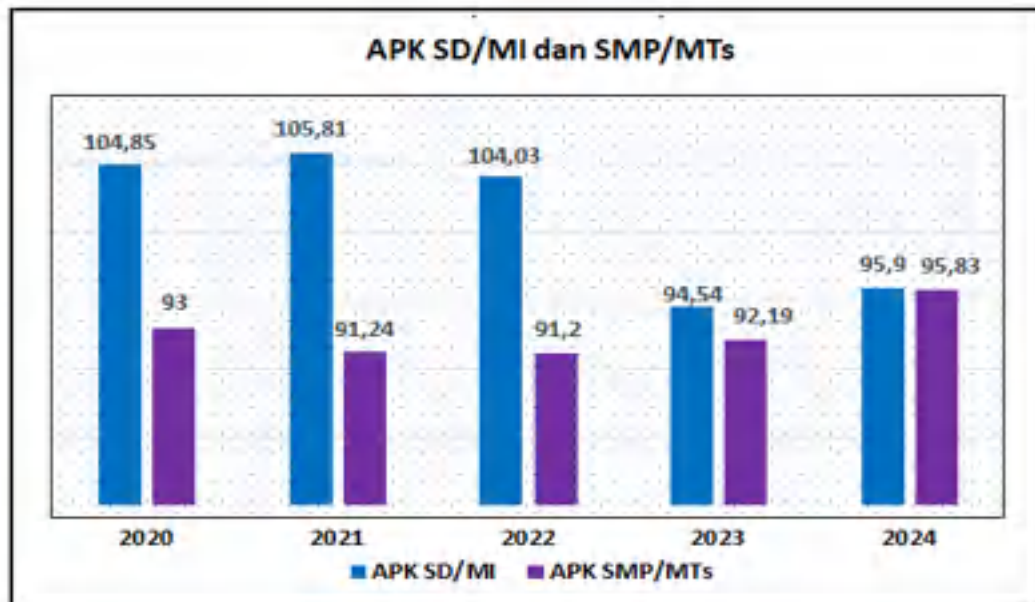
Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikut-sertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Angka APK SD/MI Kabupaten Majalengka tahun 2024 (95,90%) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (94,54%), sedangkan APK SMP/MTs tahun 2024 (95,83%) meningkat dibanding tahun 2023 (92,19%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.62
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK SD/MI	104,85	105,81	104,03	94,54	95,90
2.	APK SMP/MTs	93,00	91,24	91,20	92,19	95,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.27
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

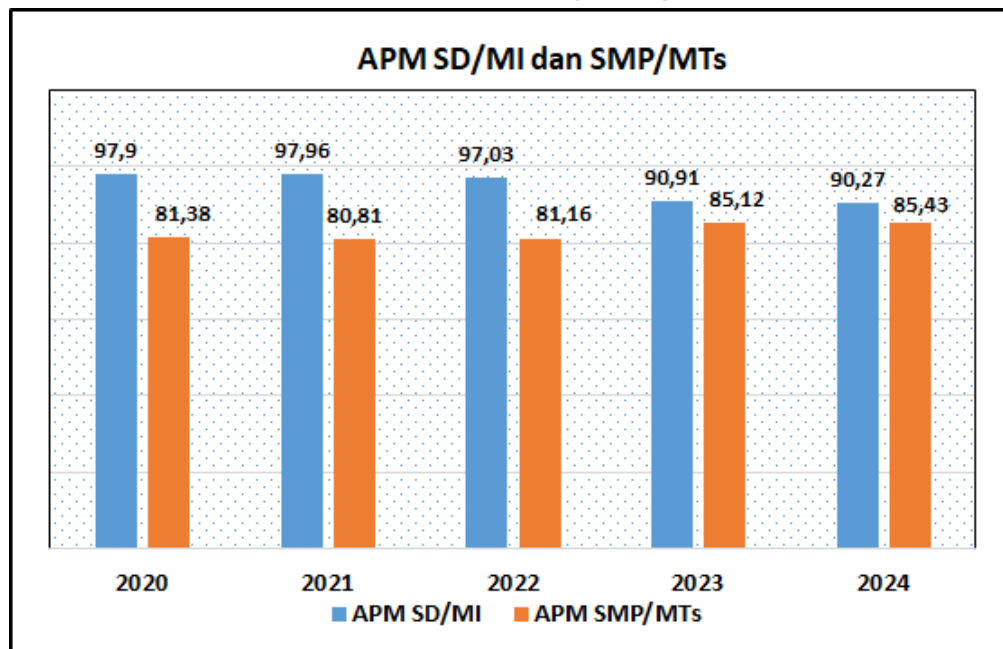
Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai jumlah siswa yang berusia pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada usia tersebut. Angka ini menunjukkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Status APM SD/MI pada tahun 2024 (90,27%) menurun dibandingkan dengan tahun 2023 (90,91%), dan APM SMP/MTs pada tahun 2024 (85,43%) meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 (85,12%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.63
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM SD/MI	97,90	97,96	97,03	90,91	90,27
2.	APM SMP/MTs	81,38	80,81	81,16	85,12	85,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.28
Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

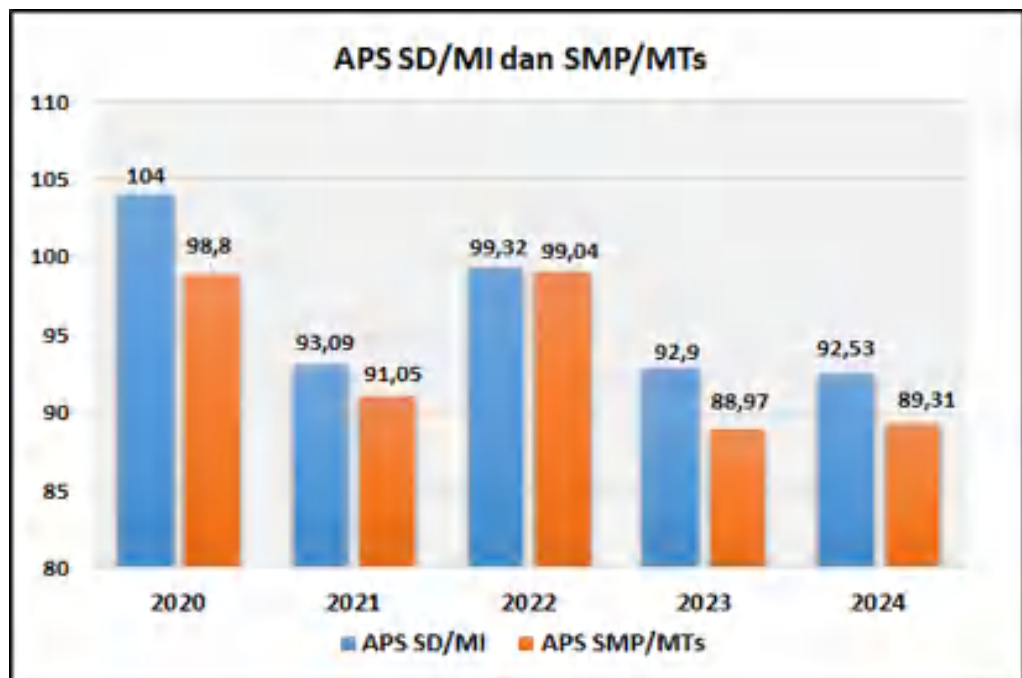
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk antara usia muda dengan ukuran pertumbuhan jumlah murid yang ditampung pada setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah usia sekolah harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah dan peningkatan akses masuk sekolah. Status APS SD/MI pada tahun 2024 (92,53%) menurun dibandingkan dengan tahun 2023 (92,90%), dan APS SMP/MTs pada tahun 2024 (89,31%) meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 (88,97%). Adapun perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.64
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APS SD/MI	104,00	93,09	99,32	92,90	92,53
2.	APS SMP/MTs	98,80	91,05	99,04	88,97	89,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 202, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.29
Perkembangan APS SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Sekolah, salah satu indikator mutu penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengukur capaian Angka Kelulusan para siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Standar maksimal bagi indikator ini adalah 100% siswa lulus. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Majalengka, angka kelulusan pada siswa SD/MI dan SMP/MTs tahun 2024 telah mencapai angka 100%.

Indikator lain dalam mutu penyelenggaraan pendidikan yaitu Angka Melanjutkan siswa SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,76 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 88,76%, sementara Angka Melanjutkan siswa SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2024 sama yaitu sebesar 83,58% dibandingkan tahun 2023 sebesar 83,58%. Dalam hal kualitas para pengajar, kualitas tenaga pengajar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 ada peningkatan yang diindikasikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV yaitu sebanyak 100,00% dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,09%. Data Perkembangan Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.65
Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah dan Kualifikasi Guru di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	AL SD/MI	100	100	100	100	100
2.	AL SMP/MTS	100	100	100	100	100
3.	AM SD/MI KE SMP/MTS	99,10	87,20	84,97	90,64	90,85
4.	AM SMP/MTS KE SMA/MA/SMK	91,01	91,10	83,58	83,58	83,58
5.	GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/DIV	99,32	99,43	88,40	97,09	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Ketersediaan Sekolah, Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Datanya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.66
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
A	SD/MI					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	668	671	674	672	671
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (Jiwa)	128.534	130.561	131.507	132.187	132.171
3.	Rasio	1:192	1:194	1:195	1:196	1:196
B	SMP/MTs					
1.	Jumlah gedung sekolah (Unit)	112	121	124	125	126
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (Jiwa)	63.460	63.866	56.208	63.756	65.232
3.	Rasio	1:566	1:527	1:453	1:510	1:517

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Rasio Guru Terhadap Murid, adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga



untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.67
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	SD/MI					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	6.039	5.886	5.766	6.495	6.824
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	111.704	112.122	113.337	113.849	113.439
3.	Rasio	1 : 19	1:19	1:20	1:18	1:16
B.	SMP/MTs					
1.	Jumlah Guru (Jiwa)	2.315	2.346	2.247	2.337	2.375
2.	Jumlah Murid (Jiwa)	39.516	39.898	39.724	40.178	41.196
3.	Rasio	1 : 17	1:17	1:18	1:17	1:17

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan melalui 3 jenis pelayanan seperti tabel berikut ini:

Tabel 2.68
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target SPM (%)	Capaian SPM (%)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100	90.86
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100	88.02
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	53.42
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	93.52

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



b. Kesehatan

Angka Kematian Bayi, adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel 2.69
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi (Permil)
1.	2020	3,62
2.	2021	2,67
3.	2022	4,54
4.	2023	7,83
5.	2024	7,53

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Angka Kematian Ibu, Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.70
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Angka Kematian Ibu (Permil)
1.	2020	66,77
2.	2021	126,03
3.	2022	113,67
4.	2023	108,73
5.	2024	102,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yaitu suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa



strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu.

Karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu posyandu melayani 100 balita. Data rasio posyandu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71
Perkembangan Rasio Posyandu
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Posyandu (Unit)	Jumlah Balita (Jiwa)	Rasio Posyandu Per 1000 Balita (Permil)
1.	2020	1.489	91.473	16,27
2.	2021	1.422	6.571	70,32
3.	2022	1.497	98.850	12,89
4.	2023	1.503	75.936	15
5.	2024	1.506	84.468	14,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Rasio dan Cakupan Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu, Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksud rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan



berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan.

Tabel 2.72
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poliklinik
1.	Lemahsugih	-	2	5	-
2.	Bantarujeg	-	1	3	-
3.	Malausma	-	1	3	-
4.	Cikijing	-	1	2	-
5.	Cingambul	-	1	5	-
6.	Talaga	1	1	3	1
7.	Banjaran	-	1	3	1
8.	Argapura	-	1	5	-
9.	Maja	-	1	5	-
10.	Majalengka	1	2	2	5
11.	Cigasong	-	1	1	-
12.	Sukahaji	-	2	1	-
13.	Rajagaluh	-	1	3	-
14.	Sindangwangi	-	1	3	-
15.	Sindang	-	1	-	-
16.	Leuwimunding	-	1	2	-
17.	Palasah	-	1	2	-
18.	Jatiwangi	-	2	3	-
19.	Dawuan	2	1	1	-
20.	Kasokandel	-	1	1	-
21.	Panyingkiran	-	1	1	2
22.	Kadipaten	-	1	1	1
23.	Kertajati	-	2	6	-
24.	Jatitujuh	-	2	2	-
25.	Ligung	-	1	5	-
26.	Sumberjaya	1	1	3	-
Jumlah		5	32	71	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Majalengka dapat diukur berdasarkan indikator kinerja aspek pelayanan umum diantaranya



berupa rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per satuan penduduk. Data tersebut dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Rasio dan Cakupan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 penduduk	0,12	0,12	0,14	0,14	0,13
2.	Cakupan Puskesmas (%)	123,08	123,08	79,41	79,41	100,87
3.	Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	21,28	21,28	8,96	8,96	8,12
4.	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,38	0,38	0,41	0,44	0,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Rasio Dokter, Sementara itu, untuk jumlah tenaga dokter di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 rasionya sebesar 33 terhadap 100.000 penduduk. Pemenuhan tenaga medik untuk dokter umum dan dokter gigi di pelayanan primer sangat berpengaruh pula terhadap pemenuhan SDM kesehatan yang dipersyaratkan oleh BPJS, sehingga berdampak pada besarnya kapitasi yang diterima oleh setiap puskesmas. Sedangkan kebutuhan tenaga medik di RSUD Cideres dan RSUD Majalengka lebih terfokus pada pemenuhan dokter spesialis di beberapa spesifikasi.

Tabel 2.74
Rasio Dokter terhadap 1.000 Penduduk
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Aspek Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio dokter terhadap 1.000 penduduk	0,16	0,28	0,43	0,39	0,33
2.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0,30	0,28	0,49	0,45	0,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Komplikasi Kebidanan yang ditangani, perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menekan kematian ibu dan kematian bayi salah satunya berusaha memperluas pelayanan cakupan komplikasi kebidanan yang harus ditangani. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil perlu diantisipasi berbagai komplikasi kebidanan yang harus dapat ditangani sehingga berpengaruh pada tingkat keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.75
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani (%)
1.	2020	181,72
2.	2021	103,04
3.	2022	113,27
4.	2023	134,70
5.	2024	124,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Data menunjukkan bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani selalu mengalami peningkatan dengan kondisi terakhir pada tahun 2024 sebesar 124,38%.

Pertolongan Persalinan, guna meningkatkan IPM, khususnya yang terkait erat dengan indeks kesehatan diantaranya perlu perhatian terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaiannya sebagaimana pada tabel berikut ini:



Tabel 2.76
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)
1.	2020	105,22
2.	2021	106,80
3.	2022	100,69
4.	2023	101,30
5.	2024	82,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Sebagaimana terlihat pada data diatas bahwa pada tahun 2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka terealisasi sebesar 82,60%.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan, Penyebab stunting menurut Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Majalengka berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:



Tabel 2.77
Data Prevalensi Stunting
Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Prevalensi Stunting (%)
1.	2020	n/a
2.	2021	23,00
3.	2022	24,30
4.	2023	24,10
5.	2024	18,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Cakupan penemuan penyakit TBC BTA dan HIV/AIDS di Kabupaten Majalengka, Pemangku kepentingan tingkat Nasional telah menetapkan strategi dan rencana aksi untuk mencapai Indonesia bebas AID, Tuberkulosis dan Malaria pada tahun 2030. Perkembangan penanganan penyakit menular tersebut di Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan data sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.78
Cakupan Penemuan Penyakit TBC dan AIDS
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (%)	58,60	52,10	93,50	100	100
2.	Orang dengan AIDS	86	112	157	259	512

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan melalui 12 jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:



Tabel 2.79
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Kesehatan
Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM	% Capaian SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	22.496	18.692	83,09
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	22.285	18.409	82,61
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	20.969	18.223	86,90
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	80.889	77.756	96,13
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	184.236	184.236	100,00
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	874.518	760.148	86,92
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	184.946	162.395	87,81
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	89.419	89.419	100,00
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	12.502	12.502	100,00
10.	Pelayanan	Jumlah Warga	1.894	1.894	100,00



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM	% Capaian SPM
	Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	17.893	17.893	100,00
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	26.602	26.602	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu kebutuhan pendukung pembangunan daerah yang pemenuhannya akan sangat berdampak pada kinerja pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya maupun pemerintahan.

Kondisi Jalan, berdasarkan data terbaru panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka tahun 2024 adalah 445,86 Km, data selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.80
Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (%)	63,17	75,79	71,23	55,18	48,73
	- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam) (Km)	580,35	696,28	654,40	507,00	445,86



No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	918,73	918,73	918,73	918,73	915,02
2.	Panjang Jalan dilalui roda 4 (Km)	918,73	918,73	918,73	918,73	915,02
3.	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan Permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (Km)	918,73	918,73	918,73	918,73	915,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi Jaringan Irigasi, kondisi bangunan air di Kabupaten Majalengka terdiri dari Bendung, Bangunan Air, Saluran, Bangunan Pelengkap dan Bangunan Fasilitas. Kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Majalengka selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.81
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Irigasi Kabupaten kondisi baik (%)	76,77	77,32	75,51	70,08	71,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Penataan Ruang, untuk menilai capaian pembangunan pada bidang penataan ruang, antara lain adalah ketaatan terhadap RTRW serta rasio bangunan ber IMB. Realisasi kinerja pembangunan di bidang penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82
Kondisi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	90	54,02	74,23	74,23
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	6,70	6,81	6,81	6,89	BPPT

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum melalui 2 jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.83
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	5.600 orang	5.600 orang
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.000 orang	2.000 orang

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi Perumahan, kondisi rumah tinggal dan rumah tangga di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024, jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 341.63 Kepala Keluarga dengan persentase sebesar 69,74%. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 398.278 Kepala Keluarga, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Kondisi Perumahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (%)	68,49	69,62	69,62	69,69	69,74
2.	Rumah tangga bersanitasi (KK)	314.205	323.565	324.240	341.403	341.631
3.	Rumah tangga pengguna air bersih (KK)	368.626	374.699	376.106	396.721	398.278



No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase Penduduk berakses airminum (%)	80,45	80,62	80,68	80,98	81,30
5.	Cakupan pelayanan air bersih yang bersumber dari mata air (KK)	378	425	1.900	1.927	2.557

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Rumah Layak Huni, Tahun 2024 jumlah rumah layak huni sebanyak 368.132 unit dengan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk sebesar 96,56%. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.85
Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Layak Huni (unit)	347.196	349.784	373.386	360.950	368.132
2.	Rasio Rumah Layak Huni (%)	94,93	95,63	96,24	96,54	96,56
3.	Rasio permukiman layak huni (%)	99,05	99,05	99,85	99,85	99,85
4.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,050	0,050	0,147	0,147	0,147

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat melalui 5 (lima) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.86
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	7 Unit (100 %)	7Unit (100 %)



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	(Tidak ada Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten)	(Tidak ada Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten)

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan capaian pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.87
Indikator Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,19	2,12	1,93	1,52	0,02
2.	Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	26,22	25,91	19,61	23,41	23,41
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	3,86	7,97	7,97	7,97	6,07
4.	Penegakan PERDA	95,59%	95,02%	91,5%	100%	52%
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	26,90	26,90	26,90	26,90	26,90
6.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.430	3.430	2.620	3.172	3.172
8.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	14,67	14,67	14,67	100%	54%



No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	51,19	55,88	45,45	50	52,11%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas melalui 2 (dua) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.88
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	90%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14.379 jiwa (100 %)	16.740 jiwa (116 %)
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	426 jiwa (100 %)	959 jiwa (225 %)
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8.975 jiwa (100 %)	8.975 jiwa (100 %)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

f. Sosial

Pada Tahun 2024, Kabupaten Majalengka memiliki sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 150



unit. Secara lengkap data penanganan masalah sosial di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.89
Data Penanganan Masalah Sosial
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	36	107	111	4	150
2.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	83,70	121,90	38,07	63,21	99,84

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial melalui 5 (lima) jenis pelayanan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.90
Target dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Majalengka Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	350	350
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50	50
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.660	1.660
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	15	15



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian SPM
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.626	2.626

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.5.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 69,64%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak



orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 sebesar 4,01% menurun sebesar 0,11% dari tahun 2023 sebesar 4,12%. Data situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka secara lengkap bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.91
Data Situasi Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,66	67,63	66,21	68,50	69,64
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
3.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja per tahun	Kasus	10	2	7	6	6
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	49,41	20,59	44,90	75,95	97,77
5.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Balai Latihan Kerja	Unit	2	16	15	15	15



No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	Buah	55	55	30	54	54
8.	Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri	Orang	655	415	2.129	2.169	1.999
9.	Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	20	20	17	15	23
10.	Jumlah Pekerja Warga Negara Asing	Orang	157	161	185	246	217

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Perbandingan angka Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.92
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional
Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Majalengka	5,48	5,71	4,16	4,12	4,01
Jawa Barat	7,69	9,82	8,31	7,44	6,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.30
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Majalengka, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2025.

Secara umum perkembangan TPT pada lima tahun terakhir di Kabupaten Majalengka cukup bagus, ini ditandai dengan angka TPT yang selalu berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah angkatan kerja yang bekerja didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tamatan SD ke bawah. Pada tahun 2021-2023, Jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan SD tahun 2021 sejumlah 54,54%, tahun 2022 sejumlah 53,06% dan tahun 2023 sejumlah 48,06%.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebesar 60%, angka ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan



publik yang responsif terhadap gender menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai dampak positif meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender, diharapkan keberpihakan terhadap hasil-hasil peraturan yang responsif gender pun semakin meningkat.

Rasio KDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 dari 429.063 rumah tangga terdapat 4 (empat) kasus kekerasan rumah tangga.

Selain KDRT, hal lain yang diperhatikan adalah penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, unsur medis, penyadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak lain (Kepolisian, LSM, Ormas). Sedangkan proses penanganan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan secara garis besar meliputi penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, pembuatan berita acara kronologis kejadian, upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai sebagai alternatif pemecahan masalah. Pada tahun 2024 terdapat 51 laporan/pengaduan tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka dan laporan/pengaduan tersebut telah ditangani sebanyak 100%.

Capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	%	56,43	53,54	60	60	60



No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah Kabupaten Majalengka						
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	10	12	6	6	12
3.	Jumlah kekerasan rumah tangga (KDRT)	kasus	4	3	3	4	4
4.	Jumlah kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	kasus	20	20	43	38	51
5.	Jumlah pengaduan kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani	kasus	20	20	43	38	51
6.	Persentase Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,06	60,04	59,82	57,91	62,81
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,91	86,24	86,69	87,06	87,16
9.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,508	0,507	0,493	0,459	0,437

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, dan BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

c. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan



rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.94
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Data	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan							
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
1.	- Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/Hari	2.540,04	2.735,80	2.650,98	2.290,93	2.697,00
	- Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	74,85	85,95	82,69	64,61	91,17
	- Skor PPH Ketersediaan	%	93,80	94,00	88,60	81,10	94,24
B. Distribusi dan Akses Pangan							
1.	ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100
2.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	100	100	100
C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan							
1.	Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	100	100	100	100	100
2.	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	74	53,6	43	271,867	329,09
3.	Ketersediaan Pangan (LPM)	Unit	141	145	172	158	147

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Saat ini otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan, diantaranya yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan atau usaha di Kabupaten Majalengka telah membuat dokumen lingkungan sesuai dengan yang diwajibkan, namun dalam pelaksanaannya belum semua usaha atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan.

Sampai saat ini di Kabupaten Majalengka belum ada usaha atau kegiatan yang mendapat sanksi berat karena melanggar hukum lingkungan. Pembinaan dan sosialisasi peraturan terus dilaksanakan agar pelaku kegiatan atau usaha dapat melaksanakan kegiatan atau usahanya tapi tetap menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sehingga ekonomi hijau dapat terlaksana. Terkait pengolahan sampah mengantisipasi berkembangnya Kawasan Rebana maka akan direncanakan akan dilakukan rehabilitasi TPA Heuleut di Kecamatan Kadipaten yang pembiayaannya direncanakan dari Pemerintah sumber dana Pinjaman Luar Negeri. Kabupaten Majalengka telah mempersiapkan lahan yang sudah bersertifikat, Rencana Induk dan Kajian UKL/UPL. Capaian pembangunan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.95
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penanganan sampah (%)	35,15	34,30	33,05	33,07	41,74
2.	Persentase cakupan area pelayanan Persampahan (%)	1,90	1,90	1,90	1,91	1,91
3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	50	50	47,14	50	50
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	87,65	87,31	88,71	88,71	94
5.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,97	50,97	50,97	50,97	35,04
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,87	62,76	64,81	65,89	64,54
7.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Titik)	352	352	352	352	352
8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL-UKL/SPPL	27,50	89,47	95,50	100	100
9.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	82,21	83,31	95,74	95,75	95,75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Kondisi lingkungan hidup dan masalah penanganan sampah di Kabupaten Majalengka masih belum memuaskan, sehingga perlu perhatian serius para stakeholder dan masyarakat, meskipun kondisinya membaik dengan meningkat tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2024 menjadi 95,75%.

Untuk solusi penanganan sampah di Kabupaten Majalengka, beberapa program yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Skema pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat RT/RW.
2. Skema pengolahan berbasis kawasan, seperti Bank Sampah Induk, TPS3R antar-desa, dan Zona Pengelolaan Sampah Terpadu. Skema



ini dapat mengoptimalkan efisiensi pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah padat maupun terpencar.

e. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dalam kependudukan dan pencacatan sipil seiring dengan waktu mengalami kemajuan baik dalam hal manajemen dan pelaksanaan secara teknis. Dalam urusan kependudukan dan catatan sipil sudah sangat memasyarakat dengan istilah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor tersebut sifatnya unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang. Kemudian dokumen kependudukan lainnya berupa Akte Lahir dan Kartu Keluarga yang kedudukannya sama pentingnya dengan KTP, jadi seluruh warga masyarakat sudah seharusnya mengindahkan dokumen-dokumen tersebut.

Tabel 2.96
Capaian Pembangunan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (%)	100	70,6	100	100	100
2.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	98,00	99,1	99,86	99,52	99,68
3.	Ratio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00	99,13	73,97	75,49	73,83
4.	Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	95,80	97,00	99,20	99,46	99,50
6.	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian (%)	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu lembaga pelayanan masyarakat yang terdekat dengan masyarakat adalah posyandu. Keaktifan pelayanan yang dilaksanakan



oleh posyandu akan memberikan tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah secara umum. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa Posyandu aktif di Kabupaten Majalengka adalah 1.506 posyandu, angka tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat sehingga salah satu kebutuhan masyarakat mendapat pelayanan dari pemerintah dapat ditangani dengan baik. Sebagai langkah nyata Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kapasitas motor penggerak (para kader) pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah serta menguatkan wawasan dan kemampuan untuk menjadi kader pemberdayaan masyarakat. Pola hubungan antara aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara hakiki.

Indikator mengenai pencapaian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.97
Perkembangan Posyandu dan Kelompok PKK
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu Aktif (unit)	1.489	1.491	1.500	1.506	1.508
	Jumlah Seluruh Posyandu (unit)	1.489	1.491	1.500	1.506	1.508
	Persentase Posyandu aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah PKK Aktif (kelompok)	330	330	370	369	369
	Jumlah Seluruh PKK (kelompok)	330	330	370	369	369
	Persentase PKK aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya	164	188	55	66	39

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.98
Perkembangan Desa Mandiri
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Status Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Mandiri	23	63	96	142	176
2.	Desa Maju	126	180	202	177	148
3.	Desa Berkembang	181	87	32	11	6
4.	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5.	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka mencatat rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Majalengka sebesar 1,0 pada tahun 2024, angka itu sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat kini mulai paham bahwa program KB itu bukan semata untuk membatasi jumlah anak, tapi mengatur jarak kelahiran bayi.

Rasio Akseptor KB, program KB memiliki dampak positif dalam membantu penurunan angka kematian ibu, epidemi HIV/AIDS, meningkatkan mutu gender, dan mempromosikan pendayagunaan kaum muda. Jika tiap keluarga mempunyai anak dua atau tiga orang, berarti program KB sudah berhasil. Rasio akseptor KB pada Tahun 2024 sebesar 70,88%.

Tabel 2.99
Indikator Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,32	2,32	2,17	1,0	1,0
2.	Rasio akseptor KB (%)	79,77	79,99	80,02	73,01	70,88

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

h. Perhubungan

Saat ini Kabupaten Majalengka memiliki 7 (tujuh) terminal bis, yaitu di Kecamatan Cikijing, Cigasong, Rajagaluh, Kadipaten, Maja,



Talaga dan Bantarujeg. Dengan berdirinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati akan memerlukan pembangunan terminal terpadu untuk menjamin aksesibilitas angkutan umum dari kota-kota di sekitarnya ke Bandara. Untuk mewujudkan itu perlu disusun kajian terpadu dengan tetap mengacu kepada master plan kebandaraan, RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 dan RDTR.

Indikator lainnya mengenai urusan perhubungan/kondisi perhubungan di kabupaten majalengka akan dibahas pada di bawah ini sebagai capaian pembangunan urusan perhubungan.

Tabel 2.100
Kondisi Perhubungan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio izin trayek	poin	1:7	1:4	1:9	1:10	1:11
2.	Jumlah uji kir angkutan orang dan barang	unit	13.141	11.709	10.753	9.212	9.213
3.	Jumlah uji kir angkutan orang	unit	1.708	1.382	1.237	1.228	1.317
4.	Pemasangan Perlengkapan Jalan	persen	41,48	45,40	46,57	46,97	48,38
5.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	juta orang	4,75	2,16	2,34	2,32	1,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pengujian kelaikan kendaraan angkutan umum dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan durasi waktu atau lamanya proses pengujian kendaraan tersebut, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, maka lamanya waktu yang diperlukan dalam pengujian dimaksud adalah 15 menit, dimulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pengujian dan penyampaian hasil uji kendaraan.



Tabel 2.101
Jumlah Kendaraan Yang diuji Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Kendaraan yang diuji (Unit)
1.	2020	13.141
2.	2021	11.713
3.	2022	10.753
4.	2023	9.212
5.	2024	9.213

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, dikelola dalam SIPD.

Berdasarkan data tahun 2024 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 1:6,66 Sedangkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum mengalami penurunan dari 1.859.040 jiwa pada tahun 2023 menjadi 1.723.432 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan Jumlah orang/barang melalui terminal pertahun pada tahun 2024 sebanyak 459.360 jiwa menurun dari tahun 2023 sebanyak 464.740 jiwa.

Tabel 2.102
Indikator Perhubungan di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Perhubungan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1:6,65	1:7,00	1:6,66	1:6,66	1:6,66
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	2.619.360	1.445.400	1.874.880	1.859.040	1.723.432
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (Jiwa)	654.840	307.800	468.720	464.740	459.360

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

i. Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2024, seluas 100% wilayah di Kabupaten Majalengka telah tercakup layanan telekomunikasi, selain itu Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website telah mencapai 100%.

Indikator selengkapnya atas capaian urusan komunikasi dan informasi secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.103
Indikator Capaian Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website (%)	100	100	100	100	100
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	59	17	23	17	17
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	74,75	98,54	94,46	95,04	98,10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.104
Jumlah Tower Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Telkomsel	62	17	1	1	1
2.	TBG	78	83	93	95	103
3.	Protelindo	57	59	59	59	70
4.	XL	5	2	2	2	2
5.	Indosat	8	8	8	-	-
6.	SIP	3	3	11	6	6
7.	Mitratel (Telkom Akuisisi ke Mitratel)	48	93	112	112	114
8.	Java Indoku	-	-	-	-	-
9.	Reka Cipta	-	-	-	-	-
10.	WMI, dll	-	-	5	-	-
11.	STP	13	13	10	9	9
12.	Indosiar	1	1	1	1	1
13.	Centratama	9	9	9	9	9
14.	IBS	12	13	5	11	11
15.	Metro TV	1	1	2	-	-
16.	Lasmana Swasti Prashida	1	5	1	5	5
17.	Hutchison Ooredoo	2	2	5	2	2
18.	Epid Menara Assetco (EMA)	-	-	-	8	8
19.	Persada Sokka	-	-	-	1	1
20.	Gihon Telekomunikasi Indonesia	-	-	-	5	5
21.	Permata Karya Perdana	-	-	-	-	1
22.	Era Bangun Towerindo	-	-	-	-	1



No.	Nama Provider	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total		300	309	324	326	349

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Majalengka telah di bentuk melalui Keputusan Bupati Majalengka Nomor 048/Kep.162-Kominfo/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka PPID berperan dalam:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi;
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Sumber Informasi.

Pada Tahun 2020 telah terbentuk PPID Pembantu di semua Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam kendali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka sebagai Ketua PPID Kabupaten.

j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah koperasi pada tahun 2024 sebanyak 517 unit dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.105
Jumlah Koperasi Yang Masih Aktif Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	KUD	26	26	26	15	15
2.	Non KUD	469	536	539	481	502
3.	Jumlah Koperasi	495	562	565	496	517
4.	Jumlah Koperasi Aktif	185	250	253	204	226

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 517 unit koperasi ternyata yang masih aktif hanya 226 unit sehingga diperlukan upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk.

Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 tercatat berjumlah 74.691 unit.



Tabel 2.106
Jumlah UMKM Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Kategori	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	28.729	29.075	74.432	74.701	74.691

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

UMKM dituntut untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan mengikuti perkembangan zaman, untuk itu transformasi UMKM khususnya di era digital harus dilakukan dalam berbagai aspek, antara lain teknologi, operasional, layanan, inovasi produk dll. Pemerintah telah berupaya melakukan beberapa hal dalam upaya transformasi UMKM. Antara lain dukungan pembiayaan, promosi dan kemudahan izin usaha.

Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktifitas dalam menciptakan dan atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Setiap wirausaha perlu memiliki jiwa kewirausahaan sesuai dengan fasenya yang terdiri dari calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha mapan. Di Era digital, pengembangan kewirausahaan UMKM merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Terutama dalam menciptakan kebijakan yang kondusif bagi UMKM. Kewirausahaan UMKM dilakukan dengan membangun sinergitas dalam pemetaan potensi kewirausahaan, menciptakan iklim kewirausahaan, menumbuhkembangkan kewirausahaan dan inkubasi kewirausahaan serta dukungan pembiayaannya. Upaya-upaya dimaksud telah dilakukan pemerintah dalam beberapa aktifitas, misalnya apresiasi terhadap UMKM berprestasi dalam bentuk permodalan dan promosi melalui kegiatan GASIK (Gerakan Start Up Inovatif dan Kompetitif), Fasilitasi pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih sebagai amanat dari Inpres No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih dan Fasilitasi/“Jemput Bola” UMKM dalam kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana NIB berfungsi sebagai identitas tunggal yang mempermudah urusan perijinan usaha, akses permodalan dan legalitas usaha.



Ukuran keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan rasio kewirausahaan.

Tabel 2.107
Rasio Wirausaha Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Kategori	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Wirausaha	persen	3,82	3,47	2,43	3,74

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Menurut Peraturan Presiden No 2 tahun 2022 tentang Pengembangan kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, rasio kewirausahaan adalah rasio perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi Angkatan kerja. Urgensi peningkatan rasio wirausaha bagi suatu daerah/wilayah adalah peningkatan lapangan kerja baru, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan pengentasan kemiskinan.

k. Penanaman Modal

Selama periode 2020-2024, nilai investasi di Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp 2,396 trilyun pada tahun 2020 menjadi Rp 7,935 trilyun pada tahun 2024. Peningkatan pesat nilai investasi ini disebabkan karena banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan baik perusahaan skala kecil, menengah maupun perusahaan besar yang berinvestasi di Majalengka. Perkembangan jumlah nilai investasi serta jumlah dan kategori perusahaan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.108
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Kategori Perusahaan	Tahun (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perusahaan Mikro & Kecil	82.988,100	221.794,02	1.353.416,387	2.001.524,71	1.181.147,40
2.	Perusahaan Menengah	58.632,1,85	645.987,50	437.937,037	271.834,55	129.311,36
3.	Perusahaan Besar	2.254.559,76	4.223.801,46	13.805.755,956	6.332.437,92	6.594.901,76



No.	Kategori Perusahaan	Tahun (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	2.396.180,04	5.091.582,98	15.597.109,38	8.605.797,18	7.935.578,04

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Perkembangan jumlah investasi PMDN dan PMA pada kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.31
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.109
Data Kategori Perusahaan Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Kategori Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perusahaan Mikro dan Kecil	544	2.488	10.464	35.792	53.570
2.	Perusahaan Menengah	28	402	323	168	144
3.	Perusahaan Besar	42	33	515	260	207
	Jumlah	615	2.923	11.302	36.220	53.921

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA pada kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.32
Perkembangan Jumlah Investor PMDN dan PMA
Kabupaten Majalengka



Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

1. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.

Demikian halnya dengan olah raga, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat menjamin pemerataan akses terhadap olah raga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Tabel 2.110
Jumlah Prasarana Olahraga Di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Jumlah Prasarana Olahraga	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lapangan Bola Voli	1.012	1.012	1.015	1.015	1.015
2.	Lapangan Bola Basket	90	91	92	91	91
3.	Lapangan Tennis	22	22	22	22	22
4.	Lapangan Futsal	65	65	67	67	68
5.	Stadion Sepak Bola	1	1	1	1	1
6.	Stadion Atletik	-	-	-	-	-
7.	Lapangan Bulu Tangkis	440	440	442	442	443
8.	Gedung Olahraga	306	308	310	310	311



No.	Jumlah Prasarana Olahraga	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Kolam Renang	23	25	25	25	25
10.	Sasana Tinju/Beladiri	1	1	1	1	1
11.	Velodrome	-	-	-	-	-
12.	Arena Bowling	-	-	-	-	-
13.	Rumah Billiard	5	5	5	5	5
14.	Lapangan Olahraga Terbuka	1.125	1.126	1.130	1.130	1.130

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.111
Perkembangan Indikator Olahraga dan Kepemudaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	60	63	63	63	63
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	3	4	5	4	5
3.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	33	18	36	44	44
4.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	128	70	139	139	139
5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	125	97	70	72	137
6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	2	9	26	99	264
7.	Jumlah prestasi olahraga	medali	2	9	84	78	181

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

m. Statistik

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah statistik. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik adalah ketersediaan buku “Kabupaten Dalam Angka” dan “PDRB Kabupaten” yang selama ini telah berhasil terpenuhi.



Tabel 2.112
Ketersediaan Dokumen Statistik
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada (Belum Terintegrasi)	Ada (Belum Terintegrasi)	Ada (Belum Terintegrasi)	Data Statistik Sudah Terintegrasi	Data Statistik Sudah Terintegrasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika dan BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

n. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selama 2020-2024, setiap tahunnya dilaksanakan Festival Seni dan Budaya yang diharapkan dapat melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula pelestarian benda dan situs budaya sebagaimana pada di bawah ini:

Tabel 2.113
Kegiatan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	15	12	15	17
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	125	125	240	125	125
3.	Jumlah Total Benda, Situs & Kawasan yang dimiliki daerah	3	105	105	105	105
4.	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	-	3	3	3	3
5.	Jumlah cagar budaya yang	4	4	4	4	4



No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	dikelola secara terpadu					

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Festival dan pelestarian seni dan budaya berbasis kearifan lokal merupakan daya Tarik bagi wisatawan yang dapat menjadi pembeda dengan daya Tarik Kabupaten lainnya bahkan beberapa daya Tarik seni dan budaya menjadi objek penelitian yang dapat meningkatkan lama tinggal kunjungan wisata. Misalnya penelitian terkait budaya tanah di Kawasan terakota, budaya terasering sebagai salah satu upaya ketahanan pangan dll. Potensi seni dan budaya masih sangat besar dalam menarik kunjungan wisatawan, untuk itu dibutuhkan upaya khususnya dalam menggali dan mengembangkan potensi seni dan budaya. Kendala yang masih dihadapi Kabupaten Majalengka dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya adalah belum ditunjang dengan adanya sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif

o. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Tabel 2.114

Data Perpustakaan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perpustakaan (Unit)	1.171	1.753	1.753	1.753	1.753
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	2.540	7.561	26.037	25.881	26.113
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Buku)	39.861	41.831	43.018	45.598	51.114
4.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki	5	6	5	5	5



No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	sertifikat (Orang)					
5.	Jumlah seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai (Orang)	5	6	7	7	7

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

p. Kearsipan

Kinerja pengelolaan arsip daerah dapat diukur dari capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.115

Data Kinerja Kearsipan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan Tata Kearsipan ke OPD dan Kecamatan (%)	16,55	56,00	63,00	67,00	76,25
2.	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Kegiatan)	3	2	2	3	3
3.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku (%)	24,07	25,06	26,79	23,21	85,00

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.5.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Pariwisata Kabupaten Majalengka mengalami kemajuan seiring telah dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, dan untuk menunjang sarana infrastruktur transportasi darat yang ada, wilayah Kabupaten Majalengka telah dilalui oleh Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan rencananya akan terhubung dengan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) yang sudah mulai dibangun pada tahun 2012. Untuk itu dilakukan terobosan pengembangan objek-objek wisata baru sebagai stimulator dan inspirasi geliat kompetitif objek-objek wisata lama yang bervariasi.

Berbagai promosi dan penataan objek wisata yang ada di Kabupaten Majalengka telah dilakukan selama periode 2020-2024,



hasilnya sudah mulai terlihat dengan meningkatnya kunjungan wisata, namun berdasarkan data, peningkatan jumlah kunjungan wisata belum mendongkrak PAD sektor pariwisata secara signifikan, sehingga perlu terobosan untuk terus menggali potensi PAD dari sektor pariwisata.

Jumlah kunjungan wisata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terus meningkat. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata sebanyak 375.000 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.357.398 orang. Adapun perkembangan PAD sektor wisata di Kabupaten Majalengka masih fluktuatif, pada tahun 2020 jumlah PAD sektor wisata sebesar Rp 64,2 juta, tahun 2021 menurun karena pandemi Covid-19 menjadi Rp 59,8, meningkat lagi tahun 2022 menjadi Rp 65,3 juta, tahun 2023 menurun menjadi Rp 49,7 juta dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 72,4 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.116
Indikator Capaian Kepariwisata Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan wisata	375.000	472.906	818.543	1.050.505	2.357.398
2.	PAD Sektor Wisata (Juta Rupiah)	64,2	59,8	65,3	49,7	72,4
3.	Jumlah Hotel	18	24	27	30	30
4.	Jumlah Kamar	512	641	649	772	932
5.	Jumlah Rumah Makan/Restoran	-	156	156	156	175

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

b. Pertanian

Luas Kabupaten Majalengka adalah 120.424 Ha, terdiri atas lahan sawah pada tahun 2024 sebesar 49.465 Ha dan lahan bukan sawah 70.959 Ha. Untuk luas bukan sawah didominasi oleh lahan tegal/kebun sebesar 23.958 Ha.

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas unggulan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Majalengka terdiri atas:



a) **Padi**

Luas tanam padi pada tahun 2024 sebesar 81.957 hektar sama dengan luas tanam pada tahun 2023, luas panen padi pada tahun 2023 sebesar 101.313 hektar **turun** menjadi 92.966 hektar pada tahun 2024. Turunnya Luas panen padi berimbas kepada hasil produksi dimana pada tahun 2023 sebesar 657.081 ton **turun** menjadi 606.617 ton pada tahun 2024. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih.

b) **Jagung**

Luas tanam jagung pada tahun 2023 sebesar 14.851 hektar **turun** menjadi 14.170 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 sebesar 14.657 hektar **turun** menjadi 14.170 hektar pada tahun 2024. Namun turunnya luas panen jagung tidak berimbas kepada hasil produksi, dimana pada tahun 2023 produksi jagung sebesar 112.486 ton **naik** menjadi 136.246 ton pada tahun 2024. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma.

c) **Kedelai**

Luas tanam kedelai pada tahun 2023 sebesar 1.486 hektar sama dengan luas tanam kedelai pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 sebesar 874 hektar **turun** menjadi 638 hektar pada tahun 2024. Turunnya luas panen kedelai berimbas kepada hasil produksi dimana pada tahun 2023 sebesar 1.540 ton **turun** menjadi 1.074 ton pada tahun 2024. Sentra kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas pangan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.117
Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	123.724	103.102	118.480	81.957	81.957
2.	Jagung	19.477	15.907	15.967	14.851	4.170
3.	Kedelai	1.492	598	1.771	1.486	1.486

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.118
Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	110.199	104.849	116.040	101.313	92.966
2.	Jagung	19.533,52	15.548,34	17.819	14.657	17.460
3.	Kedelai	2.922,68	417,23	2.552	874	638

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Tabel 2.119
Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	724.834	681.664	773.775	657.081	606.617
2.	Jagung	150.647	118.795	138.074	112.486	136.246
3.	Kedelai	4.977	668	4.440	1.540	1.074

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

Komoditas Unggulan Tanaman Hortikultura, Komoditas unggulan tanaman hortikultura khususnya sayuran terdiri atas:

a) **Bawang Merah**

Luas tanam bawang merah pada tahun 2023 seluas 2.892 hektar **turun** menjadi 2.671 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 seluas 2.882 hektar **turun** menjadi 2.671 hektar pada tahun 2024, produksi pada tahun 2023 sebesar 35.811 ton **turun** menjadi sebesar 31.978,25 ton pada tahun 2024. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka.

**b) Cabai Besar**

Luas tanam cabai besar pada tahun 2023 seluas 631 hektar **naik** menjadi 840 hektar pada tahun 2024, luas panen seluas 620 hektar pada tahun 2023 **naik** menjadi 653 hektar pada tahun 2024, sedangkan produksi pada tahun 2023 sebesar 7.440 ton **turun** menjadi sebesar 3.788,93 ton pada tahun 2024. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran.

c) Kentang

Pada tahun 2023 luas tanam kentang seluas 169 hektar **naik** menjadi 169 hektar pada tahun 2024, dengan luas panen tahun 2023 sebesar 165 hektar **naik** menjadi 236 hektar pada tahun 2024, dengan produksi pada tahun 2023 sebesar 3.860 ton **naik** menjadi 6.069,5 ton pada tahun 2024. Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman hortikultura tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.120
Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bawang Merah	2.540	3.067	2.614	2.892	2.685
2.	Cabai Besar	587	665,6	185	631	840
3.	Kentang	380	317	266	169	236

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.121
Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bawang Merah	2.742	2.873	2.658	2.882	2.671
2.	Cabai Besar	669	513	234	620	653
3.	Kentang	393	329	227	165	240

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.122
Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bawang Merah	35.166,80	34.068,30	34.504	35.811	31.978,25
2.	Cabai Besar	7.282,60	9.848,22	3.036	7.440	3.788,93
3.	Kentang	7.255,90	5.645,40	4.079	3.860	6.069,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2. Komoditas Unggulan Buah-buahan

Komoditas unggulan buah-buahan terdiri atas:

a) **Mangga**

Luas tanam mangga pada tahun 2023 seluas 44.262 hektar, **naik** pada tahun 2024 menjadi 11.021,49 hektar, luas panen pada tahun 2023 seluas 4.198 hektar, **naik** menjadi 4.981,94 hektar pada tahun 2024 dan produksi pada tahun 2023 sebesar 37.440,67 ton **naik** menjadi 39.683,60 ton pada tahun 2024. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.

b) **Durian**

Luas tanam durian pada tahun 2023 menjadi 9.449 hektar **naik** pada tahun 2024 menjadi 2.358,64 hektar, luas panen pada tahun 2023 seluas 1.542 hektar **naik** menjadi 1.026,11 hektar pada tahun 2024, dan produksi pada tahun 2023 sebesar 22.429,37 ton **turun** menjadi 9.486,20 ton pada tahun 2024. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.

c) **Jambu Biji**

Pada tahun 2023 luas tanam jambu biji seluas 7.691 hektar **turun** menjadi 631,78 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 seluas 994 hektar **turun** menjadi 388,40 hektar pada tahun 2024, dan produksi pada tahun 2023 sebesar 6.650,88 ton **naik** menjadi 4.334,80 ton pada tahun 2024.



Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas tanaman buah-buahan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mangga	11.092,09	11.098,2	11.131,6	44.262	11.021,49
2.	Durian	2.294,74	2.369,56	2.203,84	9.449	2.358,64
3.	Jambu Biji	651,47	651,05	655,53	7.691	631,78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.124
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mangga	4.673,11	4.911,22	4.166,97	4.198,00	4.981,94
2.	Durian	551,43	640,66	952,83	1.542,00	1.026,11
3.	Jambu Biji	240,73	251,00	245,37	994,00	388,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.125
Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mangga	52.210,60	65.283,43	44.754,69	37.440,67	39.683,60
2.	Durian	8.889,90	5.940,70	11.263,46	22.429,37	9.486,20
3.	Jambu Biji	2.803,60	3.180,30	3.618,46	6.650,88	4.334,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Cakupan Bina Kelompok Petani, Kabupaten Majalengka sebagai kabupaten agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan bahan baku dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penentu daya saing produk agribisnis. Dari kedua komponen tersebut sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan atau keberhasilan pemerintah yang potensinya sebagian besar didapat dari pertanian, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Majalengka



setiap tahunnya selalu mengalokasikan kegiatan yang berbasis pada informatika seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.126
Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Petani (kelompok)
1.	2020	2.200
2.	2021	2.852
3.	2022	2.363
4.	2023	1.320
5.	2024	2.541

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

c. Perdagangan

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat, fasilitas perdagangan di Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, antara lain bisa dilihat dengan semakin banyaknya pasar/toko swalayan milik masyarakat yang berdiri. Fasilitas perdagangan lainnya yaitu pasar Pemda sebanyak 5 unit yang kondisi fisiknya semakin membaik, dan pasar desa tercatat 39 unit pada tahun 2024.

Tabel 2.127
Jumlah dan Jenis Pasar di Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasar Pemda	4	5	5	5	5
2.	Pasar Sindangkasih Cigasong					
	- Kios	430	430	580	580	580
	- Ruko / Toko	35	35	37	37	37
	- Los / Auning	31/130	31/130	31/130	31/130	80
	- Emprakan	140	140	106	106	180
3.	Pasar Prapatan					
	- Kios	158	158	468	468	246
	- Ruko / Toko	-	-	243	243	-
	- Los / Auning	310	310	786	768	310
	- Emprakan	292	292	285	285	55
4.	Pasar Talaga					
	- Kios	210	210	234	234	234
	- Ruko / Toko	28	28	28	28	28



No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	- Los / Auning	200	200	342	342	342
	- Emprakan	175	175	166	166	188
5.	Pasar Kadipaten					
	- Kios	171	171	206	206	206
	- Ruko / Toko	50	50	53	53	53
	- Los / Auning	701	701	1.080	1.080	1080
	- Emprakan	164	164	89	89	90
6	Pasar jatitujuh					
	- Kios	-	-	-	168	188
	- Emprakan	-	-	-	46	11
7.	Jumlah Pasar Desa	39	38	39	39	39
8.	Jumlah Pasar Modern	110	165	188	188	231

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

d. Perindustrian

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dan mencapai 25,94% dari seluruh sektor PDRB pada tahun 2024. Ini menandakan berbagai jenis industri di Majalengka mulai tumbuh dan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya jenis-jenis industri yang ada di Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.128
Jenis Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024

No.	Jenis Industri	Jumlah IKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Industri Makanan/Pengolahan Pangan	769	804	882	960	1051
2.	Industri Minuman	5	7	8	9	13
3.	Industri Pengolahan Tembakau	16	16	15	17	17
4.	Industri Tekstil	40	59	62	49	52
5.	Industri Pakaian Jadi	193	204	208	235	244
6.	Industri Kulit, Barang Kulit dan Alas Kaki	8	7	7	10	10
7.	Industri Kayu, Barang Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture)	135	151	151	159	165
8.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2	2	2	1	2
9.	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	-	2	8	9
10.	Industri Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi	-	-	0	0	0



No.	Jenis Industri	Jumlah IKM				
		2020	2021	2022	2023	2024
11.	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	5	5	7	8
12.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	1	1	1	1
13.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4	6	6	2	5
14.	Industri Barang Galian Bukan Logam	521	514	527	529	530
15.	Industri Logam Dasar	-	-	0	0	0
16.	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	60	67	67	65	65
17.	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	-	-	0	1	1
18.	Industri Peralatan Listrik	-	-	0	0	0
19.	Industri Pesin dan Perlengkapan ytdl	-	1	1	0	1
20.	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan semi Trailer	-	-	1	0	0
21.	Industri alat Angkutan Lainnya	-	-	0	0	0
22.	Industri Furniture	71	85	87	94	96
23.	Industri Pengolahan Lainnya	17	23	30	32	33
24.	Industri dan pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-	0	0	0
25.	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulaha Material	-	-	-	-	1
	JUMLAH	1.848	1.952	2.062	2.179	2.304

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Dalam 5 tahun terakhir berdasarkan data potensi industri kecil dan menengah, Industri Kecil Menengah yang memiliki trend positif adalah berturut-turut adalah:

1. Industri pengolahan makanan;
2. Industri pengolahan galian bukan logam;
3. Industri Pakaian jadi;
4. industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus; serta
5. industri furniture.

Berdasarkan trend pertumbuhan Industri Kecil Menengah, ketersediaan bahan baku dan peluang pasar yang masih terbuka baik export maupun lokal prioritas maka pengembangan Industri Kecil Menengah untuk 5 tahun ke depan adalah industri pengolahan makanan dan dan industri hasil pertanian.



e. Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2024, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2023 sebesar 1.289,30 ton **naik** menjadi 1.308,70 ton pada tahun 2024. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh.

Produksi ikan nila pada tahun 2023 sebesar 4.139,50 ton **naik** menjadi 4.225,40 ton pada tahun 2024 dengan sentra produksi ikan nila berada di Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding.

Produksi ikan gurame pada tahun 2023 sebesar 945,80 ton **naik** menjadi 966,60 ton pada tahun 2024, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah.

Produksi ikan lele pada tahun 2023 sebesar 1.756,00 ton **naik** menjadi 1.794,30 ton pada tahun 2024, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

Tabel 2.129
Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ikan Mas	1.338,39	1.303,34	1.261,60	1.289,30	1.308,70
2.	Ikan Nila	3.939,94	4.049,04	4.052,00	4.139,50	4.225,40
3.	Ikan Nilem	238,47	234,92	265,58	285,90	291,10
4.	Ikan Tambak	106,94	108,09	115,30	118,10	119,80
5.	Ikan Mujaer	17,58	24,61	-	-	-
6.	Ikan Lele	1.486,00	1.529,30	1.718,80	1.756,00	1.794,30
7.	Ikan Sepat Siem	108,55	109,61	113,20	115,60	117,80
8.	Ikan Bawal	47,53	49,06	51,20	55,00	60,00
9.	Ikan Tawes	143,59	146,65	157,10	160,60	163,90
10.	Udang Galah	-	-	-	-	-
11.	Belut	56,39	57,75	-	-	-
12.	Patin	n/a	n/a	58,80	60,00	61,30
13.	Ikan Gurame	893,65	918,85	925,80	945,80	966,60
14.	Ikan Gabus	38,48	46,31	47,50	49,00	50,00
15.	Ikan Beunteur	58,70	74,54	97,90	100,50	102,50
16.	Ikan Lalawak	49,04	54,93	61,50	63,20	64,20
17.	Ikan Paray	48,56	58,76	80,20	81,70	83,20
18.	Ikan Seren	23,54	29,22	-	-	-
19.	Ikan Tagih	60,79	48,90	63,50	66,55	67,90
20.	Ikan Deleg	26,09	31,31	-	-	-
21.	Ikan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.130
Indikator Capaian Urusan Perikanan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	25,46	26,2	21,69	11,35	8,5
2.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah daerah	83	0	0	0	0
3.	Jumlah seluruh kelompok nelayan	826	660	660	663	663
4.	Produksi perikanan (ton)	8.682,23	8.875,19	9.069	9.286,75	9.476,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Ikan merupakan sumber protein hewani dan juga memiliki kandungan gizi yang tinggi diantaranya mengandung mineral, vitamin dan lemak tak jenuh. Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Kabupaten Majalengka mengalami fluktuatif, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami penurunan.

f. Peternakan

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2024 populasi ayam ras pedaging sebanyak 31.748.564 ekor dengan produksi daging sebesar 41.622,37 ton **menurun** dari tahun 2023 sebesar 146.176,76 ton, populasi domba pada tahun 2024 sebanyak 1.385.522 ekor dengan produksi daging mencapai 2.957,50 ton **meningkat** dari tahun 2023 yang mencapai 2.582,80 ton dan populasi sapi potong pada tahun 2024 sebanyak 9.639 ekor dengan produksi daging mencapai 2.467,94 ton **meningkat** dari tahun 2023 yang mencapai 2.377,47 ton. Sentra



produksi ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Banjaran, Sindangwangi. Sentra produksi domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Dawuan, Kertajati. Sentra produksi sapi potong tersebar di Kecamatan Kertajati, Lemahsugih, Majalengka.

Tabel 2.131
Populasi Peternakan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Tahun (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ayam Ras Pedaging	17.842.680	18.295.752	18.747.742	18.583.366	31.748.564
2.	Domba	1.425.428	1.609.282	1.713.410	1.376.616	1.385.522
3.	Sapi Potong	15.073	15.477	9.212	9.447	9.639

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.132
Produksi Peternakan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Jenis	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ayam Ras Pedaging	23.391,75	23.985,73	24.578,40	146.176,76	41.622,37
2.	Domba	1.745,09	1.865,68	2.584,83	2.582,80	2.957,50
3.	Sapi Potong	2.272,63	2.373,23	2.393,55	2.377,47	2.467,94

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

g. Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan diantaranya adalah teh, tembakau, kopi, cengkeh, dan tebu, sebagai berikut:

a) Teh

Luas tanam komoditas teh pada tahun 2023 adalah sebesar 636,20 hektar, **menurun** menjadi 611,20 hektar pada tahun 2024. Sedangkan produksi teh pada tahun 2024 sebesar 98,85 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh.

b) Tembakau

Luas tanam komoditas tembakau pada tahun 2023 sebesar 1.247,85 hektar **meningkat** menjadi 1.261,55 hektar pada tahun



2024 dengan produksi sebesar 1.109,22 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih dan Majalengka.

c) **Kopi**

Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2023 sebesar 1.223,34 hektar **meningkat** menjadi 1.324,00 hektar pada tahun 2024 dengan produksi sebesar 275,61 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.

d) **Cengkeh**

Luas tanam komoditas cengkeh pada tahun 2023 sebesar 2.084,62 hektar **menurun** menjadi 2.084,22 hektar pada tahun 2024, dengan produksi olahan pada tahun 2024 berupa bunga basah sebesar 594,05 ton dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.

e) **Tebu**

Luas tanam komoditas tebu pada tahun 2023 sebesar 3.836,96 hektar **meningkat** menjadi 4.005,54 hektar pada tahun 2024, dengan produksi berupa tebu sebesar 9.969,41 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung, Leuwimunding dan Jatitujuh.

Data perkembangan luas tanam, luas panen dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan tersebut dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.133
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Teh	661,2	1.800	661,2	636,20	611,20
2.	Tembakau	1.461,3	1.954,02	1.231,47	1.247,85	1.261,55
3.	Kopi	1.080,6	186,39	1.115,64	1.223,34	1.324,00
4.	Cengkeh	2.087,0	1.982,10	2.086,97	2.084,62	2.084,22
5.	Tebu	3.012,9	549,19	3.285,81	3.836,96	4.005,54

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.



Tabel 2.134
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Komoditas	Tahun (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Teh	458,2	479,82	585,94	119,15	98,85
2.	Tembakau					
	- Daun	8.535,9	8.576,9	7.914,15	8.506,6	-
	- Rajangan	813,7	858,13	-	1.105,85	1.109,22
3.	Kopi	1.317,9	249,62	1.207,12	271,25	275,61
4.	Cengkeh					
	- Bunga basah	3.048,2	565,72	2.513,86	585,03	594,05
	- Minyak cengkeh	-	-	-	-	
5.	Tebu	25.115,8	537,71	173.190,00	13.126,57	9.969,41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025.

2.1.5.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2024.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mempunyai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2022.

Selanjutnya setiap tahun disusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD



dalam hal ini merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022.

b. Keuangan

Selain adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang berubah, urusan penunjang keuangan pun mengalami perubahan, diantaranya terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebabkan penyesuaian dalam penyusunan APBD. Capaian pembangunan urusan penunjang keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.135
Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	3,59	2,40	2,49	2,11	0,81
3.	Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (%)	29,07	31,95	30,47	34,09	34,68
4.	Persentase belanja kesehatan terhadap APBD (%)	18,15	20,83	29,92	21,32	25,17
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	45,97	41,88	40,00	60,06	47,06
6.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	54,03	58,12	60,00	39,94	52,94
7.	Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa terhadap APBD (%)	0,37	0,45	0,53	0,61	0,56

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diantaranya dilihat dari jumlah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan



struktural. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2024 sebesar 12,54% sedangkan untuk jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kabupaten tercatat sebanyak 10.045 orang. Adapun jumlah ASN Kabupaten Majalengka tahun 2024 sebanyak 11.752 orang, berkurang 229 orang daripada tahun 2023 sebanyak 11.981 orang.

Tabel 2.136

Indikator Pembangunan Urusan penunjang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	70,77	52,05	34,44	67,19	12,54
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,79	1,57	7,04	91,55	54,12
3.	Jumlah Total ASN (orang)	10.172	9.616	11.773	11.981	11.752
4.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	32	33	34	35	29
5.	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	183	195	191	195	193
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (orang)	7.273	6.903	6.571	9.370	10.045

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

d. Pengawasan

Capaian pembangunan urusan penunjang Pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat diantaranya dilihat dari persentase temuan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Majalengka, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 80,23 persen.



Tabel 2.137
Indikator Pembangunan Urusan Penunjang Pengawasan
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)	60,33	83,05	55,56	66,26	80,23
2.	Jumlah temuan BPK	16	22	10	26	16
3.	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP (level)	2	2	2	3	3
4.	Laporan Hasil Penilaian Kapasitas APIP (level)	2,00	2,00	2,00	3	3
5.	Pemantauan Pelaporan Pemberantasan Korupsi (%)	71,26	82,36	92,35	88,35	95,45

Sumber: Inspektorat Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

e. Sekretariat DPRD

Capaian pembangunan urusan penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dari indikator-indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 2.138
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD yang terlaksana Tepat Waktu	Persen	100	100	100	84	70,5
2.	Fasilitasi kunjungan kerja yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Perda yang disahkan	Perda	7	13	8	5	4
4.	Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan	10	17	9	16	9

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

f. Sekretariat Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Pada tahun 2024 Kabupaten Majalengka meraih Predikat SAKIP A dengan nilai 84. Dengan hasil ini Pemerintah Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan predikat SAKIP sebagai salah satu indikator pemerintahan yang transparan, baik dan efisien serta akuntabel.

Indikator capaian pembangunan urusan penunjang pada Sekretariat Daerah dapat dilihat juga pada jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha yang terbagi dalam kategori yaitu peraturan daerah terkait perizinan, peraturan daerah terkait lalu lintas barang dan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Untuk mempercepat proses perizinan dalam rangka mendukung iklim usaha yang baik, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah mengeluarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



Tabel 2.139
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	53,88	56,84	58,46	73,52	82,04
		Predikat	CC	CC	CC	BB	A
2.	Nilai SAKIP	Poin	67,18	67,08	67,1	68	84
		Predikat	B	B	B	B	A
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	B	B
4.	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Nihil	Tinggi	Tinggi	Tinggi	(masih proses penilaian)
5.	Pemenuhan SPM sesuai Ketentuan	Persen	43,67	62,23	87,00	96,33	97,71
6.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	19,00	54,52	64,30	69,29	71,70
7.	Level Maturitas UKPBJ	level	3/9	6/9	8/9	9/9	9/9

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

2.1.4.5 Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka periode jangka menengah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan berakhir di tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023. Sejalan dengan terdapatnya perubahan-perubahan Kebijakan Nasional dan terjadinya bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian ulang terhadap rencana pembangunan dimaksud yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019



Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selanjutnya disusunlah dokumen rencana pembangunan daerah periode 2024-2026 dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Capaian pembangunan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan untuk dilaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai dan lebih lanjut sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah periode berikutnya.



Tabel 2.140
Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka RPJMD Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		2019			2020			2021*)			2022*)			2023*)			KONDISI AKHIR
			2017	2018	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	TARGET	CAPAIAN	(%)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,92	66,72	67,19	67,52	100,49	67,34	67,59	100,37	67,85	67,81	99,94	68,33	68,56	100,34	68,85	70,76	102,77	68,85
	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,39	69,68	69,73	69,97	100,34	70,08	70,27	100,27	70,22	70,46	100,34	70,40	70,76	100,51	70,60	71,05	100,64	70,60
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,18	12,19	12,21	12,21	100,00	12,22	12,22	100,00	12,81	12,23	95,47	12,97	12,24	94,37	13,17	12,26	93,09	13,17
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,91	7,00	7,09	101,29	7,11	7,27	102,25	7,19	7,31	101,67	7,27	7,49	103,03	7,39	7,52	101,76	7,39
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	8.833	9.416	9.421	9.822	104,26	9.120	9.521	104,40	9.280	9.591	103,35	9.410	9.950	105,74	9.475	10.340	109,13	9.475
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,02	4,95	4,89	4,37	111,90	5,90	5,84	101,03	5,50	5,71	96,32	5,13	4,16	123,32	4,88	4,12	118,45	4,88
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,60	10,79	10,48	10,06	104,17	11,89	11,43	104,02	11,20	12,33	90,84	10,80	11,94	90,45	10,37	11,21	92,51	10,37
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,81	6,23	6,035	7,71	127,75	0,25	0,86	344,00	3,10	4,75	153,23	4,50	6,63	147,33	5,17	6,15	118,96	5,17
5	PDRB per kapita (ADHK)	Ribu Rupiah	14.789	15.740	16.500	17.883	108,38	17.850	17.953	100,58	18.262	17.277	94,61	18.989	18.197	95,83	19.877	19.240	96,79	19.877
6	Indeks Gini	Poin	0,351	0,350	0,335	0,335	100,00	0,340	0,336	101,19	0,339	0,354	95,76	0,337	0,367	91,83	0,330	0,342	96,49	0,330

Keterangan :

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka Tahun 2024, diolah kembali oleh Tim Penyusun Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

*) Target Perubahan RPJMD 2018-2023



Tabel 2.141
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Majalengka RPJMD Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		KONDISI TAHUN 2019			PERUBAHAN RPJMD 2020			PERUBAHAN RPJMD 2021			PERUBAHAN RPJMD 2022			PERUBAHAN RPJMD 2023			Kondisi Akhir
			2017	2018	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	
1	Prosentase peningkatan rata-rata jamaah beraktfitas di Rumah Ibadah	Persen	N/A	N/A	5,00	5,00	100,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	5,00
2	Indeks Gini	Poin	0,351	0,35	0,335	0,331	101,21	0,340	0,336	101,19	0,339	0,354	95,76	0,337	0,367	91,83	0,330	0,342	96,49	0,330
3	Angka Kemiskinan	Persen	12,6	10,79	10,48	10,06	104,17	11,89	11,43	104,02	11,20	12,33	90,84	10,80	11,94	90,45	10,37	11,21	92,51	10,37
4	Angka Stunting	Persen	N/A	N/A	2,70	5,50	49,09	5,00	5,29	94,52	4,50	3,52	127,84	4,00	3,84	104,17	3,50	3,12	112,18	3,50
5	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	N/A	20,00	10,00	20,00	200,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,42	104,20	10,00	8,00	120,00	10,00	10,46	104,60	10,00
6	Nlai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	100,00	BB	B	95,97	BB	B	95,83	BB	B	95,71	BB	B	97,13	BB
7	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	B	B	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B	B	100,00	B
9	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	88,25	88,25	88,50	78,00	88,14	59	58,8	99,66	60	57,48	95,80	84	57,14	68,02	85	88,78	104,45	85
10	Prosentas Besarun Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kemenpan RB	Persen	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Indeks Pengetahuan	Poin	56,83	56,89	58,03	57,55	99,17	58,84	58,84	100,00	59,55	58,34	97,97	58,8	58,97	100,29	59,44	59,12	99,46	59,44
12	Indeks Kesehatan	Poin	75,98	76,43	76,53	76,88	100,46	76,75	77,34	100,77	77,04	77,63	100,77	77,26	78,09	101,07	77,54	74,73	96,38	77,54
13	Prosentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	Persen	80,22	80,37	80,52	68,47	85,03	80,67	68,58	85,01	69,38	69,62	100,35	69,75	69,76	100,01	70,12	69,69	99,39	70,12
14	Nilai Tukar Petani	Persen	N/A	99,67	100,49	100,80	100,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen	N/A	N/A	1,0	0,96	96,00	1,0	-0,05	-5,00	1,0	0,87	87,00	1,0	5,68	568,0	1,0	1,78	178,00	1,0
15	Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	200.000	589.843	619.335	701.335	113,24	500.000	375.000	75,00	525.000	472.906	90,08	850.000	707.698	83,26	1.000.000	1.050.524	105,05	1.000.000
16	Jumlah industri baru	Unit	0	0	40	56	140,00	40	45	112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laju pertumbuhan sektor industri	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	11,88	237,6	5,00	13,34	266,80	5,00	8,5	170,00	5,00
17	Jumlah desa tematik	Desa	0	0	26	33	126,92	26	6	23,08	17	17	100,00	18	18	100,00	18	26	144,44	59
18	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	Desa	N/A	109	36	52	144,44	51	51	100,00	52	134	257,69	41	55	134,15	25	66	264,00	221

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan diolah kembali oleh Tim Penyusun Evaluasi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023



Tabel 2.142
Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka RPD Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2024			TARGET RPD		KONDISI AKHIR
			TARGET	CAPAIAN	(%)	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	68,90	71,37	103,58	69,00	69,20	69,20
	Usia Harapan Hidup	tahun	71,35	71,31	99,94	71,65	72,00	72,00
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,26	12,27	100,08	12,28	12,30	12,30
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,61	7,53	98,95	7,71	7,82	7,82
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.955	10.842	108,91	9.970	9.980	9.980
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,44	4,01	110,72	4,40	4,37	4,37
3	Persentase Penduduk Miskin	persen	10,56	10,82	97,60	10,09	9,63	9,63
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,72	6,38	94,94	6,28	6,34	6,34
5	Nilai Inflasi Daerah	persen	3,97	1,60	248,12	3,97	3,97	3,97
6	PDRB per kapita (ADHB)	Trilyun Rupiah	42,63	34,23	80,30	45,44	47,86	47,86
7	Indeks Gini	Poin	0,329	0,354	92,94	0,328	0,328	0,328

Sumber: RPD Kabupaten Majalengka 2024-2026 diolah kembali oleh Tim Penyusun Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

Tabel 2.143
Target dan Capaian IKU Kabupaten Majalengka RPD Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2024			TARGET RPD		KONDISI AKHIR
			TARGET	CAPAIAN	(%)	2025	2026	
1	Prosentase penduduk miskin	Persen	10,56	10,82	97,60	10,09	9,63	9,63
2	Rata rata lama sekolah	Tahun	7,61	7,53	98,95	7,71	7,82	7,82
3	Angka harapan hidup	Tahun	71,35	71,31	99,94	71,65	72,00	72,00
4	Prevalensi Stunting	Persen	17,36	17,54	98,97	14,61	11,86	11,86
5	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,18	62,19	95,41	67,28	68,49	68,49
6	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	67,08	64,54	96,21	68,26	69,45	69,45
7	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun rupiah	27,58	27,44	99,49	29,31	31,17	31,17
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	4,44	4,01	110,72	4,40	4,37	4,37
9	Indeks Trantibum	Kategori	C	B	109,29	C	B	B
10	Indeks Birokrasi	Kategori	CC	A	136,73	B	B	B
11	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	100,00	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kabupaten Majalengka 2024-2026 diolah kembali oleh Tim Penyusun Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka

Berdasarkan dokumen perencanaan sebelumnya maka dilakukan evaluasi terhadap RPJMD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dengan hasil sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka RPJM Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026 yaitu : Prosentase penduduk miskin, PDRB perkapita, Indek gini, Laju pertumbuhan ekonomi, Indek pembangunan manusia, Tingkat pengangguran terbuka dan capaian nilai inflasi daerah seluruhnya memiliki capaian kinerja diatas 80 persen atau rata rata capaian kinerja mencapai **111,32 persen** dengan predikat kinerja **sangat tinggi**, berdasarkan ketentuan skala nilai peringkat kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 2.144
Rata- Rata Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka
Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026

Indikator Makro RPJMD	% Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Indikator Makro RPD	% Capaian RPD Tahun 2024
1. Prosentase penduduk miskin	92,51	1. Prosentase penduduk miskin	97,60
2. PDRB per kapita	96,79	2. PDRB per kapita	80,30
3. Indek gini	96,49	3. Indek gini	92,94
4. Indek Pembangunan Manusia	102,77	4. Laju pertumbuhan ekonomi	94,94
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	118,45	5. Indek Pembangunan Manusia	103,58
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	118,96	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	110,72
		7. Nilai inflasi Daerah	248,12
Rata rata capaian kinerja	104,33		118,31

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

b. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) terakhir tahun 2024 memberikan gambaran bahwa seluruh capaian indikator tersebut dibawah ini memiliki capaian kinerja diatas 92 prosen atau rata rata capaian kinerja mencapai **112,68 persen** dengan predikat kinerja **sangat tinggi**, berdasarkan ketentuan skala nilai peringkat kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017.



Tabel 2.145
Rata- Rata Capaian Indikator Makro Kabupaten Majalengka
Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	% Capaian Akhir RPJMD 2018-2023	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD	% Capaian RPD Tahun 2024
1. Prosentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas dirumah ibadah	100,00	1. Prosentase penduduk miskin	97,60
2. Indeks gini	96,49	2. Rata-rata lama sekolah	98,95
3. Angka kemiskinan	92,51	3. Angka harapan hidup	99,94
4. Angka stunting	112,18	4. Prevalensi stunting	98,97
5. Prosentase penurunan jumlah penyakit masyarakat	104,60	5. Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah	95,41
6. Nilai SAKIP	97,13	6. Indeks kualitas lingkungan hidup	96,21
7. Opini BPK RI	100,00	7. PDRB per kapita	99,49
8. Indeks kepuasan masyarakat	100,00	8. Tingkat pengangguran terbuka	110,72
9. Indeks profesionalisme ASN	104,45	9. Indeks trantibum	109,29
10. Indeks pengetahuan	99,46	10. Indeks birokrasi	136,73
11. Indeks kesehatan	96,38	11. Kemampuan keuangan daerah	100,00
12. Prosentase rumah tangga yang mengakses sanitasi layak	99,39		
13. Peningkatan laju PDRB sektor pertanian	178,00		
14. Jumlah kunjungan wisatawan	105,05		
15. Laju pertumbuhan sektor industri	170,00		
16. Jumlah desa tematik	144,44		
17. Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya.	264,00		
Rata rata capaian kinerja	121,42		103,94

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan capaian kinerja indikator makro dan indikator kinerja utama (IKU) tersebut diatas mengindikasikan kegiatan pembangunan telah berjalan sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Pada bab mengenai gambaran keuangan daerah ini, akan diuraikan secara rinci kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

2.2.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Diperlukan analisa untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada periode selanjutnya. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kemampuan keuangan APBD sangat dipengaruhi oleh APBN, dimana APBN ditentukan oleh perhitungan asumsi makro APBN yang dipengaruhi oleh:

- 1) Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 2) Laju pertumbuhan perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah;
- 3) Terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor; dan



4) Melemahnya nilai tukar rupiah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu tersebut dilakukan dari pos pendapatan daerah serta belanja daerah dan baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dianalisa dengan menghitung dari tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya diantaranya dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat disajikan berikut ini :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Secara umum komponen pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta



- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan mulai tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diberlakukan mulai tahun 2020, bahwa pendapatan daerah terdiri dari:
- a. pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa; dan transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan.
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari : hibah; dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp. 3.239.509.344.776,06, sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2024 mencapai Rp. 3.137.439.996.280,88. Walaupun terjadi penurunan realisasi pendapatan tetapi terjadi peningkatan PAD pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Komponen pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Dana Perimbangan, yaitu dari dana alokasi khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, bantuan keuangan dari provinsi.



Bila dilihat dari penerimaan daerah, maka Bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2020-2024 mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif. Sedangkan bagian terbesar pendapatan masih berada pada bagian pendapatan dari bagian dana perimbangan terus meningkat, pada tahun 2024 mencapai Rp. 1.255.452.403.615,00 yang sumber terbesar komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan terakhir adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari pos dana penyesuaian.

Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020-2024. Realisasi pendapatan pada periode 2020-2024 terjadi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,3 persen, sebagaimana disajikan pada tabel 2.153.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tolok ukur meningkatnya kegiatan pembangunan suatu daerah dapat diamati dari realisasi pengeluaran/belanja pemerintah daerah, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.



Tabel 2.146

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA PERTUMBUH AN (%)
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024*	
1	PENDAPATAN DAERAH	3.239.509.344.776,06	3.070.483.953.160,11	3.005.190.749.122,61	3.023.014.286.534,06	3.137.439.996.280,88	1,3
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	490.880.764.107,06	466.788.495.605,11	522.458.294.586,61	529.336.132.216,06	530.215.308.790,88	1,9
1.1.1	Pajak Daerah	119.119.943.663,00	143.392.442.998,00	156.740.101.171,00	155.232.982.485,00	167.149.914.498,00	6,5
1.1.2	Retribusi Daerah	17.631.278.296,00	15.513.665.009,00	19.931.473.893,00	13.276.775.081,00	339.702.313.695,00	487,0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.551.818.643,00	5.944.980.467,00	7.409.795.269,00	9.524.899.395,00	8.235.616.793,00	2,8
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	347.577.723.505,06	301.937.407.131,11	338.376.924.253,61	351.301.475.255,06	15.127.463.804,88	-14,6
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.609.883.566.369,00	2.451.683.852.964,00	2.470.049.386.684,00	2.493.522.028.818,00	2.607.224.687.490,00	1,9
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.644.026.980.541,00	1.696.689.917.948,00	1.756.410.665.248,00	1.788.750.784.790,00	1.969.290.407.231,00	3,4
1.2.1.1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	95.224.680.505,00	126.859.688.460,00	124.558.462.548,00	99.856.632.376,00	96.243.204.000,00	8,2
1.2.1.2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.127.919.598.000,00	1.112.158.811.000,00	1.101.637.280.584,00	1.169.587.726.456,00	1.255.452.403.615,00	1,6
1.2.1.3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	105.495.925.036,00	137.408.861.052,00	113.618.834.876,00	72.213.705.353,00	168.996.421.083,00	7,0
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	315.386.777.000,00	320.262.557.436,00	416.596.087.240,00	447.092.720.605,00	448.598.378.533,00	27,5
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	476.635.459.000,00	445.208.660.000,00	408.734.078.000,00	328.530.155.000,00	345.235.126.000,00	-2,9
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	84.966.945.000,00	53.540.146.000,00	19.160.198.000,00	0,00	11.785.482.000,00	-36,1
1.2.2.2	Dana Desa	391.668.514.000,00	391.668.514.000,00	389.573.880.000,00	328.530.155.000,00	333.449.644.000,00	17,1
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	489.221.126.828,00	309.785.275.016,00	304.904.643.436,00	376.241.089.028,00	292.699.154.259,00	4,7
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.142.636.893,00	150.518.504.868,00	176.100.247.504,00	191.720.517.537,00	195.976.481.679,00	5,5
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	341.078.489.935,00	159.266.770.148,00	128.804.395.932,00	184.520.571.491,00	96.722.672.580,00	9,2



NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA PERTUMBUH AN (%)
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024*	
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	138.745.014.300,00	152.011.604.591,00	12.683.067.852,00	156.125.500,00	0,00	-55,3
1.3.1	Pendapatan Hibah	138.745.014.300,00	152.011.604.591,00	12.683.067.852,00	156.125.500,00	0,00	-55,3
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

*Unaudited BPK RI



Realisasi Belanja dapat menjadi pengukuran kinerja suatu daerah, yaitu semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Pada periode Tahun 2020-2024, belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,18 persen. Belanja Operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,37 persen. Komponen Belanja transfer mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -1,54 persen. Komponen belanja modal terjadi penurunan yaitu rata-rata sebesar -6,45 persen.

Jenis pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Operasional yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan. Realisasi belanja daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.154.

5. Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Di bawah ini disajikan Data Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 2.155 di bawah ini.



Tabel 2.147
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020–2024

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA PERTUMBUH AN (%)
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024*	
2	BELANJA DAERAH	3.225.169.974.376,00	3.105.899.535.279,00	2.989.792.990.334,00	3.024.588.240.018,00	3.179.987.890.985,00	1,18
2.1	BELANJA OPERASI	1.871.399.832.597,00	1.957.781.367.788,00	2.036.498.318.961,00	2.177.482.229.867,00	2.292.848.901.707,00	4,37
2.1.1	Belanja Pegawai	1.202.589.347.980,00	1.195.391.829.485,00	1.199.383.502.524,00	1.218.477.624.958,00	1.312.106.230.758,00	0,98
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	601.470.484.617,00	710.160.988.874,00	776.033.932.607,00	877.003.555.839,00	888.816.101.149,00	9,55
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	30.840.000.000,00	45.940.749.429,00	47.392.283.830,00	72.558.749.070,00	87.696.569.800,00	26,59
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	36.500.000.000,00	6.287.800.000,00	13.688.600.000,00	9.442.300.000,00	4.230.000.000,00	204,09
2.2	BELANJA MODAL	792.443.784.762,00	590.725.094.825,00	419.963.774.013,00	379.225.421.744,00	412.185.473.970,00	-6,45
2.2.1	Belanja Tanah	4.526.627.200,00	3.160.673.641,00	4.308.386.920,00	6.915.570.540,00	996.047.000,00	-16,84
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	198.690.351.913,00	100.872.539.495,00	75.534.381.670,00	130.675.228.152,00	119.268.638.139,00	3,21
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	165.516.946.908,00	207.768.693.910,00	80.357.568.073,00	63.246.824.009,00	117.350.792.151,00	9,33
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	384.755.890.755,00	258.339.704.166,00	249.929.058.518,00	166.976.700.813,00	161.223.113.930,00	-6,99
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	38.953.967.986,00	20.583.483.613,00	9.834.378.832,00	11.411.098.230,00	12.973.445.250,00	-19,46
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	373.437.500,00	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	23.297.126.717,00	29.168.231.234,00	9.374.622.131,00	1.316.816.569,00	722.246.400,00	-14,75
2.3.1	Belanja Tak Terduga	23.297.126.717,00	29.168.231.234,00	9.374.622.131,00	1.316.816.569,00	722.246.400,00	-14,75
2.4	BELANJA TRANSFER	538.029.230.300,00	528.224.841.432,00	523.956.275.229,00	466.563.771.838,00	474.231.268.908,00	-1,54
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	11.868.502.000,00	14.101.448.000,00	15.827.425.000,00	15.293.578.400,00	12.999.999.800,00	0,29
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.868.502.000,00	14.101.448.000,00	15.827.425.000,00	15.293.578.400,00	12.999.999.800,00	0,29



NO	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA PERTUMBUH AN (%)
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024*	
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	526.160.728.300,00	514.123.393.432,00	508.128.850.229,00	451.270.193.438,00	461.231.269.108,00	-1,55
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	525.152.321.800,00	514.123.393.432,00	508.128.850.229,00	451.270.193.438,00	461.231.269.108,00	-1,52
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.008.406.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,52
2.4.2.4	Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

*Unaudited BPK RI



Tabel 2.148
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020–2024

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Penggunaan SiLPA	159.040.827.837,15	104.578.310.809,75	115.916.681.211,26	74.502.501.490,37	66.033.702.027,98	60.095.731.287,04
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	40.336.198.456,00	10.390.090,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	19.299.465.800,00	0,00	1.450.000,00	35.315.682,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	4.997.500,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	178.345.291.137,15	104.581.310.809,75	115.918.131.211,26	74.537.817.172,37	106.369.900.483,98	60.106.121.377,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	44.699.560.813,00	5.517.541.843,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.157.285.100,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	13.899.998.915,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	19.299.465.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	28.456.750.900,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	23.899.998.915,00	44.699.560.813,00	5.517.541.843,00
PEMBIAYAAN NETO	149.888.540.237,15	101.581.310.809,75	109.918.131.211,26	50.637.818.257,37	61.670.339.670,98	54.588.579.534,04

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah data yang menyajikan posisi keuangan Kabupaten Majalengka yang meliputi asset, kewajiban, dan equitas dana pada suatu saat tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satu moneter. Aset terdiri dari asset lancar, investasi jangka Panjang, asset teap, dana cadangan, dan asset lainnya. Gambaran neraca daerah Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.156 di bawah ini.

2.2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Dana Alokasi Umum (DAU)

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan momentum yang sangat baik bagi setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan dalam segala aspek, termasuk pembangunan ekonominya. Dana perimbangan diharapkan dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam upaya membangun daerah. Tujuan hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nurfadilah, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu jenis dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Tidak bisa dimungkiri bahwa DAU merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar untuk daerah, sehingga DAU selalu menjadi “angin segar” dalam instrumen pembangunan daerah.

DAU merupakan bagian penting dalam pendapatan daerah yang termasuk dalam komponen dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkecil ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga



daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal minim tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU berperan penting dalam keuangan daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Masih di PMK yang sama, disebutkan bahwa kebutuhan DAU setiap daerah disusun dengan memperhatikan perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional; kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional, dan layanan publik; perkiraan DAU dalam tiga tahun terakhir; dan perkiraan penerimaan dalam negeri neto.

DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Sebelum tahun anggaran 2023, penyaluran DAU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi yang diterima tiap-tiap Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian pada posisi saat itu Pemerintah Daerah dapat “bermanuver” menggunakan DAU untuk prioritas, kebutuhan, serta program-program daerah yang mengarah pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya spesifikasi alokasi dari DAU tersebut terhadap bidang-bidang tertentu. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa dan fleksibel mengelola DAU dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebelum memasuki Tahun Anggaran 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 38A ayat 1 PMK tersebut berbunyi bahwa alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan



penggunaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah cukup terkejut terhadap “barang” baru ini.

Apa yang dimaksud DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya? Apa perbedaannya? Mungkin itulah yang muncul di benak Pemerintah Daerah saat membaca PMK tersebut. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah DAU *Block Grant* merupakan DAU yang sebelum tahun 2023 yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya sesuai alokasi masing-masing dan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta memenuhi prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Tidak jauh berbeda dengan PMK Nomor 139/PMK.07/2019, DAU *Block Grant* disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.

Bagaimana dengan DAU yang ditentukan penggunaannya? DAU yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah *Specific Grant* atau DAU *earmarked* adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut.

Munculnya DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut merupakan “barang” baru yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. DAU yang ditentukan penggunaannya tersebut berbeda dengan DAU *Block Grant*. DAU yang ditentukan penggunaannya disalurkan secara bertahap. Pemerintah Daerah wajib memenuhi prasyarat di tiap tahapnya sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 sebelum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Tantangan baru muncul untuk Pemerintah Daerah. Jika biasanya Pemerintah Daerah mengelola DAU dengan fleksibel untuk menjalankan kegiatan dan/atau program daerah, saat ini pengelolaan



DAU sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat. Untuk daerah yang kemampuan fiskalnya sudah memadai tentu kebijakan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Namun, bagaimana dengan daerah yang kemampuan fiskalnya sedang, rendah, atau sangat rendah?

Jika kita menelisik pada PMK Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah masih banyak daerah Provinsi/Kota/Kabupaten yang kapasitas fiskalnya sedang, rendah, dan/atau sangat rendah. Adanya DAU yang ditentukan penggunaannya ini membatasi “gerak” dari Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan transfer yang diperoleh dari APBN.

Merujuk pada PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, DAU yang ditentukan penggunaannya dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat Kinerja Daerah, besaran pembayaran gaji PPPK, dan satuan biaya per Kelurahan pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah. DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan tersebut.

DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum sudah ditentukan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Dengan kata lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai selain kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur dalam PMK Nomor 212/PMK.07/2022. Akibatnya, daerah-daerah yang masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan tidak sepenuhnya dapat menggunakan DAU untuk kebutuhan dan program daerah seperti alokasi DAU sebelum Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan secara fleksibel oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan kegiatan prioritas daerah.

Kendala lainnya yaitu apabila persyaratan penyaluran di tiap tahapnya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka DAU yang



ditentukan penggunaannya tidak dapat disalurkan ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam PMK 211/PMK.07/2022. Artinya anggaran DAU tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan/program lain seperti halnya DAU yang diterima Pemerintah Daerah sebelum tahun anggaran 2023.

Pada tahun 2023 alokasi DAU berubah sehubungan dengan terbitnya PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pada PMK tersebut ditentukan bahwa pada tahun anggaran 2023 DAU terbagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) sama seperti dengan penggunaan DAU pada tahun-tahun sebelumnya (sebelum tahun anggaran 2023), sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk bidang/bagian yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Lalu apa hubungan antara DAU yang ditentukan penggunaannya dengan peningkatan pembangunan daerah?

Melalui DAU yang ditentukan penggunaannya tentu diharapkan prioritas pengeluaran anggaran serta pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, DAU yang ditentukan penggunaannya juga mendorong Pemerintah Daerah agar DAU tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimum kepada masyarakat serta pembangunan infrastruktur di daerah.

Pada akhirnya dana perimbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBN ditujukan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, begitu pula arah pembangunan yang selaras antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. DAU yang ditentukan penggunaannya hadir mulai tahun anggaran 2023 sebagai sebuah solusi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya. Pembangunan daerah melalui DAU yang ditentukan penggunaannya khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan penggajian formasi PPPK



sejalan dengan prioritas nasional serta menunjukkan bahwa DAU sebagai salah satu jenis dana perimbangan dengan alokasi yang besar dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

2.2.1.4. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Analisis proyeksi keuangan daerah disajikan dengan melakukan analisis kerangka pendanaan, kapasitas keuangan tersebut dialokasikan untuk mendanai program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan mulai tahun 2025 sampai dengan 2030, dapat dilihat pada Tabel 2.219 di bawah ini.

Mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah sebelumnya, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasilan PAD, maka diproyeksikan penerimaan PAD rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan. Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 tahun adalah:

- a) Penerapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b) Perubahan kelas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada objek BPHTB;
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- d) Adanya strategi di dalam maupun antar OPD pengelola PAD;
- e) Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM personal, pemenuhan sarana dan prasarana serta system operasional pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh OPD pengelola PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
- g) Peningkatan pemanfaatan asset dan keuangan daerah.

Selanjutnya penjelasan per jenis PAD sebagai berikut:

1. **Pajak Daerah**

Proyeksi Pajak Daerah dalam rentang waktu 2025 – 2030 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 15,28% atau rata-rata sebesar 3,05% per tahun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat / wajib pajak dalam membayar pajak daerah, adanya penambahan jenis mata pajak daerah dampak peralihan DBH PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB, rencana perubahan tarif pajak (PBB P2, Reklame dan Air Tanah), peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak termasuk didalamnya digitalisasi pajak daerah meskipun terdapat pula kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran berdampak pada PBJT perhotelan serta PBJT makanan dan/atau minuman, pemberlakuan insentif pajak daerah di waktu tertentu pada PBJT Tenaga Listrik dan BPHTB maupun pemberian keringanan pada PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Retribusi Daerah**

Proyeksi Retribusi Daerah dalam rentang waktu 2025 – 2030 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 29,20% atau rata-rata sebesar 5,84% per tahun. Peningkatan retribusi daerah diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dan Labkesda sebagai dampak dari upaya



peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan. Selain itu peningkatan proyeksi penerimaan juga diperkirakan terjadi pada retribusi pemanfaatan asset daerah dan penggunaan tenaga kerja asing seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja asing yang melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagai dampak inovasi Si Dia Pertama pada Dinas K2UKM.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam rentang waktu 2025 – 2030 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,26% atau rata-rata sebesar 0,05% per tahun. Pendapatan ini diperoleh dari Perumda BPR Majalengka dengan asumsi mulai tahun 2027 dan seterusnya terdapat proyeksi peningkatan laba sebesar 4–7%. Sementara untuk PDAM diproyeksikan akan mengalami penurunan deviden disebabkan potensi sumber mata air menurun secara kualitas dan kuantitatif mengakibatkan penurunan konsumsi air, tunggakan pembayaran oleh pelanggan dan bahkan factor eksternal misalnya perubahan iklim.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dalam rentang waktu 2025 – 2030 diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 17,06% atau rata-rata sebesar 3,41% per tahun. Pendapatan ini diperoleh dari Jasa Giro sebagai dampak proyeksi dari beberapa factor diantaranya peningkatan suku bunga, acuan (Benchmark Interest rate) yang ditetapkan oleh Bank sentral, peningkatan Inflasi, peningkatan permintaan kredit dan perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral.

Proyeksi Belanja Daerah

Selanjutnya belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib (*Mandatory Spending*) dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Diantaranya alokasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan



pengawasan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025-2030 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
- b. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
- c. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan kecamatan hingga kabupaten;
- e. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas;
- f. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- h. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi



umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;

- i. Menyesuaikan gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- j. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
- k. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Selain itu, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025-2030 diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati Majalengka melalui program- program yang bertujuan untuk:

1. Terwujudnya Nilai-nilai Agama dalam Perilaku Kehidupan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
4. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa sesuai Rencana Tata Ruang yang Berkelanjutan.
5. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
6. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Selain pendapatan dan belanja daerah yang telah dibahas sebelumnya, selanjutnya mengenai perencanaan pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan



penyelesaian permasalahan- permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.



Tabel 2.149
Neraca Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	115.847.804.108,26	70.323.303.469,37	56.554.493.591,98	60.096.386.187,04	12.040.684.829,92
Kas di Kas Daerah	82.254.355.261,00	46.307.679.497,00	32.062.361.029,00	22.910.937.908,00	462.874.615,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	18.000.000,00	-	200.028.527,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	56.138.983,00	18.399.638,00	49.880.966,00
Kas di BLUD	30.003.087.677,26	22.320.995.442,37	24.342.057.071,98	35.566.080.511,04	9.864.025.436,92
Kas di JKN	2.764.231.519,00	1.337.337.817,00	538.679,00	-	-
Kas di BOS	624.219.131,00	339.290.713,00	45.095.991,00	654.900,00	400.000,00
Kas di BOP	-	-	-	646,00	646,00
Kas di BOK	-	-	-	1.395.395.614,00	1.653.537.978,00
Kas di Rekening Penampungan PBB	-	-	664.892,00	4.888.443,00	9.965.188,00
Kas Lainnya	201.910.520,00	-	47.636.946,00	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang	143.661.710.551,22	201.582.662.740,22	194.780.548.024,32	226.912.113.724,94	196.730.551.642,94
Piutang Bagi Hasil	17.480.689.477,00	127.462.348.186,78	141.710.565.455,78	26.143.384.740,00	958.218.000,00
Piutang Retribusi	392.683.400,00	695.257.400,00	392.683.400,00	828.386.000,00	6.330.000,00
Piutang Pajak Daerah	112.136.118.871,78	8.843.289.423,00	-	157.699.994.024,78	172.764.299.179,78
Piutang Lainnya	13.652.218.802,44	64.581.767.730,44	26.951.343.525,54	42.240.348.960,16	23.001.704.463,16
Penyisihan Piutang	-62.905.146.045,27	-86.049.601.814,57	-107.732.608.688,12	-124.224.680.908,35	-143.378.392.469,33
Penyisihan Piutang Retribusi	-392.683.400,00	-76.096.653.743,53	-95.822.760.957,28	-	-1.582.500,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-54.077.865.531,53	-392.683.400,00	-392.683.400,00	-113.673.746.094,03	-129.413.223.612,28
Penyisihan Piutang Lainnya	-8.434.597.113,74	-9.560.264.671,04	-11.517.164.330,84	-10.550.934.814,32	-13.963.586.357,05
Bagian Lancar Pinjaman	47.582.500,13	31.297.976,00	13.486.667,00	25.864.679,00	45.505.396,00



URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	47.582.500,13	31.297.976,00	13.486.667,00	25.864.679,00	45.505.396,00
Persediaan	32.897.805.806,07	43.371.102.965,19	42.783.324.139,51	49.131.540.129,59	42.203.546.664,75
Persediaan	32.897.805.806,07	43.371.102.965,19	42.783.324.139,51	49.131.540.129,59	42.203.546.664,75
Biaya Dibayar Dimuka	139.113.391,67	139.572.758,33	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	139.113.391,67	139.572.758,33	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	229.688.870.312,08	229.398.338.094,54	186.409.850.071,69	211.941.223.812,22	107.641.896.064,28
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.506.255.924,00	4.510.140.924,00	4.476.640.924,00	4.476.640.924,00	4.476.640.924,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Investasi dalam obligasi	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	3.161.295.924,00	3.165.180.924,00	3.131.680.924,00	3.131.680.924,00	3.131.680.924,00
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-3.161.295.924,00	-3.165.180.924,00	-3.131.680.924,00	-3.131.680.924,00	-3.131.680.924,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi dalam obligasi	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Penyisihan Dana Bergulir	-3.161.295.924,00	-3.165.180.924,00	-3.131.680.924,00	-3.131.680.924,00	-3.131.680.924,00
Penyisihan Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Non Permanen	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00	1.344.960.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	65.363.538.194,32	74.561.618.777,43	91.156.400.203,13	91.669.129.697,00	92.317.559.200,63



URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	65.363.538.194,32	74.561.618.777,43	91.156.400.203,13	91.669.129.697,00	92.317.559.200,63
Investasi Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	-	-
Penyisihan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Penyisihan Investasi Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	65.363.538.194,32	74.561.618.777,43	91.156.400.203,13	91.669.129.697,00	92.317.559.200,63
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	66.708.498.194,32	75.906.578.777,43	92.501.360.203,13	93.014.089.697,00	93.662.519.200,63
ASET TETAP					
Tanah	787.662.435.081,08	810.646.405.332,08	835.131.925.802,08	845.667.428.806,08	876.732.179.523,08
Peralatan dan Mesin	991.303.714.642,53	1.103.138.977.237,22	1.184.967.770.595,64	1.303.939.505.282,86	1.419.164.703.199,81
Gedung dan Bangunan	1.514.849.445.004,59	1.762.481.098.724,16	1.819.202.806.939,08	1.866.993.168.000,93	1.990.291.156.258,35
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.945.382.746.022,13	3.155.861.774.104,39	3.350.813.369.298,44	3.452.943.915.900,34	3.574.849.340.097,95
Aset Tetap Lainnya	148.882.379.026,40	159.394.685.519,40	171.504.793.096,40	182.959.612.826,40	195.906.163.070,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	91.270.634.933,00	6.295.998.779,00	7.625.230.779,00	5.393.591.840,00	16.912.512.045,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.718.724.321.744,79	-1.997.587.527.611,71	-2.290.016.193.155,16	-2.569.737.803.426,80	-2.842.989.760.346,77
Jumlah Aset Tetap	4.760.627.032.964,94	5.000.231.412.084,55	5.079.229.703.355,48	5.088.159.419.229,81	5.230.866.293.847,82
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	150.072.877.103,00	154.197.245.623,00	169.481.113.654,00	164.365.237.357,00	169.872.389.110,00
Jumlah Dana Cadangan	150.072.877.103,00	154.197.245.623,00	169.479.238.654,00	164.365.237.357,00	169.872.389.110,00
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	3.369.642,88	-	-	6.599.982,00	79.695.785,58
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	18.329.935.050,00	18.533.716.800,00	19.048.362.750,00	20.054.652.000,00	20.527.878.500,00



URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2021	SALDO 2022	SALDO 2023	SALDO 2024
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-15.512.672.425,00	-16.015.409.462,50	-16.358.312.612,50	-16.903.315.700,00	-17.499.819.812,50
Aset Lain-lain	131.105.418.885,68	136.738.407.648,46	138.813090.324,0	149.495.612.862,83	160.501.403.185,87
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-52.959.971.815,54	-59.109.732.617,50	-61.056.361.470,09	-68.822.993.928,26	-76.795.913.582,20
Jumlah Aset Lainnya	80.966.079.338,02	80.146.982.368,46	80.446.778.991,46	83.830.555.216,57	86.813.244.076,75
JUMLAH ASET	5.288.063.357.912,35	5.539.880.556.947,98	5.608.068.806.275,76	5.641.310.525.312,60	5.688.856.342.299,48
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.402.450.287,00	85.084.279.607,00	24.228.752.847,00	35.517.078.181,00	42.129.419.089,00
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.578.786.883,33	782.747.583,33	736.066.166,66	678.164.033,83	765.519.500,00
Utang Belanja	-	10.798.469.393,00	28.189.072.965,00	56.355.070.861,00	87.367.659.144,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	835.153.550,00	985.472.437,00	66.242.694,00	109.633.194,00	91.297.317,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	59.816.390.720,33	97.650.969.020,33	53.220.134.672,66	92.659.946.269,83	130.353.895.050,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	59.816.390.720,33	97.650.969.020,33	53.220.134.672,66	92.659.946.269,83	130.353.895.050,00
EKUITAS					
Ekuitas	5.228.246.967.192,02	5.442.229.587.927,65	5.554.848.671.603,10	5.548.650.579.042,77	5.558.502.447.249,48
Jumlah Ekuitas	5.228.246.967.192,02	5.442.229.587.927,65	5.554.848.671.603,10	5.548.650.579.042,77	5.558.502.447.249,48
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	5.288.063.357.912,35	5.539.880.556.947,98	5.608.068.806.275,76	5.641.310.525.312,60	5.688.856.342.299,48

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 2.150
Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	PROYEKSI (Rp)					
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	PENDAPATAN DAERAH	3.137.439.996.280,88	3.055.593.093.256,01	3.056.201.875.593,00	3.128.160.161.375,12	3.181.210.721.357,04	3.247.075.768.102,29	3.291.626.079.902,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	530.215.308.790,88	656.194.843.617,01	678.255.781.377,00	733.737.005.898,12	769.476.159.874,04	812.304.207.102,29	819.940.002.494,41
1.1.1	Pajak Daerah	167.149.914.498,00	255.578.303.158,00	266.937.097.066,00	277.250.359.641,65	284.584.957.002,44	294.986.118.466,81	301.611.283.660,13
1.1.2	Retribusi Daerah	339.702.313.695,00	380.115.009.927,88	392.212.796.043,00	436.754.400.931,82	465.075.352.121,86	497.413.318.114,03	498.390.580.039,03
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	9.609.821.310,00	8.089.725.151,00	8.724.233.024,37	8.777.301.512,74	8.835.736.910,11	8.837.291.633,48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.127.463.804,88	10.891.709.221,13	11.016.163.117,00	11.008.012.300,28	11.038.549.237,00	11.069.033.611,34	11.100.847.161,77
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.607.224.687.490,00	2.399.398.249.639,00	2.377.946.094.216,00	2.394.423.155.477,00	2.411.734.561.483,00	2.434.771.561.000,00	2.471.686.077.408,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.969.290.407.231,00	1.897.725.829.000,00	1.899.020.377.756,00	1.915.132.098.597,00	1.931.727.773.512,00	1.953.743.997.660,00	1.983.050.157.625,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	96.243.204.000,00	89.596.184.000,00	90.890.732.756,00	91.428.304.052,00	92.799.728.613,00	94.191.724.542,00	95.604.600.410,00
1.2.1.2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.255.452.403.615,00	1.239.120.108.000,00	1.239.120.108.000,00	1.251.369.152.200,00	1.263.740.686.842,00	1.276.235.936.830,00	1.295.379.475.883,00
1.2.1.3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	168.996.421.083,00	48.901.516.000,00	48.901.516.000,00	49.635.038.740,00	49.883.213.934,00	50.132.630.003,00	50.884.619.453,00
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	448.598.378.533,00	520.108.021.000,00	520.108.021.000,00	522.699.603.605,00	525.304.144.123,00	533.183.706.285,00	541.181.461.879,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	345.235.126.000,00	342.758.992.000,00	342.758.992.000,00	340.709.486.200,00	338.967.406.270,00	337.486.638.330,00	342.548.937.904,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	11.785.482.000,00	13.663.372.000,00	13.663.372.000,00	11.613.866.200,00	9.871.786.270,00	8.391.018.330,00	8.516.883.604,00
1.2.2.2	Dana Desa	333.449.644.000,00	329.095.620.000,00	329.095.620.000,00	329.095.620.000,00	329.095.620.000,00	329.095.620.000,00	334.032.054.300,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	292.699.154.259,00	158.913.428.639,00	136.166.724.460,00	138.581.570.680,00	141.039.381.701,00	143.540.925.010,00	146.086.981.879,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	195.976.481.679,00	135.099.428.639,00	136.166.724.460,00	138.581.570.680,00	141.039.381.701,00	143.540.925.010,00	146.086.981.879,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	96.722.672.580,00	23.814.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 2.151

Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	PROYEKSI (Rp)					
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
2	BELANJA DAERAH	3.179.987.890.985,00	3.100.932.071.994,28	3.137.523.070.443,81	3.174.545.842.675,05	3.212.005.483.618,62	3.249.907.148.325,31	3.288.256.052.675,55
2.1	BELANJA OPERASI	2.292.848.901.707,00	2.360.628.688.818,28	2.388.484.107.346,34	2.416.668.219.813,02	2.445.184.904.806,82	2.474.038.086.683,54	2.503.231.736.106,40
2.1.1	Belanja Pegawai	1.312.106.230.758,00	1.499.671.497.070,28	1.517.367.620.735,71	1.535.272.558.660,39	1.553.388.774.852,58	1.571.718.762.395,84	1.590.265.043.792,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	888.816.101.149,00	807.490.383.748,00	817.018.770.276,23	826.659.591.765,49	836.414.174.948,32	846.283.862.212,71	856.270.011.786,82
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	87.696.569.800,00	52.336.808.000,00	52.954.382.334,40	53.579.244.045,95	54.211.479.125,69	54.851.174.579,37	55.498.418.439,41
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.230.000.000,00	1.130.000.000,00	1.143.334.000,00	1.156.825.341,20	1.170.475.880,23	1.184.287.495,61	1.198.262.088,06
2.2	BELANJA MODAL	412.185.473.970,00	243.682.363.718,00	246.557.815.609,87	249.467.197.834,07	252.410.910.768,51	255.389.359.515,58	258.402.953.957,86
2.2.1	Belanja Tanah	996.047.000,00	1.253.000.265,00	1.267.785.668,13	1.282.745.539,01	1.297.881.936,37	1.313.196.943,22	1.328.692.667,15
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	119.268.638.139,00	98.330.404.451,00	99.490.703.223,52	100.664.693.521,56	101.852.536.905,11	103.054.396.840,59	104.270.438.723,31
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	117.350.792.151,00	56.685.869.002,00	57.354.762.256,22	58.031.548.450,85	58.716.320.722,57	59.409.173.307,09	60.110.201.552,12
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.223.113.930,00	72.412.372.000,00	73.266.837.989,60	74.131.386.677,88	75.006.137.040,68	75.891.209.457,76	76.786.725.729,36
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.973.445.250,00	14.847.863.000,00	15.023.067.783,40	15.200.339.983,24	15.379.703.995,05	15.561.184.502,19	15.744.806.479,31
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	373.437.500,00	152.855.000,00	154.658.689,00	156.483.661,53	158.330.168,74	160.198.464,73	162.088.806,61
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	722.246.400,00	6.496.770.000,00	6.573.431.886,00	6.650.998.382,25	6.729.480.163,17	6.808.888.029,09	6.889.232.907,83
2.3.1	Belanja Tak Terduga	722.246.400,00	6.496.770.000,00	6.573.431.886,00	6.650.998.382,25	6.729.480.163,17	6.808.888.029,09	6.889.232.907,83
2.4	BELANJA TRANSFER	474.231.268.908,00	490.124.249.458,00	495.907.715.601,60	501.759.426.645,70	507.680.187.880,12	513.670.814.097,11	519.732.129.703,45
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	12.999.999.800,00	26.289.968.358,00	26.600.189.984,62	26.914.072.226,44	27.231.658.278,72	27.552.991.846,40	27.878.117.150,19
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	12.999.999.800,00	26.289.968.358,00	26.600.189.984,62	26.914.072.226,44	27.231.658.278,72	27.552.991.846,40	27.878.117.150,19
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	PROYEKSI (Rp)					
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
2.4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	461.231.269.108,00	463.834.281.100,00	469.307.525.616,98	474.845.354.419,26	480.448.529.601,41	486.117.822.250,70	491.854.012.553,26
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	461.231.269.108,00	463.834.281.100,00	469.307.525.616,98	474.845.354.419,26	480.448.529.601,41	486.117.822.250,70	491.854.012.553,26
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.4	Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 2.152
Realisasi Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	PROYEKSI (Rp)					
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
3	PEMBIAYAAN DAERAH	54.588.579.534,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	-3.370.027.226,86
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.106.121.377,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	0,00
3.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	60.095.731.287,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.390.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.517.541.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.027.226,86
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.517.541.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.027.226,86
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	PEMBIAYAAN NETTO	54.588.579.534,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	-3.370.027.226,86

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 2.153
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI TAHUN (Rp)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PENDAPATAN								
	A. Pendapatan Asli Daerah	530.215.308.790,88	656.194.843.617,01	678.255.781.377,00	733.737.005.898,12	769.476.159.874,04	812.304.207.102,29	819.940.002.494,41	
	B. Pendapatan Transfer	2.607.224.687.490,00	2.399.398.249.639,00	2.377.946.094.216,00	2.394.423.155.477,00	2.411.734.561.483,00	2.434.771.561.000,00	2.471.686.077.408,00	
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.137.439.996.280,88	3.055.593.093.256,01	3.056.201.875.593,00	3.128.160.161.375,12	3.181.210.721.357,04	3.247.075.768.102,29	3.291.626.079.902,41	
2	BELANJA								
	A. Belanja Operasi	2.292.848.901.707,00	2.360.628.688.818,28	2.388.484.107.346,34	2.416.668.219.813,02	2.445.184.904.806,82	2.474.038.086.683,54	2.503.231.736.106,40	
	B. Belanja Modal	412.185.473.970,00	243.682.363.718,00	246.557.815.609,87	249.467.197.834,07	252.410.910.768,51	255.389.359.515,58	258.402.953.957,86	
	C. Belanja Tak Terduga	722.246.400,00	6.496.770.000,00	6.573.431.886,00	6.650.998.382,25	6.729.480.163,17	6.808.888.029,09	6.889.232.907,83	
	D. Belanja Transfer	474.231.268.908,00	490.124.249.458,00	495.907.715.601,60	501.759.426.645,70	507.680.187.880,12	513.670.814.097,11	519.732.129.703,45	
	JUMLAH BELANJA	3.179.987.890.985,00	3.100.932.071.994,28	3.137.523.070.443,81	3.174.545.842.675,05	3.212.005.483.618,61	3.249.907.148.325,31	3.288.256.052.675,55	
	SURPLUS/ DEFISIT	-42.547.894.704,12	-45.338.978.738,27	-81.321.194.850,81	-46.385.681.299,93	-30.794.762.261,57	-2.831.380.223,02	3.370.027.226,86	
3	PEMBIAYAAN								
	A. Penerimaan Pembiayaan	60.106.121.377,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	0,00	
	B. Pengeluaran Pembiayaan	5.517.541.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.027.226,86	
	PEMBIAYAAN NETTO	54.588.579.534,04	45.338.978.738,27	81.321.194.850,81	46.385.681.299,93	30.794.762.261,57	2.831.380.223,02	-3.370.027.226,86	

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang mana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara umum, analisis permasalahan pembangunan daerah berkaitan dengan pengembangan ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, pembangunan sumber daya manusia dan masalah sosial, dan tata kelola pemerintahan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang harus menjadi perhatian di tahun berikutnya.

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai berikut:



Tabel 2.154
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Pendidikan			
1.1	Angka rata-rata lama sekolah	7,53 tahun	1. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 2. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. 3. Pendidikan gratis belum maksimal	1. Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah 2. Perubahan pola pikir dalam masyarakat tentang pentingnya pendidikan
1.2	Angka Partisipasi Kasar			
1.2.1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI	95,90 %		Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses dan layanan sekolah pada jenjang SD/MI
1.2.2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs	95,83 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs
1.3	Angka Partisipasi Murni			
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90,27 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SD/MI yang tidak sesuai usia sekolah (7-12 tahun)	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SD/MI
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,43 %	Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15) tahun	Mendorong partisipasi masyarakat terhadap usia sekolah dijenjang SMP/MTs
1.4	Pendidikan dasar :			
1.4.1	Angka partisipasi Sekolah SD/MI	92,53 %		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	Angka partisipasi Sekolah SMP/MTs	89,31 %	Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
1.4.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	(SD) 1:196, (SMP) 1:517	Penyebaran sekolah yang belum merata	Pemerataan ketersediaan sekolah terutama dilingkungan pemukiman penduduk



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
1.4.3	Rasio guru/murid	(SD) 1:16, (SMP) 1:17	Distribusi guru proporsional belum maksimal	Penempatan guru sesuai kebutuhan dan bidang studi
1.5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
1.5.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98,02 %	Masih kurangnya lembaga PAUD	Peningkatan lembaga PAUD
1.6	Angka Kelulusan:			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/ guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku-buku sesuai kebutuhan
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	100 %		1. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru 2. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan buku
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,76 %	Adanya penduduk/ warga usia sekolah khususnya di usia 12-15 yang lebih memilih sekolah di Kabupaten Majalengka	Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	83,58 %	1. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan 2. Masih kurangnya infrastruktur penunjang pendidikan	1. Mendorong mempercepat program pendidikan wajib 12 tahun 2. Peningkatan infrastruktur penunjang pendidikan
1.6.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 %	1. Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1. Meningkatkan kualifikasi guru minimal S1/D-IV
2.	Kesehatan			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
2.1	Angka Kematian Bayi	7,53	1. Masih adanya angka kematian bayi. 2. Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil 3. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak. 2. Memberikan pelatihan dan pemahaman terkait pola hidup sehat terhadap ibu hamil dan menyusui.
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	74,98 tahun	Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat	Meningkatkanderajat kesehatan masyarakat melalui PHBS
2.3	Persentase balita gizi buruk	0,25 %	rendahnya pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang	1. Peningkatan pemahaman orang tua terhadap gizi seimbang 2. Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk
2.4	Rasio posyandu per 1000 balita	14,6 permil	Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu	Meningkatkan pemerataan posyandu
2.5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,13 permil	Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.	1. Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan; 2. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,44	Kurangnya jumlah RS sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
2.7	Rasio dokter terhadap 100.000 penduduk	0,33 permil	1. Kurangnya jumlah dokter 2. Tidak meratanya sebaran dokter	1. Penambahan jumlah dokter 2. Perlu dibuat regulasi/ aturan agar penempatan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
2.8	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,52 permil	1. Kurangnya tenaga medis 2. Tidak meratanya sebaran tenaga medis	1. Penambahan jumlah tenaga medis 2. Perlu dibuat regulasi/aturan agar penempatan tenaga medis disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	124,38 %	1. Kemampuan Bidan untuk mengiden tiifikasi komplikasi masih rendah 2. Puskesmas belum mampu melakukan penatalaksanaan pelayanan standar	1. Peningkatan kapasitas bidan 2. Penguatan puskesmas
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,60 %	Adanya penduduk di luar Majalengka yang memilih melahirkan di Kabupaten Majalengka	1. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 2. Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	85,7 %	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat 2. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	1. Mengkaji dan Menganalisis data hingga merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas, identifikasi masalah dan mencari solusi 2. Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau) melalui pelayanan posyandu, pustu yang terjadwal antara petugas dan masyarakat Memperkuat kemitraan dengan lintas sektorterkait, Lembaga pendidikan, Organisasi
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	Masih adanya persepsi masyarakat yang keliru terhadap gizi buruk	1. Penanganan Medis secaraintensif 2. Penanganan Gizi Buruk ditingkat Rumah Tangga (PascaRawat) 3. Perlu regulasi



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				tentang Ketenangaan 4. Penyediaan Buffer Stock Bahan Antisipasi KLB Gizi Buruk
2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	100 %	1. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan Program Pengobatan Jangka Pendek 2. Pemahaman masyarakat tentang TB belum optimal	1. Melakukan intervensi ke Rumah Sakit untuk melakukan Program Pengobatan Jangka Pendek 2. Mengefektifkan AKMS (Advokasi, Komunikasi, Mobilitasi Sosial) Program TB
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%		1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 2. Peningkatan PHBS
2.15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Miskin	57,56 %	Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat)	Peningkatan ketersediaan obat dirumah sakit/ balai kesehatan masyarakat membuat jejaring antara rumah sakit dengan penyedia layanan daerah
2.16	Cakupan kunjungan bayi	121,18 %		1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan prasarana 2. Kesadaran masyarakat yang makin meningkat
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	48,73 %	Rendahnya kualitas jalan	Meningkatkan kualitas jalan
3.2	Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	71,36 %	Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum	Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
			terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.	irigasi danpeningkatan kemampuan petani untuk mengelola sumberdaya air
3.3	Panjang jalan Kab. dalam kondisi baik (> 40 Km /Jam	445,86 Km	1. Rendahnya kinerja jaringan jalan 2. Terbatasnya jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya	1. Peningkatan kinerja jaringan jalan 2. Penambahan jumlah ruas jalan yang diperbaiki tiap tahunnya
3.4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	6,89	Belum terawasinya dengan baik pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat	Pendataan dan penertiban bangunan yang ber IMB yang harus sesuai dengan RTRW
3.5	Ketaatan terhadap RTRW	74,23 %	1. Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang 2. Belum tersedianya instrumen pengendalian keruangan yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang	1. Tertibnya pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dengan mengacu pada RTRW
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman			
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	398.278 KK	Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum	Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarakat perdesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
4.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	69,74 %	Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum optimalnya PHBS oleh masyarakat.	1. Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak 2. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
4.3	Persentase Penduduk berakses air minum	81,30 %	1. Belum terpetakan nya wilayah yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum 2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum 3. Masih banyaknya pengguna air bersih khususnya masyarakat pedesaan yang belum terjangkau PDAM	1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum 2. Penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum 3. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
4.4	Rasio rumah layak huni	96,56 %	Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni	1. Peningkatan aksesibilitas melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan 2. Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
4.5	Rasio permukiman layak huni	99,85 %	Masih terdapat luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
4.6	Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,147 %	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya cakupan pelayanan sarana dan prasarana2. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh3. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas dan cakupan sarana dan prasarana.2. Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh;3. Optimalnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Angka kriminalitas yang tertangani	100 %	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sosialisasi hukum2. Kurangnya aparat penegak hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan sosialisasi hukum2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,02	Belum berimbangnnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan
5.3	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	23,41	Belum berimbangnnya polisi pamong praja dengan jumlah penduduk	Penempatan polisi pamong praja sesuai kebutuhan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
5.4	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	6,07	Belum optimalnya peran masyarakat dalam memanfaatkan siskamling	Meningkatkan fasilitas dan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
5.5	Penegakan PERDA	52 %	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan	Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan
5.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	26,90 %	1. Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas satpol PP 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol ptugas Satpol PP
5.7	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100 %		Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan
5.8	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.172 petugas	Belum berimbangny jumlah Linmas dengan jumlah penduduk	Penempatan linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
5.9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	54 %	Luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayan	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilayah-wilayah kecamatan
5.10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	52,11	Jarak tempuh yang jauh ke wilayah kebakaran	Pembentukan UPTD/Posko tambahan pada wilayah-wilayah kecamatan
6	Sosial			
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	150	Terbatasnya anggaran	Optimalisasi anggaran
6.2	PPKS yg memperoleh bantuan sosial	99,84 %	1. Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PPKS	1. Optimalisasi ketersediaan data PPKS yang akurat



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
			2. Belum tersedianya kriteria PPKS yang akan mendapatkan bantuan sosial	2. Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PPKS yang akan mendapatkan bantuan
7	Tenaga Kerja			
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,64 %	1. Masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja 2. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja	Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
7.2	Jumlah sengketa pengusaha, pekerja pertahun	6 kasus	Belum adanya regulasi daerah tentang ketenagakerjaan	Penetapan regulasi daerah tentang ketenagakerjaan dan implementasinya
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	97,77 %	1. Terbatasnya lapangan kerja 2. Ketidaksiesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia	1. Pembukaan lapangan kerja baru 2. Optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,01 %	1. Tidak seimbang antara angkatan kerja dengan peluang kerja yang ada 2. Masih terbatasnya informasi pasar kerja	1. Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru 2. Mengintensifkan penyebaran lapangan kerja dan pengembangan system informasi pasar kerja melalui online sistem
7.5	Rasio ketergantungan	44,39 %	Naiknya presentase penduduk yang belum dan tidak produktif	Meningkatkan program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi/KB
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60,00 %	Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender	Mengefektifkan jaringan kelmbagaan dalam pengarusutamaan gender dan anak dalam berbagai produk



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
			dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama di bidang politik, jabatan-jabatan public dan dibidang ekonomi	perundang-undangan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antar lain penguatan kerja PUG, Fungsionalisasi Focal Point PUG
8.2	Rasio KDRT	0,000009	Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Pembentukan lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8.3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100 %		1. Terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan peran serta kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran dinas terkait melalui peningkatan kapasitas aparatur
9	Lingkungan Hidup			
9.1	Presentase penanganan sampah	41,74 %	Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah	1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R (<i>Reduce, Reuse</i>



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
				dan <i>Recycle</i>) 2. Meningkatkan optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
9.2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	95,75 %	Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.	1. Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang profesional; 2. Mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
9.3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (poin)	50,00	1. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha/ kegiatan 2. Masih rendahnya tingkat ketaatan setiap usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah	1. Perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha / kegiatan 2. Pengoptimalan pemantauan dan pengawasan disetiap usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan limbah
9.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (poin)	94,00	1. Belum optimalnya perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha/ kegiatan 2. Masih rendahnya tingkat ketaatan setiap usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah	1. Perbaikan pengelolaan limbah disetiap usaha / kegiatan 2. Pengoptimalan pemantauan dan pengawasan disetiap usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan limbah
9.5	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	95,75 %	Belum maksimalnya keberadaan sarana persampahan berupa TPS terutama di wilayah perdesaan dibandingkan pertambahan jumlah penduduk	Penambahan jumlah sarana persampahan
10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
10.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	73,83	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
			kependudukan	kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
10.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99,68%	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	99,50 %	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100 %		Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.5	Cakupan Penerbitan Kutipan Kartu Keluarga	100 %		Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Masih manualnya pengoperasian system informasi administrasi kependudukan (SIAK) sehingga penyajian database dalam bentuk bac up data dari SIAK	Peningkatan kapasitas apatur dalam penyusunan database kependudukan yang akurat
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Masih adanya penduduk yang belum memperbaharui dokumen kependudukannya terutama penduduk usia lanjut	1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan 2. Identifikasi aparat desa/kelurahan terkait dokumen kependudukan warganya
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,0	1. Masih rendahnya kesadaran ber KB 2. Masih kurangnya partisipasi tokoh agama dalam penyuluhan KB	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita dan remaja
11.2	Rasio akseptor KB	70,88	Kurangnya PUS muda yang ber KB	1. Melakukan pendataan PUS dengan pesrta KB aktif dan memastikan PUS baru terlayani 2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita remaja
12	Perhubungan			
12.1	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	1:6,66	Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru	Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan
12.2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.320.000 jiwa	Belum tersedianya data base tentang tarikan dan bangkitan	Penyusunan masterplan atau survey kinerja lalu lintas, pergerakan bangkitan dan tarikan perjalanan
12.3	Rasio ijin trayek	1:11	Masih ada kendaraan umum yang tidak memiliki ijin trayek	Meningkatkan kesadaran masyarakat (dalam hal ini sopir) memiliki ijin trayek
12.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	92,66 %	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian tepat waktu 2. Kurang memadainya operasional prosedur perawatan alat uji, Pengujian kendaraan bermotor mekanis 3. Kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pengujian KIR angkutan umum
12.5	Jumlah Terminal Bis	7	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			pengelolaan serta pelayanan terminal	terminal serta Peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khusus pada kawasan pedesaan 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
12.6	Pemasangan Rambu- rambu	54,00 %	Masih banyaknya jalan-jalan yang strategis dan rawan kecelakaan yang membutuhkan rambu-rambu	Meningkatnya pengadaan rambu-rambu lalu lintas
12.7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.723.432 orang	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan pelabuan laut dan terminal	Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi ke daerah Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih angkutan umum
12.8	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	459.360 orang	Belum terintegrasinya transport antar moda dan belum optimalnya pengelolaan serta pelayanan terminal	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan terminal 2. Peningkatan aksesibilitas 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang layak sehingga banyak masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum
13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
13.1	Persentase koperasi aktif	43,71 %	Rendahnya peran aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi	1. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi 2. upaya untuk mengaktifkan kembali koperasi yang sudah terbentuk



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
13.2	Usaha Mikro dan Kecil	74.691	Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha dan penyusunan potensi serta peluang usaha yang lengkap
14	Penanaman Modal			
14.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	36.220	Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi investasi	Adanya regulasi yang mendukung kemudahan berinvestasi dan penyusunan potensi serta peluang investasi yang lengkap
14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7.935.578,037 juta	Masih kurangnya regulasi dan infrastruktur	Meningkatkan promosi investasi dan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat
15	Kebudayaan			
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	17 kali	1. Masih kurangnya fasilitas pemerintah 2. Rendahnya partisipasi masyarakat	Adanya agenda yang tersistematis
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	125 unit	Masih banyak warisan budaya yang belum terdaftar	Inventarisasi warisan budaya
16	Kepemudaan dan Olahraga			
16.1	Jumlah gedung olahraga	311	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
16.2	Jumlah organisasi pemuda	63	Belum terpolanya pemberdayaan pemuda	Meningkatkan fasilitasi terhadap pemberdayaan pemuda dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda	Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktivitas dan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
				prestasi
16.4	Lapangan olahraga	1.130	Rendahnya kualitas lapangan olahraga	Ketersediaan lahan dan melibatkan pihak swasta peningkatan pemeliharaan dan kualitas lapangan olahraga
17	Pemerintahan Umum			
17.1	Pertumbuhan PDRB	6,38	Pertumbuhan ekonomi masih didominasi sector pertanian terutama sub sektor tanaman pangan dan perikanan	1. Peningkatan dan kemampuan daya beli masyarakat 2. Terbukanya kesempatan kerja 3. Peningkatan kegiatan ekonomi
17.2	PDRB Per kapita ADHB	Rp 34.234	1. Belum optimalnya peningkatan nilai produksi masing masing sektor 2. Kurangnya lapangan pekerjaan 3. Ada kebocoran wilayah (kecenderungan belanja diluar Kabupaten)	1. Membuka lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan nilai Tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan
17.3	Persentase penduduk miskin	10,82 %	1. Rendahnya tingkat penghasilan 2. Kurangnya lapangan kerja baru dan akses lapangan pekerjaan	1. Mengembangkan kewirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah 2. Percepatan penciptaan lapangan usaha
17.4	PDRB Harga Berlaku (milyar rupiah)	Rp 46.302,88	1. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. 2. Faktor konsumsi daerah yang tinggi dibanding faktor investasi menyebabkan pertumbuhan yang tidak seimbang. 3. Kurangnya industri	1. Membuka lapangan kerja baru 2. Meningkatkan nilai tambah 3. Mengembangkan sektor industri pengolahan



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			pengolahan	
17.5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	99		Semakin baiknya tata kelola pemerintahan desa
17.6	Jenis dan jumlah bank dan cabang	106	Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kecamatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa bank
17.7	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	9 Perda	Belum efektifnya pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha	Efektifitas pelaksanaan Perda yang mendukung iklim usaha
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
18.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	7,58	Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa	Pembinaan terhadap LPM agar meningkatkan kelompok binaan
18.2	PKK aktif	100%		Meningkatkan pembinaan/ supervisi terhadap Kader PKK
18.3	Posyandu aktif	100%		Meningkatkan kapasitas SDM kader dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai
18.4	Status Desa	Desa Mandiri (176), Desa Maju (148), Desa Berkembang (6)	1. Program/kegiatan masih belum tepat sasaran dan belum ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan desa 2. Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya	1. Memperkuat upaya memfasilitasi dukungan kemajuan Desa menuju Desa Mandiri 2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal desa



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
19	Statistik			
19.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada		
19.2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada		
20	Kearsipan			
20.1	Pengelolaan arsip secara baku	85,00 %	Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip masih kurang	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan yang berkualitas
20.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 Kegiatan	1. Masih terbatasnya SDM 2. Belum memiliki SDM yang profesional dalam bidang arsip	Pelaksanaan diklat kearsipan
21	Komunikasi dan Informatika			
21.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai website	100%	Keberadaan web site milik pemerintah daerah dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah belum aktual	1. Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah teraktual 2. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas web site pemerintah daerah
21.2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	17%	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
22	Perpustakaan			
22.1	Jumlah perpustakaan	1.753	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan	sarana dan prasarana yang memadai



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
22.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	26.113 orang	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Menumbuhkan minat baca masyarakat
22.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	51.114 buku	Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang	Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
23	Urusan Pilihan			
23.1	Pertanian			
23.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,486 ton	<ol style="list-style-type: none">1. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan2. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan3. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan benih bermutu2. Penerapan teknologi pertanian3. Penggunaan sarana produksi yang seimbang4. Peningkatan infrastruktur pertanian
23.1.2	Cakupan bina kelompok petani	2.541 kelompok	Masih terbatasnya akses dalam melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok	Peningkatan Sumber Daya Petani / Kelompok Penyediaan modal usaha pertanian
23.2	Pariwisata			
23.2.1	Kunjungan wisata	2.357.398 wisatawan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata2. Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata3.	<ol style="list-style-type: none">1. Promosi media cetak2. Dukungan swasta bidang pariwisata
	Perikanan			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
23.2.2	Produksi perikanan	9.476,70 ton	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan produksi perikanan dan peternakan
23.2.3	Konsumsi ikan	8,5 kg /kapita/ Tahun	Belum seimbang antara produksi dengan kebutuhan daging ikan	Peningkatan produksi perikanan
23.3	Perdagangan			
23.3.1	Jumlah Pasar Pemda	5 pasar	Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai	Peningkatan kualitas pasar pemda
23.3.2	Jumlah Pasar Desa	39 pasar	Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar desa kondisinya kurang memadai	Peningkatan kualitas pasar desa
23.4	Perindustrian			
23.4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	25,94 %	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya industry dan keterbatasan volume produksi sektor industri	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Industry Peningkatan volume produksi
23.4.2	Pertumbuhan IKM per tahun	5,67 %	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan wawasan pelaku IKM dalam hal produksi, peralatan, manajemen, akses permodalan dan pemasaran.2. Keterbatasan daya kreasi dan inovasi3. Masih relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku IKM2. Perluasan pasar produk hasil produksi IKM3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
23.5	Perencanaan			



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
23.5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
23.5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
23.5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan
23.6	Pengawasan			
23.6.1	Persentase pelanggaran pegawai	-	Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN	1. Pengawasan oleh Inspektorat 2. Sosialisasi aturan terkait Disiplin Pegawai
23.7	Sekretariat Daerah			
23.7.1	Peningkatan jamaah yang beribadah di tempat ibadah	100 %		
23.8	Kepegawaian			
23.8.1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,54 %	Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Pelatihan bagi Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
23.8.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	54,12%	Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pelatihan bagi Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
23.9	Keuangan			
23.9.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan	Penanaman yang kuat mengenai komitmen organisasi mulai dari kepala daerah hingga pegawai teknis peningkatan kinerja



No.	Bidang Urusan / Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
			keuangan	SDM yang tersedia dengan melakukan berbagai macam pendidikan dan pelatihan pemanfaatan sistem informasi yang memadai untuk menunjang tugas keuangan pemda

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, yang dikelola dalam SIPD.

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrim Masih Tinggi

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut BPS, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan



sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dalam 5 (lima) tahun terakhir terus menurun dari 11,43% (138.200 orang) pada tahun 2020 menjadi 10,82% (134.580 orang) pada tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat (7,08%) dan Nasional (8,57%), angka kemiskinan Kabupaten Majalengka masih tergolong tinggi.

Permasalahan lain terkait dengan kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin ekstrem yang mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan semakin besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk program perlindungan sosial (bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dll) yang tentu saja membebani APBD Kabupaten Majalengka.

Kondisi kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari semakin melebarnya ketimpangan pendapatan diantara kelompok penduduk miskin yang diukur melalui indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Data beberapa tahun terakhir menunjukkan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat, dari 0,25 % pada tahun 2020 naik pada tahun 2021 menjadi 0,77% dan pada tahun 2024 menjadi 0,45%. Jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Barat (0,29%) dan Nasional (0,322%), indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Majalengka termasuk tinggi, menempati urutan keempat diantara Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dimana yang tertinggi adalah Kabupaten Indramayu (0,54%), kedua Kabupaten Kuningan (0,53%), ketiga Kabupaten Subang (0,46%), keempat Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka dengan

nilai yang sama yaitu 0,45% dan terendah Kota Depok (0,07%). Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, diolah Bappedalitbang.

2. Angka Stunting Masih Tinggi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Permasalahan stunting menjadi program prioritas nasional, Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi sebesar 14,4% pada tahun 2029 dan mencapai 5% pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

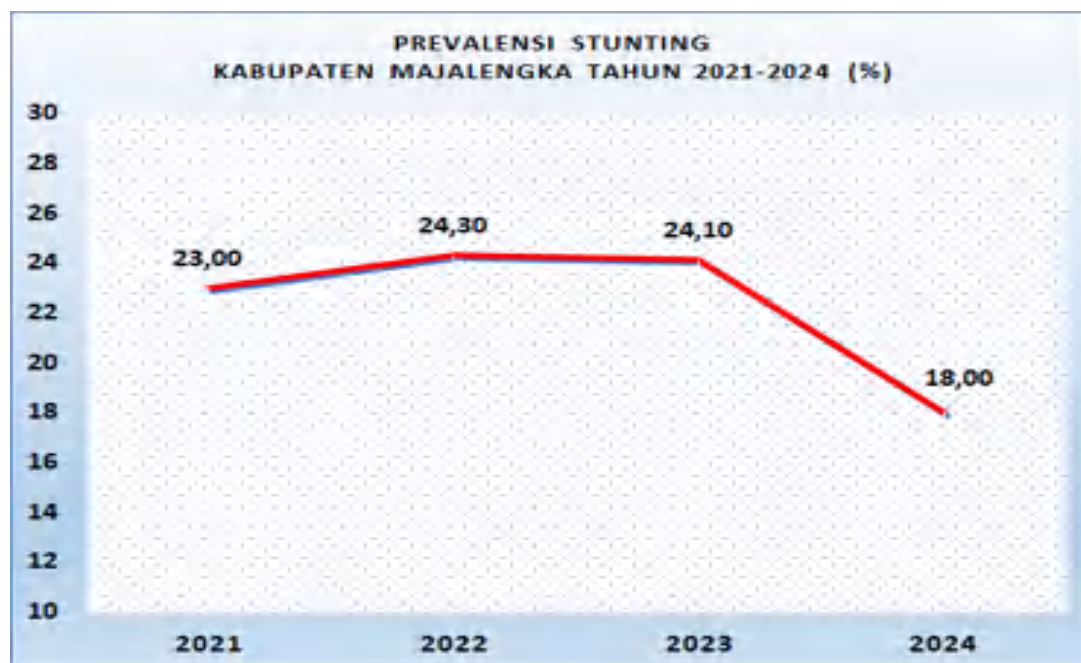
Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting balita di Kabupaten Majalengka sebesar 18,00%

menurun dari tahun 2023 sebesar 24,10%, namun masih lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 15,9%, namun lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 19,80%.

Meskipun capaian prevalensi stunting Kabupaten Majalengka sudah mulai membaik, namun masih perlu dilakukan upaya yang serius dan kolaborasi dengan semua pihak untuk menuntaskannya, karena masih dibawah target nasional dan target RKPD tahun 2024 sesuai RPD 2024-2026 sebesar 17,36 %. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Majalengka dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.34

Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2024 (Persen)



Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Tahun 2025

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Masih Rendah

Rata-rata Lama Sekolah (*Means Years of Schooling*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2020-2024 menunjukkan menanjak yaitu dari 7,27 tahun pada tahun 2020



menjadi 7,53 tahun pada 2024. Angka ini bisa didefinisikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau hampir setara dengan SMP kelas 2. Walaupun terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 masih berada terpaut jauh di bawah RLS Jawa Barat (8,87 tahun) dan Nasional (8,85 tahun). Posisi RLS Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menempati urutan ke-24 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.35
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Tahun), Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, diolah Bappedalitbang.

4. Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Masih Rendah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atau sering juga disebut sebagai pendapatan per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor



produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 sebesar Rp 24,73 juta mengalami penurunan dibanding tahun 2019 (Rp 25,81 juta), hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid-19, yang menurunkan daya beli masyarakat. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 angka PDRB per kapita terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan aktivitas masyarakat mulai normal kembali setelah angka kasus covid-19 menurun. Pada tahun 2024 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 34,23 juta. Meskipun mengalami kenaikan, PDRB per kapita Kabupaten Majalengka masih lebih rendah daripada rata-rata PDRB per kapita Jawa Barat (Rp 56,08 juta) dan Nasional (Rp 78,62 Juta). Posisi PDRB per kapita Kabupaten Majalengka menempati urutan ke-18 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.36
Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat (Juta Rupiah), Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, diolah Bappedalitbang.

5. Pertumbuhan Sektor Pertanian Melambat

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 (6,38%) meningkat dibandingkan tahun 2023 (6,15%). Dari 17 jenis lapangan usaha yang menjadi komponen PDRB, tidak semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar -7,42 persen, hal ini disebabkan karena turunnya produksi padi. Adapun Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 48,33 persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan sektor pertanian antara lain :

- a. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan.
- b. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya
- c. struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
- d. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan.
- e. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian.

Perkembangan pertumbuhan sektor pertanian dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen)
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025, diolah Bappedalitbang

6. Cakupan Penanganan Persampahan Masih Rendah

Salah satu masalah lingkungan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini adalah sampah. Setiap tahun, ribuan ton sampah dihasilkan, ada yang berakhir di tempat pembuangan akhir, namun ada juga mencemari lingkungan sekitar dan bahkan sungai. Dampak dari limbah ini tak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia serta kehidupan ekosistem.

Seiring dengan meningkatnya populasi dan konsumsi, tantangan ini semakin mendesak untuk diatasi. Pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya.

Perkembangan persentase penanganan sampah di Kabupaten Majalengka dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.38
Persentase Penangan Sampah di Kabupaten Majalengka
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Beberapa penyebab terus meningkatnya sampah setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
2. Konsumsi berlebihan.
3. Kurangnya kesadaran lingkungan.
4. Ketergantungan pada plastik.
5. Sistem Pengelolaan Sampah yang tidak efektif.



6. Industri dan produksi yang tidak ramah lingkungan.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

3.1.1. Dasar Perumusan Visi Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 memiliki visi **“Indonesia Emas 2045”**, dengan implementasi periode pertama melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Periodisasi RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan fondasi awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang langkah-langkahnya dirumuskan dalam misi Presiden atau Asta Cita.

Sejalan dengan hal di atas, dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam RPJPD yaitu : **“Kabupaten Majalengka Gerbang Internasional yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan”**. RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 dengan implementasinya melalui RPJMD periodisasi Tahun 2025-2029 dengan tema Penguatan Transformasi.

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045, ditandai dengan:

- a. Pendapatan Per Kapita Meningkat;
- b. Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun;
- c. Kepemimpinan Daerah Di Dunia Internasional Meningkat;



- d. Daya Saing Sumber daya Manusia Meningkat; dan
- e. Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.

Tabel 3.1

**Perwujudan Visi
Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029**

1.	Pendapatan Per Kapita Meningkat		
	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	33,62 – 33,98	48,43-52,58
	b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	27,59	31,65
2.	Kemiskinan Dan Ketimpangan Menurun		
	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,66 – 10,66	4,72-6,37
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,334 – 0,341	0,339-0,346
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten Majalengka Terhadap Provinsi (%)	1,59	1,59
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26 - 5,95	6,08-8,51
3.	Kepemimpinan Daerah Di Dunia Internasional Meningkat		
	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
	a. Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,8	4,2
4.	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		
	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
	a. Indeks Pembangunan Manusia	71,66	72,87
5.	Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>		
	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2029
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	61,91	62,92
	b. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	12,16	15,68

Sumber : RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045.

3.1.2. Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan hasil perumusan Bupati dan Wakil Bupati terpilih saat mencalonkan sebagai peserta kontestansi Pemilihan Kepala Daerah. Perumusan Visi tersebut selain mengacu pada visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045, juga memperhatikan kebijakan lainnya baik di tingkat Pusat maupun Provinsi. Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 menjadi arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola. Visi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah :

“TERWUJUDNYA MAJALENGKA LANGKUNG SAE”

Pernyataan Terwujudnya Majalengka Langkung Sae mengandung makna yang menunjukkan komitmen dan optimisme untuk bekerja lebih baik serta membangun Majalengka lebih baik tanpa merendahkan masa sebelumnya.



Secara filosofis frase, kalimat Terwujudnya Majalengka Langkung Sae memiliki makna kata sebagai berikut :

- ❖ TERWUJUDNYA memiliki arti suatu upaya yang ingin diwujudkan untuk lima tahun ke depan menjadi suatu yang nyata.
- ❖ MAJALENGKA merupakan entitas pemerintahan Kabupaten Majalengka yang memiliki penduduk dan wilayah yang terdiri dari 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa.
- ❖ LANGKUNG SAE memiliki arti situasi atau kondisi lebih baik dari kondisi atau situasi sebelumnya.

Sehingga Visi Terwujudnya Majalengka Langkung Sae berupaya mewujudkan seluruh bidang pembangunan Kabupaten Majalengka untuk 5 (lima) tahun kedepan berada dalam kondisi lebih baik : Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Masyarakat, Sosial Budaya, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi lebih baik.

Perbandingan visi antara RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Majalengka disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat,
RPJMD Kabupaten Majalengka

Visi Pembangunan Tahun 2025-2029		
RPJMN	RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPJMD Kabupaten Majalengka
“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”	Jabar Istimewa <i>Lembur Diurus Kota Ditata</i>	<i>Terwujudnya :</i> Majalengka Langkung SAE
Arti Visi : Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.	Istimewa : Situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/ berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.	Langkung Sae : Situasi atau kondisi lebih baik dari kondisi atau situasi sebelumnya. Sehingga Visi Terwujudnya “Majalengka Langkung Sae” menunjukkan komitmen dan optimisme untuk bekerja lebih baik serta membangun Majalengka lebih baik tanpa merendahkan masa sebelumnya.

Sumber: Perpres 12 Tahun 2025, Visi dan Misi Gubernur Jawa Barat dan Bupati Majalengka 2025-2029.

3.1.3. Misi

Perumusan misi didasarkan atas upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi yang akan diwujudkan dalam periode pemerintahan. Misi yang baik adalah misi yang mampu



menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai visi secara jelas, ringkas dan mudah dipahami. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, memperhitungkan peluang yang dimiliki, serta memperhatikan misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut:

Misi Kesatu : Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban.

Misi ini menjelaskan upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan saling menghormati dalam keragaman agama, budaya, serta latar belakang sosial. Kehidupan beragama adalah cara individu dan masyarakat menjalankan keyakinan spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari mencakup : kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama dan dialog antar agama. Tatanan sosial inklusif berarti sistem sosial yang memberi ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapat perlakuan setara, tanpa diskriminasi. Mewujudkan kesetaraan antara hak dan kewajiban, pengakuan dan menjunjung tinggi terhadap keragaman, serta pemberdayaan kelompok rentan. Membangun kehidupan beragama dan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadaban adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan maju. Ini membutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga agama, hingga pemerintah, untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan.

Misi ini menjelaskan upaya memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan agar lebih merata, terjangkau, dan berkualitas, demi menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif. Pendidikan berkualitas adalah kunci mencetak generasi unggul. Upaya peningkatan mutu pendidikan mencakup: pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang relevan dan adaptif setara sarana dan prasarana pendidikan yang



memadai. Mutu kesehatan yang baik berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, dengan upaya mencakup : akses kesehatan yang merata, peningkatan kualitas tenaga medis, pelayanan kesehatan yang terjangkau, edukasi dan promosi kesehatan yang intensif. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas akan menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk terus meningkatkan dua aspek fundamental ini, karena keduanya adalah pondasi pembangunan jangka panjang.

Misi Ketiga : Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan.

Misi ini menjelaskan keterhubungan antar wilayah terutama antar desa, antar kecamatan dan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat arus barang jasa, informasi dan manusia. Meningkatkan konektivitas dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital. Selain itu Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota, Desa harus menjadi pusat pertumbuhan baru, melalui : pengembangan potensi lokal, Dana Desa yang efektif serta pemerataan pemenuhan layanan dasar. Tata ruang adalah perencanaan penggunaan lahan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan dengan : pemanfaatan lahan yang tepat, pembangunan yang ramah lingkungan, dan pencegahan bencana. Meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan berbasis desa, dan menerapkan tata ruang berkelanjutan adalah strategi penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan begitu, desa menjadi mandiri, masyarakatnya sejahtera, dan lingkungan tetap lestari.

Misi Keempat : Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan.

Misi ini menjelaskan bahwa Ekonomi inklusif berarti sistem ekonomi yang memberikan kesempatan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok seperti petani kecil, pelaku UMKM, perempuan, dan penyandang disabilitas, yang berarti mengurangi



kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ekonomi produktif mendorong peningkatan nilai tambah dan efisiensi dari kegiatan ekonomi masyarakat melalui inovasi dan teknologi tepat guna, kemitraan pengusaha besar dan UMKM serta mendorong investasi sektor riil di kota dan desa. Kemandirian pangan adalah kemampuan pemerintah atau daerah untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tanpa tergantung pada impor, untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mengembangkan ekonomi inklusif dan produktif serta meningkatkan kemandirian pangan berarti membangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaya saing dengan melibatkan seluruh rakyat dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

Misi Kelima : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Misi ini menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah upaya menjaga dan mengelola alam (air, udara, tanah, hutan dan keanekaragaman hayati) agar tetap lestari, sekaligus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui : pelestarian sumber daya alam, pengurangan polusi, pengelolaan sampah yang baik, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penegakan hukum lingkungan. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tanpa pengelolaan yang baik, kerusakan lingkungan akan mengancam kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain di bumi ini.

Misi Keenam : Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi.

Misi ini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem, struktur, dan budaya kerja dalam pemerintahan agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan profesional. Reformasi birokrasi ini ditempuh melalui : penyederhanaan prosedur

administrasi agar lebih cepat dan mudah, peningkatan kapasitas dan integritas pegawai negeri dan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi berarti menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat untuk mempercepat dan memudahkan masyarakat mengakses layanan. Kolaborasi berarti kerja sama antara berbagai pihak, seperti antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi perlu dilakukan dalam upaya memperluas cakupan layanan, meningkatkan inovasi dan efisiensi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Gambar 3.1

**Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Majalengka
Tahun 2025-2029**



Penetapan enam misi pembangunan di atas selain sejalan untuk menjawab tantangan permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka, juga sejalan dengan penetapan misi pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penetapan misi pembangunan Kabupaten Majalengka selain sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Majalengka juga bertujuan mendukung pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sinergitas antara misi pembangunan Kabupaten Majalengka dengan misi



pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.3

Misi Pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029

Misi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029		
RPJMN (Asta Cita)	RPJMD Provinsi Jawa Barat	RPJMD Kabupaten Majalengka
<ol style="list-style-type: none"> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Memantapkan Sistem Pertahan-Nan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromanufaktur Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Sena Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Qenerasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Penumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur. 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban. Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan. Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan. Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi.

Sumber: *Perpres 12 Tahun 2025, Visi dan Misi Gubernur Jawa Barat dan Bupati Majalengka 2025-2029.*



3.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 tentunya mengacu pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Majalengka, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Kehidupan Beragama dan Tatahan Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan, memiliki tujuan :

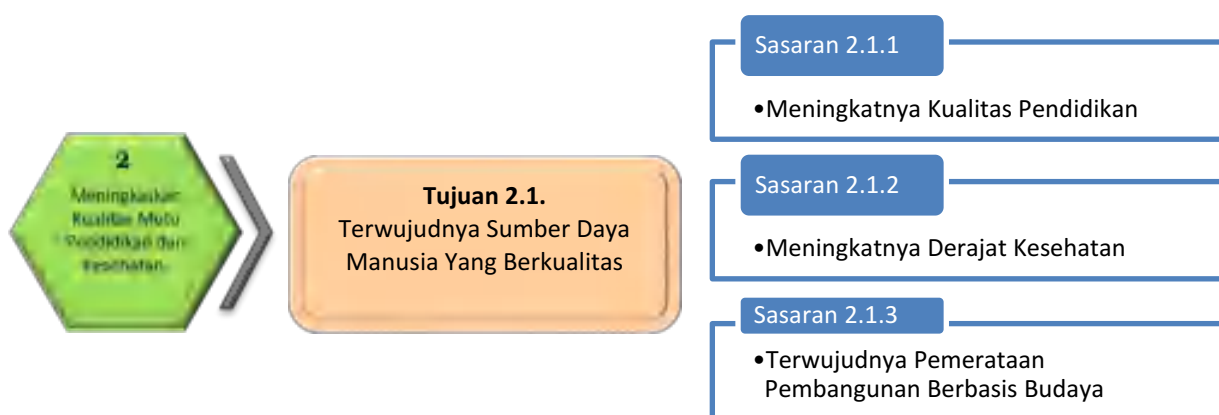
- 1) Terwujudnya Nilai-Nilai Agama dan Sosial Dalam Prilaku Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama.
 - b. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah.
- 2) Meningkatnya Ketahanan Sosial, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya Penduduk Miskin





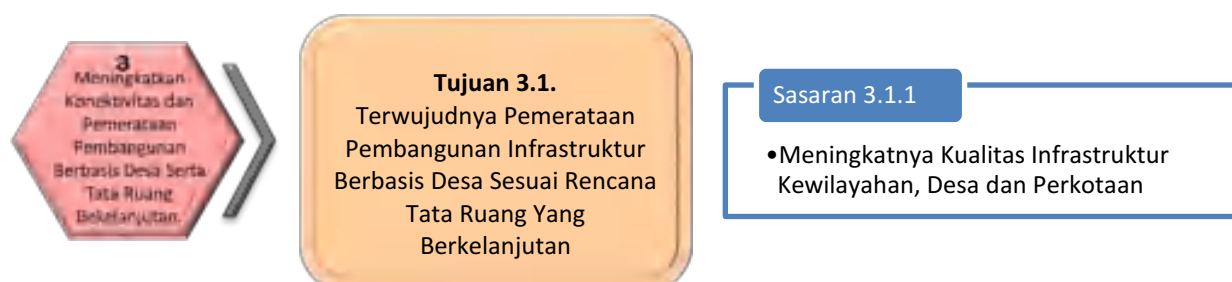
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan, memiliki tujuan:

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan.
 - c. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Berbasis Budaya.



Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan, memiliki tujuan:

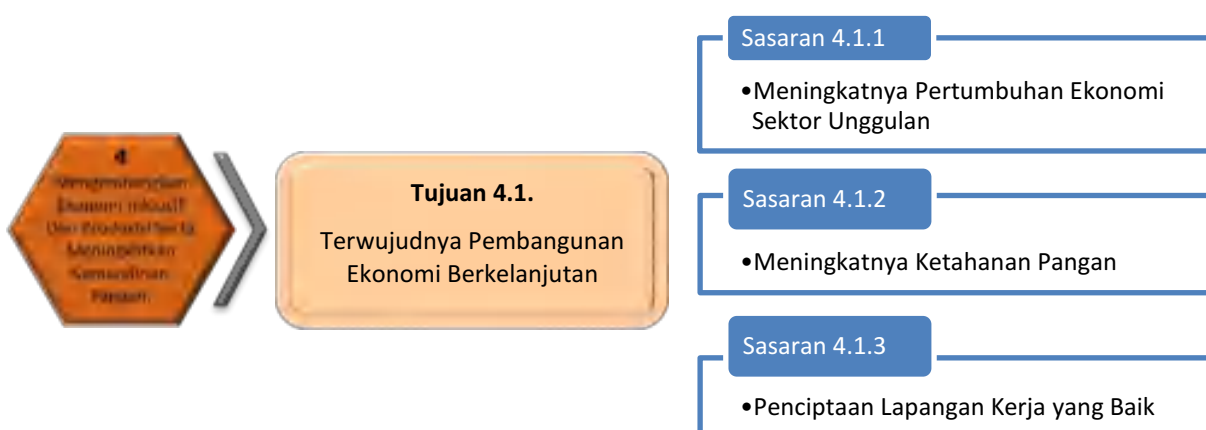
- 1) Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan, Desa dan Perkotaan.





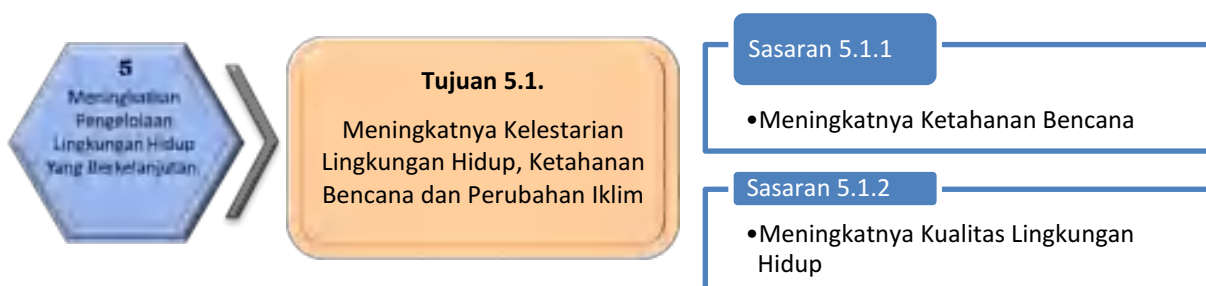
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan, memiliki tujuan:

- 1) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.
 - b. Meningkatnya Ketahanan Pangan.
 - c. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik.



Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, memiliki tujuan:

- 1) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Ketahanan Bencana.
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

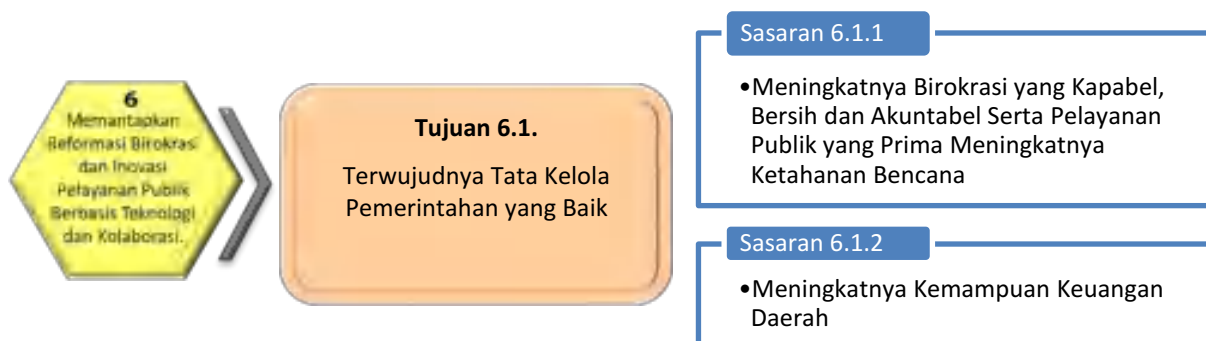


Misi 6 : Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi, memiliki tujuan :

- 1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:



- a. Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima Meningkatkan Ketahanan Bencana.
- b. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah.



Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2025-2029 terdiri dari 7 tujuan dan 14 sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Visi : Terwujudnya Majalengka Langkung Sae											
Misi 1 : Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban											
1.1	Terwujudnya Nilai-Nilai Agama dan Sosial Dalam Prilaku Kehidupan Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	75	75,3	75,6	75,9	76,2	76,5	76,5
1.1.1	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	75	75,5	76	76,5	77	77,5	77,5
1.1.2	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Indeks Trantibum	Kategori	B	B	B	B	B	B	A	A
1.2	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Indeks Gini	Poin	0,354	0,350	0,345	0,341	0,336	0,332	0,327	0,327
1.2.1	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,09	9,63	9,43	9,04	8,59	8,15	8,15
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan											
2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,37	71,68	72,44	73,2	73,97	74,73	75,5	75,5
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,53	7,71	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	8,42
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,98	71,65	75,25	75,5	75,75	76	76,25	76,5
		2. Prevalensi Stunting	Persen	18,00 %	17,89	17,52	16,47	15,48	14,55	13,68	13,68
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan											
3.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Berkelanjutan	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah Dan Ruang Wilayah	Persen	65,19	64,04	64,63	65,16	65,67	66,37	67,03	67,03
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan, Desa dan Perkotaan	1. Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,19	64,04	64,63	65,16	65,67	66,37	67,03	67,03
		2. Indeks Desa	Persen	N/A	79,00	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,00



VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan											
4.1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,38	6,13	7,29	8,53	8,32	8,51	8,55	8,55
		2. Indeks Ekonomi Hijau	Persen	55,41	55,67	57,6	58,51	59,54	60,6	61,6	61,6
4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Triliun Rupiah	16,26	17,28	18,57	20,18	21,87	23,73	25,76	25,76
4.1.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	81,39	82,58	82,58	83,13	83,63	84,13	84,63	84,63
4.1.3	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,012	3,8	3,65	3,51	3,36	3,21	3,19	3,19
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan											
5.1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK	Poin	n/a	6,61	7,2	7,78	8,37	8,95	9,53	9,53
5.1.1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	108,99	108,49	107,99	107,49	106,99	106,49	105,99	105,99
5.1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	64,54 (Rumus Lama)	61,91	62,16	62,41	62,67	62,92	63,31	63,31
Visi 6 : Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi											
6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,68	3,78	3,88	3,98	4,08	4,18	4,28	4,28
6.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A-	A-	A-	A	A	A	A	A
6.1.2	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD.

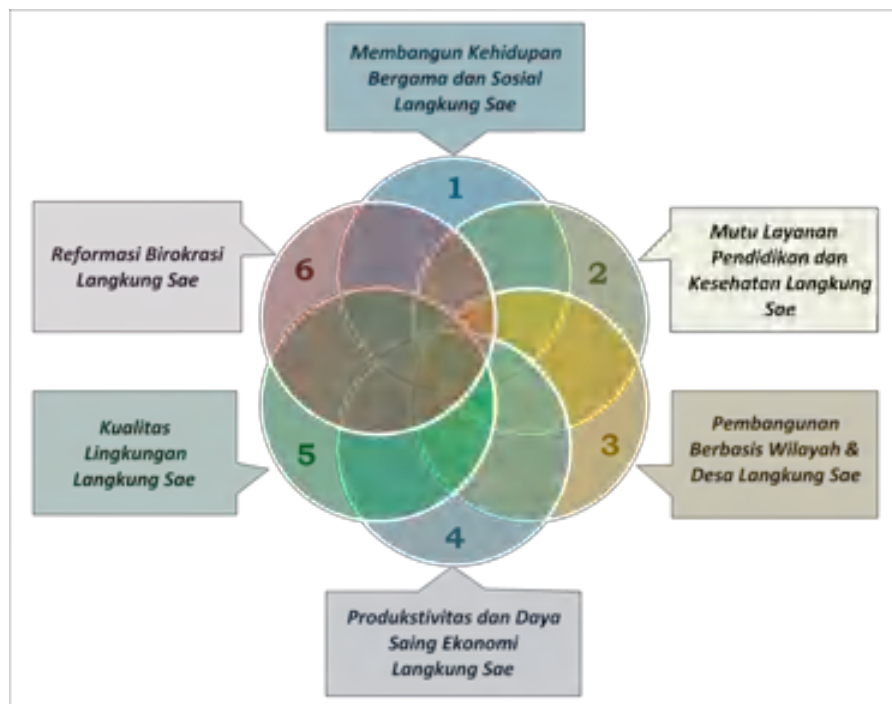
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, berhubungan dengan target-target yang ingin dicapai serta solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan serta telah ditetapkan langkah-langkah 5 (lima) tahun ke depan yang diyakini akan menjadi solusi sekaligus akan menjadikan Majalengka Langkung Sae, berbagai langkah tersebut dirumuskan dalam *Genep Guyub Gawe Sauryunan Majalengka Langkung Sae* (Enam Upaya Bekerja Bersama Secara Rukun dan Kompak Dalam Semangat Gotong Royong untuk Majalengka Lebih Baik), yang sudah diselaraskan dengan misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Membangun Kehidupan Beragama dan Sosial Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan Manajemen Mesjid secara Modern;
 - b. Organisasi Masyarakat yang Beradab;
 - c. Cipta Kondisi Keamanan, Ketentraman, Dan Ketertiban Masyarakat;
 - d. Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin;
 - e. Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin;
 - f. Mengurangi Kantong-kantong Kemiskinan;
 - g. Meningkatkan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan.
2. Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan Akses Pendidikan;
 - b. Meningkatkan Mutu Pendidikan;
 - c. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan;
 - d. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga;
 - f. Meningkatkan Intervensi Stunting Langsung;
 - g. Meningkatkan Intervensi Stunting Tidak Langsung.



3. Pembangunan Berbasis Wilayah dan Desa Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Pembangunan Sesuai Regulasi dan Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR)
 - b. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
 - c. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perdesaan.
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah;
 - b. Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 - c. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Mewujudkan Wisata Kelas Nasional;
 - d. Meningkatkan Kualitas Produk Unggulan dan pelaku UMKM;
 - e. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan;
 - f. Meningkatkan Ketersediaan Pangan;
 - g. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat;
 - h. Meningkatkan Distribusi Pasokan Pertanian Dan Harga Pangan;
 - i. Meningkatkan Konsumsi Dan Keamanan Pangan;
 - j. Menciptakan Lapangan Kerja Baru Dan Peningkatan Produktifitas Kerja;
 - k. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah.
5. Kualitas Lingkungan Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Aparatur dan Wilayah dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. Meningkatkan Tutupan Lahan;
 - c. Mengurangi Pencemaran Udara;
 - d. Peningkatan Pengelolaan Persampahan;
 - e. Pengembangan RTH di Kawasan Perkotaan.
6. Reformasi Birokrasi Langkung Sae, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit;
 - c. Meningkatkan Tatakelola Standar Kemanan, Sarana Pendukung Dan Sumberdaya Manusia Pengelola Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan;
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
- g. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
- h. Meningkatkan Pendapatan Daerah.

Gambar 3.2**6 Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae Tahun 2026-2030**

Strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan yang terakumulasi pada tema pembangunan tahun 2026-2030. Tahapan dan tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3**Tahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030**



Tabel 3.5

Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030

NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)			
		Tema :		Tema :		Tema :		Tema :		Tema :			
		Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Pencapaian Kemakmuran Masyarakat			
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus		
1.	Membangun Kehidupan Beragama dan Sosial Langkung Sae	1. Modernisasi Manajemen Masjid (1 Desa, 1 Masjid)	Kecamatan Majalengka, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Kasokandel	1. Modernisasi Manajemen Masjid (1 Desa, 1 Masjid)	Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya	1. Modernisasi Manajemen Masjid (1 Desa, 1 Masjid)	Kecamatan Rajagaluh, Leuwimunding, Palasah, Sindang, Sindangwangi	1. Modernisasi Manajemen Masjid (1 Desa, 1 Masjid)	Kecamatan Argapura, Maja, Sukahaji, Cigasong, Banjaran	1. Modernisasi Manajemen Masjid (1 Desa, 1 Masjid)	Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul		
		2. Optimalisasi Pesantren (1 Desa 1 Hafiz)	Kecamatan Majalengka, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Kasokandel	2. Optimalisasi Pesantren (1 Desa 1 Hafiz)	Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya	2. Optimalisasi Pesantren (1 Desa 1 Hafiz)	Kecamatan Rajagaluh, Leuwimunding, Palasah, Sindang, Sindangwangi	2. Optimalisasi Pesantren (1 Desa 1 Hafiz)	Kecamatan Argapura, Maja, Sukahaji, Cigasong, Banjaran	2. Optimalisasi Pesantren (1 Desa 1 Hafiz)	Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul		
		3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan	3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan	3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan	3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan	3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan	3. Bergerak Fasilitasi Mempermudah Pengurusan Jenazah (BERFAEDAH)	26 Kecamatan
		4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta	4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta	4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta	4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta	4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta	4. Ngantor Berjamaah Dhuha (Ngantor Ber Dhuha)	Perangkat Daerah, Kecamatan dan Swasta
		5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka	5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka	5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka	5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka	5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka	5. Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Majalengka
		6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center	6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center	6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center	6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center	6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center	6. Optimalisasi Majalengka Creative Center	Majalengka Creative Center
		7. 1000 entas Rutilahu	3 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan	7. 1000 entas Rutilahu	3 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan	7. 1000 entas Rutilahu	3 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan	7. 1000 entas Rutilahu	3 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan	7. 1000 entas Rutilahu	3 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan	7. 1000 entas Rutilahu	2 Unit Rutilahu per Desa/ Kelurahan
		8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan	8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan	8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan	8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan	8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan	8. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Ekstrem	26 Kecamatan
		9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan	9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan	9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan	9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan	9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan	9. Kepesertaan BPJS 100% bagi Masyarakat Kurang Mampu	26 Kecamatan



NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		10. Satukan Gerakan Verifikasi Babarengan Tepat Manfaat Data Layanan Sosial (SAVING AMAL)	Kabupaten Majalengka	10. Satukan Gerakan Verifikasi Babarengan Tepat Manfaat Data Layanan Sosial (SAVING AMAL)	Kabupaten Majalengka	10. Satukan Gerakan Verifikasi Babarengan Tepat Manfaat Data Layanan Sosial (SAVING AMAL)	Kabupaten Majalengka	10. Satukan Gerakan Verifikasi Babarengan Tepat Manfaat Data Layanan Sosial (SAVING AMAL)	Kabupaten Majalengka	10. Satukan Gerakan Verifikasi Babarengan Tepat Manfaat Data Layanan Sosial (SAVING AMAL)	Kabupaten Majalengka
		11. Rumah Singgah Heman ka Warga (RUMAH SINGGAH HEGAR)	Dinas Sosial Kabupaten Majalengka	11. Rumah Singgah Heman ka Warga (RUMAH SINGGAH HEGAR)	Dinas Sosial Kabupaten Majalengka	11. Rumah Singgah Heman ka Warga (RUMAH SINGGAH HEGAR)	Dinas Sosial Kabupaten Majalengka	11. Rumah Singgah Heman ka Warga (RUMAH SINGGAH HEGAR)	Dinas Sosial Kabupaten Majalengka	11. Rumah Singgah Heman ka Warga (RUMAH SINGGAH HEGAR)	Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
		12. Beri Ruang Bagi Disabilitas untuk Berkarya dan Berprestasi (BERDAYA)	Kabupaten Majalengka	12. Beri Ruang Bagi Disabilitas untuk Berkarya dan Berprestasi (BERDAYA)	Kabupaten Majalengka	12. Beri Ruang Bagi Disabilitas untuk Berkarya dan Berprestasi (BERDAYA)	Kabupaten Majalengka	12. Beri Ruang Bagi Disabilitas untuk Berkarya dan Berprestasi (BERDAYA)	Kabupaten Majalengka	12. Beri Ruang Bagi Disabilitas untuk Berkarya dan Berprestasi (BERDAYA)	Kabupaten Majalengka
						13. Pelaksanaan Sekolah Rakyat (ASTA CITA)	Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong	13. Pelaksanaan Sekolah Rakyat (ASTA CITA)	Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong	13. Pelaksanaan Sekolah Rakyat (ASTA CITA)	Kelurahan Simpeureum Kecamatan Cigasong
						14. Beasiswa PT bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Majalengka	14. Beasiswa PT bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Majalengka	14. Beasiswa PT bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Majalengka
2.	Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Langkung Sae	1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas baru	20 Ruang Kelas PAUD, 25 Ruang Kelas SD, 100 Ruang Kelas SMP	1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas baru	20 Ruang Kelas PAUD, 25 Ruang Kelas SD, 100 Ruang Kelas SMP	1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas baru	20 Ruang Kelas PAUD, 25 Ruang Kelas SD, 100 Ruang Kelas SMP	1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas baru	20 Ruang Kelas PAUD, 25 Ruang Kelas SD, 100 Ruang Kelas SMP	1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas baru	20 Ruang Kelas PAUD, 25 Ruang Kelas SD, 100 Ruang Kelas SMP
				2. Penerapan Laboratorium Of Life di sekolah	SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Majalengka	2. Penerapan Laboratorium Of Life di sekolah	SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Majalengka	2. Penerapan Laboratorium Of Life di sekolah	SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Majalengka	2. Penerapan Laboratorium Of Life di sekolah	SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Majalengka
		2. Gerakan Jajanan Sekolah Bagi Generasi Kuat Bebas Anemia dan Aksi Bergizi (GEN HEBAT & SIPENTING HEPI)	Seluruh Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Majalengka	3. Gerakan Jajanan Sekolah Bagi Generasi Kuat Bebas Anemia dan Aksi Bergizi (GEN HEBAT & SIPENTING HEPI)	Seluruh Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Majalengka	3. Gerakan Jajanan Sekolah Bagi Generasi Kuat Bebas Anemia dan Aksi Bergizi (GEN HEBAT & SIPENTING HEPI)	Seluruh Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Majalengka	3. Gerakan Jajanan Sekolah Bagi Generasi Kuat Bebas Anemia dan Aksi Bergizi (GEN HEBAT & SIPENTING HEPI)	Seluruh Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Majalengka	3. Gerakan Jajanan Sekolah Bagi Generasi Kuat Bebas Anemia dan Aksi Bergizi (GEN HEBAT & SIPENTING HEPI)	Seluruh Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Majalengka



NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
				4. Pemberian Insetif Guru	Guru SD dan SMP	4. Pemberian Insetif Guru	Guru SD dan SMP	4. Pemberian Insetif Guru	Guru SD dan SMP	4. Pemberian Insetif Guru	Guru SD dan SMP
						5. Beasiswa Guru Berprestasi	Guru SD dan SMP Penggerak	5. Beasiswa Guru Berprestasi	Guru SD dan SMP Penggerak		
		3. Peningkatan layanan Kesehatan (NGALAYAN BHAKTI)	3 RSUD dan 32 Puskesmas dan 1 Labkesmas	5. Peningkatan layanan Kesehatan (NGALAYAN BHAKTI)	3 RSUD dan 32 Puskesmas dan 1 Labkesmas	6. Peningkatan layanan Kesehatan (NGALAYAN BHAKTI)	3 RSUD, 6 RS Swasta, 32 Puskesmas, 1 Labkesmas, 70 Puskesmas Pembantu dan 41 Poliklinik	6. Peningkatan layanan Kesehatan (NGALAYAN BHAKTI)	3 RSUD, 6 RS Swasta, 32 Puskesmas, 1 Labkesmas, 70 Puskesmas Pembantu dan 41 Poliklinik	6. Peningkatan layanan Kesehatan (NGALAYAN BHAKTI)	3 RSUD, 6 RS Swasta, 32 Puskesmas, 1 Labkesmas, 70 Puskesmas Pembantu dan 41 Poliklinik
		4. Penambahan Puskesmas Rawat Inap	2 puskesmas perbatasan			7. Penambahan Puskesmas Rawat Inap	2 puskesmas perbatasan			7. Penambahan Puskesmas Rawat Inap	2 puskesmas perbatasan
		5. Makan Bergizi Gratis (ASTA CITA)	Siswa Pendidikan Dasar	6. Makan Bergizi Gratis (ASTA CITA)	Siswa Pendidikan Dasar	8. Makan Bergizi Gratis (ASTA CITA)	Siswa Pendidikan Dasar	7. Makan Bergizi Gratis (ASTA CITA)	Siswa Pendidikan Dasar	8. Makan Bergizi Gratis (ASTA CITA)	Siswa Pendidikan Dasar
		6. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ASTA CITA)	Masyarakat yang yg Berulang Tahun	7. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ASTA CITA)	Masyarakat yang yg Berulang Tahun	9. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ASTA CITA)	Masyarakat yang yg Berulang Tahun	8. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ASTA CITA)	Masyarakat yang yg Berulang Tahun	9. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (ASTA CITA)	Masyarakat yang yg Berulang Tahun
		7. Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis (LAJUR PESAT)	Kec. Majalengka	8. Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis (LAJUR PESAT)	Kec. Malausma	10. Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis (LAJUR PESAT)	Kec. Talaga	9. Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis (LAJUR PESAT)	Kec. Sumberjaya	10. Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis (LAJUR PESAT)	Kec. Jatitujuh
		8. Pembangunan Fasilitas Olah raga dan Peningkatan event olahraga	1 unit dan 1 event olahraga per desa di 5 Kecamatan	9. Pembangunan Fasilitas Olah raga dan Peningkatan event olahraga	1 unit dan 1 event olahraga per desa di 5 Kecamatan	11. Pembangunan Fasilitas Olah raga dan Peningkatan event olahraga	1 unit dan 1 event olahraga per desa di 5 Kecamatan	10. Pembangunan Fasilitas Olah raga dan Peningkatan event olahraga	1 unit dan 1 event olahraga per desa di 5 Kecamatan	11. Pembangunan Fasilitas Olah raga dan Peningkatan event olahraga	1 unit dan 1 event olahraga per desa di 6 Kecamatan
		9. Meningkatkan intervensi gizi langsung dan tidak langsung	Desa Lokus Stunting	10. Meningkatkan intervensi gizi langsung dan tidak langsung	Desa Lokus Stunting	12. Meningkatkan intervensi gizi langsung dan tidak langsung	Desa Lokus Stunting	11. Meningkatkan intervensi gizi langsung dan tidak langsung	Desa Lokus Stunting	12. Meningkatkan intervensi gizi langsung dan tidak langsung	Desa Lokus Stunting
3.	Pembangunan Berbasis Wilayah dan Desa Langkung Sae	1. Pembangunn Sesuai Regulasi dan RTRW/ RDTR	Kabupaten Majalengka	1. Pembangunn Sesuai Regulasi dan RTRW/ RDTR	Kabupaten Majalengka	1. Pembangunn Sesuai Regulasi dan RTRW/ RDTR	Kabupaten Majalengka	1. Pembangunn Sesuai Regulasi dan RTRW/ RDTR	Kabupaten Majalengka	1. Pembangunn Sesuai Regulasi dan RTRW/ RDTR	Kabupaten Majalengka



NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		2. Kolaborasi Terpadu Majalengka Indah Tertata (KOTA KITA)	Kecamatan Majalengka dan Cigasong	2. Kolaborasi Terpadu Majalengka Indah Tertata (KOTA KITA)	Kecamatan Kadipaten dan Panyingkiran	2. Kolaborasi Terpadu Majalengka Indah Tertata (KOTA KITA)	Kecamatan Kertajati dan Jatitujuh	2. Kolaborasi Terpadu Majalengka Indah Tertata (KOTA KITA)	Kecamatan Talaga dan Cikijing	2. Kolaborasi Terpadu Majalengka Indah Tertata (KOTA KITA)	Kecamatan Jatiwangi dan Rajagaluh
		3. Penataan Gerbang Batas Majalengka (PAGAR BAJA)	Kecamatan Jatitujuh, Ligung, Kertajati	3. Penataan Gerbang Batas Majalengka (PAGAR BAJA)	Kecamatan Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka	3. Penataan Gerbang Batas Majalengka (PAGAR BAJA)	Kecamatan Sumberjaya, Sindangwangi, Leuwimunding	3. Penataan Gerbang Batas Majalengka (PAGAR BAJA)	Kecamatan Cikijing, Cingambul, Malausma	3. Penataan Gerbang Batas Majalengka (PAGAR BAJA)	Kecamatan Lemahsugih, Argapura
		4. Ngajalur Jalan Buat Rakyat, Ekonomi dan Pariwisata (NGABRET)	Peningkatan Jalan Pendukung JATILIMA Jalan Akses Pertanian Dan Pariwisata 37,54 KM	4. Ngajalur Jalan Buat Rakyat, Ekonomi dan Pariwisata (NGABRET)	Lanjutan	4. Ngajalur Jalan Buat Rakyat, Ekonomi dan Pariwisata (NGABRET)	Lanjutan	4. Ngajalur Jalan Buat Rakyat, Ekonomi dan Pariwisata (NGABRET)	Lanjutan		
		5. Peningkatan Jalan Lintas Selatan Majalengka (GEMA JALISMA)	Jalan Lintas Selatan 29,56 KM	5. Peningkatan Jalan Lintas Selatan Majalengka (GEMA JALISMA)	Lanjutan	5. Peningkatan Jalan Lintas Selatan Majalengka (GEMA JALISMA)	Lanjutan	5. Peningkatan Jalan Lintas Selatan Majalengka (GEMA JALISMA)	Lanjutan		
		6. Pembangunan Jalan Bersama Industri (PJBI)	Kec. Jatiwangi	6. Pembangunan Jalan Bersama Industri (PJBI)	Kec. Sumberjaya	6. Pembangunan Jalan Bersama Industri (PJBI)	Kec. Ligung	6. Pembangunan Jalan Bersama Industri (PJBI)	Kec. Kertajati	4. Pembangunan Jalan Bersama Industri (PJBI)	Kec. Dawuan
				7. Pembangunan Jalan	Kec. Argapura			7. Pembangunan Jalan	Kec. Banjaran		
		7. Pemeliharaan Jalan	26 Kecamatan	8. Pemeliharaan Jalan	26 Kecamatan	7. Pemeliharaan Jalan	26 Kecamatan	8. Pemeliharaan Jalan	26 Kecamatan	5. Pemeliharaan Jalan	26 Kecamatan
		8. Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Majalengka	9. Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Majalengka	8. Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Majalengka	9. Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Majalengka	6. Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten Majalengka
		9. Rehabilitasi Drainase	Kabupaten Majalengka	10. Rehabilitasi Drainase	Kabupaten Majalengka	9. Pemeliharaan Drainase	Kabupaten Majalengka	10. Pemeliharaan Drainase	Kabupaten Majalengka	7. Pemeliharaan Drainase	Kabupaten Majalengka
		10. Pembangunan Infrastruktur Internet (Wifi Portabel)	33 Desa	11. Pemberian Akses Internet	33 Desa	10. Penyediaan Akses Internet	33 Desa	11. Fasilitas Akses Internet	33 Desa	8. Kemudahan Akses Internet	33 Desa
		11. Pembangunan SPAM Cilongkrang	Kec. Argapura, Kec. Maja, Kec. Cigasong, Kec. Majalengka, Kec. Panyingkiran	12. Peningkatan Layanan Air Minum	Daerah Perkotaan	11. Peningkatan Kualitas Air di Pedesaan	26 Kecamatan	12. Peningkatan Kualitas Air di Pedesaan	26 Kecamatan	9. Peningkatan Kualitas Air di Pedesaan	26 Kecamatan



NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		12. Penataan Kawasan Kumuh	10 Kecamatan berdasar Keppup Tahun 2022 tentang Kawasan Kumuh	13. Penataan Kawasan Kumuh	10 Kecamatan berdasar Keppup Tahun 2022 tentang Kawasan Kumuh	12. Penataan Kawasan Kumuh	10 Kecamatan berdasar Keppup Tahun 2022 tentang Kawasan Kumuh	13. Penataan Kawasan Kumuh	10 Kecamatan berdasar Keppup Tahun 2022 tentang Kawasan Kumuh	10. Penataan Kawasan Kumuh	10 Kecamatan berdasar Keppup Tahun 2022 tentang Kawasan Kumuh
		13. Bantuan Keuangan Khusus Desa	330 Desa	14. Bantuan Keuangan Khusus Desa	330 Desa	13. Bantuan Keuangan Khusus Desa	330 Desa	14. Bantuan Keuangan Khusus Desa	330 Desa	11. Bantuan Keuangan Khusus Desa	330 Desa
4.	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Langkung Sae	1. Peningkatan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha (KARPET Merah/ Investasi Berkelanjutan)	MPP/ Kecamatan Majalengka	1. Penyusunan regulasi investasi dan kemudahan berusaha	Kabupaten Majalengka	1. Peningkatan infrastruktur dasar pendukung investasi sektor ekonomi produktif dan inklusif yaitu pertanian, perikanan dan industri	Kawasan Pertanian Terpadu (Kec. Banjaran, Lemahsugih, Argapura, Sindangwangi) dan Kawasan Peruntukan Industri (Kec. Kertajati, Jatiwangi, Sumberjaya)	1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif yaitu pertanian, perikanan dan industri	Kawasan Pertanian Terpadu (Kec. Banjaran, Lemahsugih, Argapura, Sindangwangi) dan Kawasan Peruntukan Industri (Kec. Kertajati, Jatiwangi, Sumberjaya)	1. Memantau regulasi dan kebijakan terkait investasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan	Kabupaten Majalengka
		2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	2. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP
		3. Penataan dan Penyusunan Regulasi Klaster dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Pengembangan klaster dan sentra IKM melalui transformasi digital dan branding produk IKM)	Kabupaten Majalengka	3. Peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan pada klaster dan sentra IKM	Kabupaten Majalengka	3. Peningkatan kualitas inovasi dan produktivitas pada klaster dan sentra IKM, serta akses terhadap bahan baku	Kabupaten Majalengka	3. Peningkatan jejaring kemitraan usaha pada klaster dan sentra IKM dengan pelaku industri besar	Kabupaten Majalengka	3. Transformasi digital dan branding produk IKM	Kabupaten Majalengka



NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
				4. Transformasi PTR Bojong Ciders menjadi Pasar induk Hasil Pertanian	Pasar Ternak Dawuan	4. Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan	4. Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan	5. Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan
		4. Rehabilitasi Pasar Pemda Dan Pasar Rakyat	1 Pasar Pemda	5. Rehabilitasi Pasar Pemda Dan Pasar Rakyat	1 Pasar Pemda	5. Rehabilitasi Pasar Pemda Dan Pasar Rakyat	1 Pasar Pemda	5. Rehabilitasi Pasar Pemda Dan Pasar Rakyat	1 Pasar Pemda	6 Rehabilitasi Pasar Pemda Dan Pasar Rakyat	1 Pasar Pemda
		5. Majalengka Mendunia Ekspor (MADUE)	Kabupaten Majalengka	6. Majalengka Mendunia Ekspor (MADUE)	Kabupaten Majalengka	6. Majalengka Mendunia Ekspor (MADUE)	Kabupaten Majalengka	6. Majalengka Mendunia Ekspor (MADUE)	Kabupaten Majalengka	7. Majalengka Mendunia Ekspor (MADUE)	Kabupaten Majalengka
		6. Penguatan Infrastruktur Pertanian	Kabupaten Majalengka	7. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Kabupaten Majalengka	7. Penguatan Pasar dan Aksesibilitas Pangan	Kabupaten Majalengka	7. Diversifikasi Pangan	Kabupaten Majalengka	8. Peningkatan Konsumsi Pangan	Kabupaten Majalengka
		7. Penyusunan Regulasi Ripparkab dan Rindekraft Promosi dan branding Pariwisata dan KENCAN WISATA (Kegiatan Cepat Pendampingan Perizinan Pariwisata)	Kabupaten Majalengka	8. Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata di Kawasan strategis pariwisata strategis dan Kawasan pengembangan pariwisata. Optimalisasi dan Pembangunan Terminal Wisata	Kabupaten Majalengka	8. Even /Festival Skala Nasional dan Pengembangan Destinasi Wisata Agro Dan Budaya, Fasilitasi Pengembangan Bumdes Untuk Pariwisata	Kabupaten Majalengka	8. Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata dan Aktivasi Ruang Publik	Kabupaten Majalengka	8. Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Ekraf dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata	Kabupaten Majalengka
		8. MATA HATI, Pelatihan para pencari Kerja	Kabupaten Majalengka	9. MATA HATI, Pelatihan para pencari Kerja	Kabupaten Majalengka	9. MATA HATI, Pelatihan para pencari Kerja	Kabupaten Majalengka	9. MATA HATI, Pelatihan para pencari Kerja	Kabupaten Majalengka	9. MATA HATI, Pelatihan para pencari Kerja	Kabupaten Majalengka
		9. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi dan Rekonsiliasi (PEJANTAN KEREN)	Kabupaten Majalengka	10. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi dan Rekonsiliasi (PEJANTAN KEREN)	Kabupaten Majalengka	10. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi dan Rekonsiliasi (PEJANTAN KEREN)	Kabupaten Majalengka	10. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi dan Rekonsiliasi (PEJANTAN KEREN)	Kabupaten Majalengka	10. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi dan Rekonsiliasi (PEJANTAN KEREN)	Kabupaten Majalengka



NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		10. Transformasi UMKM/UMKM Naik Kelas (GASIK) dan Pendirian Koperasi Merah Putih	Kabupaten Majalengka dan 330 Desa 13 Kelurahan	11. Transformasi UMKM/UMKM Naik Kelas (GASIK) dan Pembangunan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)	Kabupaten Majalengka	11. Transformasi UMKM/UMKM Naik Kelas (GASIK)	Kabupaten Majalengka	11. Transformasi UMKM/UMKM Naik Kelas (GASIK)	Kabupaten Majalengka	11. Transformasi UMKM/UMKM Naik Kelas (GASIK)	Kabupaten Majalengka
		11. Optimalisasi EKRAF Melalui Desa Kreatif dan Culinary Night	Kabupaten Majalengka	12. Optimalisasi EKRAF Melalui Desa Kreatif dan Culinary Night	Kabupaten Majalengka	12. Optimalisasi EKRAF Melalui Desa Kreatif dan Culinary Night	Kabupaten Majalengka	12. Optimalisasi EKRAF Melalui Desa Kreatif dan Culinary Night	Kabupaten Majalengka	12. Optimalisasi EKRAF Melalui Desa Kreatif dan Culinary Night	Kabupaten Majalengka
				13. Optimalisasi Majalengka Creative Center untuk mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif	Kabupaten Majalengka	13. Penguatan Kelembagaan Ekraf	Kabupaten Majalengka	13. Peningkatan Kompetensi Pelaku Ekraf	Kabupaten Majalengka	13. Even Ekraf	Kabupaten Majalengka
		12. Pemberdayaan Pelaku Seni dan Budaya Melalui Event Di Tempt Wsata	Kabupaten Majalengka	14. Penguatan Sarana dan Prasarana Gedung Kebudayaan yang Representatif, Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten Majalengka	14. Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Majalengka	14. Optimalisasi Pengelolaan Musium Talaga Manggung	Museum Talaga Manggung	14. Pemberdayaan Pelaku Seni dan Budaya Melalui Event	Kabupaten Majalengka
5.	Kualitas Lingkungan Langkung Sae	1. Gerakan Pembangunan Bersama Kelola Sampah (GERBANG BERKAH)	Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, TPS3R, 26 Kecamatan	1. Gerakan Pembangunan Bersama Kelola Sampah (GERBANG BERKAH)	Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, TPS3R, 26 Kecamatan	1. Gerakan Pembangunan Bersama Kelola Sampah (GERBANG BERKAH)	Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, TPS3R, 26 Kecamatan	1. Gerakan Pembangunan Bersama Kelola Sampah (GERBANG BERKAH)	Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, TPS3R, 26 Kecamatan	1. Gerakan Pembangunan Bersama Kelola Sampah (GERBANG BERKAH)	Ekonomi Sirkular dalam Pengelolaan Sampah, TPS3R, 26 Kecamatan
		2. Pembangunan TPS3R di setiap Kecamatan	26 Kecamatan	2. Pembangunan Bank Sampah Berdampingan dengan TPS3R	26 Kecamatan	2. Sosialisasi Fungsi TPS3R dan Bank Sampah	26 Kecamatan	2. Pengelolaan Terpadu TPS3R dengan Bank Sampah	26 Kecamatan	2. Integrasi TPST, TPS3R dan Bank Sampah	Kec. Kadipaten



NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		3. Peningkatan TPST Heuleut	Kec. Kadipaten	3. Perluasan Lahan TPST Heuleut	Kec. Kadipaten	3. Penyediaan Saran Prasarana Pengangkutan ke TPST Heuleut	Kec. Kadipaten	3. Penyediaan Saran Prasarana Pengolahan ke TPST Heuleut	Kec. Kadipaten	3. Optimalisasi Penanganan Persampahan di TPST Heuleut	Kec. Kadipaten
		4. Peningkatan Jalan Akses TPA Heuleut	Kecamatan Panyingkiran								
		5. Gerakan Bersih-Bersih dan Berkah dihari Jumat (GEBER JUMAT)	26 Kecamatan	4. Gerakan Bersih-Bersih dan Berkah dihari Jumat (GEBER JUMAT)	26 Kecamatan	4. Gerakan Bersih-Bersih dan Berkah dihari Jumat (GEBER JUMAT)	26 Kecamatan	4. Gerakan Bersih-Bersih dan Berkah dihari Jumat (GEBER JUMAT)	26 Kecamatan	4. Gerakan Bersih-Bersih dan Berkah dihari Jumat (GEBER JUMAT)	26 Kecamatan
		6. Penanaman Pohon Serentak Kotaku Hijau, Alami dan Indah (POHON KAMI)	26 Kecamatan	5. Penanaman Pohon Serentak Kotaku Hijau, Alami dan Indah (POHON KAMI)	26 Kecamatan	5. Penanaman Pohon Serentak Kotaku Hijau, Alami dan Indah (POHON KAMI)	26 Kecamatan	5. Penanaman Pohon Serentak Kotaku Hijau, Alami dan Indah (POHON KAMI)	26 Kecamatan	5. Penanaman Pohon Serentak Kotaku Hijau, Alami dan Indah (POHON KAMI)	26 Kecamatan
		7. Penghijauan lahan Kritis	Lahan Kritis			6. Penghijauan lahan Kritis	Lahan Kritis	6. Penghijauan lahan Kritis	Lahan Kritis		
		8. Gerakan Responsif Cepat Tanggap (GERCEP)	Lokasi Bencana	6. Gerakan Responsif Cepat Tanggap (GERCEP)	Lokasi Bencana	7. Gerakan Responsif Cepat Tanggap (GERCEP)	Lokasi Bencana	7. Gerakan Responsif Cepat Tanggap (GERCEP)	Lokasi Bencana	6. Gerakan Responsif Cepat Tanggap (GERCEP)	Lokasi Bencana
6.	Reformasi Birokrasi Langkung Sae	1. Pemberian Akta Kelahiran Bagi Bayi Baru Lahir (SATSET)	Kabupaten Majalengka	1. Pemberian Akta Kelahiran Bagi Bayi Baru Lahir (SATSET)	Kabupaten Majalengka	1. Pemberian Akta Kelahiran Bagi Bayi Baru Lahir (SATSET)	Kabupaten Majalengka	1. Pemberian Akta Kelahiran Bagi Bayi Baru Lahir (SATSET)	Kabupaten Maja lengka	1. Pemberian Akta Kelahiran Bbagi Bayi Baru Lahir (SATSET)	Kabupaten Majalengka
		2. Menjadikan Majalengka Kota Cerdas Berbasis SPBE	Pemkab Majalengka	2. Penyempurnaan Sistem SPBE	Pemkab Majalengka	2. Mengintegrasikan SPBE Menuju Smart City	Pemkab Majalengka	2. Sosialisasi dan Implementasi Smart City	Pemkab Majalengka	2. Perwujudan Smart City	Pemkab Majalengka
		3. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	3. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	3. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	3. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP	3. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Pasti dan Produktif (MPP PRO)	Dinas DPMPPTSP



NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I (2026)		Tahap II (2027)		Tahap III (2028)		Tahap IV (2029)		Tahap V (2030)	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Tema : Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Tema : Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Daerah		Tema : Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Tema : Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		4. Sinergi Masyarakat Majalengka (SIMAMA)	Kabupaten Majalengka	4. Sinergi Masyarakat Majalengka (SIMAMA)	Kabupaten Majalengka	4. Sinergi Masyarakat Majalengka (SIMAMA)	Kabupaten Majalengka	4. Sinergi Masyarakat Majalengka (SIMAMA)	Kabupaten Majalengka	4. Sinergi Masyarakat Majalengka (SIMAMA)	Kabupaten Majalengka
		5. Meningkatkan Jangkauan Unit Pemadam Kebakaran	4 Wilayah Kabupaten Majalengka (utara, selatan, barat, timur)	5. Proporsional SDM dan sarana prasarana Pemadam Kebakaran	Pemkab Majalengka	5. Meningkatkan Kompetensi Petugas Melalui Pelatihan Dan Sertifikasi Di Bidang Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamatan Untuk Memastikan pelayanan yang profesional dan efektif	Pemkab Majalengka	5. Modernisasi Infrastruktur dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Pemkab Majalengka	5. Terbentuknya 4 Pos Baru Unit Pemadam Kebakaran	4 Wilayah Kabupaten Majalengka (Utara, Selatan, Barat, Timur)
		6. Peningkatan Kapasitas SDM yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pemkab . Majalengka	6. Pengembangan sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel berbasis kinerja dan target peningkatan pelayanan publik	Pemkab . Majalengka	6. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi Pelayanan Publik di Perangkat Daerah	Pemkab . Majalengka	6. Penerapan TIK dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan komunikasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik Perangkat Daerah	Pemkab . Majalengka	6. Kolaborasi antar Perangkat Daerah, instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk peningkatan pelayanan publik	Pemkab . Majalengka
		7. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Pemkab Majalengka	7. Penguatan kapasitas aparatur Pengelolaan keuangan daerah dan Pengintegrasian database asset daerah ke dalam e-BMD	Pemkab Majalengka	7. Percepatan digitalisasi layanan Keuangan daerah Melalui optimalisasi Penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah	Pemkab Majalengka	7. Percepatan target Pengamanan Barang Milik Daerah secara Fisik dan Legal	Pemkab Majalengka	7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pemkab Majalengka

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Ket. : : Program 10 Hari yang dilanjutkan.



3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam pencapaian misi, maka arah kebijakan yang dirumuskan sebagaimana Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan RPJMD
Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

No.	Misi	Arah Kebijakan
1.	Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif dan Berkeadaban	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan 1 Desa 1 Mesjid Modern/Terpadu2. Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan3. Meningkatkan Rasa Aman, Tentram, Dan Tertib di Masyarakat4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum5. Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin6. Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Keluarga Miskin7. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Keluarga Miskin8. Optimalisasai Kelembagaan Dan Meningkatkan Kualitas Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
2.	Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru2. Peningkatan Kompetensi Guru3. Pemberian Insentif Guru dan Beasiswa Guru Berprestasi4. Penambahan Puskesmas Rawat Inap5. Penambahan Tunjangan Kinerja Tenaga Kesehatan6. Peningkatan Aktivitas Olahraga7. Peningkatan Status Gizi Masyarakat8. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan
3.	Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkapannya2. Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Desa3. Peningkatan Infrastruktur Desa4. Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Desa5. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa6. Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
4.	Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)2. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perdagangan3. Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor4. Penguatan Ekosistem Digital UMKM



No.	Misi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none">5. Peningkatan Optimalisasi Tatakelola, Promosi Dan Disertifikasi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW)6. Peningkatan Jangkauan Promosi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Seni Dan Budaya7. Optimalisasi dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif8. Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Mewujudkan Kawasan Pemajuan Kebudayaan9. Branding Produk Unggulan10. Legalitas Produk Umkm11. Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi12. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perikanan, Hortikultura Dan Perkebunan13. Peningkatan Sertifikasi Benih14. Penguatan Regulasi Lp2b Dan Lsd15. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian16. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian17. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani18. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian19. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Perikanan, Hortikultura Dan Perkebunan20. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah21. Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat22. Penguatan Lumbung Pangan23. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani24. Pengelolaan Kelembagaan Petani25. Stabilisasi Pasokan Pangan26. Penyediaan dan Fasilitasi Distribusi Perdagangan27. Stabilisasi Harga Pangan28. Pengawasan Mutu Pangan29. Pengolahan Bahan Pangan Lokal30. Pelatihan Untuk Menciptakan Tenaga Kerja Mandiri Dan Kebutuhan Dunia Usaha31. Fasilitasi Pencaker Dengan Kebutuhan Dunia Usaha32. Penguatan Daya Dukung Untuk Peningkatan Skill Tenaga Kerja Dan Perlindungan Ketenagakerjaan33. Peningkatan Kualitas Pelaku Ekraf34. Meningkatkan Minat Dan Pengembangan Usaha Disektor Pertanian35. Penguatan Promosi Yang Effesien Dan Efektif36. Penguatan Regulasi Investasi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Secara Bersamaan2. Melaksanakan Penanganan, Pemeliharaan Tutupan Lahan3. Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara4. Melaksanakan Penanganan, Pengurangan Sampah5. Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan6. Melaksanakan Penanaman Pohon



No.	Misi	Arah Kebijakan
6.	Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah2. Kualitas Layanan Administrasi Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD3. Pengelolaan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit4. Penyusunan Dan Penetapan Regulasi Keamanan Informasi Daerah5. Peningkatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknik Dan Pelatihan Sumberdaya Manusia6. Meningkatkan Audit Dan Supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)7. Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Sarana Keamanan Informasi8. Peningkatan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan9. Penguatan Peran Dan Fungsi Kecamatan Dalam Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Pembangunan Desa/Kelurahan10. Peningkatan Kapasitas Melalui Pendampingan Terhadap Aparatur Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa/Kelurahan11. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah12. Peningkatan Level PK APIP13. Penguatan Sarana Prasarana Mall Pelayanan Publik (MPP)14. Peningkatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Serta Koordinasi Dana Transfer

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka 2025-2029.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.3.1 Program Prioritas Sesuai Agenda Pembangunan Daerah

Program prioritas daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penjenjangan) kinerja.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Kabupaten Majalengka menetapkan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Misi 1, Membangun Kehidupan Beragama Dan Tatahan Sosial Yang Lebih Berkualitas, dengan program prioritas :
 - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan



- c. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - g. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - h. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - i. Program Pemberdayaan UMKM
 - j. Program Pemberdayaan Sosial
 - k. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - l. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - m. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - n. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - o. Program Rehabilitasi Sosial
 - q. Program Pengelolaan Pendidikan
 - r. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - s. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - t. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - u. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - v. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - w. Program Penanganan Bencana
 - x. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - y. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - z. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
2. Misi 2, Meningkatkan Kualitas Mutu Kesehatan dan Pendidikan, dengan program prioritas:
- a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan



- c. Program Pembinaan Perpustakaan
 - d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - h. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah
 - j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - k. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - l. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - m. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - n. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - o. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - p. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Misi 3, Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan, dengan program prioritas:
- a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c. Program Penataan Desa
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - e. Program Adminitrasi Pemerintahan Desa



- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Misi 4, Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan, dengan program prioritas:
 - a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Pengembangan Ekspor
 - d. Program Pengembangan UMKM
 - e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - f. Program Pemasaran Pariwisata
 - g. Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - h. Program Pengembangan Kebudayaan
 - i. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Dan Mikro
 - j. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - k. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - l. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - m. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - n. Program Penyuluhan Pertanian
 - o. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - p. Program Pengelolaan Sumberdaya Air
 - q. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - r. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - s. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - t. Program Peningkatan Diverifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - u. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - v. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - w. Program Hubungan Industri
 - x. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekraf
 - y. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



- z. Program Promosi Penanaman Modal
- aa. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 5. Misi 5, Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dengan program prioritas :
 - a. Program Penanggulangan Bencana
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengelolaan Persampahan
 - d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - e. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 6. Misi 6, Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi, dengan program prioritas:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 - c. Program Kepegawaian Daerah
 - d. Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - g. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - h. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - i. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - j. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - k. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
 - l. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - m. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - n. Pengelolaan Keuangan Daerah
 - o. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan maka program prioritas yang dirumuskan adalah sebagaimana Tabel 3.7



Tabel 3.7
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	
Visi : Terwujudnya Majalengka Langkung Sae							
Misi 1 : Membangun Kehidupan Beragama Dan Tatahan Sosial Yang Lebih Berkualitas							
1.1	Terwujudnya Nilai-nilai Agama Dan Sosial Dalam Prilaku Kehidupan Masyarakat			1.	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	
1.1.1		Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Dan Pengamalan Ajaran Agama	Mewujudkan Masyarakat Yang Beretika, Toleran dan Mengimplemen Tasikan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
1.1.2		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Tentram, Aman dan Kondusif	1.	Indeks Trantibum	Kategori	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.2	Meningkatnya Ketahanan Sosial			1.	Indeks Gini	Poin	
1.2.1		Menurunnya Penduduk Miskin	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka Serta Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	1.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pemberdayaan UMKM Program Pemberdayaan Sosial Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	
						Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penanganan Bencana Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Mutu Kesehatan dan Pendidikan							
2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			1.	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	
2.1.1		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Mewujudkan SDM Kabupaten Majalengka Yang Potensial, Berilmu Dan Beradab Serta Berdaya Saing Tinggi	1.	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan
2.1.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Yang Sangat Baik, Menjadikan SDM Kabupaten Majalengka Yang	1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				2.	Prevalensi Stunting	Persen	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	
			Unggul Dari Kesehatan Mental Dan Fisik (Jiwa Dan Raga)			Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Berkelanjutan							
3.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Desa Sesuai Rencana Tata Ruang Yang Berkelanjutan	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan, Desa dan Perkotaan	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah Dan Ruang Wilayah 1. Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah Dan Ruang Wilayah 2. Indeks Desa	Persen Persen Persen	Program Penyelenggaraan Jalan Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Penataan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Adminitrasi Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta Meningkatkan Kemandirian Pangan							
4.1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Terjaganya Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen
					2.	Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi	Persen
					1.	Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	Triliun Rupiah



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	
		4.1.2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Kabupaten Majalengka Memiliki Ketercukupan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Peningkatan Diverifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		4.1.3	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industri Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekraf Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan								
5.1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				1.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Poin	
		5.1.1	Meningkatnya Ketahanan Bencana	Menurunnya Tingkat Kerentanan Masyarakat dan Wilayah Terhadap Bencana	1.	Indeks Risiko Bencana	Poin	Program Penanggulangan Bencana



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS				
		5.1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Yang Baik	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
Misi 6 : Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Kolaborasi										
6.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	6.1.1	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima	Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Kabupaten Majalengka yang Sesuai Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>), Serta Memiliki Daya Saing Yang Semakin Kuat	1.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Kepegawaian Daerah Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Pelayanan Penanaman Modal



NO.	VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS
		6.1.2	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kabupaten Majalengka Mempunyai Kemampuan Keuangan yang Tinggi	1.	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



3.2.3.2 Program Prioritas Tematik serta Kewilayahan

A. Program Prioritas Tematik

Program prioritas tematik merupakan program daerah yang spesifik dimaksudkan untuk mendukung prioritas pusat dan provinsi, sebagai berikut :

1. Program prioritas tematik untuk mendukung Kedaulatan Pangan, Makan Bergizi Gratis dan Pengembangan Sektor Pertanian, yaitu:
 - a. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Lemahsugih, Argapura, Banjaran, Pengendalian LP2B.
 - b. Pengembangan Pasar Sayuran Talaga, Lemahsugih, Maja dan Argapura.
2. Program prioritas tematik untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita, yaitu:
 - a. Pengembangan Kawasan Pendidikan Terintegrasi Industri.
 - b. Peningkatan Jalan Lingkar Utara Majalengka.
3. Program prioritas tematik untuk mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan, yaitu : Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Majalengka.
4. Program prioritas tematik untuk mendukung Pengembangan Pariwisata, yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan Jatilima.
 - b. Peningkatan Jalan Akses Pendukung Jatilima.
5. Program prioritas tematik untuk mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu:
 - a. Peningkatan Jalan Akses TPA Heuleut.
 - b. Pengembangan TPS3R di Tiap Kecamatan.
6. Program prioritas tematik untuk mendukung Potensi Desa dan Penangan Stunting, yaitu:
 - a. Bantuan Keuangan Desa Yang Diarahkan.
 - b. Pembangunan Koperasi Merah Putih.



B. Program Kewilayahan

1. Wilayah Bagian Utara

Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Topografis : landai/ dataran rendah, dengan kemiringan 0-15%.
- b. Luas wilayah : ± 48.803 Ha (68,26% dari luas kabupaten).
- c. Administrasi terdiri : 9 kecamatan, 96 desa.
- d. Jumlah penduduk : pada tahun 2024 sebanyak 402.603 jiwa.
- e. Pemanfaatan ruang : Industri besar di koridor jalan nasional, LSD/LP2B, jasa perdagangan, perumahan permukiman, perkebunan.
- f. Isu Strategis : Pengembangan Arocity, Kawasan Rebana dan KPI, Kedaulatan Pangan.
- g. Permasalahan : Alih fungsi lahan pertanian, bencana alam banjir, penanganan sampah, Kawasan Kumuh di Jatiwangi, stunting di Kecamatan Sumberjaya.

Berdasarkan karakteristik di wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara, arahan pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

- a. Arah Pemanfaatan Ruang : KSP BIJB dan Kertajati Aerocity, KSK Teracotta/JAF, Kawasan Industri KIEM 400 Ha, KPI Kertajati-Jatitujuh 374 Ha, jasa perdagangan dan pertanian.
- b. Prioritas Program : Penetapan RTRW dan Penyusunan RDTR Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara, Tata Kelola Sampah, Peningkatan Kualitas Jalan, Penanganan Kawasan Kumuh, Aksi Konvergensi Stunting, Peningkatan Produksi Pertanian.
- c. Indikator Kinerja Terungkit : LPE , PDRB, Stunting dan Kemiskinan.

Gambar 3.4
Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Utara



Sumber : Shapefile RTRW Tahun 2011-2031.

2. Wilayah Bagian Tengah

Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Tengah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Topografis : Berbukit bergelombang, dengan kemiringan 15-40%.
- b. Luas wilayah : \pm 30.176 Ha (18,53% dari luas kabupaten).
- c. Administrasi terdiri : 12 kecamatan, 120 desa/kelurahan.
- d. Jumlah penduduk : pada tahun 2024 sebanyak 476.254 jiwa.
- e. Pemanfaatan ruang : Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Jasa Perdagangan, SIKIM, Industri Kreatif, Peertanian.
- f. Isu Strategis : Kualitas dan daya saing SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.
- g. Permasalahan : HLS, Kualitas SDM, Penanganan Sampah.

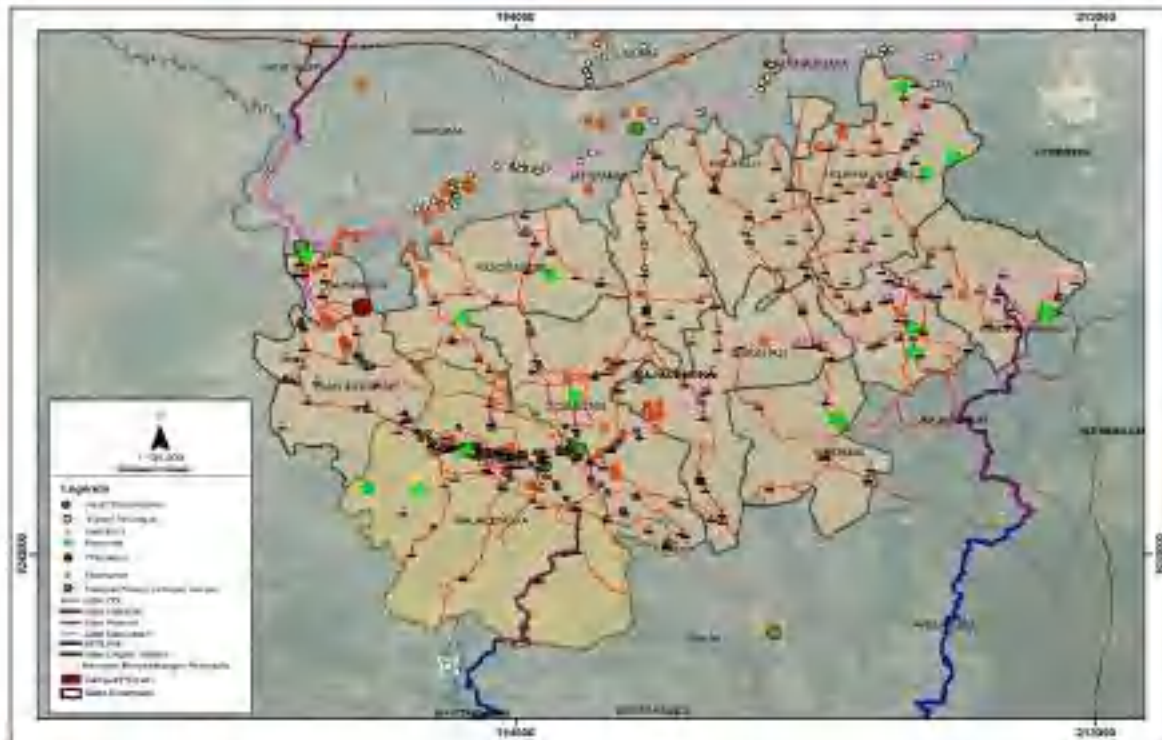
Berdasarkan karakteristik di wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Tengah, arahan pembangunan kewilayahan sebagai berikut:

- a. Arah Pemanfaatan Ruang (RTRW) : KI Jatiwangi, KI di Jatiwangi, Pengembangan Kawasan Perkotaan, Perdagangan dan Jasa serta Pertanian.

- b. Prioritas Program : Tata Kelola Pemerintahan, Pelatihan Tenaga Kerja, Tata Kelola Sampah TPS3R, Pengembangan Ekraf, Konektivitas Jalan.
- c. Indikator Kinerja Terungkit : RLS , PDRB, TPT.

Gambar 3.5

Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Tengah



Sumber : Shapefile RTRW Tahun 2011-2031

3. Wilayah Bagian Selatan

Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Selatan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Topografis : Datan Tinggi/ Perbukitan Terjal, dengan kemiringan > 40%.
- b. Luas wilayah : ± 54.729 Ha (13,21% dari luas kabupaten).
- c. Administrasi terdiri : 12 kecamatan, 140 desa.
- d. Jumlah penduduk : pada tahun 2024 sebanyak 481.184 jiwa.
- e. Pemanfaatan ruang : Pertanian, pariwisata, Konservasi SDA/TNGC, LP2B.
- f. Isu Strategis : Kedaulatan pangan, Ketimpangan Pembangunan.
- g. Permasalahan : Laju pertumbuhan sektor pertanian stagnan, Infrastruktur pendukung pariwisata masih

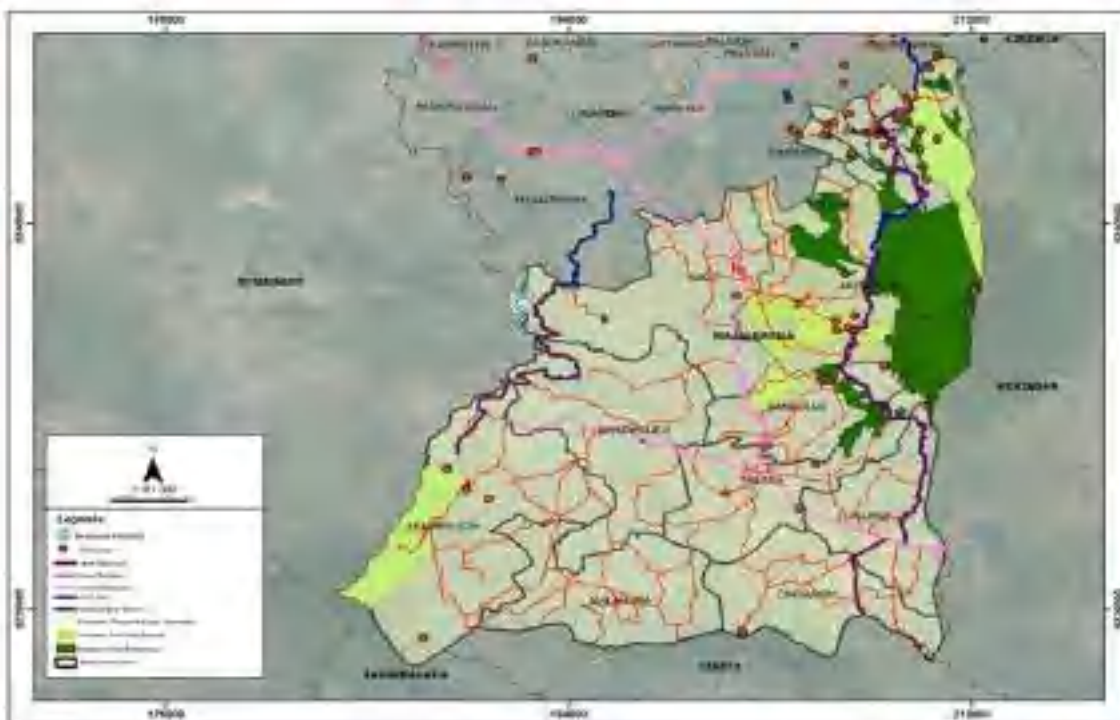
minim, angka kemiskinan masih tinggi, stunting, tata kelola persampahan.

Berdasarkan karakteristik di wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Selatan, arahan pembangunan kewilayahan sebagai berikut :

- a. Arah Pemanfaatan Ruang (RTRW) : Kawasan Konservasi, KSK Nunuk Cengal dan KSK Kawitgapura,.
- b. Prioritas Program : Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian dan pariwisata, Peningkatan Jalan Lingkar Selatan, peningkatan akses jalan penghubung JATILIMA, pengembangan IKM makanan dan tembakau, Produksi Pertanian dan Pengelolaan Persampahan
- c. Indikator Kinerja Terungkit : Tingkat Kemiskinan, Stunting, PDRB Sektor Pertanian, PDRB Perkapita, Indeks Gini.

Gambar 3.6

Wilayah Kabupaten Majalengka Bagian Selatan



Sumber : Shapefile RTRW Tahun 2011-2031

3.2.3.3 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dokumen Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat dan Provinsi Jawa Barat, terinventarisasi beberapa program strategis yang berlokasi di Kabupaten Majalengka dan



secara pendanaan program strategis tersebut bisa dilakukan berbagai sumber, sebagai berikut:

Tabel 3.8
Program Strategis Pusat dan Provinsi Jawa Barat Yang Berlokasi
Di Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

No.	Rencana Infrastruktur	Sumber Anggaran				Sumber Dokumen
		APBN	APBD Prov	ABPD Kab	Badan Usaha	
1.	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Akses Utama Menuju Sentra Produksi, Industri Dan Pariwisata Unggulan	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029
2.	Pengembangan Koridor Industri Cirebon-Kertajati	√	√	√	√	RPJMN 2025-2029
3.	Integrasi Rantai Nilai Dan Rantai Pasok Logistik, Terutama Pada Ruas: Kertajati-Indramayu	√	√	√	√	Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap 1
4.	Dry Port KA Terintegrasi Kawasan Strategis Industri Kertajati-Cirebon	√	√	√	√	Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap 1
5.	Peningkatan sarana & prasarana dan Kualitas Pelayanan Bandar Udara Internasional Yang Dapat Melayani Aksesibilitas/ Konektivitas Cepat Ke/Dari Kawasan Metropolitan, Kawasan Strategis Industri, Kawasan Strategis Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dan/Atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati)	√	√	√	√	Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap 1
6.	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
8.	Optimalisasi BIJB	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029
9.	Peningkatan Sarana & Prasarana Dan Kualitas Pelayanan Bandar Udara Internasional Yang Dapat Melayani Aksesibilitas/ Konektivitas Cepat Ke/Dari Kawasan Metropolitan, Kawasan Strategis Industri, Kawasan Strategis Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dan/Atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati)	√	√	√	√	RPJMN 2025-2029
10.	Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Primer	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
11.	Pengembangan Kertajati Aeocity	√	√	√	√	RPJMN 2025-2029
12.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029



No.	Rencana Infrastruktur	Sumber Anggaran				Sumber Dokumen
		APBN	APBD Prov	ABPD Kab	Badan Usaha	
13.	Penataan Permukiman Kumuh	√	√	√	√	Berdasarkan RPJMN 2025-2029
14.	Sanitasi Lingkungan	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029
15.	Penataan Permukiman Kumuh	√	√	√	√	RPJMN 2025-2029
16.	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja	√	√	√	√	Revisi Perpres 87 Tahun 2021
17.	Pemenuhan Layanan Dasar Air Minum, Penangan Limbah Dan Penyediaan RTH	√	√	√	√	RPJMN 2025-2029
18.	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (Cai Ngalir)	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029
19.	Operasi Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Dengan Luas Layanan > 3000 Ha	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
20.	Operasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Lintas Kab./Kota	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
21.	Operasi Pemeliharaan Dan Rehabilitasi DI Dengan Luas Layanan 1.000 – 3.000 Ha	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
22.	Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka	√	√	√	√	Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap 1
23.	Normalisasi Sungai, Situ, Embung dan Pengamanan Pantai/Muara	√	√	√	√	Ranhir RPJMD Prov. Jabar 2025-2029
24.	Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka	√	√	√	√	Perda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahap 1
25.	Pembangunan Embung	√	√	√	√	Perda RTRW Provinsi Jawa Barat
26.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut	√	√	√	√	Perpres 87 Tahun 2021
27.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	√	√	√	√	Perpres 87 Tahun 2021
28.	Pengembangan Rumah Sakit Cideres Tipe B	√	√	√		Perpres 87 Tahun 2021
29.	Peningkatan Kapasitas Air Minum SPAM Perkotaan majalengka bagi penyiapan Infrastruktur Kawasan Pendidikan Lingkar Utara Dari Mata Air Cilongkrang	√	√	√		Revisi Perpres 87 Tahun 2021



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
7. Bersinergi dengan program prioritas Pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, serta unsur pendukung, penunjang, pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan umum. Program-program tersebut disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Lebih rinci mengenai rencana program Perangkat Daerah yang disertai pendanaan indikatif Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						576.203		605.013		635.264		667.027		700.379	DISDIK
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	39,5	47,50		51,50		55,50		59,50		63,50		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						519.396		545.366		572.634		601.266		631.329	DISDIK
2.1	Meningkatnya Partisipasi PAUD	APM PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD/Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	Persen	92,78	95,78		95,81		95,84		95,87		95,90		DISDIK
2.2	Meningkatnya Partisipasi SD	APM SD/MI	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (MI)/Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan x100%	Persen	91,25	91,30		91,32		91,34		91,36		91,38		DISDIK
2.3	Meningkatnya Partisipasi SMP	APM SMP/MTs	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang	Persen	88,15	88,28		88,31		88,34		88,37		88,40		DISDIK



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
				sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%													
	2.4	Meningkatnya Partisipasi Kesenjangan	APK Non Formal	Jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / jumlah warga negara usia 7 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x100%	Persen	52,99	58,85		64,38		69,91		75,44		80,97		DISDIK
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																DISDIK
	3.1	Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	(jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih/jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di kab/kota) x 100%	Persen	28,97	29,77	543	30,57	570	31,36	599	32,16	629	32,96	660	DISDIK
KESEHATAN																	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DINKES
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	45,43		21,864		22,957		24,105		25,310		26,575		DINKES
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																DINKES
2.1	Terpenuhinya standar pelayanan minimum bidang kesehatan	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk	(jumlah Daya Tampung RS/jumlah penduduk di kab/kota) x 1000	Nilai	0,68	0,78	9,975	0,88	10,474	0,98	10,997	0,98	11,547	1	12,125		DINKES
		Persentase RS Rujukan yang terakreditasi	(jumlah RS Rujukan yang terakreditasi/jumlah RS di kab/kota) x 100%	Persen	100	100	203,8	100	213,989	100	224,688	100	235,922	100	247,719		DINKES
		Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	(jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil/jumlah seluruh ibu hamil di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100%	13,860	100%	14,553	100%	15,281	100%	16,045	100%	16,847		DINKES
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	(jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan/jumlah ibu bersalin di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	7,240	100 %	7,602	100 %	7,982	100 %	8,381	100 %	8,800		DINKES
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	(bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/bayi baru lahira di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	8,085	100 %	8,489	100 %	8,914	100 %	9,359	100 %	9,827		DINKES



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	(jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah balita di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	218,379	100 %	229,298	100 %	240,763	100 %	252,801	100 %	265,441	DINKES
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah anak usia pendidikan dasar di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	8,085	100 %	8,489	100 %	8,914	100 %	9,359	100 %	9,827	DINKES
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/jumlah orang usia 15-29 tahun di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	26,250	100 %	27,563	100 %	28,941	100 %	30,388	100 %	33,426	DINKES
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar/jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	30,303	100 %	31,818	100 %	33,409	100 %	35,080	100 %	36,833	DINKES
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah penderita hipertensi di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	26,250	100 %	27,563	100 %	28,941	100 %	30,388	100 %	33,426	DINKES



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/jumlah penderita DM di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	26,250	100 %	27,563	100 %	28,941	100 %	30,388	100 %	33,426	DINKES
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar/jumlah ODGJ di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	26,250	100 %	27,563	100 %	28,941	100 %	30,388	100 %	33,426	DINKES
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	(jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar/jumlah orang terduga TBC di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	21	100 %	22,050	100 %	23,153	100 %	24,310	100 %	26,741	DINKES
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar/jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV) x 100%	Persen	100 %	100 %	283,5	100 %	297,675	100 %	312,559	100 %	328,187	100 %	361,005	DINKES
		Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas	Jumlah Jenis Obat yang tersedia dibagi dengan jumlah Jenis obat yang sesuai standar	Persen	100 %	100 %	10.989,42	100	11.538,889	100	12.115,834	100	12.721,625	100	13.357,707	DINKES



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	(Jumlah Alkes di Faskes sesuai Standar)/(Total Jumlah Alkes Seluruhnya)x 100%	Persen	100	100	921,302	100	967,3671	100	1.015,735	100	1.066,522	100	1.119,848	DINKES
			Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS/ jumlah penduduk kabupaten/kota x 100%	Persen	95%	98%	44.110,626	98%	46.316,157	98%	48.631,965	98%	51.063,563	98%	53.616,742	DINKES
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUS.IA KESEHATAN																DINKES
	3.1	Terpenuhnya standar kompetensi tenaga kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Pegawai	85%	85%	943,543	85%	990,720	85%	1.040,256	85%	1.092,269	85%	1.146,882	DINKES
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																DINKES
	4.1	Prosentase penggunaan obat rasional di puskesmas	Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Indikator Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar dibagi jumlah manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin x 100%	Persen	100	100	138,894	100	145,839	100	153,131	100	160,787	100	168,827	DINKES



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	4.2	Terselenggaranya Higiene sanitas Pangan	Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal	Jumlah pengawasan di sarana dibagi jumlah seluruh sarana	Persen	85%	85%	88,174	85%	92,582	85%	97,212	85%	102,072	85%	107,176	DINKES
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																DINKES
	5.1	Penguatan Gerakan Masyarakat Menuju Hidup Sehat	Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100%	Jumlah UKBM yang menyelenggarakan upaya kesehatan dibagi jumlah UKBM yang ada	persen	85%	85%	161,616	90 %	169,697	95 %	178,182	100 %	187,091	100 %	196,445	DINKES
RSUD MAJALENGKA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							134.350		147.785		162.563		178.820		196.702	RSUD MAJALENGKA
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,21	83		84		85		86		87		RSUD MAJALENGKA
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							12.500		33.600		61.429		19.600		12.500	RSUD MAJALENGKA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA								PD PENANG GUNG JAWAB		
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			TAHUN 2030	
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		TARGET	PAGU (Juta Rp.)
	2.1	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah sakit	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	85,85	86		87		88		89		90		RSUD MAJALEN GKA
RSUD CIDERES																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						206,522		212,085		217,731		225,568		233,499		RSUD CIDERES
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,17	86		86,5		87		87,5		88		RSUD CIDERES
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						92,300		61,800		68,000		54,000		78,000		RSUD CIDERES
	2.1	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah sakit	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	80,79	83		85		87		89		91		RSUD CIDERES
RSUD TALAGA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.292		3.621		3.983		4.382		4.820		RSUD TALAGA
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,44	83		84		85		86		87		RSUD TALAGA
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						11.707		12.878		14.166		15.582		17.141		RSUD TALAGA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	60	61		63		65		67		69		RSUD TALAGA	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															DPUTR	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai												DPUTR	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															DPUTR	
2.1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi/luas daerah irigasi di kab/kota)x100%	Persen	100	100	79.136,80	100	112.096,19	100	142.402,30	100	43.697,00	100	37.085,63	DPUTR	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															DPKPP	
3.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar	(jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga/jumlah rumah tangga di seluruh	Persen	80,75 %	81,10 %	12.000	81,40%	12.000	81,75%	12.500	81,90%	12.500	82,10%	13.000	DPKPP	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
				kabupaten/kota) x 100%														
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																	
4.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar	(jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik/jumlah rumah tangga di kab/kota)x 100%	Persen	70,17 %	70,23 %	600	70,24 %	600	70,25 %	800	70,26 %	800	70,28 %	800			DPKPP
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																	DPKPP
5.1	Meningktanya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase yang terbangun sesuai standar	Luas kawasan permukiman yang tertangani drainasinya / luas kawasan permukiman keseluruhan x 100%	Persen	70,17 %	70,23 %	600	70,24 %	600	70,25 %	800	70,26 %	800	70,28 %	800			DPKPP
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		(Tidak dipakai karena pemutakhiran)															DPKPP
6.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase kawasanpermu kiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kot a yang ditangani		Persen	7,27	11,27	1000	13,27	1200	15,27	1300	17,27	1400	17,27	1000			DPKPP
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																	DPUTR



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	7.1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	-	1	414,1	24	40.155,00	18	17.150,00	8	11.200,00	9	12.405,00	DPUTR
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																DPUTR
	9.1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik/jumlah total panjang jalan kab/kota) x 100%	Persen	48,73	54,54	221.968,07	56,99	185.047,01	58,98	147.417,97	59,38	97.823,98	60,4	65.527,09	DPUTR
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																DPUTR
	10.1	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kontruksi yang mengikuti Pelatihan	Orang	-	125	650	150	505	150	510	150	520	150	615	DPUTR
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																DPUTR
	11.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang Wilayah dan Rinci yang ditetapkan dan disosialisasikan	Dokumen	1	1	1.860,00	1	2.660,00	1	2.760,00	1	2.760,00	1	2.960,00	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DPKPP
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	45,09	46,5	7.358	47	7.458	47,5	7.458	48	7.558	49	7.658	DPKPP
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																DPKPP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.1	Terpenuhi rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(jumlah unit rumah korban bencana yg ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yg akan ditangani pada tahun n) x 100%	unit rumah	7	11	300	13	400	15	500	17	600	19	700	DPKPP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	(rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yg memenuhi kriteria penerima pelayanan) x 100%	unit rumah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPKPP
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	(jumlah rumah tidak layak huni/jumlah rumah di kab/kota) x 100%	persen	5,8	5,7	1300	5,65	1400	5,6	1500	5,55	1600	5,55	1700	DPKPP	
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															DPKPP	
3.1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase data kawasan kumuh permukiman yang akurat dan mutakhir	Persentase data kawasan kumuh	Persen	100 %	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	DPKPP	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam upaya pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	Panjang Jalan lingkungan yang diperbaiki di kawasan kumuh	Meter'	-	1400	700	1400	700	1400	700	1400	700	1400	700	DPKPP
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																DPKPP
	4.1	Tertatanya Kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase Peningkatan Kawasan Kumuh Yang Tertata	(kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani/kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota) x 100%	Persen	7,27	11,27	1.100	13,27	1.200	15,27	1.300	17,27	1.400	17,27	1.500	DPKPP
			Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Panjang Jalan lingkungan yang diperbaiki di luar kawasan kumuh	meter'	22002,5	7500	5000	7500	5000	7500	5000	8000	5500	10000	6000	DPKPP
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																DPKPP
	5.1	Meningkatnya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi	jumlah perumahan yang sudah diserahkan ke Pemda terfasilitasi PSU	Persen	100 %	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	1.000	DPKPP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
1.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																DPKPP
1.1	Meningkatnya Pembangunan fasilitas umum	Persentase permohonan pembebasan lahan sesuai ketentuan	jumlah lokasi untuk pembangunan fasilitas umum	Lokasi	100 %	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	5.000		DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																SATPOL PP DAMKAR
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	50	50	72.512		100.000		110.000		121.000		133.100		SATPOL PP DAMKAR
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																SATPOL PP DAMKAR
2.1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	(jumlah pengaduan yg ditangani/jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk) x 100%	Persen	10,34	10,36	6.171.127	10,37	8.327.390	10,38	9.160.129	10,39	10.076.142	10,4	11.083.756		SATPOL PP DAMKAR
2.2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	(Jumlah Perda/Perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yg memuat sanksi) X 100 %	Laporan	12	12	30.000	12	400.000	12	440.000	12	484.000	12	532.400		SATPOL PP DAMKAR
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																BPBD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	26,91	41	Rp4.400	42	Rp4.380	43	Rp4.711	44	Rp5.176	45	Rp5.492	BPBD	
4.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															BPBD	
4.1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persentase Masyarakat, Aparatur dan Wilayah yang terbina Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana	Jiwa	100	100	Rp1.924	100	Rp1.604	100	Rp1.574	100	Rp1.642	100	Rp1.874	BPBD	
4.2	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana (Persentase Korban Bencana yang Terevakuasi dan terdistribusi logistik sesuai standar)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	100	95	Rp450	95	Rp470	95	Rp490	95	Rp510	95	Rp570	BPBD	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	4.3	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Persentase Rekomendasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Sesuai Standar dan Ditindak lanjuti)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	100	50	Rp85	50	Rp95	50	Rp105	50	Rp115	50	Rp125	BPBD
5.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																SATPOL PP DAMKAR
	5.1	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	(pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran/jumlah kejadian kebakaran di kab/kota) x 100%	persen	100	100	712.554	100	800.000	100	880.000	100	968.000	100	1.064.800	SATPOL PP DAMKAR
	5.2	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	rata-rata Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	Menit	19,93	19,92	337.554	19,91	500.000	19,90	550.000	19,89	605.000	19,88	665.500	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL																	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															DINSOS
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	46,27	100%	5.000,00	100%	5.250,00	100%	5.500,00	100%	5.750,00	100%	6.000,00	DINSOS
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															DINSOS
2.1	Meningkatnya pemberdayaan ssosial	Persentase KUBE yang Mandiri	Jumlah KUBE mandiri/jumlah total Kube X 100%	Persen	100%	100%	950,00	100%	1.000,00	100%	1.050,00	100%	1.100,00	100%	1.150,00	DINSOS
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															DINSOS
3.1	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	(jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti/populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis) x 100%	Persen	100%	100%	500,00	100%	550,00	100%	600,00	100%	650,00	100%	700,00	DINSOS
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															DINSOS
4.1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Orang Miskin yang mendapat Perlindungan	Jumlah Orang Miskin yang mendapat Limjamsos/jumlah	Persen	100%	100%	1.100,00	100%	1.150,00	100%	1.200,00	100%	1.250,00	100%	1.300,00	DINSOS



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			dan jaminan Sosial	Total Orang Miskin X 100%													
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																DINSOS
5.1	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	(jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran/populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota) x 100%	Persen	100%	100%	1.000,00	100%	1.050,00	100%	1.100,00	100%	1.150,00	100%	1.200,00		DINSOS
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																DINSOS
6.1	Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman makam pahlawan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di Pelihara/Jumlah Taman Pahlawan X 100%	Persen	100%	100%	100,00	100%	125,00	100%	150,00	100%	175,00	100%	200,00		DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DK2UKM
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	40,26	42	6.106	43	6.924	44	7.282	45	7.928	46	8.631		DK2UKM
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																DK2UKM



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.1	Meningkatnya Pemanfaatan Perencanaan Ketengakerjaan	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	(jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan yg mengacu ke RTKD/jumlah keg. keseluruhan yg dilaksanakan di kab/kota) x 100%	Persen	100	100	0	100	25	100	30	100	155	100	40	DK2UKM	
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															DK2UKM	
	3.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Prosentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Orang	75	77	2.151	78	2.355	79	2.561	80	2.767	81	2.973	DK2UKM
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															DK2UKM	
	4.1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri	(jumlah pencaker yg ditempatkan/jumlah pencaker yg terdaftar) x 100%	Persen	97,77	98,1	448	98,2	487	98,3	840	98,4	565	98,5	604	DK2UKM
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															DK2UKM	
	5.1	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen sarana hubungan industrial	(jumlah Angka Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)/jumlah perselisihan hubungan industrial di kab/kota) x 100%	Persen	68,65	70	1.390	71	1.498	73	1.669	75	1.794	80	2.027	DK2UKM
PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DP3AKB
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	47,33	48	4884,174	53,75	4902,017	60	4909,81	62,5	4934,493	65	4994,551		DP3AKB
2.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						320		329,6		341,136		354,781		370,802		DP3AKB
2.1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	(Jumlah ARG pada belanja langsung APBD/jumlah seluruh belanja langsung APBD) x 100%	Persen	60,31	61,3		61,7		62,02		62,06		62,09			DP3AKB
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	(jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG/jumlah perangkat daerah di kab/kota) x 100%	Persen	20	20		22,5		20,5		30		32			DP3AKB
		Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan	(Jumlah Anggota Perempuan Pada Organisasi Kemasyarakatan)/(Jumlah Penduduk Perempuan)x 100%	persen													
2.2	Meningkatnya pemanfaatan Data Gender	Persentase Pemanfaatan Data Terpilah Gender	Tingkat Pemanfaat Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan	persen	n/a	10		10		15		15		20			DP3AKB
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																DP3AKB



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	(jumlah perempuan yg mengalami kekerasan/jumlah penduduk perempuan) x 100%	Persen	0,00118	0,00116	250	0,00116	257,5	0,00115	266,512	0,00114	277,173	0,00113	290,477	DP3AKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																	DP3AKB
4.1	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan, perempuan dan anak		Jumlah perempuan kepala keluarga miskin menjadi mandiri	(Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Mandiri/jumlah perempuan kepala keluarga miskin di kab/kota) x 100%	Persen												DP3AKB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																	DP3AKB
5.1	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Capaian Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Nilai	524	527	294,075	530	302,897	538	313,498	540	326,038	555	342,34	DP3AKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																	DP3AKB
6.1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	(jumlah anak (penduduk usia <18 th) korban kekerasan instansi tk. kab/kota yg didampingi/jumlah anak (penduduk usia < 18 th)) x 100%	Persen	0,0105	0,0103	400	0,0102	412	0,0101	426,42	0,01	443,476	0,01	467,868	DP3AKB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																DP3AKB



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.1	Terkendalinya jumlah penduduk aspek kelahiran		TFR (Total Fertility Rate)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (biasanya usia 15-49 tahun)	Point	2,09	2,1	755,83	2,1	778,504	2,1	805,752	2,1	837,982	2,1	876,664	DP3AKB
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																DP3AKB
2.1	Meningkatnya Kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah Pasangan usia subur yang memakai kotrasepsi moderen)/(Jumlah Pasangan usia subur seluruhnya)x 100%	Persen	70,88	70,89	10659,945	70, 91	10082,57	70, 92	9912,767	70, 93	10414,403	70,94	11213,823	DP3AKB
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																DP3AKB
3.1	Menurunnya perkawinan usia dini		Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	(Jumlah Keluarga Pra Sejahtera)/(Jumlah Keluarga seluruhnya)x 100%	Tahun (Usia)	20	20,5	8155,21	20,6	8562,97	20,7	8905,489	20,8	9327,644	20,9	9851,369	DP3AKB
PANGAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DKP3
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah		Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	34,43	35	1550	36	1705	37	1875,5	38	2063,05	39	2269,36	DKP3
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																DKP3
2.1	Meningkatnya diversifikasi dan		Capaian Kelompok yang	(jumlah laporan ketersediaan, harga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DKP3



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		ketahanan pangan masyarakat	menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	dan pasokan pangan / 12 bulan) x 100 %													
		Peningkatan skor PPH		(skor PPH tahun berjalan - skor PPH tahun sebelumnya per 100) x 100 %	Poin	94,33	94,83	300	95,33	300	95,83	300	96,33	300	96,83	300	DKP3
		Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis		(jumlah ketersediaan pangan/kebutuhan pangan) x 100%	Persen	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	DKP3
3.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																DKP3
	3.1	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	Desa yang tercukupi kebutuhannya	Desa	4	4	100	4	100	4	100	4	100	4	100	DKP3
4.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																DKP3
	4.1	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah/target pengawasan x 100 %	Persen	8	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	DKP3
LINGKUNGAN HIDUP																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DLH
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai		61	8.266	62	8.470	63	8.670	64	8.875	65	9.086	DLH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															DLH
	2.1 Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	(Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang terpenuhi)/(Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Seharunnya tersedia)x 100%	Persen	100 %	100 %	605	100 %	500	100 %	525	100 %	801,25	100 %	578,8	DLH
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															DLH
	3.1 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Pencemaran udara	Poin			564,3		1.024		1.075		1.129		1.128	DLH
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															DLH
	4.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Persentase RTH	Persen	100 %	100 %	2.503	100 %	2503	100 %	2503	100 %	2503	100 %	2503	DLH
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															DLH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
5.1	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	(jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yg melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yg diterbitkan Pemerintah kab/kota) / (usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan)	Persen	100 %	100 %	56	100 %	58	100 %	61,7	100 %	64,8	100 %	68	DLH
6.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																DLH
6.1	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	(jumlah masyarakat yg mendapat pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup) / (jumlah penduduk di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	10	100 %	15	100 %	15,75	100 %	16,53	100 %	17,36	DLH
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																DLH
7.1	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup	(jumlah aduan Lingkungan Hidup yg sudah ditangani/jumlah aduan Lingkungan Hidup di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	25	100 %	26,3	100 %	27,6	100 %	28,9	100 %	30,3	DLH
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																DLH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
8.1	Meningkatnya tatakelola persampahan	Persentase penanganan sampah yang tertangani	(jumlah masalah sampah yg sudah ditangani/jumlah masalah sampah di kab/kota) x 100%	Persen	100 %	100 %	8.091	100 %	8.091	100 %	8.091	100 %	8.091	100 %	8.091	DLH	
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															DLH	
9.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase sarana dan prasarana TPS/TPA yang dimanfaatkan	(jumlah sarana persampahan/jumlah kebutuhan sarana persampahan) x 100%	Persen	100 %	100 %	2.950	100 %	4.460	100 %	4.683	100 %	3.314	100 %	4.987	DLH	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															DISDUKC APIL	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	72	74	9.320	75	8.419,2	76	8.858,4	77	9.267,9	78	9.706,8	DISDUKC APIL	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															DISDUKC APIL	
2.1	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	(jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP/jumlah penduduk 17 th keatas) x 100%	Persen	99	99,72	200	99,74	200	99,76	200	99,78	200	99,8	200	DISDUKC APIL	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	(jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA/jumlah anak usia 0-17 tahun) x 100%	Persen	67	69	100	70	100	71	100	72	100	73	100	DISDUKC APIL	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga	(Jumlah KK yang dimutakhirkan /jumlah Kartu Keluarga) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKC APIL	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	Hasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	88,53	90,5	500	91	500	91,5	500	92	500	92,5	500	DISDUKC APIL
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															DISDUKC APIL	
	3.1	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	(jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir/jumlah anak usia 0-18th) x 100%	Persen	99	99,6	200	99,65	200	99,7	200	99,75	200	99,8	200	DISDUKC APIL
			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	(jumlah Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian/jumlah perkawinan dan perceraian di kab/kota) x 100%	Persen	100	100	320	100	320	100	320	100	320	100	320	DISDUKC APIL
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil	Hasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil	Nilai	88,53	90	520	90,5	520	91	520	91,5	520	92	520	DISDUKC APIL
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															DISDUKC APIL	
	4.1	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Tempat Perekam Data Kependudukan (TPDK) yang	(Jumlah TPDK yang berfungsi dengan baik/Jumlah seluruh TPDK yang ada) x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDUKC APIL



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			berfungsi dengan baik														
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	(Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama/jumlah OPD) x 100%	Persen	14,28	21,43	50	25	70	28,57	90	32,14	110	35,71	130	DISDUKC APIL
	4.2	Meningkatnya kualitas sistem informasi administrasi kependudukan	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	(Jumlah layanan yang menggunakan SIAK / Jumlah seluruh layanan) x 100%	Persen	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	DISDUKC APIL
	4.3	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Penerapan Inovasi Pelayanan serta Kualitas Penanganan Pengaduan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data kependudukan	(Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan / Jumlah PD keseluruhan) x 100%	Persen	14,28	17,86	50	21,43	70	25	90	28,57	110	32,15	130	DISDUKC APIL
Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan yang diterapkan			(Jumlah inovasi yang diterapkan / jumlah inovasi yang dimiliki) x 100%	Persen	100	100	25	100	35	100	45	100	55	100	65	DISDUKC APIL	
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti			(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh pengaduan yang masuk) x 100%	Persen	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	DISDUKC APIL	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																DISDUKC APIL



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
5.1	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	(Jumlah data kependudukan yang tersedia / jumlah data kependudukan seharusnya ada) x 100%	Persen	100	100	120	100	140	100	160	100	180	100	200	DISDUKCAPIL	
5.2	Data kependudukan akurat	Persentase data kependudukan yang akurat	(Jumlah data kependudukan yang tersedia / jumlah data kependudukan seharusnya tersedia) x 100%	Persen	100	100	120	100	140	100	160	100	180	100	200	DISDUKCAPIL	
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.449		7.089		7.808		8.587		9.432	DPMD	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	34,65	36		37		38		39		40		DPMD	
2.	PROGRAM PENATAAN DESA						6.290		6.420		6.550		6.680		6.810	DPMD	
2.1	Meningkatnya pemanfaatan Sarana Prasarana Desa	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang dimanfaatkan	(Jumlah Desa yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarananya)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	5,76	7,88		15,76		23,64		31,52		39,39		DPMD	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						5.000		5.500		6.000		6.500		7.000	DPMD	
3.1	Meningkatnya Kerjasama yang menyelesaikan Permasalahan Pembangunan desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Kerjasama	(Jumlah Desa yang Menindaklanjuti Kerjasama)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	1,52	1,52		1,52		1,52		1,52		1,52		DPMD	
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						5.975		7650		6850		8550		8130	DPMD	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
4.1	Meningkatnya kapasitas keuangan dan kekayaan desa	Persentase Desa dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa meningkat	(Jumlah Desa dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa yang meningkat)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	0,49	0,6		0,7		0,8		0,9		1,0		DPMD	
4.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik	(Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	97,46	98		98		98		98		98		DPMD	
4.3	Meningkatnya Tata kelola Administrasi dan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan serta Keterbukaan Informasi Publik Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	(Jumlah Desa yang Tertib Administrasinya)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	97,88	98		98		98		98		98		DPMD	
4.4	Meningkatnya Kemandirian BUMDesa	Persentase Desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju	(Jumlah Desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju)/(Jumlah Desa di Kabupaten Majalengka) x 100%	Persen	2,72	4,55		6,06		7,58		9,09		10,22		DPMD	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.325		3435		3515		3600		3675	DPMD	
5.1	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berperan aktif dalam pembangunan desa/ jumlah lembaga	Persen	16,13	20,20		20,20		20,20		20,20		19,20		DPMD	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Pembangunan Desa	kemasyarakatan desa seluruhnya x 100%													
PERHUBUNGAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DISHUB
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	39,19	18.016		18.016		18.016		18.016		18.016		DISHUB
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																DISHUB
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka	V/C ratio ruas jalan di Kabupaten Majalengka = $\frac{\text{Volume lalulintas (V)}}{\text{Kapasitas jalan (C)}} \times 100 \%$	Persen	0,34	0,33	26.400	0,32	26.400	0,31	26.400	0,3	26.400	0,29	26.400	DISHUB
	2.1	Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan di Kabupaten Majalengka	Jumlah Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan / jumlah angkutan umum yang beroperasi x 100 %	Persen	85	85	18.016	85	18.016	85	18.016	85	18.016	85	18.016	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DISKOMINFO



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	42,36	44,5	6.125.132	46,5	6.125.132	47,5	6.125.132	48,5	6.125.132	49,5	6.125.132	DISKOMI NFO	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															DISKOMI NFO	
2.1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	(jumlah masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda/jumlah penduduk sasaran) x 100%	Persen	78,92	80,25	783,525	81	883,525	81,15	983,525	81,5	883,525	82	883,525	DISKOMI NFO	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA															DISKOMI NFO	
3.1	Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan efisien	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi/jumlah layanan publik) x 100%	Persen	NA	20	450	40	100	60	150	80	150	100	150	DISKOMI NFO	
		Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	Jumlah penambahan lokasi yang terfasilitasi Sarana Infrastruktur informatika	Lokasi	NA	31	0	57	0	70	0	236	0	413	0	DISKOMI NFO	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses yang	Persen	NA	8	2.600	14	2.600	17	2.600	57	2.600	100	2.600	DISKOMI NFO	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	disediakan oleh Dinas Kominfo													
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																DISKOMINFO
1.1	Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik	Jumlah data dan informasi yang terakses secara aman pada jaringan aplikasi pemerintah Daerah/ jumlah layanan informasi elektronik	Persen	501	510	100	515	360	520	390	525	410	530	450		DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																DK2UKM
1.1	Meningkatnya koperasi yang diawasi dan diperiksa	Prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	(jumlah koperasi aktif yg diawasi dan diperiksa/ jumlah koperasi aktif di kab/kota) x 100%	Persen	2	3	15	4	20	5	25	6	30	7	35		DK2UKM
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																DK2UKM
2.1	Meningkatnya koperasi aktif	Presentase Koperasi aktif	(jumlah koperasi sehat/ jumlah koperasi di kab/kota) x 100%	Persen	46	48	32.5	49	42	50	52.5	51	64	52	76.5		DK2UKM
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																DK2UKM



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya produktivitas koperasi	Presentase peningkatan volume usaha koperasi	(Volume usaha koperasi tahun n - Volume usaha koperasi tahun n-1 / Volume usaha koperasi tahun n-1) x 100%	Persen	-	1	75	1	87.5	1	100	1	112.5	1	125	DK2UKM	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															DK2UKM	
4.1	Meningkatnya ekspansi usaha	Presentase koperasi yang berekspansi usaha	(jumlah koperasi yg meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/jumlah seluruh koperasi) x 100%	Persen	5	10	314	15	388	18	400	20	412.5	20	425	DK2UKM	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															DK2UKM	
5.1	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Persentase peningkatan UKM baru	(Jumlah UKM tahun n - Jumlah UKM Tahun n-1 / Jumlah UKM tahun n-1) x 100%	Persen	-	0,01	150	0,01	200	0,01	250	0,01	300	0,01	350	DK2UKM	
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															DK2UKM	
6.1	Meningkatnya daya saing produk UMKM	Persentase peningkatan produk UKM yang masuk pasar modern	(jumlah usaha mikro yg menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	Persen	-	10	1.415	15	1.375	18	1.625	20	1.950	30	2.200	DK2UKM	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6.2	meningkatnya akses pemasaran		presentase peningkatan produk UKM yang memiliki akses	Jumlah produk UKM yang memiliki akses pada tahun n - Jumlah produk yang memiliki akses pada tahun n-1 / Jumlah produk yang memiliki akses pada tahun n-1) x 100%	Persen	-	0,01	150	0,01	200	0,01	250	0,01	300	0,01	350	DK2UKM
TRANSMIGRASI																	
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																DK2UKM
1.1	Fasilitasi kawasan transmigrasi		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	kawasan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DK2UKM
PENANAMAN MODAL																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DPMTSP
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah		Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	6.538	BB	7.192	BB	6.957	BB	7.653	BB	8.423	DPMTSP
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																DPMTSP
2.1	Meningkatnya Akses terhadap Peluang dan Potensi Penanaman Modal		Peningkatan investasi di kabupaten/kota	(jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 di kab/kota/jumlah investasi tahun n-1 di kab/kota) x 100%	Persen	14,9	10	101.000	10	150.000	10	165.000	10	181.500	10	199.650	DPMTSP
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																DPMTSP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya Kualitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Sarana/ Prasarana	1	1	50.000	1	55.000	1	60.500,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	DPMTSP	
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															DPMTSP	
4.1	Meningkatnya Kualitas Pelayan Perizinan dan Penanaman Modal	Tingkat Perizinan Yang diterbitkan	(jumlah perijinan yang diterbitkan /jumlah usulan keseluruhan perijinan yg terdaftar)/x100%	jumlah	100	100	453.460.800,00	100	498.806.880,00	100	548.687.568,00	100	603.556.325,00	100	663.911.957,00	DPMTSP DPMTSP	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															DPMTSP	
5.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penanaman Modal	Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban	(Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang Mengumpulkan LKPM/Jumlah PMA /PMDN yang Mempunyai Kewajiban mengumpulkan LKPM)x100	Persen	100	20	225.000.000,00	20	247.500.000,00	20	272.250.000,00	20	299.475.000,00	20	329.422.500,00	DPMTSP	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															DPMTSP	
6.1	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten	(Jumlah data perijinan dan investasi yang terdokumen/jumlah keseluruhan data perijinan dan investasi)x100%	Persen	0	0	0	1	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0	DPMTSP	
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.539		6.093		6.702		7.372		8.110	DISPORA
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	37,51	38,50		39		39,5		40		40,5		DISPORA
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						758		1863		1863		1863		1863	DISPORA
2.1	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	(jumlah pemuda (16-30 th) yg berwirausaha di prov/jumlah pemuda umur 16-30 di kab/kota) x 100%	Persen	29,4	30		30		30		30		30		DISPORA
2.1	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(jumlah pemuda (16-30 th) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota/jumlah pemuda umur 16-30 th di kab/kota) x 100%	Persen	56	56		57		57		57		57		DISPORA
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						24.026		21.611		275.381		173.291		102.736	DISPORA
3.1	1. Meningkatkan Prestasi Olahraga 2. Meningkatkan Partisipasi	Peningkatan prestasi olahraga	jumlah atlet berprestasi/Jumlah atlet yang diikutsertakan dalam even olahraga	Persen	45,1	46		46,5		47		47,5		48		DISPORA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		Masyarakat Berolahraga	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Jumlah even olahraga yang melibatkan masyarakat/jumlah even olahraga yang direncanakan	Persen	48	50		52		54		57		60		DISPORA
			Peningkatan Infrastruktur keolahragaan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun/Jumlah Infrastruktur yang ada	Persen	37	30		36		36		36		36		DISPORA
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						650		650		750		800		800		
	4.1	Meningkatnya Partisipasi Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Jumlah aktifitas kepramukaan tingkat kabupaten	Persen	N/A	10		10		15		15		15		DISPORA
STATISTIK																	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																DISKOMI NFO
	1.1	Meningkatnya Kualitas layanan Statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/jumlah OPD) x 100%	Persen	2,75	3,1	204	3,2	224	3,3	246	3,4	271	3,5	298	DISKOMI NFO
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/jumlah OPD) x 100%	Persen	2,75	3,1	204	3,2	224	3,3	246	3,4	271	3,5	298	DISKOMI NFO



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
KEBUDAYAAN																	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																DISPARB UD
1.1	Meningkatnya Kebudayaan Daerah	Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	(Jumlah Objek Kebudayaan Daerah Tahun N/Jumlah Objek Kebudayaan Daerah yang di rencanakan)/x100%	Persen	9	10	1045	11	1350	12	1265	13	1391	14	1530		DISPARB UD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																DISPARB UD
2.1	Meningkatnya Seni Tradisional yang di revitalisasi	Presentase Seni Tradisional yang direvitalisasi	(Jumlah Seni Tradisional yang sudah di revitalisasi N/Jumlah Seni Tradisional yang belum di revitalisasi)/x100%	Persen	1	2	179	2	187	2	217	2	239	2	263		DISPARB UD
3.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																DISPARB UD
3.1	Meningkatnya Sejarah Lokal yang di lestarikan	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang dilestarikan	(jumlah dokumen sejarah lokal Tahun N/jumlah dokumen sejarah lokal yang direncanakan) x 100%	Persen	1	2	220	2	242	2	266	2	266				DISPARB UD
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																DISPARB UD
4.1	Meningkatnya Situs cagar Budaya yang terlindungi	Persentase cagar budaya yang terlindungi	(jumlah cagar budaya yang terlindungi/jumlah cagar budaya yg terdata) x 100%	Persen		3	300	3	330	3	363	3	399	3	439		DISPARB UD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																DISPARB UD
5.1	Meningkatnya Museum yang di revitalisasi	Presentase Museum yang direvitalisasi	(Jumlah Museum yang sudah di revitalisasi N/Jumlah Museum	Persen	1	1	275	1	302	1	332	1	366				DISPARB UD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
				yang belum di revitalisasi)/x100%													
PERPUSTAKAAN																	
1.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						889		934		980		1.029		1.081	ARPUSDA	
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	47	51		53		55		57		59	ARPUSDA	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	83,30	84,00		84,30		84,50		85,00		85,30	ARPUSDA	
KEARSIPAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.388		4.607		4.837		5.079		5.333	ARPUSDA	
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	35,2	36		36,5		37		37,5		38	ARPUSDA	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						88		93		97		102		107		
	2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	$T = (a + i + s + j)/4$ 50% T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah	Persen	52	54		55		56		57		58	ARPUSDA	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN													
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						79		83		87		92		96	
	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan tata kelola kearsipan	Rasio pengelola arsip	jumlah OPD yang mempunyai pengelola arsip/jumlah OPDx100%	Persen	100			100		100		100		100		ARPUSDA
3.1	Meningkatnya Implementasi Pengelolaan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	$T = \frac{m + b + g + a + c + i}{6}$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah	Persen	52	54		55		56		57		58		ARPUSDA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
				provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran 50% Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK													
URUSAN PILIHAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															DKP3	
1.1	Meningkatnya Produksi perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan	Persen	2	2	268,88	2	725	2	750	2	775	2	800	DKP3	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Budidaya kabupaten	Budidaya) kabupaten/kota													
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																DKP3
	2.1	Meningkatnya nilai tambah dan akses pemasaran hasil perikanan	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Peningkatan Omzet Pemasaran Produk Hasil Perikanan (Surimi, Pemindangan, Ikan Segar)	Persen	1	1	86	1	150	1	150	1	150	1	150	DKP3
			Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Pelaku	5	5	200	5	200	5	200	5	200	5	200	200
PARIWISATA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DISPARB UD
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	35,93	36	2090	37	2299	38	2528	39	2781	40	3059	DISPARB UD
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																DISPARB UD
	2.1	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	(jumlah objek daya tarik Wisata layak Kunjung/jumlah daya tarik wisata yang belum layak kunjung) x100%	persen	4	5	1050	6	1155	7	1270	8	1397	9	1537	DISPARB UD
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																DISPARB UD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya pemasaran wisata	Persentase Peningkatan daya tarik Wisata yang di promosikan	(jumlah daya tarik yang dipromosikan/jumlah seluruh daya tarik) x100%	persen	5	5	1000	6	1100	7	1210	8	1331	9	1464	DISPARBUD	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															DISPARBUD	
4.1	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif pada tahun n)/jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun n-1 x100%	persen	1	2	250	3	265	4	281	5	299	6	319	DISPARBUD	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															DISPARBUD	
5.1	Meningkatnya kompetensi pelaku ekraf	persentase sertifikasi pelaku ekonomi kreatif	(jumlah pelaku ekonomi kreatif yang disertifikasi/jumlah total pelaku yang terdata)x 100 persen	Persen	2	2	100	3	110	4	121	5	133	6	146	DISPARBUD	
PERTANIAN																	
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															DKP3	
1.1	Meningkatnya pemanfaatan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%	Persen	80	80	1844	80	2028,4	80	2231,24	80	2454,364	80	2699,8004	DKP3	
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															DKP3	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	2.1	Meningkatnya pemanfaatan prasarana hortikultura dan perkebunan, tanaman pangan	Persentase ketersediaan prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	Persen	70	70	1461	70	1607,1	70	1767,81	70	1944,591	70	2139,0501	DKP3
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																DKP3
	3.1	Meningkatnya kesehatan hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	(jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)/jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) x 100%	persen	1	2	400	2	400	2	400	2	400	2	400	DKP3
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																DKP3
	4.1	Berkurangnya risiko serangan tanaman pangan	Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian, sarana penanggulangan hama dan penyakit tanaman	Hektar	6100	6100	50	6100	55	6100	60,5	6100	66,55	6100	73,205	DKP3
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																DKP3
	5.1	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha tanaman pangan	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi oleh penyuluh/ jumlah kelompok se	Persen	100	100	1051	100	1156,1	100	1271,71	100	1398,881	100	1538,7691	DKP3



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
				Kabupaten Majalengka dikali 100 %													
PERDAGANGAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																DISPERD AGIN
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	37.95	37.96	8870	37.97	8265	37.98	8677	37.99	9104	38	9541	DISPERD AGIN
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																DISPERD AGIN
	2.1	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Infrastruktur perdagangan yang dibangun	Jumlah Pasar yang direvitalisasi Tahun ini.	unit	0	3	36181	2	58036	2	5385	0	0	0	0	DISPERD AGIN
			Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Refresentatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang diRevitalisasi Tahun ini	Unit	0	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	DISPERD AGIN
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																DISPERD AGIN
	3.1	Terkendalnya harga dan ketersediaan barang	Tingkat kinerja realisasi pupuk	(realisasi/RDKK) x 100%	Persen	57.90	58	75	59	82,5	60	90,75	61	99,825	62	109,8075	DISPERD AGIN
			Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat	Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Pokok Penting Bagi Masyarakat yang di	Kali	2	2	275	2	302,5	2	332,75	2	366,025	2	402,6275	DISPERD AGIN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
				Laksanakan Tahun ini.													
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																DISPERD AGIN
	4.1	Meningkatnya Ekspor	Terpenuhinya nilai ekspor	(Nilai Ekspor Tahun Ini / Nilai Ekspor Tahun Lalu) x 100%	Persen		4.5	650	4.6	715	4.7	786,5	4.8	865,15	4.9	951,665	DISPERD AGIN
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																DISPERD AGIN
	5.1	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	(jumlah UTTP bertanda Tera Sah yg berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yg wajib ditera dan tera ulang di wil. kab/kota) x 100%	Persen	48.63	50	200	55	200	60	100	65	100	70	100	DISPERD AGIN
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																DISPERD AGIN
	6.1	Meningkatnya produk dalam negeri yang dipromosikan	Peningkatan Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	Jumlah pelaku usaha yang dipromosikan	Pelaku Usaha		5	120	5	132	5	145,2	5	159,72	5	175,692	DISPERD AGIN
PERINDUSTRIAN																	
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																DISPERD AGIN
	1.1	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sektor Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)/(jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) x 100%	IKM	133	51	331,364	53	268,5008	55	303,228	58	349,278	60	400,933	DISPERD AGIN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																DISPERD AGIN
	2.1	Meningkatnya publikasi data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan; tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan; informasi produksi dan kapasitas produksi; informasi bahan baku dan bahan penolong; informasi bahan bakar /energy;infor masi tenaga kerja	Dokume n	1	1	102,7	1	206,4	1	216,5	1	219,8	1	222,4	DISPERD AGIN
URUSAN PENUNJANG																	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							1.505		1.580		1.659		1.742		1.829	BAPPEDA LITBANG
	1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	44,43	44,5		44,55		44,6		44,65		44,7		BAPPEDA LITBANG
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1.939		2.036		2.137		2.244		2.357	BAPPEDA LITBANG
	2.1	Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka	Nilai Pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Kab. Majalengka dalam penilaian SAKIP dimensi perencanaan	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka	Nilai Pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Kab. Majalengka dalam penilaian SAKIP dimensi perencanaan	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.276		1.340		1.407		1.477		1.551	BAPPEDA LITBANG
	3.1	1. Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM dalam penilaian SAKIP dimensi perencanaan	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG
			Nilai Pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM dalam penilaian SAKIP dimensi pengukuran kinerja	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG
		2. Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA dalam penilaian SAKIP dimensi perencanaan	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG
			Nilai Pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA dalam penilaian SAKIP	Nilai	6	6		6		6		6		6		BAPPEDA LITBANG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Lingkup Bidang PSDA	dimensi pengukuran kinerja													
		3. Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang PSDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berdampak Pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penilaian SAKIP dimensi perencanaan	Nilai	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	BAPPEDA LITBANG	
			Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penilaian SAKIP dimensi pengukuran kinerja	Nilai	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	BAPPEDA LITBANG	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						614,09		644,80		677,04		710,89		746,44	BAPPEDA LITBANG	
	1.1	Inovasi Daerah Bermutu	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar pada Indeks Inovasi Daerah (IID)	(Jumlah Inovasi yang dikirim ke Indeks Inovasi Daerah)/(Jumlah Inovasi Terapan Perangkat Daerah yang dilaporkan)x 100%	Persen	59,43	59,93	60,43		60,93		61,43		61,93		BAPPEDA LITBANG	
	1.2	Perencanaan Pembangunan Berbasis Kajian Hasil Penelitian	Persentase Kajian yang Dimanfaatkan Dalam	(Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan dalam Dokumen Perencanaan/(Juml	Persen	100	100	100		100		100		100		BAPPEDA LITBANG	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		Dokumen Perencanaan	ah Kajian Seluruhnya)x 100%													
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.000		18.900		19.845		20.837		21.879	BKPSDM
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	30,4	32		33		34		35		36		BKPSDM
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						4.000		4.200		4.410		4.631		4.862	BKPSDM
		Rasio pegawai Fungsional	(Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional)/(Jumla h Seluruh ASN)x 100%	Persen	100	100		100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	(Jumlah Pelanggaran disiplin PNS yang tertangani)/(Jumlah Pelanggaran disiplin seluruhnya)x 100%	Persen	100	100		100		100		100		100		BKPSDM
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasa r (%)	(Jumlah Pegawai dengan Pendidikan Perguruan Tinggi Keatas)/(Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah)x 100%	Rasio	100	100		100		100		100		100		BKPSDM
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						2.050		2.153		2.260		2.373		2.492	BKPSDM



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya kualitas pengembangan karir	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	(Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural)/(Jumlah jabatan Struktural)x 100%	Persen	100	100		100		100		100		100		BKPSDM	
		Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	(Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi)/(Jumlah seluruh Pegawai Fungsional)x 100%	Persen	100	100		100		100		100		100		BKPSDM	
KEUANGAN DAN ASET DAERAH																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.322,53		29.172,21		30.047,38		30.948,80		31.877,26	BKAD	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	66,13	67		68		69		70		71		BKAD	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						508.659,70		523.919,47		539.637,05		555.826,16		572.500,95	BKAD	
2.1	Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Kepatuhan Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		BKAD	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						2.631,58		2.710,53		2.791,85		2.875,60		2.961,87	BKAD	
3.1	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal	Jumlah Aset yang diamankan secara fisik /total aset x 100%	Persen	90	90		90		95		95		100		BKAD	
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															BAPENDA	
4.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan	Nilai RB General	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai		45,5	12.601	46	13.882	46,5	15.233	47	16.716	47.5	18.320	BAPENDA	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	Pemerintahan di Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															BAPENDA
5.1	Meningkatnya Capaian Realisasi PAD	Capaian realisasi Penerimaan PAD	jumlah realisasi PAD / Target PAD x 100%	persen		90	9.355	90	10.318	90	11.350	90	12.485	90	13.734	BAPENDA
FUNGSI LAINNYA																
SETDA																
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						67.137		70.949		74.360		77.942		81.839	SETDA
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	41,07	42,05		43,05		44,05		45,05		46,05		SETDA
1.2	Meningkatnya kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan	Nilai Pelaporan Kinerja	Capaian nilai dimensi pelaporan kinerja pada nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	10,63	10,5		11		11,5		12		12,5		SETDA
1.3	Organisasi Agile	Tingkat Implementasi PB	Persentase capaian penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah merupakan perbandingan antara jumlah struktur jabatan administrasi yang disederhanakan dengan target struktur jabatan administratif yang seharusnya disederhanakan sesuai dengan model	Persen	102,3	100		100		100		100		100		SETDA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			penyederhanaan struktur organisasi													
1.4	Meningkatnya PD yang Menerapkan Standar Kerja dan Sistem Kerja Sederhana	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO	Poin	5	6	7	8	9	10						SETDA
1.5	Diterapkannya Budaya Kerja	Persentase PD dengan nilai RB BB	(Jumlah perangkat daerah dengan nilai RB BB)/ (jumlah perangkat daerah seluruhnya) x 100%	Persen	21,42	20	40	60	80							SETDA
		Persentase PD dengan nilai RB A	(Jumlah perangkat daerah dengan nilai RB A)/ (jumlah perangkat daerah seluruhnya) x 100%	Persen	0					30						SETDA
1.6	Meningkatnya PD yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	IKM Kabupaten	Capaian IKM Kabupaten	Predikat	B	B	B	A	A	A						SETDA
1.7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Nilai IKM Bagian Umum dan Perencanaan Keuangan	Capaian IKM Bagian Umum dan Perencanaan Keuangan	Predikat	B	B	B	B	A	A						SETDA
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						9.240	9.702	10.187	10.696			11.231			SETDA
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Capaian Predikat LPPD tahun berjalan	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi			Tinggi			SETDA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	2.2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	NKK Bidang Kesra	Capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesra	Nilai	40	42		43		44		45		46		SETDA
	2.3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Capaian Predikat Indeks Reformasi Hukum tahun berjalan	Predikat	AA	AA		AA		AA		AA		AA		SETDA
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						3.036		3.187		3.347		3.514		3.690		SETDA
	3.1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	1. NKK Bidang Ekonomi	Capaian Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Ekonomi	Nilai	40	42		43		44		45		46		SETDA
			2. Tingkat Inflasi Daerah	Capaian Tingkat Inflasi Daerah tahun berjalan	Persen	1,6	2		2		2		2		2		2
	3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indikator yang digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) untuk menilai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aspek yang dinilai meliputi sumberdaya manusia, kelembagaan dan pemanfaatan sistem pengadaan	Persen	71,7	72		72,5		73		73,5		74		SETDA
INSPEKTORAT																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.685	13.472		14.819		16.301		17.931		19.724		INSPEKTORAT



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	INSPEKTORAT		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.545	2.449	2.694	2.964	3.260	3.586	INSPEKTORAT					
2.1	Meningkatnya Rekomendasi LHP BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Capaian Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	80,23	81	82	83	84	85	INSPEKTORAT						
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					814	1.453	1.526	1.602	1.682	1.851	INSPEKTORAT					
3.1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	(tingkat maturitas SPIP(belum dinilai(0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil quality assurance (QA) yg dikeluarkan oleh BPKP	Level/Nilai	3/3,070	3/3,080	3/3,090	3/3,100	3/3,110	3/3,120	INSPEKTORAT						
3.2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan Hasil Quality assurance (QA) yg dikeluarkan BPKP	Level/Nilai	3/3,300	3/3,350	3/3,400	3/3,450	3/3,500	3/3,550	INSPEKTORAT						
SEKRETARIAT DPRD																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					49.777	54.754	60.230	66.253	72.878	80.166	SETWAN					



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	31,97	32,95		33,95		34,95		35,95		36,95		SETWAN	
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					27.570	30.327		33.359		36.695		40.365		44.401	SETWAN	
2.1	Terfasilitasinya Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	jumlah fasilitasi dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD/ fungsi legislasi dewan X 100 %	persen	100	100		100		100		100		100		SETWAN	
		Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	Jumlah fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan/ Fungsi penganggaran dan pengawasan x 100 %	Persen	100	100		100		100		100		100		SETWAN	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															KESBANG POL	
1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	Hasil Penilaian RB General Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	381	BB	396	BB	406	BB	426	BB	446	KESBANG POL	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															KESBANG POL	
2.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila	Presentase Tingkat Ketahanan	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi	Persen	100	100	713	100	718	100	728	100	738	100	748	KESBANG POL	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANG GUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
		dan karakter kebangsaan	Ideologi dan Karakter Kebangsaan	dan Karakter Kebangsaan														
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	KESBANG POL
	3.1	Meningkatnya etika dan budaya politik	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	417	100	427	100	437	100	447	100	457		KESBANG POL
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	KESBANG POL
	4.1	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	169	100	269	100	369	100	469	100	569		KESBANG POL
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA																	KESBANG POL
	5.1	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya masyarakat	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	118	100	168	100	218	100	268	100	318		KESBANG POL



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																KESBANG POL
6.1	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	20,83	66,67	150	67,44	200	78,58	250	92,31	300	100	350		KESBANG POL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
KECAMATAN																	
KECAMATAN ARGAPURA																	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.161,00		3.477,00		3.825,00		4.607,00		4.629,00		
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A		A		A		A		A			KECAMATAN ARGAPURA
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	85,2	85,60		85,75		85,95		86,12		86,29			KECAMATAN ARGAPURA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran	Persen	100	100,00	2.897,00	100,00	3.187,00	100,00	3.506,00	100,00	3.856,00	100,00	4.242,00		KECAMATAN ARGAPURA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
			terhadap yang ditargetkanx100%														
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																KECAMATAN ARGAPURA
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	174,00	100,00	192,00	100,00	211,00	100,00	232,00	100,00	255,00		KECAMATAN ARGAPURA
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																KECAMATAN ARGAPURA
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	9,00		KECAMATAN ARGAPURA
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																KECAMATAN ARGAPURA
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00		KECAMATAN ARGAPURA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																KECAMATAN ARGAPURA
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	60,00	100,00	66,00	100,00	73,00	100,00	80,00	100,00	88,00		KECAMATAN ARGAPURA
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																KECAMATAN ARGAPURA
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	17,00	100,00	339,00	100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00		KECAMATAN ARGAPURA
KECAMATAN BANJARAN								2.427,00		2.829,00		2.936,00		3.590,00		3.553,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.162,00		2.378,00		2.616,00		2.878,00		3.165,00		KECAMATAN BANJARAN
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A		A		A		A		A			KECAMATAN BANJARAN
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	79,09	85,05		85,50		85,75		86,00		86,05			KECAMATAN BANJARAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.162,00	100,00	2.378,00	100,00	2.616,00	100,00	2.878,00	100,00	3.165,00		KECAMATAN BANJARAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN																KECAMATAN BANJARAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	142,00	100,00	156,00	100,00	172,00	100,00	189,00	100,00	208,00	KECAMATAN BANJARAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															KECAMATAN BANJARAN
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	KECAMATAN BANJARAN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															KECAMATAN BANJARAN
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	KECAMATAN BANJARAN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															KECAMATAN BANJARAN
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa	Jumlah pelaksanaan event	Persen	100	100,00	87,00	100,00	95,00	100,00	105,00	100,00	116,00	100,00	127,00	KECAMATAN BANJARAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
		dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan														
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																KECAMATAN BANJARAN	
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	19,00	100,00	180,00	100,00	22,00	100,00	385,00	100,00	27,00	KECAMATAN BANJARAN	
KECAMATAN BANTARUJEG								2.800,00		3.200,00		3.388,00		4.047,00		4.099,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.469,00		2.716,00		2.987,00		3.286,00		3.615,00	KECAMATAN BANTARUJEG	
	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A			A		A		A		A	KECAMATAN BANTARUJEG	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	82	82,25			82,36		82,49		82,60		82,71		KECAMATAN BANTARUJEG
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.469,00	100,00	2.716,00	100,00	2.987,00	100,00	3.286,00	100,00	3.615,00		KECAMATAN BANTARUJEG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							187,00		205,00		226,00		249,00		273,00	KECAMATAN BANTARUJEG	
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan	Persen	100	100,00	187,00	100,00	205,00	100,00	226,00	100,00	249,00	100,00	273,00	KECAMATAN BANTARUJEG	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			yang aktif dalam bidang Kesos	publik di kecamatan													
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9,00		10,00		11,00		12,00		13,00		KECAMATAN BANTARUJEG
	3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	KECAMATAN BANTARUJEG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14,00		15,00		17,00		18,00		20,00		KECAMATAN BANTARUJEG
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	14,00	100,00	15,00	100,00	17,00	100,00	18,00	100,00	20,00	KECAMATAN BANTARUJEG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						97,00		107,00		117,00		129,00		142,00		KECAMATAN BANTARUJEG
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan	Persen	100	100,00	97,00	100,00	107,00	100,00	117,00	100,00	129,00	100,00	142,00	KECAMATAN BANTARUJEG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			kebangsaan tingkat kecamatan													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						24,00		147,00		29,00		352,00		36,00	KECAMATAN BANTARUJEG
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	24,00	100,00	147,00	100,00	29,00	100,00	352,00	100,00	36,00	KECAMATAN BANTARUJEG
KECAMATAN CIGASONG								9.781,00		10.391,00		11.001,00		11.611,00		12.221,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.001,00		6.297,00		6.593,00		6.889,00		7.185,00	KECAMATAN CIGASONG
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB			BB		BB		BB		BB	KECAMATAN CIGASONG
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	81,3	82,00			82,25		82,50		82,63		82,80	KECAMATAN CIGASONG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	6.001,00	100,00	6.297,00	100,00	6.593,00	100,00	6.889,00	100,00	7.185,00	KECAMATAN CIGASONG
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						218,00		228,00		238,00		248,00		258,00	KECAMATAN CIGASONG
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	218,00	100,00	228,00	100,00	238,00	100,00	248,00	100,00	258,00	KECAMATAN CIGASONG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.368,00		3.668,00		3.968,00		4.268,00		4.568,00	KECAMATAN CIGASONG
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	3.368,00	100,00	3.668,00	100,00	3.968,00	100,00	4.268,00	100,00	4.568,00	KECAMATAN CIGASONG
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						22,00		24,00		26,00		28,00		30,00	KECAMATAN CIGASONG
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	22,00	100,00	24,00	100,00	26,00	100,00	28,00	100,00	30,00	KECAMATAN CIGASONG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						109,00		110,00		111,00		112,00		113,00	KECAMATAN CIGASONG
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	109,00	100,00	110,00	100,00	111,00	100,00	112,00	100,00	113,00	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						63,00		64,00		65,00		66,00		67,00	KECAMATAN CIGASONG
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	63,00	100,00	64,00	100,00	65,00	100,00	66,00	100,00	67,00	KECAMATAN CIGASONG
KECAMATAN CIKIJING							2.477,00		2.724,00		2.997,00		3.336,00		3.614,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.169,00		2.386,00		2.624,00		2.887,00		3.175,00	KECAMATAN CIKIJING
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB			BB		BB		BB		BB	KECAMATAN CIKIJING
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,5	87,25			87,25		88,13		88,50		88,90	KECAMATAN CIKIJING
	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.169,00	100,00	2.386,00	100,00	2.624,00	100,00	2.887,00	100,00	3.175,00	KECAMATAN CIKIJING
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						194,00		213,00		234,00		258,00		283,00	KECAMATAN CIKIJING
	2.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	194,00	100,00	213,00	100,00	234,00	100,00	258,00	100,00	283,00	KECAMATAN CIKIJING
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9,00		10,00		11,00		12,00		1,00	KECAMATAN CIKIJING



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat		Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	1,00	KECAMATAN CIKIJING
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							7,00		7,00		8,00		9,00		10,00	KECAMATAN CIKIJING
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum		Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	KECAMATAN CIKIJING
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							70,00		77,00		85,00		93,00		103,00	KECAMATAN CIKIJING
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme		Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	70,00	100,00	77,00	100,00	85,00	100,00	93,00	100,00	103,00	KECAMATAN CIKIJING
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							29,00		31,00		34,00		78,00		42,00	KECAMATAN CIKIJING



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa		Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	29,00	100,00	31,00	100,00	34,00	100,00	78,00	100,00	42,00	KECAMATAN CIKIJING
KECAMATAN CINGAMBUL								2.866,00		3.433,00		3.468,00		4.055,00		4.197,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.520,00		2.772,00		3.049,00		3.354,00		3.689,00	KECAMATAN CINGAMBUL
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A		A		A		A		A		KECAMATAN CINGAMBUL
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,5	87,25		87,25		88,13		88,50		88,90		KECAMATAN CINGAMBUL
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.520,00	100,00	2.772,00	100,00	3.049,00	100,00	3.354,00	100,00	3.689,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						207,00		228,00		251,00		276,00		304,00	KECAMATAN CINGAMBUL	
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos		Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	207,00	100,00	228,00	100,00	251,00	100,00	276,00	100,00	304,00	KECAMATAN CINGAMBUL
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						10,00		11,00		12,00		13,00		14,00	KECAMATAN CINGAMBUL	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan	Persen	100	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	100,00	14,00	KECAMATAN CINGAMBUL



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		bidang Pemberdayaan Masyarakat	aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan													
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8,00		9,00		10,00		11,00		12,00		KECAMATAN CINGAMBUL
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	KECAMATAN CINGAMBUL
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						90,00		99,00		109,00		120,00		132,00		KECAMATAN CINGAMBUL
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	90,00	100,00	99,00	100,00	109,00	100,00	120,00	100,00	132,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						31,00		314,00		38,00		281,00		46,00		KECAMATAN CINGAMBUL
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	31,00	100,00	314,00	100,00	38,00	100,00	281,00	100,00	46,00	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
KECAMATAN DAWUAN							577,00		755,00		699,00		889,00		845,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						295,00		324,00		356,00		392,00		431,00	KECAMATAN DAWUAN
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A			A		A		A		A	KECAMATAN DAWUAN
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	85	86,00		86,15		86,35		86,55		86,75		KECAMATAN DAWUAN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	295,00	100,00	324,00	100,00	356,00	100,00	392,00		431,00	KECAMATAN DAWUAN
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						187,00		206,00		226,00		249,00		274,00	KECAMATAN DAWUAN
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	187,00	100,00	206,00	100,00	226,00	100,00	249,00	100,00	274,00	KECAMATAN DAWUAN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17,00		19,00		21,00		23,00		25,00	KECAMATAN DAWUAN
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	17,00	100,00	19,00	100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00	KECAMATAN DAWUAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						13,00		14,00		15,00		17,00		19,00	KECAMATAN DAWUAN
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	13,00	100,00	14,00	100,00	15,00	100,00	17,00	100,00	19,00	KECAMATAN DAWUAN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						38,00		42,00		47,00		51,00		56,00	KECAMATAN DAWUAN
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	38,00	100,00	42,00	100,00	47,00	100,00	51,00	100,00	56,00	KECAMATAN DAWUAN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						27,00		150,00		33,00		156,00		40,00	KECAMATAN DAWUAN
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	27,00	100,00	150,00	100,00	33,00	100,00	156,00	100,00	40,00	KECAMATAN DAWUAN
KECAMATAN JATITUJUH							3.094,00		3.810,00		3.752,00		4.247,00		4.539,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.848,00		3.133,00		3.446,00		3.791,00		4.170,00	KECAMATAN JATITUJUH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
1.1		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		BB		BB		A-		A		A		KECAMATAN JATITUJUH	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		84,50		84,75		85,00		85,30		85,55		KECAMATAN JATITUJUH	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	2.848,00	100,00	3.133,00	100,00	3.446,00	100,00	3.791,00	100,00	4.170,00		KECAMATAN JATITUJUH
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					172,00		189,00		208,00		228,00		251,00		KECAMATAN JATITUJUH	
2.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	172,00	100,00	189,00	100,00	208,00	100,00	228,00	100,00	251,00		KECAMATAN JATITUJUH
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2,00		2,00		2,00		2,00		3,00		KECAMATAN JATITUJUH	
3.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	3,00		KECAMATAN JATITUJUH
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		KECAMATAN JATITUJUH	
4.1		Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan	Jumlah penanganan gangguan dan	Persen		100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00		KECAMATAN JATITUJUH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			gangguan trantibum	pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan												KECAMATAN JATITUJUH	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						57,00		68,00		75,00		82,00		91,00	KECAMATAN JATITUJUH	
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	57,00	100,00	68,00	100,00	75,00	100,00	82,00	100,00	91,00	KECAMATAN JATITUJUH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						14,00		416,00		18,00		140,00		22,00	KECAMATAN JATITUJUH	
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	14,00	100,00	416,00	100,00	18,00	100,00	140,00	100,00	22,00	KECAMATAN JATITUJUH
KECAMATAN JATIWANGI								732,00		1.126,00		886,00		1.095,00		1.072,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						388,00		427,00		470,00		516,00		568,00	KECAMATAN JATIWANGI	
	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		-A		A		A		A		A	KECAMATAN JATIWANGI	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		84,54		85,88		86,43		88,33		88,35	KECAMATAN JATIWANGI	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	388,00	100,00	427,00	100,00	470,00	100,00	516,00	100,00	568,00	KECAMATAN JATIWANGI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							210,00		231,00		254,00		280,00		308,00	KECAMATAN JATIWANGI
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	210,00	100,00	231,00	100,00	254,00	100,00	280,00	100,00	308,00	KECAMATAN JATIWANGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							21,00		23,00		25,00		27,00		30,00	KECAMATAN JATIWANGI
	3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00	100,00	27,00	100,00	30,00	KECAMATAN JATIWANGI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							25,00		28,00		30,00		33,00		37,00	KECAMATAN JATIWANGI
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan	Persen		100,00	25,00	100,00	28,00	100,00	30,00	100,00	33,00	100,00	37,00	KECAMATAN JATIWANGI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			ketertiban umum di tingkat kecamatan													
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						41,00		45,00		49,00		54,00		60,00	KECAMATAN JATIWANGI
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	41,00	100,00	45,00	100,00	49,00	100,00	54,00	100,00	60,00	KECAMATAN JATIWANGI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						48,00		373,00		58,00		184,00		70,00	KECAMATAN JATIWANGI
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	48,00	100,00	373,00	100,00	58,00	100,00	184,00	100,00	70,00	KECAMATAN JATIWANGI
KECAMATAN KADIPATEN								3.134,00		3.527,00		3.792,00		4.212,00		4.589,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.863,00		3.149,00		3.464,00		3.811,00		4.192,00	KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		BB		BB		A-		A-		A-		KECAMATAN KADIPATEN
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		86,00		86,02		86,04		86,06		86,08		KECAMATAN KADIPATEN
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran	Persen		100,00	2.863,00	100,00	3.149,00	100,00	3.464,00	100,00	3.811,00	100,00	4.192,00	KECAMATAN KADIPATEN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			terhadap yang ditargetkanx100%													
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						175,00		192,00		212,00		233,00		256,00	KECAMATAN KADIPATEN
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	175,00	100,00	192,00	100,00	212,00	100,00	233,00	100,00	256,00	KECAMATAN KADIPATEN
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3,00		3,00		4,00		4,00		4,00	KECAMATAN KADIPATEN
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	KECAMATAN KADIPATEN
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10,00		11,00		12,00		14,00		15,00	KECAMATAN KADIPATEN
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	14,00	100,00	15,00	KECAMATAN KADIPATEN
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN						64,00		70,00		77,00		85,00		94,00	KECAMATAN KADIPATEN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	64,00	100,00	70,00	100,00	77,00	100,00	85,00	100,00	94,00	KECAMATAN KADIPATEN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						19,00		101,00		23,00		65,00		28,00	KECAMATAN KADIPATEN
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	19,00	100,00	101,00	100,00	23,00	100,00	65,00	100,00	28,00	KECAMATAN KADIPATEN
KECAMATAN KASOKANDEL								471,00		678,00		570,00		867,00		690,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						291,00		320,00		352,00		387,00		425,00	KECAMATAN KASOKANDEL
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		-A		A		A		A		A		KECAMATAN KASOKANDEL
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,2	83,84		85,74		86,56		87,43		88,79		KECAMATAN KASOKANDEL
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	291,00	100,00	320,00	100,00	352,00	100,00	387,00	100,00	425,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						110,00		121,00		133,00		147,00		161,00	KECAMATAN KASOKANDEL



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	110,00	100,00	121,00	100,00	133,00	100,00	147,00	100,00	161,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7,00		8,00		8,00		9,00		10,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5,00		5,00		6,00		6,00		7,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						43,00		47,00		52,00		57,00		63,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah	Persen		100,00	43,00	100,00	47,00	100,00	52,00	100,00	57,00	100,00	63,00	KECAMATAN KASOKANDEL	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						16,00		177,00		19,00		261,00		23,00	KECAMATAN KASOKANDEL	
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	16,00	100,00	177,00	100,00	19,00	100,00	261,00	100,00	23,00	KECAMATAN KASOKANDEL
KECAMATAN KERTAJATI								2.956,00		3.612,00		3.577,00		4.055,00		4.328,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.611,00		2.872,00		3.159,00		3.475,00		3.823,00	KECAMATAN KERTAJATI
		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A	2.611,00	A	2.872,00	A	3.159,00	A	3.475,00	A	3.823,00	KECAMATAN KERTAJATI
	1.1		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	90	91,00		91,50		92,00		92,50		93,00		KECAMATAN KERTAJATI
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							191,00		210,00		231,00		254,00		280,00	KECAMATAN KERTAJATI
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	191,00	100,00	210,00	100,00	231,00	100,00	254,00	100,00	280,00	KECAMATAN KERTAJATI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			dalam bidang Kesos														
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16,00		18,00		20,00		22,00		24,00		KECAMATAN KERTAJATI
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	16,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	24,00		KECAMATAN KERTAJATI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						16,00		18,00		20,00		22,00		24,00		KECAMATAN KERTAJATI
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	16,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	24,00		KECAMATAN KERTAJATI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						82,00		91,00		100,00		110,00		121,00		KECAMATAN KERTAJATI
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	82,00	100,00	91,00	100,00	100,00	100,00	110,00	100,00	121,00		KECAMATAN KERTAJATI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						39,00		403,00		47,00		172,00		57,00	KECAMATAN KERTAJATI
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	39,00	100,00	403,00	100,00	47,00	100,00	172,00	100,00	57,00	KECAMATAN KERTAJATI
KECAMATAN LEMAHSUGIH							2.895,00		3.184,00		3.502,00		4.613,00		4.238,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.588,00		2.847,00		3.131,00		3.444,00		3.789,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		BB	2.026,00	-A	2.229,00	A	2.451,00	A	2.697,00	AA	2.966,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
1.1		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		87,00		87,25		87,50		88,00		88,25		KECAMATAN LEMAHSUGIH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	562,00	100,00	618,00	100,00	680,00	100,00	748,00	100,00	823,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						221,00		243,00		268,00		295,00		324,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	221,00	100,00	243,00	100,00	268,00	100,00	295,00	100,00	324,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
2.1																
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4,00		4,00		5,00		5,00		5,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat		Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							15,00		16,00		18,00		20,00		22,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum		Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	15,00	100,00	16,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	22,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							49,00		54,00		59,00		65,00		71,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme		Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	49,00	100,00	54,00	100,00	59,00	100,00	65,00	100,00	71,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							18,00		20,00		22,00		784,00		26,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa		Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	784,00	100,00	26,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH	
KECAMATAN LEUWIMUNDING								2.761,00		3.237,00		3.341,00		3.955,00		4.042,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.530,00		2.783,00		3.061,00		3.367,00		3.704,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING	
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB			A-		A		A		A	KECAMATAN LEUWIMUNDING	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		86,00		86,27		87,25		87,89		88,77		88,77	KECAMATAN LEUWIMUNDING
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan 100%	Persen		100,00	2.530,00	100,00	2.783,00	100,00	3.061,00	100,00	3.367,00	100,00	3.704,00	100,00	3.704,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							165,00		181,00		200,00		220,00		242,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING	
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos		Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	165,00	100,00	181,00	100,00	200,00	100,00	220,00	100,00	242,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2,00		2,00		3,00		3,00		3,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan	Persen		100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		bidang Pemberdayaan Masyarakat	aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan													
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3,00		3,00		3,00		4,00		4,00		KECAMATAN LEUWIMUNDING
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	4,00	100,00	4,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						43,00		47,00		52,00		57,00		63,00		KECAMATAN LEUWIMUNDING
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	43,00	100,00	47,00	100,00	52,00	100,00	57,00	100,00	63,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18,00		220,00		22,00		304,00		27,00		KECAMATAN LEUWIMUNDING
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	18,00	100,00	220,00	100,00	22,00	100,00	304,00	100,00	27,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
KECAMATAN LIGUNG							3.356,00		3.854,00		4.063,00		4.909,00		4.916,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.006,00		3.309,00		3.640,00		4.004,00		4.405,00	KECAMATAN LIGUNG
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		-A		A-		A		A		A		KECAMATAN LIGUNG
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		83,84		87,52		87,53		87,54		87,55		KECAMATAN LIGUNG
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	3.006,00	100,00	3.309,00	100,00	3.640,00	100,00	4.004,00	100,00	4.405,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						197,00		217,00		239,00		263,00		289,00	KECAMATAN LIGUNG
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	197,00	100,00	217,00	100,00	239,00	100,00	263,00	100,00	289,00	KECAMATAN LIGUNG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11,00		12,00		13,00		15,00		16,00	KECAMATAN LIGUNG
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	100,00	15,00	100,00	16,00	KECAMATAN LIGUNG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17,00		19,00		21,00		23,00		25,00	KECAMATAN LIGUNG
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	17,00	100,00	19,00	100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00	KECAMATAN LIGUNG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						94,00		103,00		114,00		125,00		138,00	KECAMATAN LIGUNG
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	94,00	100,00	103,00	100,00	114,00	100,00	125,00	100,00	138,00	KECAMATAN LIGUNG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30,00		192,00		36,00		479,00		43,00	KECAMATAN LIGUNG
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	30,00	100,00	192,00	100,00	36,00	100,00	479,00	100,00	43,00	KECAMATAN LIGUNG
KECAMATAN MAJA							2.864,00		3.150,00		3.465,00		3.812,00		4.193,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.617,00		2.879,00		3.167,00		3.483,00		3.832,00	KECAMATAN MAJA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
1.1		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A	2.617,00	A	2.879,00	A	3.167,00	A	3.483,00	A	3.832,00	KECAMATAN MAJA	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	88,71	91,00		88,92		88,93		88,94		88,95		88,95	KECAMATAN MAJA
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					136,00		150,00		165,00		181,00		200,00	KECAMATAN MAJA		
2.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	136,00		150,00		165,00		181,00		200,00	KECAMATAN MAJA	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					30,00		33,00		36,00		40,00		44,00	KECAMATAN MAJA		
3.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	30,00		33,00		36,00		40,00		44,00	KECAMATAN MAJA	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8,00		9,00		10,00		10,00		12,00	KECAMATAN MAJA		
4.1		Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan	Jumlah penanganan gangguan dan	Persen	100	100,00	8,00		9,00		10,00		10,00		12,00	KECAMATAN MAJA	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			gangguan trantibum	pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan												KECAMATAN MAJA	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						55,00		60,00		66,00		73,00		80,00		
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	55,00		60,00		66,00		73,00		80,00	KECAMATAN MAJA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18,00		19,00		21,00		23,00		26,00	KECAMATAN MAJA	
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	18,00		19,00		21,00		23,00		26,00	KECAMATAN MAJA
KECAMATAN MAJALENGKA								19.709,00		21.680,00		23.848,00		26.233,00		28.856,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.119,00		13.331,00		14.664,00		16.130,00		17.743,00	KECAMATAN MAJALENGKA	
	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		BB		BB		BB		BB		BB	KECAMATAN MAJALENGKA	
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		B		B		B		B		B		KECAMATAN MAJALENGKA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen		100,00	12.119,00	100,00	13.331,00	100,00	14.664,00	100,00	16.130,00	100,00	17.743,00	KECAMATAN MAJALENGKA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							162,00		178,00		196,00		215,00		237,00	KECAMATAN MAJALENGKA
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	162,00	100,00	178,00	100,00	196,00	100,00	215,00	100,00	237,00	KECAMATAN MAJALENGKA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							7.205,00		7.925,00		8.718,00		9.590,00		10.549,00	KECAMATAN MAJALENGKA
	3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	7.205,00	100,00	7.925,00	100,00	8.718,00	100,00	9.590,00	100,00	10.549,00	KECAMATAN MAJALENGKA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,00		11,00		12,00		13,00		15,00	KECAMATAN MAJALENGKA
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan	Persen		100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	100,00	15,00	KECAMATAN MAJALENGKA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			ketertiban umum di tingkat kecamatan													
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						188,00		207,00		228,00		251,00		276,00	KECAMATAN MAJALENGKA
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	188,00	100,00	207,00	100,00	228,00	100,00	251,00	100,00	276,00	KECAMATAN MAJALENGKA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						25,00		28,00		31,00		34,00		37,00	KECAMATAN MAJALENGKA
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	25,00	100,00	28,00	100,00	31,00	100,00	34,00	100,00	37,00	KECAMATAN MAJALENGKA
KECAMATAN MALAUSMA							2.631,00		3.014,00		3.183,00		3.742,00		3.855,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															KECAMATAN MALAUSMA
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		A-	2.349,00	A	2.584,00	A	2.843,00	A	3.127,00	A	3.440,00	KECAMATAN MALAUSMA
1.1		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		85,36		85,61		85,78		86,03		86,24		KECAMATAN MALAUSMA
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			terhadap yang ditargetkanx100%													
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															KECAMATAN MALAUSMA
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	178,00	100,00	196,00	100,00	216,00	100,00	237,00	100,00	261,00	KECAMATAN MALAUSMA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															KECAMATAN MALAUSMA
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	5,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	7,00	KECAMATAN MALAUSMA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															KECAMATAN MALAUSMA
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	14,00	KECAMATAN MALAUSMA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN															KECAMATAN MALAUSMA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	72,00	100,00	79,00	100,00	87,00	100,00	96,00	100,00	106,00	KECAMATAN MALAUSMA
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															KECAMATAN MALAUSMA
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	17,00	100,00	138,00	100,00	20,00	100,00	262,00	100,00	28,00	KECAMATAN MALAUSMA
KECAMATAN PALASAH								2.273,00		2.781,00		2.751,00		3.226,00		3.329,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.001,00		2.201,00		2.421,00		2.663,00		2.930,00	KECAMATAN PALASAH
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A			A		A		A		A	KECAMATAN PALASAH
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,45	82,51			82,55		82,75		83,05		83,40	KECAMATAN PALASAH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.001,00	100,00	2.201,00	100,00	2.421,00	100,00	2.663,00	100,00	2.930,00	KECAMATAN PALASAH
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						175,00		192,00		212,00		233,00		256,00	KECAMATAN PALASAH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	175,00	100,00	192,00	100,00	212,00	100,00	233,00	100,00	256,00	KECAMATAN PALASAH	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,00		6,00		7,00		7,00		8,00	KECAMATAN PALASAH	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	8,00	KECAMATAN PALASAH	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9,00		10,00		11,00		12,00		13,00	KECAMATAN PALASAH	
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	KECAMATAN PALASAH	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						66,00		72,00		80,00		88,00		96,00	KECAMATAN PALASAH	
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah	Persen	100	100,00	66,00	100,00	72,00	100,00	80,00	100,00	88,00	100,00	96,00	KECAMATAN PALASAH	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						17,00		299,00		21,00		223,00		25,00		KECAMATAN PALASAH
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	17,00	100,00	299,00	100,00	21,00	100,00	223,00	100,00	25,00	KECAMATAN PALASAH
KECAMATAN PANYINGKIRAN								2.149,00		2.414,00		2.656,00		2.921,00		3.213,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.931,00		2.124,00		2.337,00		2.571,00		2.828,00		KECAMATAN PANYINGKIRAN
		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A-	1.931,00	A	2.124,00	A	2.337,00	A	2.571,00	A	2.828,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
	1.1		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	83,93	83,95		83,97		84,00		84,10		84,15		KECAMATAN PANYINGKIRAN
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						165,00	100,00	181,00	100,00	199,00	100,00	219,00	100,00	241,00		KECAMATAN PANYINGKIRAN
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	165,00	100,00	181,00	100,00	199,00	100,00	219,00	100,00	241,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			dalam bidang Kesos														
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							100,00	50,00	100,00	55,00	100,00	61,00	100,00	67,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00		100,00	50,00	100,00	55,00	100,00	61,00	100,00	67,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3,00	100,00	3,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	3,00	100,00	3,00		4,00		4,00		4,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						34,00		37,00		41,00		45,00		50,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	34,00	100,00	37,00	100,00	41,00	100,00	45,00	100,00	50,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						16,00		18,00		20,00		21,00		24,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	16,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	21,00	100,00	24,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
KECAMATAN RAJAGALUH							3.288,00		3.816,00		3.978,00		4.576,00		4.813,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.987,00		3.285,00		3.614,00		3.975,00		4.373,00	KECAMATAN RAJAGALUH
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A-	2.987,00	A	3.285,00	A	3.614,00	A	3.975,00	A	4.373,00	KECAMATAN RAJAGALUH
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	83,47	84.50		84.76		85.25		85.64		86.01		KECAMATAN RAJAGALUH
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						189,00		208,00		228,00		251,00		276,00	KECAMATAN RAJAGALUH
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	189,00	100,00	208,00	100,00	228,00	100,00	251,00	100,00	276,00	KECAMATAN RAJAGALUH
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17,00		19,00		21,00		23,00		25,00	KECAMATAN RAJAGALUH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	17,00	100,00	19,00	100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00	KECAMATAN RAJAGALUH	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8,00		9,00		9,00		10,00		11,00	KECAMATAN RAJAGALUH	
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	KECAMATAN RAJAGALUH	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						68,00		75,00		83,00		91,00		100,00	KECAMATAN RAJAGALUH	
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	68,00	100,00	75,00	100,00	83,00	100,00	91,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						19,00		221,00		23,00		225,00		28,00	KECAMATAN RAJAGALUH	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa		Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	19,00	100,00	221,00	100,00	23,00	100,00	225,00	100,00	28,00	KECAMATAN RAJAGALUH
KECAMATAN SINDANG								205,00		226,00		249,00		407,00		568,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.493,00		2.742,00		3.017,00		3.318,00		3.650,00	KECAMATAN SINDANG
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A	2.493,00	A	2.742,00	A	3.017,00	A	3.318,00	A	3.650,00	KECAMATAN SINDANG
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	88,08	88,79		89,26		89,61		90,11		90,52		KECAMATAN SINDANG
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan 100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						159,00		175,00		193,00		212,00		233,00	KECAMATAN SINDANG	
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos		Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	159,00	100,00	175,00	100,00	193,00	100,00	212,00	100,00	233,00	KECAMATAN SINDANG
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,00		6,00		7,00		8,00		8,00	KECAMATAN SINDANG	
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan	Persen		100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	8,00	KECAMATAN SINDANG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
		bidang Pemberdayaan Masyarakat	aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan													
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6,00		6,00		7,00		8,00		8,00		KECAMATAN SINDANG
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	8,00	100,00	8,00	KECAMATAN SINDANG
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						21,00		23,00		25,00		27,00		30,00		KECAMATAN SINDANG
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	21,00	100,00	23,00	100,00	25,00	100,00	27,00	100,00	30,00	KECAMATAN SINDANG
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						100,00	14,00	100,00	15,00	100,00	17,00	100,00	153,00	100,00	288,00	KECAMATAN SINDANG
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	14,00	100,00	15,00	100,00	17,00	100,00	153,00	100,00	288,00	KECAMATAN SINDANG



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
KECAMATAN SINDANGWANGI							2.775,00		3.053,00		3.358,00		3.694,00		4.063,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.494,00		2.743,00		3.018,00		3.319,00		3.651,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai		-A	2.494,00	-A	2.743,00	-A	3.018,00	-A	3.319,00	-A	3.651,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		92,66		92,67		92,68		92,69		92,70		KECAMATAN SINDANGWANGI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkan100%	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						185,00		204,00		224,00		246,00		271,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen		100,00	185,00	100,00	204,00	100,00	224,00	100,00	246,00	100,00	271,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						5,00		6,00		6,00		7,00		7,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen		100,00	5,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	7,00	100,00	7,00	KECAMATAN SINDANGWANGI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11,00		12,00		13,00		14,00		15,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen		100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	100,00	14,00	100,00	15,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						58,00		64,00		70,00		77,00		85,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen		100,00	58,00	100,00	64,00	100,00	70,00	100,00	77,00	100,00	85,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						23,00		25,00		28,00		30,00		34,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen		100,00	23,00	100,00	25,00	100,00	28,00	100,00	30,00	100,00	34,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
KECAMATAN SUKAHAJI							3.052,00		3.637,00		3.693,00		4.102,00		4.468,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.733,00		3.007,00		3.307,00		3.638,00		4.002,00	KECAMATAN SUKAHAJI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
1.1		Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	2.733,00	A	3.007,00	A	3.307,00	A	3.638,00	A	4.002,00	KECAMATAN SUKAHAJI
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,38	84,18		85,20		86,10		87,08		88,04		KECAMATAN SUKAHAJI
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					188,00		207,00		228,00		251,00		276,00	KECAMATAN SUKAHAJI	
2.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	188,00	100,00	207,00	100,00	228,00	100,00	251,00	100,00	276,00	KECAMATAN SUKAHAJI
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					11,00		12,00		13,00		14,00		16,00	KECAMATAN SUKAHAJI	
3.1		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	11,00	100,00	12,00	100,00	13,00	100,00	14,00	100,00	16,00	KECAMATAN SUKAHAJI
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18,00		20,00		22,00		24,00		26,00	KECAMATAN SUKAHAJI	
4.1		Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan	Jumlah penanganan gangguan dan	Persen	100	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	22,00	100,00	24,00	100,00	26,00	KECAMATAN SUKAHAJI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			gangguan trantibum	pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan													
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							73,00		80,00		88,00		97,00		106,00	KECAMATAN SUKAHAJI
	5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	73,00	100,00	80,00	100,00	88,00	100,00	97,00	100,00	106,00	KECAMATAN SUKAHAJI
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							29,00		312,00		35,00		78,00		42,00	KECAMATAN SUKAHAJI
	6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	29,00	100,00	312,00	100,00	35,00	100,00	78,00	100,00	42,00	KECAMATAN SUKAHAJI
KECAMATAN SUMBERJAYA								2.649,00		2.914,00		3.205,00		3.525,00		3.878,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.329,00		2.561,00		2.818,00		3.099,00		3.409,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB		-A		A		A		A		KECAMATAN SUMBERJAYA
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	81,56	81,64		81,68		81,72		81,76		81,80		KECAMATAN SUMBERJAYA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
							TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	100,00	2.329,00	100,00	2.561,00	100,00	2.818,00	100,00	3.099,00	100,00	3.409,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							183,00		202,00		222,00		244,00		268,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
	2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	183,00	100,00	202,00	100,00	222,00	100,00	244,00	100,00	268,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							8,00		9,00		10,00		11,00		12,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
	3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							8,00		9,00		10,00		11,00		12,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
	4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan	Persen	100	100,00	8,00	100,00	9,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	12,00	KECAMATAN SUMBERJAYA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
			ketertiban umum di tingkat kecamatan														
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						91,00		100,00		110,00		121,00		133,00	KECAMATAN SUMBERJAYA	
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	91,00	100,00	100,00	100,00	110,00	100,00	121,00	100,00	133,00	KECAMATAN SUMBERJAYA	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30,00		33,00		36,00		40,00		44,00	KECAMATAN SUMBERJAYA	
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	30,00	100,00	33,00	100,00	36,00	100,00	40,00	100,00	44,00	KECAMATAN SUMBERJAYA	
KECAMATAN TALAGA								2.537,00		3.070,00		3.069,00		3.656,00		3.714,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.251,00		2.476,00		2.724,00		2.996,00		3.296,00	KECAMATAN TALAGA	
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A			A		A		A		A	KECAMATAN TALAGA	
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	87.90	88.00			88.05		88.05		88.10		88.10	KECAMATAN TALAGA	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran	Persen	100	100,00	2.251,00	100,00	2.476,00	100,00	2.724,00	100,00	2.996,00	100,00	3.296,00	KECAMATAN TALAGA	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	
			terhadap yang ditargetkanx100%													
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						184,00		202,00		223,00		245,00		269,00	KECAMATAN TALAGA
2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100,00	184,00	100,00	202,00	100,00	223,00	100,00	245,00	100,00	269,00	KECAMATAN TALAGA
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						12,00		14,00		15,00		17,00		18,00	KECAMATAN TALAGA
3.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	100,00	12,00	100,00	14,00	100,00	15,00	100,00	17,00	100,00	18,00	KECAMATAN TALAGA
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10,00		10,00		11,00		13,00		14,00	KECAMATAN TALAGA
4.1	Berkurangnya gangguan trantibum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	11,00	100,00	13,00	100,00	14,00	KECAMATAN TALAGA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN						53,00		58,00		64,00		71,00		78,00	KECAMATAN TALAGA



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	BASE LINE 2024	CAPAIAN KINERJA										PD PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
						TARGET	PAGU (juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)		
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
5.1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	100,00	53,00	100,00	58,00	100,00	64,00	100,00	71,00	100,00	78,00	KECAMATAN TALAGA	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						27,00		309,00		32,00		315,00		39,00	KECAMATAN TALAGA	
6.1	Meningkatnya kinerja Kelurahan/Desa	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	100,00	27,00	100,00	309,00	100,00	32,00	100,00	315,00	100,00	39,00	KECAMATAN TALAGA	

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2025–2030.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	PROYEKSI RPJMD					KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,37	71,68	72,44	73,20	73,97	74,73	75,50	75,50
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,98	71,65	75,25	75,50	75,75	76	76,25	76,25
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,27	12,28	12,30	12,39	12,43	12,47	12,51	12,51
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,71	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	8,42
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.842	11.450	11.920	12.700	13.550	14.850	15.300	15.300
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,01	3,80	3,65	3,51	3,36	3,21	3,19	3,19
	Jumlah Penganggur	Jiwa	29.644	28.644	27.780	26.918	26.056	25.194	24.333	24.333
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,09	9,63	9,43	9,04	8,59	8,15	8,15
	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	134.600	132.733	130.619	126.134	120.702	115.287	114.602	114.602
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,38	6,13	7,29	8,53	8,32	8,51	8,50	8,50
5.	Indeks Gini	Poin	0,354	0,337-0,350	0,348	0,346	0,341	0,339	0,338	0,338
6.	Pendapatan Perkapita	Rupiah	34.233	34.927	35.500	36.900	38.100	39.600	40.800	40.800
7.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	N/A	806.368	956.485	1.115.212	1.270.000	1.430.555	1.600.500	1.600.500

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
2	Indeks Trantibum	Kategori	B	B	B	B	B	B	A	
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,82	10,09	9,63	9,43	9,04	8,59	8,15	
4	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Tahun	7,53	7,71	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,98	71,65	75,25	75,5	75,75	76	76,25	
6	Prevalensi Stunting	Persen	18	17,89	17,52	16,7	15,8	14,55	13,68	
7	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah Dan Ruang Wilayah	Persen	65,19	64,04	64,63	65,16	65,67	66,37	67,03	
8	Indeks Desa Membangun	Persen	N/A	79,00	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	
9	Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Trilyun Rupiah	16,26	17,28	18,57	20,18	21,87	23,73	25,76	
10	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	81,39	82,58	82,58	83,13	83,63	84,13	84,63	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,012	3,8	3,65	3,51	3,36	3,21	3,19	
12	Indeks Risiko Bencana	Poin	108,99	108,49	107,99	107,49	106,99	106,49	105,99	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	64,54 (Rumus Lama)	61,91	62,16	62,41	62,67	62,92	63,31	
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A-	A-	A-	A	A	A	A	
15	Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indek Ketahanan Pangan	Angka	82,58	82,58	83,13	83,63	84,13	84,63	
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan	%	5,9	5,6	5,1	4,8	4,5	4,2	
3.	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/ Perkapita	1	1	1	1	2	2	
4.	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air	%							
5.	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	62,16	62,41	62,67	62,92	63,31	63,31	
6.	Rumah Tangga dengan Akses Snitasi Aman	%	7,43	7,45	7,48	7,5	7,53	7,55	
7.	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/ Orang	65,67	65,92	66,17	66,42	66,67	66,92	
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	6,61	7,2	7,78	8,37	8,95	9,53	
9.	Indeks Resiko Bencana	Angka	108,49	107,99	107,49	106,99	106,49	105,99	
10.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.67	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	
12.	Rasio Penduduk	%	101,3	101,2	101	101,1	101,15	101,2	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	1.144	1.150	1.163	1.170	1.175	1.178	
II.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,13	7,29	8,53	8,32	8,51	8,55	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	10,09	9,63	9,43	9,04	8,59	8,15	
3.	PDRB per Kapita	Rp Juta	33,62	37,99	41,18	44,66	48,23	52,74	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,8	3,65	3,51	3,36	3,21	3,19	
5.	Indeks Gini	Angka	0,35	0,345	0,341	0,336	0,332	0,327	
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,68	72,44	73,2	73,97	74,73	75,5	
7.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,65	75,25	75,5	75,75	76	76,25	
9.	Prevalensi Stunting	%	17,89	17,52	16,7	15,8	14,55	13,68	
10.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,71	7,82	7,97	8,12	8,27	8,42	
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,45	12,52	12,59	12,65	12,72	
13.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	83,5	84	84,3	84,5	85	85,3	
14.	Indeks Literasi Digital	Angka	69,38	70	71	72	73	74	
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	30,38	35,38	40,38	45,38	50,38	54,9	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
17.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka							
18.	Indeks Perlindungan Anak	Angka							
19.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka							
20.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka							
21.	Indeks Pembangunan Gender	Angka							
22.	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka							
III.	ASPEK DAYA SAING								
1.	Nilai Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	7,75	9,07	10,42	9,98	10,03	10,05	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	6,93	8,24	9,64	9,4	9,62	9,7	
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
4.	Rasio Kewirausahaan	%	3,8	3,9	4	4,1	4,2	4,3	
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,92	70,15	70,4	70,85	71,22	71,63	
6.	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	
7.	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	55,67	57,6	58,51	59,54	60,6	61,6	



No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka							
9.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	99,85	99,85	99,86	99,86	99,87	99,87	
10.	Indeks Desa	%	79	79,4	79,8	80,2	80,6	81	
11.	Tingkat Inflasi	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
12.	Indeks Daya Saing Daerah	%	3,78	3,88	3,98	4,08	4,18	4,28	
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	A-	A-	A-	A	A	A	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,5	3,65	6,75	3,85	3,95	4	
3.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	90	95	96	97	99	100	
4.	Indeks Keamanan Informasi	Poin	475	500	525	530	535	540	
5.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Kategori	B	B	B	B	B	A	
6.	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
PENDIDIKAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	47,50	51,50	55,50	59,50	63,50	DISDIK
2	APM PAUD	Persen	95,78	95,81	95,84	95,87	95,90	DISDIK
3	APM SD/MI	Persen	91,30	91,32	91,34	91,36	91,38	DISDIK
4	APM SMP/MTs	Persen	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40	DISDIK
5	APK Non Formal	Persen	58,85	64,38	69,91	75,44	80,97	DISDIK
6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	29,77	30,57	31,36	32,16	32,96	DISDIK
KESEHATAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai						DINKES
2	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah penduduk	Nilai	0,78	0,88	0,98	0,98	1	DINKES
3	Persentase RS Rujukan yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	DINKES
4	Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
7	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
9	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
16	Terjaminnya Ketersediaan Obat dan vaksin esensial Puskesmas	Persen	100%	100	100	100	100	DINKES
17	Persentase alat kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Laboratorium) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	DINKES
18	Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan	Persen	98%	98%	98%	98%	98%	DINKES
19	Jumlah Keluarga miskin yang menjadi peserta JKN	Keluarga						DINKES
20	Jumlah pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi minimal 20 jam/ tahun	Pegawai	85%	85%	85%	85%	85%	DINKES
21	Terpenuhinya Indikator Presentase Instalasi Farnasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	DINKES
22	Terlaksanannya pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Toko Obat, Apotek, Industri Perbekalan kesehatan Rumah Tangga, Toko Alat kesehatan dan Optikal	Persen	85%	85%	85%	85%	85%	DINKES
23	Jumlah UKBM yang Menyelenggarakan Kegiatan dibagi dengan jumlah seluruh UKBM dikali 100%	persen	85%	90%	95%	100 %	100 %	DINKES
RSUD MAJALENGKA								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	84	85	86	87	RSUD MAJALENGKA
2	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	86	87	88	89	90	RSUD MAJALENGKA
RSUD CIDERES								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,5	87	87,5	88	RSUD CIDERES



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	83	85	87	89	91	RSUD CIDERES
RSUD TALAGA								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	84	85	86	87	RSUD TALAGA
2	Presentase jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	persen	61	63	65	67	69	RSUD TALAGA
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai						DPUTR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	100	100	100	DPUTR
3	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar	Persen	81,10 %	81,40%	81,75%	81,90%	82,10%	DPKPP
4	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar	Persen	70,23 %	70,24 %	70,25 %	70,26 %	70,28 %	DPKPP
5	Persentase drainase yang terbangun sesuai standar	Persen	70,23 %	70,24 %	70,25 %	70,26 %	70,28 %	DPKPP
6	Persentase infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	Persen						DPKPP
7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	11,27	13,27	15,27	17,27	17,27	DPKPP
8	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang ditangani	Unit	1	24	18	8	9	DPUTR
9	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang ditangani	Unit						DPUTR
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	54,54	56,99	58,98	59,38	60,4	DPUTR
11	Jumlah Tenaga Kontruksi yang tersertifikasi	Orang	125	150	150	150	150	DPUTR
12	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang yang ditetapkan dan disosialisasikan	Dokumen	1	1	1	1	1	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	46,5	47	47,5	48	49	DPKPP
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	unit rumah	11	13	15	17	19	DPKPP



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit rumah	0	0	0	0	0	DPKPP
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	persen	5,7	5,65	5,6	5,55	5,55	DPKPP
5	Persentase data kawasan kumuh permukiman yang akurat dan mutakhir	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
6	Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam upaya pelaksanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh	Meter'	1400	1400	1400	1400	1400	DPKPP
7	Persentase Peningkatan Kawasan Kumuh Yang Tertata	Persen	11,27	13,27	15,27	17,27	17,27	DPKPP
8	Peningkatan jaringan jalan lingkungan dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	meter'	7500	7500	7500	8000	10000	DPKPP
9	Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase permohonan pembebasan lahan sesuai ketentuan	Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	50					SATPOL PP DAMKAR
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	10,36	10,37	10,38	10,39	10,4	SATPOL PP DAMKAR
3	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan	12	12	12	12	12	SATPOL PP DAMKAR
4	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	41	42	43	44	45	BPBD
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Persentase Masyarakat, Aparatur dan Wilayah yang terbina Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	Jiwa	100	100	100	100	100	BPBD
6	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana (Persentase Korban Bencana yang Terevakuasi dan terdistribusi logistik sesuai standar)	Jiwa	95	95	95	95	95	BPBD
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Persentase Rekomendasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Sesuai Standar dan Ditindak lanjuti)	Jiwa	50	50	50	50	50	BPBD



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
8	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
9	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	19,92	19,91	19,90	19,89	19,88	SATPOL PP DAMKAR
SOSIAL								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
2	Persentase KUBE yang Mandiri	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
4	Persentase Orang Miskin yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
6	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR								
TENAGA KERJA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	42	43	44	45	46	DK2UKM
2	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	DK2UKM
3	Prosentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	77	78	79	80	81	DK2UKM
4	Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dalam dan luar negeri	Persen	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	DK2UKM
5	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen sarana hubungan industrial	Persen	70	71	73	75	80	DK2UKM
PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	48	53,75	60	62,5	65	DP3AKB



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	61,3	61,7	62,02	62,06	62,09	DP3AKB
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	20	22,5	20,5	30	32	DP3AKB
4	Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan	persen						DP3AKB
5	Persentase Pemanfaatan Data Terpilah Gender	persen	10	10	15	15	20	DP3AKB
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,00116	0,00116	0,00115	0,00114	0,00113	DP3AKB
7	Jumlah perempuan kepala keluarga miskin menjadi mandiri	Persen						DP3AKB
8	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Nilai	527	530	538	540	555	DP3AKB
9	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,0103	0,0102	0,0101	0,01	0,01	DP3AKB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Total Fertility Rate)	Point	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	DP3AKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	70,89	70,91	70,92	70,93	70,94	DP3AKB
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun (Usia)	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	DP3AKB
PANGAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	35	36	37	38	39	DKP3
2	Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan Teknologi tepat guna	Persen	100	100	100	100	100	DKP3
3	Peningkatan skor PPH	Poin	94,83	95,33	95,83	96,33	96,83	DKP3
4	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	100	100	100	100	DKP3
5	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	Desa	4	4	4	4	4	DKP3
6	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	8	8	8	8	8	DKP3
LINGKUNGAN HIDUP								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	61	62	63	64	65	DLH
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
3	1. Indeks Kualitas Air	Poin						DLH
	2. Indeks Kualitas Udara							
4	Persentase RTH	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
6	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
7	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana lingkungan hidup	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
8	Persentase penanganan sampah yang tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
9	Persentase sarana dan prasarana TPS/TPA yang dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	74	75	76	77	78	DISDUKCAPIL
2	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	99,72	99,74	99,76	99,78	99,8	DISDUKCAPIL
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	69	70	71	72	73	DISDUKCAPIL
4	Persentase Pemutakhiran kartu Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai	90,5	91	91,5	92	92,5	DISDUKCAPIL
6	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kematian	Persen	99,6	99,65	99,7	99,75	99,8	DISDUKCAPIL
7	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil	Nilai	90	90,5	91	91,5	92	DISDUKCAPIL



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
9	Persentase Tempat Perakam Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
10	Persentase OPD yang telah memanfaatkan datakependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	21,43	25	28,57	32,14	35,71	DISDUKCAPIL
11	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang Memanfaatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
12	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	17,86	21,43	25	28,57	32,15	DISDUKCAPIL
13	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi kependudukan yang diterapkan	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
14	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
15	Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
16	Persentase data kependudukan yang akurat	Persen	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	36	37	38	39	40	DPMD
2	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang dimanfaatkan	Persen	7,88	15,76	23,64	31,52	39,39	DPMD
3	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Kerjasama	Persen	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	DPMD
4	Persentase Desa dengan kapasitas keuangan dan kekayaan desa meningkat	Persen	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	DPMD
5	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik	Persen	98	98	98	98	98	DPMD
6	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	98	98	98	98	98	DPMD
7	Persentase Desa yang memiliki BUMDesa Strata Maju	Persen	4,55	6,06	7,58	9,09	10,22	DPMD
8	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam Pembangunan Desa	Persen	20,20	20,20	20,20	20,20	19,20	DPMD
PERHUBUNGAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai						DISHUB



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka	Persen	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29	DISHUB
3	Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar Keselamatan di Kabupaten Majalengka	Persen	85	85	85	85	85	DISHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	44,5	46,5	47,5	48,5	49,5	DISKOMINFO
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	80,25	81	81,15	81,5	82	DISKOMINFO
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	20	40	60	80	100	DISKOMINFO
4	Jumlah Sarana Infrastruktur layanan publik	Lokasi	31	57	70	236	413	DISKOMINFO
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	8	14	17	57	100	DISKOMINFO
PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Tingkat Keamanan Informasi yang diselenggarakan secara elektronik	Persen	510	515	520	525	530	DISKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	3	4	5	6	7	DK2UKM
2	Presentase Koperasi aktif	Persen	48	49	50	51	52	DK2UKM
3	Presentase peningkatan volume usaha koperasi	Persen	1	1	1	1	1	DK2UKM
4	Presentase koperasi yang berekspansi usaha	Persen	10	15	18	20	20	DK2UKM
5	Persentase peningkatan UKM baru	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DK2UKM
6	Persentase peningkatan produk UKM yang masuk pasar modern	Persen	10	15	18	20	30	DK2UKM
7	presentase peningkatan produk UKM yang memiliki akses	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DK2UKM
TRANSMIGRASI								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi	kawasan	0	0	0	0	0	DK2UKM
PENANAMAN MODAL								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	DPMTSP
2	Peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	10	10	10	10	10	DPMTSP
3	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Investasi	Sarana/Prasarana	1	1	1	1	1	DPMTSP
4	Tingkat Perizinan Yang diterbitkan	jumlah	100	100	100	100	100	DPMTSP DPMTSP
5	Perusahaan PMA dan PMDN yang patuh terhadap Kewajiban	Persen	20	20	20	20	20	DPMTSP
6	Data Perizinan dan Investasi di Kabupaten	Persen	0	1	0	0	0	DPMTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	38,50	39	39,5	40	40,5	DISPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda	Persen	30	30	30	30	30	DISPORA
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	56	57	57	57	57	DISPORA
4	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	46	46,5	47	47,5	48	DISPORA
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persen	50	52	54	57	60	DISPORA
6	Peningkatan Infrastruktur keolahragaan	Persen	30	36	36	36	36	DISPORA
7	Tingkat Partisipasi Kepramukaan	Persen	10	10	15	15	15	DISPORA
STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	DISKOMINFO
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	DISKOMINFO



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
KEBUDAYAAN								
1	Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	Persen	10	11	12	13	14	DISPARBUD
2	Persentase Seni Tradisional yang direvitalisasi	Persen	2	2	2	2	2	DISPARBUD
3	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang dilestarikan	Persen	2	2	2	2		DISPARBUD
4	Persentase cagar budaya yang terlindungi	Persen	3	3	3	3	3	DISPARBUD
5	Persentase Museum yang direvitalisasi	Persen	1	1	1	1		DISPARBUD
PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	51	53	55	57	59	ARPUSDA
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	84,00	84,30	84,50	85,00	85,30	ARPUSDA
KEARSIPAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	36	36,5	37	37,5	38	ARPUSDA
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	54	55	56	57	58	ARPUSDA
3	Rasio pengelola arsip	Persen		100	100	100	100	ARPUSDA
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	54	55	56	57	58	ARPUSDA
URUSAN PILIHAN								
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	2	2	2	2	2	DKP3
2	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan	Persen	1	1	1	1	1	DKP3
3	Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat	Pelaku	5	5	5	5	5	DKP3
PARIWISATA								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	36	37	38	39	40	DISPARBUD
2	Persentase Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	persen	5	6	7	8	9	DISPARBUD
3	Persentase Peningkatan daya tarik Wisata yang di promosikan	persen	5	6	7	8	9	DISPARBUD
4	Persentase Peningkatan Pelaku ekonomi Kreatif	persen	2	3	4	5	6	DISPARBUD
5	persentase sertifikasi pelaku ekonomi kreatif	Persen	2	3	4	5	6	DISPARBUD
PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	80	80	80	80	80	DKP3
2	Persentase ketersediaan prasarana Pertanian	Persen	70	70	70	70	70	DKP3
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	2	2	2	2	2	DKP3
4	Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Hektar	6100	6100	6100	6100	6100	DKP3
5	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	DKP3
PERDAGANGAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	37.96	37.97	37.98	37.99	38	DISPERDAGIN
2	Infrastruktur Perdagangan yang dibangun	unit	3	2	2	0	0	DISPERDAGIN
3	Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Refrepresentatif	Unit	1	1	1	1	1	DISPERDAGIN
4	Tingkat kinerja realisasi pupuk	Persen	58	59	60	61	62	DISPERDAGIN
5	Pengendalian Pemenuhan Kebutuhan Barang Pokok Penting Bagi Masyarakat	Kali	2	2	2	2	2	DISPERDAGIN
6	Terpenuhinya nilai ekspor	Persen	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	DISPERDAGIN
7	Tingkat alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	50	55	60	65	70	DISPERDAGIN
8	Peningkatan Produk Dalam Negeri yang dipromosikan	Pelaku Usaha	5	5	5	5	5	DISPERDAGIN



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	IKM	51	53	55	58	60	DISPERDAGIN
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	DISPERDAGIN
URUSAN PENUNJANG								
PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	44,5	44,55	44,6	44,65	44,7	BAPPEDALITBANG
2	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
3	Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka							
4	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
5	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
6	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
7	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
8	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PSDA	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
9	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
10	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	6	6	6	6	6	BAPPEDALITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
11	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang terdaftar pada Indeks Inovasi Daerah (IID)	Persen	59,93	60,43	60,93	61,43	61,93	BAPPEDALITBANG
12	Persentase Kajian yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	BAPPEDALITBANG
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	32	33	34	35	36	BKPSDM



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Rasio pegawai Fungsional	Persen	100	100	100	100	100	BKPSDM
3	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	BKPSDM
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)	Rasio	100	100	100	100	100	BKPSDM
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	100	100	100	100	100	BKPSDM
6	Persentase pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	BKPSDM
KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	67	68	69	70	71	BKAD
2	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	BKAD
3	Aset yang diamankan secara fisik dan Legal	Persen	90	90	95	95	100	BKAD
4	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	45,5	46	46,5	47	47.5	BAPENDA
5	Capaian realisasi Penerimaan PAD	persen	90	90	90	90	90	BAPENDA
FUNGSI LAINNYA								
SETDA								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	42,05	43,05	44,05	45,05	46,05	SETDA
2	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai	10,5	11	11,5	12	12,5	SETDA
3	Tingkat Implementasi PB	Persen	100	100	100	100	100	SETDA
4	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Poin	6	7	8	9	10	SETDA
5	Persentase PD dengan nilai RB BB	Persen	20	40	60	80		SETDA
6	Persentase PD dengan nilai RB A	Persen					30	SETDA
7	IKM Kabupaten	Predikat	B	B	A	A	A	SETDA



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
8	Nilai IKM Bagian Umum dan Perencanaan Keuangan	Predikat	B	B	B	A	A	SETDA
9	Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	SETDA
10	NKK Bidang Kesra	Nilai	42	43	44	45	46	SETDA
11	Indeks Reformasi Hukum	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA	SETDA
12	1. NKK Bidang Ekonomi	Nilai	42	43	44	45	46	SETDA
13	2. Tingkat Inflasi Daerah	Persen	2	2	2	2	2	SETDA
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Persen	72	72,5	73	73,5	74	SETDA
INSPEKTORAT								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	INSPEKTORAT
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	81	82	83	84	85	INSPEKTORAT
3	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/Nilai	3/3,080	3/3,090	3/3,100	3/3,110	3/3,120	INSPEKTORAT
4	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/Nilai	3/3,350	3/3,400	3/3,450	3/3,500	3/3,550	INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DPRD								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	32,95	33,95	34,95	35,95	36,95	SETWAN
2	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	persen	100	100	100	100	100	SETWAN
3	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi penganggaran dan pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	SETWAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Nilai RB General Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	KESBANGPOL
2	Presentase Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	KESBANGPOL



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
3	Presentase Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persen	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
4	Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
5	Presentase Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
6	Presentase Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	66,67	67,44	78,58	92,31	100	KESBANGPOL
KECAMATAN								
KECAMATAN ARGAPURA								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN ARGAPURA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	85,60	85,75	85,95	86,12	86,29	KECAMATAN ARGAPURA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN ARGAPURA
KECAMATAN BANJARAN								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN BANJARAN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	85,05	85,50	85,75	86,00	86,05	KECAMATAN BANJARAN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANJARAN
KECAMATAN BANTARUJEG								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN BANTARUJEG
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,25	82,36	82,49	82,60	82,71	KECAMATAN BANTARUJEG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BANTARUJEG
KECAMATAN CIGASONG								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	KECAMATAN CIGASONG
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,00	82,25	82,50	82,63	82,80	KECAMATAN CIGASONG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGASONG
KECAMATAN CIKIJING								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	KECAMATAN CIKIJING
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	87,25	87,25	88,13	88,50	88,90	KECAMATAN CIKIJING
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIKIJING
KECAMATAN CINGAMBUL								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A				KECAMATAN CINGAMBUL
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai						KECAMATAN CINGAMBUL
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CINGAMBUL
KECAMATAN DAWUAN								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN DAWUAN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	86,15	86,35	86,55	86,75	KECAMATAN DAWUAN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		KECAMATAN DAWUAN
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DAWUAN
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DAWUAN
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DAWUAN
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DAWUAN
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DAWUAN
KECAMATAN JATITUJUH								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	A-	A	A	KECAMATAN JATITUJUH
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	84,50	84,75	85,00	85,30	85,55	KECAMATAN JATITUJUH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATITUJUH
KECAMATAN JATIWANGI								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN JATIWANGI
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	84,54	85,88	86,43	88,33	88,35	KECAMATAN JATIWANGI
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATIWANGI
KECAMATAN KADIPATEN								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	A-	A-	A-	KECAMATAN KADIPATEN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	86,02	86,04	86,06	86,08	KECAMATAN KADIPATEN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KADIPATEN



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
KECAMATAN KASOKANDEL								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN KASOKANDEL
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	83,84	85,74	86,56	87,43	88,79	KECAMATAN KASOKANDEL
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KASOKANDEL
KECAMATAN KERTAJATI								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN KERTAJATI
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	KECAMATAN KERTAJATI
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KERTAJATI
KECAMATAN LEMAHSUGIH								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A	A	A	AA	KECAMATAN LEMAHSUGIH
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	87,00	87,25	87,50	88,00	88,25	KECAMATAN LEMAHSUGIH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEMAHSUGIH
KECAMATAN LEUWIMUNDING								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	A-	A	A	A	KECAMATAN LEUWIMUNDING
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	86,00	86,27	87,25	87,89	88,77	KECAMATAN LEUWIMUNDING
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWIMUNDING



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
KECAMATAN LIGUNG								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A-	A	A	A	KECAMATAN LIGUNG
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	83,84	87,52	87,53	87,54	87,55	KECAMATAN LIGUNG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LIGUNG
KECAMATAN MAJA								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN MAJA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	91,00	88,92	88,93	88,94	88,95	KECAMATAN MAJA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00					KECAMATAN MAJA
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00					KECAMATAN MAJA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00					KECAMATAN MAJA
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00					KECAMATAN MAJA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00					KECAMATAN MAJA
KECAMATAN MAJALENGKA								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	KECAMATAN MAJALENGKA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	KECAMATAN MAJALENGKA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MAJALENGKA
KECAMATAN MALAUSMA								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A-	A	A	A	A	KECAMATAN MALAUSMA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	85,36	85,61	85,78	86,03	86,24	KECAMATAN MALAUSMA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MALAUSMA
KECAMATAN PALASAH								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN PALASAH



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,51	82,55	82,75	83,05	83,40	KECAMATAN PALASAH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PALASAH
KECAMATAN PANYINGKIRAN								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A-	A	A	A	A	KECAMATAN PANYINGKIRAN
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	83,95	83,97	84,00	84,10	84,15	KECAMATAN PANYINGKIRAN
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00				KECAMATAN PANYINGKIRAN
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANYINGKIRAN
KECAMATAN RAJAGALUH								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A-	A	A	A	A	KECAMATAN RAJAGALUH



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	84.5	84.76	85.25	85.64	86.01	KECAMATAN RAJAGALUH
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RAJAGALUH
KECAMATAN SINDANG								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	A	A	A	A	KECAMATAN SINDANG
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	88,79	89,26	89,61	90,11	90,52	KECAMATAN SINDANG
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen						KECAMATAN SINDANG
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANG
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANG
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANG
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANG
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANG
KECAMATAN SINDANGWANGI								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	-A	-A	-A	-A	-A	KECAMATAN SINDANGWANGI



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	92,66	92,67	92,68	92,69	92,70	KECAMATAN SINDANGWANGI
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SINDANGWANGI
KECAMATAN SUKAHAJI								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN SUKAHAJI
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	84,18	85,20	86,10	87,08	88,04	KECAMATAN SUKAHAJI
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
5	Persentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
7	Persentase Kelurahan/Desa aktif menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAHAJI
KECAMATAN SUMBERJAYA								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET.
			TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030	
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	-A	A	A	A	KECAMATAN SUMBERJAYA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	81,64	81,68	81,72	81,76	81,80	KECAMATAN SUMBERJAYA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUMBERJAYA
KECAMATAN TALAGA								
1	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	A	A	KECAMATAN TALAGA
2	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	88	88.05	88.05	88.1	88.1	KECAMATAN TALAGA
3	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA
4	Persentase Kelurahan/Desa yang Masyarakatnya yang aktif dalam bidang Kesos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA
5	Presentase Kelurahan/Desa yang masyarakatnya aktif dalam pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA
6	Persentase penurunan gangguan trantibum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA
7	Persentase Kelurahan/Desa akfit menggerakkan masyarakat agar mengikuti PHBI dan PHBN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA
8	Persentase Peningkatan Kelurahan/Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALAGA

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi misi dan janji Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan berbagai kondisi, permasalahan, isu strategis baik skala lokal, regional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kabupaten Majalengka, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaannya RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan tahun 2026-2030.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah/kabupaten. Perangkat



Daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah/kabupaten sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing;

3. RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030, serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan juga berpedoman kepada RKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun, dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Tahun 2029 adalah periode terakhir RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam RPJMD ini memuat periodisasi tahun 2026-2030 sehingga masih dapat menjadi acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2030, serta berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045, mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi, penyesuaian dengan program strategis nasional yang tertuang dalam RKP, mempedomani peraturan lainnya yang mengatur penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta mempedomani tata cara penyusunan RKPD Tahun 2030 yang diterbitkan oleh Pemerintah.



Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025–2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Majalengka Langkung Sae.